PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Jalan Merdeka Nomor 4 Pematang Siantar (21100) Telepon : (0622) 433639 FAX : (0622) 433639 Email : bkd@mail.pematangsiantar.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 800.1.13.2/4938/XI/2023

TENTANG

MATERI POKOK SOAL SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS DENGAN CAT UNTUK SELEKSI PENGADAAN PPPK TAHUN ANGGARAN 2023

Sehubungan dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/2881/M.SM.01.00/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Teknis dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2023, bersama ini terlampir Materi Pokok dimaksud untuk dapat diketahui.

Pematang Siantar, 10 November 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEMATANG SIANTAR

TIMBUL HAMONANGAN SIMANJUNTAK, SAP, MAP.

PEMBINA

BKP

NIP. 19810118 200003 1 002



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/2881/M.SM.01.00/2023 30 Oktober 2023

Sifat : Segera

Lampiran: 1 (satu) berkas

Hal : Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Teknis dengan

CAT untuk Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran

2023

Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat

2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

di

Tempat

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang profesional, kompeten, dan melayani, maka setiap PPPK wajib memiliki kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan. Sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, maka setelah seleksi administrasi berakhir, tahap seleksi pengadaan PPPK selanjutnya adalah seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi PPPK terdiri dari Seleki Kompetensi Manajerial, Seleksi Kompetensi Sosial Kultural, Seleksi Kompetensi Teknis, dan Wawancara Berbasis Komputer.

Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu adanya penyampaian Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Teknis agar para peserta seleksi PPPK TA. 2023 dapat mengenali poin penting dari soal Seleksi Kompetensi Teknis dengan CAT yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatannya sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. PANSELNAS memberikan Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Teknis dengan CAT untuk jabatan fungsional yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional, sesuai yang tercantum pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional. Untuk selanjutnya, Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Teknis tersebut dapat disebarluaskan melalui situs resmi instansi.

Catatan:

 UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'

Sertifikasi

Elektronik

- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



<u>Ditandatangani secara elektronik oleh :</u>

A.N MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, SEKRETARIS KEMENTERIAN

Rini Widyantini

Tembusan

- 1. Menteri PANRB;
- 2. Kepala BPKP;
- 3. Plt. Kepala BKN.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX



DAFTAR MATERI POKOK SOAL SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS PPPK 2023

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
1	Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama	Pengetahuan Umum:
		Materi umum terkait Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat, Dasar Negara, dan Undang-Undang Dasar
		Materi tentang Pemerintahan Pusat-Daerah, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersifat Umum
		3 Materi tentang Pengetahuan Komputer yang bersifat umum
		Pengetahuan Khusus: 1 Materi khusus terkait Administrasi Kependudukan yang bersifat khusus
		Materi tentang Pencatatan Sipil yang bersifat khusus
		Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database
2	Administrator Kesehatan Ahli	Kompetensi Umum:
	Pertama	Penyusunan rancangan kerangka acuan penyusunan kebijakan program upaya kesehatan, program
		sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alkes dan makanan, dan program manajemen, informasi dan regulasi kesehatan
		Pengumpulan dan pengolahan bahan/literatur/laporan dalam rangka penyusunan kebijakan program
		2 upaya kesehatan, program sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alkes dan makanan, dan program manajemen, informasi dan regulasi kesehatan
		Kompetensi Khusus:
		Pelaksanaan kebijakan program-program kesehatan
		Pelaksanaan penilaian dalam rangka perizinan rumah sakit, puskesmas, balai kesehatan, praktek bersama/klinik, praktek dokter/dokter gigi, pengobatan tradisional
		Pelaksanaan penilaian pemberi jasa dalam penerbitan surat perizinan praktik dokter/dokter gigi
		Pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan
		5 Pelaksanaan sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terikat dengan bidang kesehatan
		6 Penyusunan laporan
3	Adyatama Kepariwisataan dan	Kemampuan Umum:
	Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	Penyusunan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif Advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif
		Kemampuan Khusus:
		1 Tata kelola destinasi dan infrastruktur Parekraf
		Pengelolaan pendanaan pariwisata dan ekonomi kreatif Tata kelola kelembagaan dan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
		Tata kelola pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif
		5 Tata kelola pembangunan industri pariwisata dan ekonomi kreatif
		Penguatan tata kelola ekonomi digital Produk ekonomi kreatif
		Fasilitasi kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
4	Analis Akuakultur Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Pedoman dan aturan tentang pembudidayaan ikan Kemampuan Khusus:
		Pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan perikanan budidaya
		2 Pengelolaan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut
		3 Identifikasi, inventarisasi dan analisis data proses produksi dan sertifikasi bidang perikanan budidaya
		4 Identifikasi, inventarisasi, dan analisis data pakan ikan
		Perlindungan Pelaku Utama sektor Kelautan dan Perikanan dan Usaha Perikanan Pengelolaan Usaha Perikanan budidaya
5	Analis Data Ilmiah Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Pengenalan ilmu data dalam Analis Data Ilmiah
		Penelusuran dan pengelolaan data dan informasi ilmiah Rancangan kerja Analisis Data Ilmiah
1		Kompetensi Khusus:
		1 Pengumpulan dan persiapan data
		2 Manajemen data 3 Basis data
		4 Data mining
	A F III ALED	5 Analisis dan interpretasi data
6	Analis Hukum Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Hukum Pidana
		2 Hukum Perdata
		3 Hukum Acara
1		4 Hukum Tata Negara 5 Hukum Internasional
		6 Hukum Administrasi Negara
1		Kemampuan Khusus:
1		Data dan bahan terkait pemantauan dan peninjauan, serta analisis dan evaluasi terhadap 1 permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis serta kebutuhan
		peraturan perundang-undangan
		2 Data dan bahan terkait penyelesaian permasalahan hukum dan pengawasan pelaksanaan Peraturan
1		Perundang-Undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi Pemerintah Data dan bahan terkait penyusunan/evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Instansi
		3 Pemerintah
1		4 Data dan bahan terkait pengelolaan dan pengembangan informasi hukum

Halaman 1 dari 62

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		5 Data dan bahan terkait pelaksanaan pelayanan hukum dan perizinan Data dan bahan terkait pelaksanaan advokasi hukum dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum diluar persidangan (nonlitigasi), pelaksanaan advokasi hukum secara adjudikasi, dan pelaksanaan advokasi hukum di forum alternatif
7	Analis Investigasi dan Pengamanan	penyelesaian sengketa Kompetensi Umum:
,	Perdagangan Ahli Pertama	1 Perdagangan Internasional
		2 Hukum Internasional
		3 Akuntansi Dasar 4 UU No. 7/2014
		5 UU No. 7/1994
		6 UU No. 24/2000
		7 PP No. 34/2011
		Kompetensi Khusus: 1 Pengaturan Umum WTO
		2 Anti-Dumping Agreement
		3 Agreement on Subsidy and Countervailing Measures
		4 Agreement on Safeguard 5 PP No. 34/2011
8	Analis Kebakaran Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		Pembagian wewenang penyelenggaraan sub urusan kebakaran berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 1 dan Permendagri No 16 Tahun 2020, PP No 16 Tahun 2021, dan Permen PU No 25 Tahun 2008, dan Permen PU No 26 Tahun 2008 2 Teori Segitiga Api
		3 Sarana Prasarana Pemeriksaan Gedung dan Kebutuhan Perlengkapan dalam pelaksanaan penyuluhan Kompetensi Khusus:
		1 Sistem Pipa Tegak
		2 Sistem Sprinkler Otomatis
		3 Pompa Pemadam Kebakaran
		4 Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 5 Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran
		6 Ventilasi Mekanik dan Sistem Pengendalian Asap
		7 Pasangan Konstruksi Tahan Api
		8 Partisi Penghalang Asap 9 Bahan Pelapis Interior
		10 Sarana Jalan Keluar
		11 Pencahayaan Darurat
9	Analis Kebencanaan Ahli Pertama	12 Teknik Dasar Penyuluhan Kompetensi Umum:
3	Analis Repelicandan Anii Fertama	Konsep Dasar Penanggulangan Bencana
		Kompetensi Khusus:
		Bahan NSPK kesiapsiagaan bencana Jenis-jenis bahan kesiapsiagaan bencana
		3 Bahan konsep kesiapsiagaan bencana
		4 Bahan konsep mitigasi bencana
		Bahan NSPK mitigasi bencana Tingkat peringatan dini bencana per jenis ancaman potensi bencana
		 Tingkat peringatan dini bencana per jenis ancaman potensi bencana Konsep peringatan dini bencana berbasis masyarakat
		8 Bahan NSPK terkait peringatan dini bencana
		9 Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian, dan sumber daya
		Langkah dan tata cara dalam pelaksanaan kaji cepat Pengkajian informasi awal dalam kaji cepat
		12 Metode dan pengolahan data kaji cepat
		13 Penentuan status keadaan darurat bencana
		Peran pemerintah dalam penanggulangan bencana Analisis bahan penanganan korban dan pengungsi saat status tanggap darurat
		Analisis bahan kebutuhan dasar korban dan pengungsi saat status tanggap darurat
		17 Bahan untuk penyusunan rencana operasi penanganan darurat
		18 Struktur komando penanganan darurat bencana
		Analisis bahan kebutuhan Rencana Operasi Penanganan Darurat Bahan perencanaan analisis bidang Pengendalian operasi/komando penanganan
		21 Bahan NSPK terkait Pengendalian operasi/komando penanganan
		22 Bahan pengkajian perencanaan analisis bidang pengendalian operasi
		Bahan analisis potensi kebencanaan, ancaman, kerentanan, risiko, dan kapasitas Bahan konsep dasar penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana
		25 Bahan kebutuhan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
		26 Bahan NSPK terkait Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
		Bahan konsep terkait Pemenuhan kebutuhan dasar penanganan korban dan pengungsi Standar minimum bahan analisis kebutuhan dasar penanganan korban dan pengungsi
		29 Bahan kebutuhan dasar penanganan korban dan pengungsi
		30 Jenis - jenis perlindungan terhadap kelompok rentan
		31 Bahan kebutuhan perlindungan kelompok rentan
		32 Bahan NSPK terhadap perlindungan kelompok rentan 33 Bahan NSPK Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
		34 Konsep bahan kajian kebutuhan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
		35 Bahan untuk penyusunan R3P
		Alur penyaluran hibah Rehablitasi dan Rekonstruksi pascabencana Bahan NSPK terkait Pemulihan dan Peningkatan Fisik Pasca Bencana
		38 Konsep Pemulihan dan Peningkatan Fisik Pasca Bencana
-	•	Halaman 2 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		39 Bahan pendampingan, pemulihan dan peningkatan fisik
		40 Bahan NSPK pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi dan sumberdaya alam pascabencana
		41 Konsep pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi dan sumberdaya alam pascabencana Bahan analisis pendampingan, pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi dan sumberdaya alam pascabencana
		43 Bahan analisis kebutuhan pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi dan sumberdaya alam pascabencana
		44 Bahan konsep pengelolaan logistik dan peralatan kebencanaan
		45 Bahan NSPK terkait pengelolaan logistik dan peralatan
		46 Analisa bahan kebutuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana
		47 Konsep bahan optimasi jaringan logistik dan peralatan kebencanaan48 Bahan NSPK terkait logistik dan peralatan kebencanaan
		49 Konsep distribusi bantuan logistik dan peralatan kebencanaan
		50 Bahan konsep pengurangan risiko bencana
		51 Bahan NSPK terkait pengurangan risiko bencana
		52 Bahan dasar penghitungan indeks risiko bencana
		53 Peta kawasan rawan bencana 54 Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi Bencana
		55 Konsep bahan Standar minimum penanganan korban dan pengungsi
		56 Bahan analisis kebutuhan penanganan korban dan pengungsi bencana
10	Analis Kebijakan Ahli Madya	Kemampuan Analisis:
		1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
		2 Manajemen Kebijakan Publik
		Metodologi Riset Kebijakan Analisis Kebijakan Publik
		5 Dokumentasi Saran Kebijakan
		Kemampuan Politis:
		1 Komunikasi dan Publikasi Saran Kebijakan
		2 Pemetaan Stakeholder
11	Analis Kebijakan Ahli Muda	3 Advokasi Kebijakan dan Konsultasi Publik Kemampuan Analisis:
	Alialis Rebijakali Alili Wuda	Konsep dan Studi Kebijakan Publik
		2 Manajemen Kebijakan Publik
		3 Metodologi Riset Kebijakan
		4 Analisis Kebijakan Publik
		5 Dokumentasi Saran Kebijakan Kemampuan Politis:
		1 Komunikasi dan Publikasi Saran Kebijakan
		2 Pemetaan Stakeholder
		3 Advokasi Kebijakan dan Konsultasi Publik
12	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Kemampuan Analisis:
		Konsep dan Studi Kebijakan Publik Manaiemen Kebijakan Publik
		Manajemen Kebijakan Publik Metodologi Riset Kebijakan
		4 Analisis Kebijakan Publik
		5 Dokumentasi Saran Kebijakan
		Kemampuan Politis:
		1 Komunikasi dan Publikasi Saran Kebijakan
		Pemetaan Stakeholder Advokasi Kebijakan dan Konsultasi Publik
13	Analis Kekayaan Intelektual Ahli	Kemampuan Umum:
	Pertama	Peraturan perundang-undangan kekayaan intelektual
		2 Prosedur permohonan kekayaan intelektual
		3 Penegakan hukum kekayaan intelektual Kemampuan Khusus:
		1 Penegakan hukum kekayaan intelektual
		Peraturan perundang-undangan kekayaan intelektual
		3 Prosedur permohonan kekayaan intelektual
14	Analis Ketahanan Pangan Ahli	Kemampuan Khusus:
	Madya	1 Ketersediaan pangan
		Stabilisasi pasokan dan harga pangan Distribusi dan cadangan pangan
		4 Pencegahan kerawanan pangan
		5 Sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG)
		6 Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi
		7 Penganekaragaman konsumsi pangan
		Perumusan standar keamanan dan mutu pangan Pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan
15	Analis Ketahanan Pangan Ahli	Kemampuan Khusus:
	Muda	1 Ketersediaan pangan
		2 Stabilisasi pasokan dan harga pangan
		3 Distribusi dan cadangan pangan
		Pengendalian kerawanan pangan Sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG)
		6 Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)
		7 Penganekaragaman konsumsi pangan
		8 Perumusan standar keamanan dan mutu pangan
		9 Pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan
	Analis Ketahanan Pangan Ahli	Kemampuan Khusus:
	Pertama	1 Ketersediaan pangan Halaman 3 dari 62

Halaman 3 dari 62

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		2 Stabilisasi pasokan dan harga pangan
		Distribusi dan cadangan pangan Pengendalian kerawanan pangan
		5 Sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG)
		6 Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi
		7 Penganekaragaman konsumsi pangan
		Perumusan standar keamanan dan mutu pangan Pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan
17	Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli	Kemampuan Umum:
	Pertama	Peraturan Kelautan dan Perikanan
		Kemampuan Khusus: 1 Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan
		Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri
		3 Peningkatan Akses Pasar Luar Negeri
		Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan Pemetaan Potensi usaha dan Peluang Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan
		 5 Pemetaan Potensi usaha dan Peluang Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan 6 Pengelolaan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
18	Analis Pasar Hasil Perikanan	Kemampuan Umum:
	Terampil	Peraturan Kelautan dan Perikanan
		Kemampuan Khusus: 1 Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan
		Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri
		3 Peningkatan Akses Pasar Luar Negeri
		 4 Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan 5 Pemetaan Potensi usaha dan Peluang Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan
		6 Pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan
19	Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli	Kompetensi Umum:
	Muda	Regulasi terkait bidang Analis Pasar Hasil Pertanian Ilmu Dasar Sosial Ekonomi Pertanian
		3 Pengetahuan umum dibidang analisis pasar hasil pertanian
		4 Pengembangan pasar hasil pertanian secara umum
		Kompetensi Khusus:
		Pengenalan analisis pasar hasil pertanian Jenis -jenis Bahan Informasi Pasar
		3 Jenis-jenis kebijakan pasar hasil pertanian
		4 Jenis-jenis kerjasama dalam bidang pemasaran hasil pertanian
		5 Pemanfaatan hasil analisis pasar hasil pertanian 6 Pengenalan jenis pasar
20	Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli	Kompetensi Umum:
	Pertama	Regulasi terkait Analis Pasar Hasil Pertanian
		Metode Analisis Data Pemasaran Perdagangan Internasional
		Kerjasama dan Organisasi Internasional dibidang hasil pertanian
		5 Penyebarluasan informasi pemasaran
		6 Pengetahuan di Bidang Pertanian dan ekonomi Kompetensi Khusus:
		1 Teori dan analisis ekonomi pertanian
		2 Teori dan analisis perdagangan internasional
21	Analis Pasar Hasil Pertanian	3 Usahatani
21	Terampil	Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan umum di bidang pertanian
		2 Pengetahuan umum terkait pemasaran pertanian
		3 Regulasi terkait Analis Pasar Hasil Pertanian
		Kompetensi Khusus: 1 Pengumpulan dan analisis data analis pasar hasil pertanian
		2 Ilmu Dasar Sosial Ekonomi Pertanian
		3 Sarana Pasar dan Kelembagaan
22	Analis Pemanfaatan Ilmu	4 Kebijakan Pasar Hasil Pertanian Kompetensi Umum:
	Pengetahuan dan Teknologi Ahli	1 Perencanaan lptek
	Pertama	2 Pemanfaatan lptek
		3 Manajemen Kekayaan Intelektual 4 Alih Teknologi
		Kompetensi Khusus:
		1 Intermediasi Iptek
		2 Difusi Iptek 3 Komersialisasi Teknologi
23	Analis Pemantauan Peraturan	Kemampuan Umum:
	Perundang-Undangan Legislatif Ahli	1 Penyelenggaraan Negara
	Pertama	2 Kelembagaan DPR dan DPD
		3 Manajemen ASN Kemampuan Khusus:
		1 Sistem Pendukung (Supporting system) DPR dan DPD
		2 JF Analis Pemantauan
24	Analis Pembiayaan Infrastruktur	3 Pengkajian Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Kompetensi Umum:
	Pekerjaan Umum dan Perumahan	Kebijakan/Peraturan Perundangundangan terkait Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah dan Badan
	Ahli Pertama	Usaha (KPBU)
		Kebijakan/Peraturan Perundangundangan terkait Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan
I		Halaman 4 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		Kompetensi Khusus: 1 Perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
		Penyiapan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
		Pelaksanaan dan/atau transaksi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
		4 Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
25	Analis Pengembangan Kompetensi	1 Kebijakan tentang Pengembangan Kompetensi ASN
	Aparatur Sipil Negara Ahli Pertama	2 Manajemen ASN
		3 Manajemen Kinerja
		4 Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 5 Standar Kompetensi Jabatan ASN
		6 Pengembangan Kompetensi Non Klasikal
		7 ASN Corporate University (Corpu)
		8 Manajemen Talenta
		9 Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
26	Analis Pengusahaan Jasa Kelautan	10 Evaluasi pelaksanaan Bangkom ASN Kemampuan Umum:
20	Ahli Pertama	Peraturan Kelautan dan Perikanan
		Kemampuan Khusus:
		1 Pemetaan potensi pemanfaatan air laut
		2 Pemetaan potensi sebaran biota laut dan non biota laut untuk pemanfaatan biofarmakologi
		3 Penyusunan database dan kesesuaian kriteria reklamasi
		Penyusunan peta tematik dan infografis lokasi bangunan dan instalasi Pemetaan kesesuaian ruang dan pemanfaatan BMKT
		6 Pemetaan potensi lokasi wisata bahari
27	Analis Perdagangan Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
	5 5	1 Pengetahuan bidang Perdagangan
		Pengetahuan tentang perizinan berusaha bidang Perdagangan
		3 Pengetahuan tentang Perlindungan Konsumen
		4 Pengetahuan tentang Sistem Informasi Perdagangan Kompetensi Khusus:
		Pengetahuan tentang Bidang Perdagangan Luar Negeri
		Pengetahuan tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
		3 Pengetahuan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
		4 Pengetahuan tentang Pengembangan Sistem Logistik Nasional
		5 Pengetahuan tentang Perdagangan dalam Negeri
		6 Pengetahuan tentang Sistem Informasi Perdagangan Pengetahuan tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku
		Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
		8 Pengetahuan tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
		9 Pengetahuan tentang Perdagangan Internasional
		10 Pengetahuan terkait Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
		 11 Pengetahuan terkait perlindungan konsumen 12 Pengetahuan tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
28	Analis Perkebunrayaan Ahli	Kompetensi Umum:
	Pertama	1 Konsep kebun raya dan konservasi
		2 Pengembangan koleksi tumbuhan
		3 Pengembangan kawasan kebun raya4 Identifikasi tumbuhan
		Kompetensi Khusus:
		1 Lanskap kebun
		2 Penulisan ilmiah
		3 Database koleksi
		4 Pengolahan data
		5 Penyiapan sarana prasarana 6 Perawatan koleksi
29	Analis Prasarana Dan Sarana	Kompetensi Umum:
	Pertanian Ahli Madya	Regulasi terkait Kelembagaan petani pemakai air
	-	Regulasi yang mengatur aspek perluasan dan perlindungan lahan, Sumber Daya Air, perbankan dan
		pembiayaan serta pupuk dan pestisida
		Pengetahuan tentang aspek perluasan dan perlindungan lahan, Sumber Daya Air, perbankan dan
		pembiayaan serta pupuk dan pestisida Kompetensi Khusus:
		Pengetahuan tentang tata cara perluasan dan perlindungan lahan, pengembangan dan rehabilitasi
		jaringan irigasi, pembiayaan pertanian, serta pupuk dan pestisida
30	Analis Prasarana Dan Sarana	Kompetensi Umum:
	Pertanian Ahli Muda	1 Regulasi terkait Kelembagaan petani pemakai air
		Regulasi yang mengatur aspek perluasan dan perlindungan lahan, Sumber Daya Air, perbankan dan
		pembiayaan serta pupuk dan pestisida Pengetahuan tentang aspek perluasan dan perlindungan lahan, Sumber Daya Air, perbankan dan
		pembiayaan serta pupuk dan pestisida
		Kompetensi Khusus:
		Pengetahuan tentang tata cara perluasan dan perlindungan lahan, pengembangan dan rehabilitasi
63	Analia Duazan III C	jaringan irigasi, pembiayaan pertanian, serta pupuk dan pestisida
31	Analis Prasarana dan Sarana	Kompetensi Umum:
	Pertanian Ahli Pertama	Regulasi tentang sitem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Istilah-istilah terkait pupuk dan pestisida
		Neraca dan produktifitas pertanian secara mikro serta kondisi dan cuaca dalam usaha pertanian
		Pengetahuan tentang perluasan dan perlindunagn lahan
		5 Pengetahuan terkait pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi
		Halaman 5 dari 62

Halaman 5 dari 62

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		6 Peraturan Menteri Pertanian di bidang pupuk dan pestisida
		7 Regulasi tentang Sumber Daya Air 8 Regulasi terkait perluasan dan perlindungan lahan
		9 Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang diundangkan tentang perbankan dan pembiayaan
		Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan tentang perluasan dan perlindunagn lahan
		2 Peraturan dan pedindasan dan perindahagi hanah 2 Peraturan dan pedoman yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pertanian tentang poembiayaan
		_ pertanian
32	Analis Standardisasi Ahli Pertama	Teknis pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi Kemampuan Umum:
02	7 mano Standardisasi 7 mm i Stania	1 UU Nomor 20 Tahun 2014
		2 PP Nomor 34 Tahun 2018
		Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2020 Pengantar Standardisasi (elearning.bsn.go.id)
		5 Pengantar Penilaian Kesesuaian (elearning.bsn.go.id)
		6 Manfaat Ekonomi Standar (elearning.bsn.go.id)
		7 Website BSN (bsn.go.id) 8 SNI ISO 19011:2018
		Kemampuan Khusus:
		1 UU Nomor 20 Tahun 2014
		2 PP Nomor 34 Tahun 2018 3 Pengantar Standardisasi (elearning.bsn.go.id)
		4 ISO/IEC Directives Part 2
		5 Peraturan BSN No. 8 Tahun 2022 6 Website BSN (bsn.go.id)
		7 Pengantar Penilaian Kesesuaian (elearning.bsn.go.id)
		8 Peraturan BSN terkait skema penilaian kesesuaian untuk sektor-sektor tertentu (bsn.go.id)
		9 Peraturan Kepala BSN No. 2 Tahun 2017 10 Peraturan Kepala BSN No. 7 Tahun 2020
		11 Peraturan Kepala BSN No. 8 Tahun 2020
		12 Peraturan Menteri Perindustrian No. 75/M-IND/PER/7/2010
		13 Peraturan Menteri Perindustrian No. 30 Tahun 2018 14 SNI ISO 9001:2022
		15 SNI ISO 15189:2022
		16 SNI ISO/IEC 17020:2012
		17 SNI ISO/IEC 17021-1:2015 18 SNI ISO/IEC 17024:2012
		19 SNI ISO/IEC 17025:2017
		20 SNI ISO/IEC 17029:2019
		21 SNI ISO 17034:2016 22 SNI ISO/IEC 17043:2010
		23 ISO/IEC 17043:2023
		24 SNI ISO/IEC 17065:2012
		25 SNI ISO/IEC 17067:2013 26 SNI ISO 19011:2018
		27 SNI ISO 21001:2018
		28 SNI ISO 22000:2018 29 ISO/IEC 27001:2022
		30 SNI ISO 31000:2018
		31 SNI IEC/ISO 31010:2016
		32 SNI ISO 37001:2016 33 SNI ISO 37301:2021
		34 SNI ISO 45001:2018
		35 SNI ISO Guide 73:2016
		36 Website KAN (kan.or.id) 37 KAN U-01
		38 KAN U-02
		39 KAN U-03
		40 KAN U-04 41 KAN U-06
		42 KAN U-08
		43 KAN K-01
		44 KAN K-02 45 KAN K-03
		46 KAN K-04
		47 KAN K-05
		48 KAN K-06 49 KAN K-07
		50 KAN K-08
		51 KAN K-09
		52 KAN K-10 53 SNI ISO/IEC 17011:2017
		54 ISO/IEC 17040:2005
	Analis Sumber Daya Manusia	Kemampuan Umum:
	Aparatur Ahli Pertama	UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		3 PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017
		PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		Kemampuan Khusus:
		Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur Department of the Analysis ACN
		Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN Pengadaan ASN
		4 Pangkat dan Jabatan ASN
		5 Pengembangan Karier ASN
		6 Pola Karier ASN
		7 Promosi ASN 8 Mutasi ASN
		9 Penugasan ASN
		10 Pengembangan Kompetensi ASN
		11 Penilaian Kinerja ASN
		12 Disiplin ASN 13 Penghargaan ASN
		14 Penggajian, Tunjangan, dan Fasilitas ASN
		15 Pemberhentian ASN
		16 Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN
		17 Perlindungan ASN
		18 Cuti ASN 19 Sistem Informasi ASN
		20 Talenta/reformasi birokrasi/zona integritas
		21 Struktur/kelembagaan/tata laksana/ proses bisnis unit kerja/instansi
		22 Kelembagaan ASN dan/atau lembaga pengelola kepegawaian dengan unit kerja dalam penguatan
		efektivitas organisasi 23 Proses penyusunan kebijakan/regulasi bidang SDM Aparatur
34	Apoteker Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Permenpan RB No. 13 Tahun 2021
		2 Standar kompetensi apoteker Indonesia dan kode etik apoteker
		3 PP 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian Kompetensi Khusus:
		Penilaian terhadap pemasok terkait dokumen kefarmasian dalam kegiatan pengadaan pembelian
		barang
		Penyusunan surat pesanan dalam rangka pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP
		dalam kegiatan pengadaan pembelian barang Pembuatan atau compounding sediaan farmasi
		4 Pemeriksaan hasil pembuatan atau compounding sediaan farmasi
		5 Perencanaan kegiatan dan kebutuhan sediaan yang akan dikemas ulang
		6 Pengemasan ulang sediaan
		7 Pengujian mutu bahan baku secara organoleptis 8 Pengujian bahan baku secara kualitatif dan kuantitatif
		Verifikasi dan pengesahan berita acara penerimaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP
		Pengesahan berita acara pengembalian barang atau retur sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang tidak sesuai dengan persyaratan dan spesifikasidalam penerimaan barang
		11 Stock opname dalam penyimpanan barang
		12 Pengkajian permintaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP13 Pendistribusian sediaan farmasi, alkes, dan BMHP
		14 Verifikasi daftar usulan pengahpusan sediaan farmasi, alkes, BMHP yang tidak memenuhi syarat
		15 Penyusunan usulan pengahpusan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP
		Pengkajian dan pelayanan resep berupa telaah resep, pemeriksaan dan penyerahan obat disertai pemberian informasi
		17 Rekonsiliasi obat 18 Konseling penggunaan obat
		Konseling penggunaan obat Konseling obat pada pasien dengan penyakit kronis
		20 Konseling penggunaan obat khusus, seperti Anti Retro Viral, hepatitis, TBC
		21 Penelusuran dan pengkajian catatan medik dalam pemantauan terapi obat atau PTO
		22 Identifikasi kejadian efek samping sediaan farmasi dalam monitoring efek samping sediaan farmasi
		23 Pemantauan kondisi pasien dalam monitoring efek samping sediaan farmasi 24 Preparasi sediaan intravena dalam dispensing sediaan intravena
		25 Preparasi sediaan radiofarmaka
		26 Sterilisasi sentral
		27 Penerapan kajian farmakoekonomi dan uji klinik
35	Arsiparis Ahli Madya	28 Pelayanan farmasi khusus Kemampuan Umum:
		Konsep dan teori tentang kearsipan
		2 Peraturan Perundang-undangan di bidang kearsipan, ASN, dan informasi publik
		Kemampuan Khusus: 1 Konsep dan teori tentang arsip dinamis
		Peraturan Perundang-undangan tentang Arsip Dinamis
		Pemberian dan penyusunan naskah persetujuan/pertimbangan Jadwal Retensi Arsip
		4 Pemberian dan penyusunan naskah persetujuan/pertimbangan Pemusnahan Arsip
		5 Konsep dan teori tentang arsip statis
		Peraturan Perundang-undangan tentang Arsip Statis Verifikasi Arsip Statis yang akan diserahkan
		Penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis
		9 Identifikasi dan penilaian penerbitan naskah sumber arsip
		10 Pelayanan arsip statis
		 11 Peraturan Perundang-undangan tentang Pembinaan Kearsipan 12 Bimbingan dan konsultasi (bimkos)
		13 Supervisi dan pengawasan penyelenggaraan kearsipan
		Halaman 7 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		14 Analisis rencana kebutuhan jabatan Arsiparis
		15 Evaluasi fungsi dan tugas jabatan Arsiparis
		Penilaian kinerja Arsiparis Sertifikasi Arsiparis
		18 Akreditasi kearsipan
		19 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) kearsipan
		20 Peraturan Perundang-undangan tentang JIKN
		21 Pengolahan dan penyajian informasi kearsipan untuk JIKN
36	Arsiparis Ahli Muda	Kemampuan Umum:
		1 Konsep dan teori kearsipan
		Peraturan Perundang-undangan di bidang kearsipan Kemampuan Khusus:
		Konsep dan teori tentang arsip dinamis
		Peraturan Perundang-undangan tentang Arsip Dinamis
		3 Penyusutan Arsip
		4 Arsip terjaga
		5 Konsep dan teori tentang arsip statis
		6 Peraturan Perundang-undangan tentang arsip statis 7 Penataan dan penyimpanan arsip statis
		Pengusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis
		9 Pengelolaan Arsip Sejarah Lisan
		10 Preservasi arsip statis
		11 Reproduksi arsip statis
		12 Autentifikasi arsip statis
		13 Naskah sumber arsip dan pameran arsip
		14 Pelayanan arsip statis15 Konsep dan teori tentang pembinaan kearsipan
		Ronsep dan teori tentang pembinaan kearsipan Peraturan Perundang-undangan tentang pembinaan kearsipan
		17 Penyuluhan dan Fasilitasi Kearsipan
		18 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) kearsipan
		19 Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Kearsipan
		20 Sertifikasi Arsiparis
		21 Akreditasi Kearsipan
		22 Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan23 Konsep dan teori tentang pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi
		24 Peraturan Perundang-undangan tentang pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi
		25 Arsip Terjaga menjadi informasi
		26 JIKN
37	Arsiparis Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Sejarah, konsep dan teori dasar kearsipan Undang Undang dan Peraturan Pemerintah di hidang kearsipan
		Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang kearsipan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
		4 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
		Kemampuan Khusus:
		1 Konsep dan teori tentang arsip dinamis
		2 Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Arsip Dinamis
		3 Konsep dasar penyusutan arsip
		 4 Pemusnahan arsip dinamis dan penyerahan statis ke lembaga kearsipan 5 Konsep dan teori tentang arsip statis
		6 Peraturan Perundangan tentang arsip statis
		7 Preservasi arsip statis
		8 Layanan dan Pemanfaatan Arsip Statis
		9 Standar Operasional Prosedur Kearsipan
		10 Penilaian kinerja Arsiparis
38	Arsiparis Penyelia	11 Identifikasi dan pengolahan data arsip untuk SIKN Kemampuan Umum:
55	nasipans i onyena	Konsep dan teori tentang kearsipan
		Peraturan Perundang-undangan di bidang kearsipan, ASN, dan informasi publik
		Kemampuan Khusus:
		1 Konsep dan teori tentang arsip dinamis
		2 Peraturan Perundang-undangan tentang Arsip Dinamis
		Verifikasi autentisitas arsip yang tercipta Penataan dan penyimpanan arsip inaktif
		Penataan dan penyimpanan arsip inaktif Identifikasi dan alih media arsip dinamis
		6 Identifikasi dan penilaian arsip dinamis yang akan diautentifikasi
		7 Identifikasi Arsip Terjaga
		8 .ldentifikasi dan pengelolaan arsip vital
		9 Layanan arsip dinamis
		10 Konsep dan teori tentang arsip statis
		11 Peraturan Perundang-undangan tentang arsip statis12 Penyusunan sarana bantu temu balik arsip statis
		13 Daftar arsip statis
		14 Daftar inventaris arsip statis
		15 Konsep dan teori tentang Pembinaan Kearsipan
		16 Peraturan Perundang-undangan tentang Pembinaan Kearsipan
		17 Bimbingan Teknis (BINTEK) Pengelolaan Arsip
		18 Penilaian kinerja Arsiparis
		19 Konsep dan teori tentang pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi
		Peraturan Perundang-undangan tentang pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi Identifikasi dan pengolahan data arsip untuk SIKN
		Halaman 8 dari 62

Halaman 8 dari 62

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
39	Arsiparis Mahir	Kemampuan Umum:
		Pengantar Kearsipan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU
		Nomor 43 Tahun 2009
		Kemampuan Khusus:
		Peraturan Perundangan terkait Pengelolaan Arsip Terjaga Prosedur Pengelolaan Arsip Terjaga
		3 Prosedur Penjadahan Arsip Iranjaga
		4 Prosedur Layanan Arsip Aktif
		5 Peraturan Perundangan terkait proses pembuatan sarana bantu temu balik arsip statis
		6 Penataan dan penyimpanan arsip 7 Pelayanan arsip
		8 Penyusunan daftar arsip statis
		9 Identifikasi fisik arsip 10 Penyusunan inventaris arsip
		Verifikasi fisik arsip pada kegiatan penyusunan inventaris arsip
		12 Peraturan Perundangan terkait preservasi arsip
		13 Rewashing arsip film 14 Recleaning arsip rekaman suara
		15 Rewashing arsip rekaman suara
		16 Restorasi arsip foto
		17 Reproduksi/alih media arsip statis 18 Penelusuran referensi
		19 Pemindaian
		20 Penilaian kinerja Arsiparis
40	Arsiparis Terampil	21 Bimbingan Teknis Kemampuan Umum:
	raspano rotampii	1 Konsep dan teori tentang kearsipan
		Peraturan Perundang-undangan di bidang kearsipan
		Kemampuan Khusus: 1 Teori dasar pengelolaan arsip dinamis
		Peraturan perundangan terkait pengelolaan arsip dinamis
		3 Penciptaan arsip
		4 Pemberkasan arsip aktif 5 Penataan arsip inaktif
		6 Teori dasar pengelolaan arsip statis
		7 Peraturan perundangan terkait pengelolaan arsip statis
		8 Restorasi arsip 9 Pameran arsip
		10 Teori dasar pembinaan kearsipan
		Peraturan perundangan dalam rangka pembinaan kearsipan Bimbingan teknis kearsipan
41	Asesor Manajemen Mutu Industri	Kemampuan Umum:
	Ahli Pertama	Pengetahuan umum tentang industri, konsumen, masyarakat dan pasar global
		Pengetahuan umum tentang sertifikasi produk dan perbedaan dengan jenis lainnya Pengetahuan umum tentang tugas fungsi asesor manajemen mutu industri
		Pengetahuan umum tentang tugas fungsi asesor managenen mutu industri Pengetahuan umum tentang tugas fungsi dan persyaratan lembaga sertifikasi produk
		5 Pengetahuan umum tentang konsep sistem industri manufaktur
		6 Pengetahuan umum tentang regulasi dan kebijakan industri terkait standardisasi Pengetahuan tentang prinsip-prinsip standardisasi, tujuan dan manfaat standar serta standar Nasional
		7 Indonesia
		Kemampuan Khusus:
		1 Pengetahuan tentang tujuan, manfaat dan penerapan akreditasi di LPK, dan stakeholder akreditasi
		2 Pengetahuan Dasar Proses Sertifikasi Produk, persyaratan dan skema lembaga sertifikasi produk
		3 Pemahaman tentang tujuan dan metoda evaluasi: asesmen, inspeksi, verifikasi, kalibrasi dan pengujian
		Pemahaman metoda dan teknik persiapan dan pelaksanaan asesmen untuk penerapan Sistem Manajemen Mutu di Industri
		5 Pengetahuan tentang persyaratan sistem manajemen mutu serta bukti penerapan di industri
		6 Pemahaman aspek-aspek yang mendukung kompetensi personel (Tim Asesmen) dalam melaksanakan proses sertifikasi
		Pemahaman tentang jenis-jenis skema sertifikasi, fungsi, tahapan-tahapan dalam skema sertifikasi dan contoh penerapannya
		Pemahaman penerapan di lapangan terkait dengan kegiatan-kegiatan sertifikasi pada tahap seleksi, determinasi dan surveilan/pengawasan
		Pemahaman tentang aspek penting dalam tinjauan laporan uji dan laporan asesmen serta keputusan sertifikasi 10 Analisis studi kasus dalam asesmen kesesuaian
42	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017
		4 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
		5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
		Kemampuan Khusus: 1 Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur
		Kerangka Kerja dan Implementasi Manajemen SDM berbasis Kompetensi
		3 Kerangka Kerja dan Implementasi Manajemen SDM berbasis Talenta
l	I	4 Proses dan Pengelolaan Asesmen Kompettensi/Potensi ASN Halaman 9 dari 62

Halaman 9 dari 62

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		5 Kerangka Kerja Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Asesmen
43	Asisten Apoteker Terampil	6 Kerangka Kerja Pengembangan Strategik Asesmen Kompetensi Umum:
		1 Contoh-contoh sediaan kosmetika
		2 Penggolongan obat tradisional
		Penggolongan PKRT dan alkes Pemilihan peralatan menimbang bahan baku
		5 Jenis timbangan
		6 Indikator perilaku hidup bersih dan sehat
		7 PP 51/2009 tentang pekerjaan kefarmasian
		8 Penandaan atau pelabelan di dalam sediaan farmasi dan perbekalan
		9 Promotif, preventif, kuratif, rehabilitatid 10 Jenis imunisasi
		Kompetensi Khusus:
		1 Kajian administratif
		2 Kajian farmasetik
		Aturan pakai dan adanya keterangan khusus Perkitupan kebutuhan jumlah sediana farmasi alkan PMUR seguai rasan
		Perhitungan kebutuhan jumlah sediaan farmasi, alkes, BMHP sesuai resep Perhitungan kebutuhan obat untuk resep dan tanda khusus (iter, det, nedet, dst)
		6 Perhitungan pengenceran obat/larutan
		7 Penghitungan jumlah basis salep; pembawa bedak tabur
		8 Penghitungan volume larutan Hidrogen peroksid dan larutan rekonstitusi obat
		9 Penghitungan biaya resep racikan dan resep non racikan
		10 Penghitungan dosis obat (berdasarkan berat badan, luas permukaan tubuh, usia, dosis hewan) 11 Penentuan batas penggunaan sesuai kadaluarsa dan BUD sediaan farmasi
		12 Penentuan jumlah jenis kegiatan pelayanan farmasi klinik
		13 Informasi indikasi sediaan farmasi, alkes dan BMHP
		14 Informasi terkait kontra indikasi obat
		15 Informasi efek samping dan penanganannya
		16 Informasi penyimpanan Antihistamin, analgetik, obat kardiovaskular, anti hiperlipidemia, obat saluran cerna, obat hipersekresi
		17 Antinistamin, analgetik, obat kardiovaskular, anti nipempiderina, obat saluran cerna, obat nipersekresi asam lambung, vitamin dan mineral, antidiabetik, antimikroba
		18 PMK Nomor 3 Tahun 2021
		19 Pemilihan obat swamedikasi
		20 Pelayanan informasi swamedikasi
		21 Indikasi obat 22 Perencanaan kefarmasian
		23 Pengadaan kefarmasian
		24 Penerimaan sediaan famasi, alkes, dan BMHP
		25 Penyimpanan sediaan farmasi
		26 Pengelolaan perbekalan farmasi
		27 Pengelolaan apotek 28 Evaluasi kerusakan
		29 Distribusi sediaan farmasi
		30 Pemusnahan obat
		31 Penarikan obat
		32 Sterilisasi dan disinfeksi
		33 Penanganan limbah
		34 Bahan berbahaya35 Sediaan tablet, steril, semi solid, liquid
		36 Obat esensial nasional
		37 Obat generik dan non generik
		38 Bahan medis habis pakai (BMHP)
4.4	Asiatan Inggalatur Kalaikudaraan	39 Penggolongan obat
44	Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Terampil	Kemampuan Umum:
		Regulasi Nasional dan Internasional tentang Penerbangan Sipil
		Tugas, tanggung jawab dan kompetensi Asisten Inspektor Kelaikudaraan
		3 Hukum penerbangan sipil Internasional
		4 Dasar peraturan penerbangan sipil internasional (ICAO Doc & Annexess)
		Kemampuan Khusus: Proses Sertifikasi Kecakapan Personil - Pemeriksaan kelengkapan dokumen peserta ujian,
		pengawasan ujian tertulis dan koreksi hasil ujian bagi personil lisensi
		Proses Sertifiksi Kecakapan Personil - Proses pemeriksaan kelengkapan dokumen penerbitan lisensi
		personel teknik pesawat udara
		3 Proses Sertifikasi Kecakapan Personil - Proses pemeriksaan dokumen pengajuan penerbitan
		certifiicate of maintenance approval (COMA) Proses Sertifikasi Kecakapan Personil - Proses pemeriksaan dokumen pengajuan penambahan
		4 kemampuan/rating COMA (certificate of maintenance approval)
		Proses Sertifikasi Kecakapan Personil - Proses pemeriksaan dokumen pengajuan penambahan
		skemampuan/rating license
		6 Prosedur Perwakilan Regulator sebagai Penguji - Proses pemeriksaan dokumen permohonan DAMEER (administration of designated aircraft maintenance engineer examiner representatives)
		7 Prosedur Perwakilan Regulator sebagai Penguji - Proses pengawasan ujian tes tulis pada pemohon DAMEER (administration of designated aircraft maintenance engineer examiner representatives)
		Prosedur Perwakilan Regulator sebagai Penguji - Proses pemeriksaan dokumen perpanjangan DAMEER (administration of designated aircraft maintenance engineer examiner representatives)
		Proses Sertifikasi Pesawat - Proses pemeriksaan kelaikudaraan pesawat udara kategorin normal untuk
	I	penerbitan sertifikat kelaikudaraan standard (standard C of A)
		Halaman 10 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		10 Proses Sertifikasi Pesawat - Proses pemeriksaan kelaikudaraan pesawat udara kategorin normal untuk penerbitan sertifikat kelaikudaraan khusus (special C of A) 11 Proses Sertifikasi Pesawat - Proses surat hasil pemeriksaan kelaikudaraan pesawat udara 12 Proses Sertifikasi Operator Pesawat Proses pelaksanaan safety management system (SMS) 13 Safety Management System (SMS) 14 Proses Sertifikasi Operator Pesawat - Proses audit sebagai anggota audit
		15 Proses Sertifikasi Operator Pesawat - Proses pemeriksaaan berkala safety management system (SMS)
		Prosedur Audit dan Surveillance AOC - Proses ramp inspection pesawat udara Proses Audit dan Surveillance AOC - Proses pemeriksaan fasilitas perawatan Prosedur Audit dan Surveillance AOC - Proses pemeriksaan perawatan pesawat udara (spot inspection)
		 19 Prosedur Audit dan Surveillance AOC - Proses pemeriksaan weight & balance program 20 Prosedur Audit dan Surveillance AMO - Proses pemeriksaan publikasi perawatan pesawat udara
		21 Prosedur Audit dan Surveillance AMO - Proses pemeriksaan pelaksanaan edaran kelaikan udara (AD)
45	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015
		3 Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
		Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor PER.19/MEN/2010 Tentang Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan Permen KP Nomor 15 tahun 2021 tentang pelayanan publik di lingkungan KKP
		Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Heaha dan
		Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
		Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam 7 rangka Penyediaan Pangan Sehat dan Peraturan Kepala BKIPM Nomor 96/KEP-BKIPM/ 2020 tentang Petunjuk Teknis Monitoring Kesegaran Ikan, Residu, Bahan Berbahaya, Racun Hayati Laut (Marine Biotoxin) dan Lingkungan Perairan
		Peraturan Kepala BKIPM Nomor 95/KEP-BKIPM/2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
		Kemampuan Khusus: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
		Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Tata cara Penerbitan Program Manajemen Mutu Terpadu PMMT/ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
		Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
		PP 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Penerapan Sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
		Penerapan Sistem ketertelusuran/ traceability Cara Penanganan dan pengolahan Ikan yang baik di Suplier
		Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan No 27 8 TAHUN 2022 tentang Standar Metode deteksi penyakit ikan serta pengujian mutu dan kemanan hasi, perikanan
		9 Penerapan Sistem Manajeman Mutu Lembaga Penguji
		10 Penerapan Sistem Manajeman Mutu Lembaga Inspeksi11 Penerapan sistem Manajemen Mutu ISO 9001
46	Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil	Kemampuan Umum: Pengetahuan Umum Penerbangan Sipil dan Navigasi Penerbangan - Mampu menjelaskan definisi istilah pada Penerbangan Sipil
		Peraturan dan regulasi Nasional/Internasional yang berkaitan dengan Penerbangan Sipil dan Navigasi Penerbangan serta tugas dan tanggung jawab serta wewenang personel penerbangan
		3 Prosedur Operasional Pelayanan Navigasi Penerbangan Kemampuan Khusus:
		Peraturan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan berdasarkan Permenpan RB tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Kegiatan dan hasil kegiatan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan
47	Acietan Incheletur Pancanarasia-	3 Prosedur Teknis pengaturan, pengawasan, dan pengendalian di Bidang Navigasi Penerbangan
47	Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara Terampil	Kemampuan Umum: UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan PP Nomor 32 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang penerbangan
		2 ICAO Annexes Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan
		Kemampuan Khusus: PermenPANRB Nomor 21 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara
		PM 28 Tahun 2013 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 121 tentang persyaratan 2 sertifikasi dan operasi bagi perusahaan angkutan udara yang melakukan penerbangan dalam negeri, nternasional dan angkutan udara niaga tidak berjadwal
		PM 33 tahun 2022 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 119 tentang sertifikasi pengoperasian pesawat udara

Halaman 11 dari 62

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 184 Tahun 2021 tentang Perubahan KP 244 4 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian 8900-5.2 tentang prosedur sertifikasi personel dan tugas dan tanggung jawab inspektur operasi penerbangan
		Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 263 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-6.3 (Staff Instruction 8900-6.3) tentang Prosedur Audit dan Surveilans bagi Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (Auditing and Surveillance Procedures for Air Operator Certificate (AOC) Holders)
48	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil	Kemampuan Umum: Peraturan terkait pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
	relatitan dan Ferikanan Terampii	Kemampuan Khusus:
		Pengembangan usaha dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan
		Perumusan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
		Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan
		5 Uji terap teknik produk kelautan dan perikanan
49	Asisten Penata Anestesi Terampil	6 Pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan Kemampuan Umum:
43	Asister i eriata Ariestesi Terampii	Kepmenkes HK-01.07/MENKES/722/2020 tentang Standar Kompetensi Penata Anestesi
		Kemampuan Khusus:
		Kepmenkes HK-01.07/MENKES/722/2020 tentang Standar Kompetensi Penata Anestesi Permenpan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Penata Anestesi
		3 Permenkes Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pakerjaan Penata Anestesi
50	Asisten Penata Kadastral Terampil	Kemampuan Umum:
		Dasar Pertanahan Kemampuan Khusus:
		1 Pemetaan
		2 Pengukuran Bidang Tanah
51	Asisten Penata Kadastral Pemula	3 Survei Pertanahan Kemampuan Umum:
31	Asisten Fenata Rauastiai Femula	Dasar Pertanahan
		Kemampuan Khusus:
		1 Pemetaan 2 Pengukuran Bidang Tanah
		3 Survei Pertanahan
52	Asisten Pengawas Perikanan	Kemampuan Umum:
	Terampil	Peraturan Kelautan dan Perikanan Kemampuan Khusus:
		Penyusunan dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan
		Pemahaman konsep dasar, proses pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya
		kelautan dan perikanan Pemahaman konsep dasar penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan
		Pernanaman konsep dasar penanganan barang buku dan awak kapar tindak pidana kelautan dan perikanan
		4 Pemahaman konsep dasar dan proses pengoperasian armada pengawasan
53	Asisten Pengawas Perikanan	5 Pengawakan Armada Kapal Pengawas Kemampuan Umum:
00	Pemula	Peraturan Kelautan dan Perikanan
		Kemampuan Khusus:
		Pengetahuan dan pemahaman konsep dasar pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan Pengelolaan Sistem Pemantauan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP)
		Pemahaman konsep dasar penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan
		perikanan
		Pemahaman konsep dasar dan proses pengoperasian armada pengawasan Pengawakan Armada Kapal Pengawas
54	Asisten Pengelola Produksi	Kemampuan Umum:
	Perikanan Tangkap Terampil	Peraturan tentang kebijakan perikanan tangkap
		Kemampuan Khusus: 1 Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumberdaya Ikan
		2 Rancang Bangun, Standardisasi, Tata Kelola Kapal Perikanan
		3 Perlindungan, Standardisasi dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
		Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan
		6 Perizinan Usaha Perikanan
55	Asisten Pengelola Produksi	Kemampuan Umum:
	Perikanan Tangkap Pemula	Peraturan tentang kebijakan perikanan tangkap Kemampuan Khusus:
		1 Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumberdaya Ikan
		2 Rancang Bangun, Standardisasi, Tata Kelola Kapal Perikanan
		Perlindungan, Standardisasi dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan
		5 Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan
EC	Asiston Bonguii Barangili-t	6 Perizinan Usaha Perikanan
56	Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Terampil	Kompetensi Umum: 1 ISO 17025
	- Silveria and Containing	2 ISO 17043
		3 Perangkat Telekomunikasi
		4 Kalibrasi Alat Ukur 5 Pelayanan Publik
		6 Administrasi Umum
1		Kompetensi Khusus:
		Halaman 12 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		1 ISO 17025
		2 ISO 17043
		3 Perangkat Telekomunikasi 4 Alat Ukur
		5 Pelayanan Publik
		6 Administrasi Umum
57	Asisten Penguji Prasarana	Kemampuan Umum:
	Perkeretaapian Terampil	1 UU Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
		Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
		3 Permenpan RB No 33 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian
		Permenhub No 87 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian Dan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian Kemampuan Khusus:
		PM 60 Tahun 2012 tentang Standar Teknis Jalur Kereta Api
		2 PM 29 Tahun 2011 tentang Stasiun
		3 PM 44 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian
		4 PM 45 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian
		5 PM 50 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian
		6 Proses entri data 7 Pengecekan data persiapan alat uji
		Prengecekan data persiapan alat di Prosedur dan tata cara pengujian jalur dan bangunan perkeretaapian
		Prosedur dan tata cara pengujian fasilitas pengoperasian kereta api
58	Asisten Penguji Sarana	Kemampuan Umum:
	Perkeretaapian Terampil	Pengetahuan umum tentang Kebijakan tentang Perkeretaapian
		Pengetahuan umum terkait Dasar Perkeretaapian
		Kemampuan Khusus:
		Pengetahuan tentang Kereta Pengetahuan tentang Lokomotif
		3 Pengetahuan tentang Gerbong
		4 Pengetahuan tentang Peralatan Khusus
		5 Pengetahuan tentang Sarana Perkeretaapian
59	Asisten Penyuluh Perikanan	Kemampuan Umum:
	Terampil	1 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi 45 Tahun 2009
		2 UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
		UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan Kemampuan Khusus:
		Pengolahan data dan informasi kelembagaan sektor kelautan dan perikanan
		2 Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan sektor kelautan dan perikanan
		Materi Penyuluhan dalam berbagai media
		4 Penyusunan dan Penerapan Metoda dan Materi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
		 Kemitraan Usaha Kelautan dan Perikanan Peningkatan produktivitas dan skala usaha Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha Perikanan
60	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	Kemampuan Umum:
	7 Glotoff Fordalari Eoglotatii Fordinpii	Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia
		Manajemen ASN dan Pembentukan Undang-Undang
		Kemampuan Khusus:
		1 Kelembagaan DPR
		2 JF PL Ahli Pertama/JF APL Terampil dan Penulisan sesuai PUEBI
61	Asisten Perpustakaan Mahir	3 Instansi Pembina dan Instansi Pengguna JFPL/JFAPL Kemampuan Umum:
01	A SOCIOTE CIPUSIANA ATT MATIII	Pembudayaan Kegemaran Membaca
		Kemampuan Khusus:
		1 Pengelolaan teknis bahan perpustakaan
		2 Pelayanan dasar perpustakaan
62	Asisten Perpustakaan Terampil	Kemampuan Umum:
		Pembudayaan Kegemaran Membaca Kemampuan Khusus:
		1 Pengelolaan teknis bahan perpustakaan
		Pelayanan dasar perpustakaan
63	Asisten Pranata Siaran Terampil	Kompetensi Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
		2 Undang-Undang ASN
		3 PP 11 Tahun 2005
		4 PERMENPAN 30 5 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE
		6 Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012
		7 Peraturan Menkominfo No 02/PER/M/Kominfo/3/2008
		8 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
		9 Pedoman Pemberitaan Media Cyber 2012
		10 Kode Etik Jurnalistik
		11 P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran)
		Kompetensi Khusus:
		1 Prinsip Komunikasi 2 Komunikasi massa
		3 Dasar Jurnalistik
		4 Produk Jurnalistik
		5 Berita
•		Halaman 13 dari 62

Halaman 13 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		6 Wawancara
		7 Produksi Siaran
		8 Program Siaran 9 Profesi Siaran
		10 Animasi
		11 Desain Komunikasi Visual
		12 Tata Rias
		13 Videografi
		14 PUEBI
64	Asisten Pranata Siaran Pemula	Kompetensi Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
		Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005
		4 Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012
		5 Peraturan Menkominfo No 02/PER/M/Kominfo/3/2008
		6 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
		7 Pedoman Pemberitaan Media Cyber 2012
		8 Kode Etik Jurnalistik
		9 P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran)
		Kompetensi Khusus: 1 Jurnalistik
		2 Produk Jurnalistik
		3 Prinsip Komunikasi
		4 Komunikasi Massa
		5 Proses Produksi Siaran
		6 Program Siaran
		7 Profesi Siaran
		8 Artistik 9 Tata Rias
		10 Desain Graphis
		11 Animasi
		12 Videografi
		13 PUEBI
65	Asisten Statistisi Terampil	Kemampuan Umum:
		Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Statistik Nasional (SSN)
		Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan dasar statistik: Data, kegunaan statistik dan statistika
		Pengumpulan Data Pengumpulan Data
		3 Teknik Penyusunan Kuesioner
		4 Pengolahan Data
		5 Analisis dan Diseminasi
66	Asisten Teknisi Siaran Terampil	Kompetensi Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 2 Undang-Undang ASN
		3 PP 11 Tahun 2005
		4 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE
		Kompetensi Khusus:
		1 Audio-Video
		2 Dasar-dasar Audio Video dan Teknik Studio
		3 Dasar-dasar Kamera Video 4 Produksi Siaran
		5 Sistem Komputer
		6 Sistem Televisi
		7 Dasar Teknologi Penyiaran
		8 Teori Dasar Tata Cahaya
		9 Teori Dasar Teknik Komputer
		10 Teori Multimedia
		11 Teknik Multimedia 12 Teori Dasar Elektronika
		13 Elektronika
		14 Dasar Dasar Fotografi
		15 Dasar Dasar Listrik
		16 Teori Alat Ukur dan Teknik Pengukuran
		17 Teori Dasar Audio/Studio
67	Asisten Teknisi Siaran Pemula	Kompetensi Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
		2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Kompetensi Khusus:
		1 Listrik
		2 Elektronika
		3 Frekuensi
		4 Teori Dasar Pemancar
		5 Transmisi
		6 Teknik Komputer
		7 Teori Multimedia 8 Tata Cahaya
		9 Audio-Video
		10 Fotografi
		11 Teori Dasar Audio/Studio
		12 Dasar-dasar Kamera Video
		Halaman 14 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		13 Teknik Dasar Kamera
		14 Produksi Siaran
68	Bidan Ahli Pertama	15 Teori Alat Ukur dan Teknik Pengukuran Kompetensi Umum:
00	Bidan Anii Fertama	Pengkajian pada ibu hamil fisiologis
		Asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis
		3 Pengkajian pada ibu bersalin fisiologis
		4 Asuhan kala I persalinan fisiologis
		5 Asuhan kala II persalinan fisiologis
		6 Asuhan kala III persalinan fisiologis
		7 Asuhan kebidanan pada ibu nifas fisiologis 6 Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan ibu dan anak pada individu atau keluarga
		8 sesuai dengan kebutuhan
		9 Fasilitasi Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 10 Asuhan neonatal esensial
		11 Fasilitasi konseling kesehatan reproduksi
		12 Fasilitasi konseling pra nikah
		13 Fasilitasi konseling keluarga berencana (KB)
		14 Pembinaan keluarga balita/remaja/lansia
		15 Identifikasi kebutuhan, analisis dan perencanaan kegiatan UKM terkait pelayanan kebidanan di Puskesmas
		16 Pemantauan pelaksanaan persalinan dan pencegahan komplikasi
		17 Asuhan kala IV persalinan fisiologis
		Kompetensi Khusus: 1 Pengkajian pada ibu hamil fisiologis
		Pengkajian pada ibu namii tisiologis Penyusunan perencanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis
		3 Pemberian asuhan kebidanan kepada ibu hamil fisiologis
		Pengkajian pada ibu bersalin fisiologis
		5 Asuhan kala I persalinan fisiologis
		6 Asuhan kala II persalinan fisiologis
		7 Asuhan kala III persalinan fisiologis
		8 Asuhan kala IV persalinan fisiologis 9 Pengkajian pada ibu nifas fisiologis
		Pengkajian pada ibu nilas lisiologis Asuhan kebidanan pada ibu nifas fisiologis
		11 Persiapan pre operasi obstetri ginekologi
		Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tantang kosahatan ibu dan anak pada individu atau koluarga
		12 sesuai dengan kebutuhan
		13 Fasilitasi Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
		14 Asuhan neonatal esensial
		15 Asuhan pelayanan neonatal pada 6 jam - 48 jam paska kelahiran16 Asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 3 - hari ke 7 paska kelahiran
		17 Asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 8 - hari ke 28 paska kelahiran
		18 Fasilitasi konseling kesehatan reproduksi
		19 Fasilitasi konseling pra nikah
		20 Fasilitasi konseling keluarga berencana (KB)
		21 Pemetaan sasaran dan analisis data pada keluarga dan masyarakat
		22 Pembinaan keluarga balita/remaja/lansia
		23 Partisipasi aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa24 Pelaksanaan tugas jaga shift malam
		25 Asuhan kebidanan di kamar bedah
		26 Identifikasi kebutuhan, analisis dan perencanaan kegiatan UKM terkait pelayanan kebidanan di Puskesmas
		27 Pemantauan pelaksanaan persalinan dan pencegahan komplikasi
		28 Monitoring dan evaluasi asuhan kebidanan di tingkat Puskesmas
		29 Skrining pencegahan penularan HIV, sifilis, hepatitis B dari ibu ke anak (PPIA) di Puskesmas atau Rumah Sakit
69	Bidan Terampil	Kompetensi Umum:
		1 Informed choice
		2 Informed inform consent
		3 Pencegahan infeksi
		4 Pengendalian infeksi 5 Pemeriksaan darah pada pelayanan kebidanan
		6 Pemeriksaan laboratorium urin pada pelayanan kebidanan
		7 Nutrisi dan rehidrasi
		8 Oksigenasi dan personal hygiene
		9 Promosi tentang perilaku pola hidup sehat
		10 Edukasi tentang perilaku pola hidup sehat
		Kompetensi Khusus: 1 Pengkajian pada ibu hamil fisiologis
		Perigkajian pada ibu namii risiologis Perencanaan asuhan kebidanan kasus fisiologis sesuai kesimpulan
		3 Vitamin/suplemen
		4 Kelas ibu hamil
		5 Komunikasi informasi dan edukasi (KIE)
		6 Asuhan kala I persalinan fisiologis
		7 Asuhan kala II persalinan fisiologis
		8 Asuhan kala III persalinan fisiologis
		Q. Acuban kala IV parcalinan ficiologia
		Suhan kala IV persalinan fisiologis Pengkajian pada ibu nifas
		10 Pengkajian pada ibu nifas

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		13 Asuhan kebidanan masa nifas hari ke 29-42 pasca persalinan
		14 Asuhan kebidanan pada gangguan psikologis ringan dengan pendampingan
		15 Fasilitasi Inisiasi Menyusui Dini (IMD) pada persalinan normal
		16 Asuhan bayi baru lahir normal17 Penanganan awal kegawatdaruratan pada Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
		Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan anak pada individu/keluarga sesuai
		18 kebutuhan
		19 Pelayanan Keluarga Berencana (KB) oral dan kondom
		20 Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi perempuan dan Keluarga Berencana (KB) suntik pada individu/keluarga sesuai kebutuhan
		Promosi dan edukasi tentang perilaku nola hidup sehat untuk remaja termasuk personal hygiene dan
		nutrisi
		Pendataan sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ibu nifas/ibu
		menyusui/bayi dan balita) di wilayah kerja Puskesmas melalui kunjungan rumah
		Tabulasi sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/lbu hamil/ibu nifas/ibu menyusui/bayi dan balita)
		24 Pelaksanaan kegiatan Survey Mawas Diri (SMD) atau Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
		25 Pelayanan kebidanan di Posyandu/Posbindu/Kampung KB atau tempat lain sesuai penugasan
		26 Pemberian imuniasasi rutin sesuai program pemerintah pada anak sekolah
70	Dokter Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012 Kompetensi Khusus:
		Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 139/KEP/M.PAN/11/2003
		2 Standar Kompetensi Dokter 2012
71	Dokter Gigi Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		Pelayanan medik gigi dan mulut umum rawat jalan tingkat pertama Pelayanan medik gigi dan mulut spesialistik rawat jalan tingkat pertama
		Pelayanan medik gigi dan mulut spesialistik rawat jarah tingkat pertama Tindakan khusus medik gigi dan mulut tingkat sederhana oleh dokter gigi umum
		4 Pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut
		5 Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut
		Kompetensi Khusus:
		Pelayanan medik gigi dan mulut umum rawat jalan tingkat pertama Tindakan khusus medik gigi dan mulut tingkat sederhana oleh dokter gigi umum
		Tindakan medik gigi dan mulut spesialistik kompleks tingkat I
		4 Tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sederhana
		5 Tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat l
		6 Pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sederhana
		7 Pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat I 8 Penggalian mayat untuk pemeriksaan
		9 Dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium
		10 Pelayanan medik gigi dan mulut spesialistik rawat jalan tingkat pertama
		Kunjungan kepada pasien rawat inap Pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut
		Pengumpulan data dalam rangka pengamatan epidemiolog penyakit gigi dan mulut
		14 Catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan dan rawat inap
		15 Konsultasi dari dalam dan konsultasi dari luar atau keluar
		16 Tugas jaga panggilan, tugas jaga di tempat/ rumah sakit, dan tugas jaga di tempat sepi pasien17 Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut
		18 Pengujian kesehatan
		19 Visum et repertum
		Bekerja dalam tim serta membuat sistem jejaring kerja (networking) yang efektif dan efisien dalam usaha menuju kesehatan gigi mulut yang optimal
72	Dokter Pendidik Klinis Ahli Muda	1 Pelayan medik spesialistik
		2 Pelayanan Kedokteran Forensik
		Pelayanan kesehatan lainnya Pelayanan Tindakan Medik Spesialistik Tingkat Komplek 1
		5 Pembimbingan dan pengujian dalam menghasilkan skripsi
		6 Pendidikan dokter
		7 Pengembangan program kuliah dan bahan pengajaran
		8 Penguji pada ujian akhir
		9 Penilaian bahan ajar atau kurikulum 10 Identifikasi masalah kesehatan keluarga
		11 Informed consent
		12 Pelayanan Gizi
		13 Pelayanan kegawatdarutan
		14 Pelayanan medik spesialistik
		15 Pembinaan kegiatan mahasiswa 16 Perkuliahan dan membimbing
		17 Persalinan fisiologis sesuai Asuhan Persalinan Normal
		18 Program Imunisasi
70	Doktor Bondidik Klinia ALI Danta	19 Skrining sederhana dalam rangka Kewaspadaan Dini/Kejadian Luar Biasa/ Wabah Penyakit
73	Dokter Pendidik Klinis Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Tata cara pelayanan medik umum rawat jalan tingkat pertama
		Tata cara dan prosedur tindakan resusitasi
		3 Macam-macam pemeriksaan penunjang
		4 Tata cara pemberian informasi kepada publik terkait kasus kedokteran
		5 Tata kelola dan penanganan wabah/KLB 6 Tata cara pemberian KIE
		Tata cara pembenan KIE Kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan
		Pemberian informed consent ke pasien
		Halaman 16 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

		Kemampuan Khusus:
		 Tata kelola pelayanan medis spesialistik dengan pembimbingan dokter peserta pendidikan Satuan unit kerja pelayanan kesehatan
- 1		Langkah dan tata cara tindakan medis spesialistik dengan pembimbingan peserta pendidikan
		4 Pemeriksaan luar dengan pembimbingan peserta pendidikan
		 5 Pemeriksaan dalam dengan pembimbingan peserta pendidikan 6 Penanggulangan bencana dengan pembimbingan peserta pendidikan
		7 Diskusi kasus tanpa pasien sebagai pembimbing, fasilitator dan mentor
		8 Diskusi kasus dengan pasien sebagai pembimbing, fasilitator dan mentor
		Tata cara penyuluhan/pelatihan/penataran kesehatan kepada tenaga kesehatan dengan pembimbingan
		peserta pendidikan dokter 10 Tata cara pembimbingan dan pengujian dalam menghasilkan tesis sebagai pembimbing
		Tata cara pembimbingan dan pengujian dalam menghasilkan skripsi sebagai pembimbing utama dan
		pembimbing pendamping
	•	12 Tata cara sebagai penguji pada ujian akhir sebagai anggota
		 13 Program kuliah dan pengajaran dengan mengembangkan kurikulum sebagai anggota 14 Tugas jaga melalui panggilan dan di tempat
		15 Tata cara saksi ahli pada kasus kedokteran
74	Dokter Spesialis Ahli Muda	Kemampuan Umum:
	•	1 SKDI Tahun 2012 (Profesionalitas yang Luhur) 2 SKDI Tahun 2012 (Mawas Diri dan Pengembangan Diri)
		3 SKDI Tahun 2012 (Komunikasi Efektif)
		4 SKDI Tahun 2012 (Pengelolaan Informasi)
		5 SKDI Tahun 2012 (Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran)
		6 SKDI Tahun 2012 (Keterampilan Klinis) 7 SKDI Tahun 2012 (Pengelolaan Masalah Kesehatan)
		Kemampuan Khusus:
		1 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pelayanan Spesialistik)
		2 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Tindakan Spesialistik Komplek Tingkat 1)
		Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Tindakan Spesialistik Medis Konsultan) Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Tindakan Darurat Medis Sedang)
		5 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Visitasi Pasien)
		6 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pemulihan Mental Tingkat 1)
		7 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pemulihan Fisik Tingkat 1)
		Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pemeliharaan Kesehatan Ibu) Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pemeliharaan Kesehatan Bayi dan Balita)
		10 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pemeliharaan Kesehatan Anak)
		11 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pelayanan KB)
		12 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pelayanan Imunisasi) 13 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pelayanan Gizi)
		14 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pengolahan Data)
		15 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Penyuluhan Medis)
	•	16 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Catatan Medis)17 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pemeriksaan Kesehatan Individu)
		18 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pemenksaan Resenatan Individu)
		19 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pelayanan Visum et Repertum Komplek Tingkat 1)
		20 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Saksi Ahli)
		21 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pelayanan Otopsi) 22 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Kaderisasi Masyarakat)
75 E	Dosen Lektor Kepala	
		Etika dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Pengetahuan dasar dan wawasan terkait etika, pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian.
		r engetariouri dasar dari wawasan terkat etika, pendidikan pengajaran, pendilitan, dari pengabulan.
		Bahasa Inggris
		Kompetensi membaca teks dalam Bahasa Inggris yang meliputi: a.teks artikel ilmiah;
		b.teks argumentatif;
		c.teks pengumuman; dan
		d.teks berita.
		Penalaran dan Pemecahan Masalah
		Kemampuan dalam aspek:
		a.critical thinking: kemampuan mengidentifikasi masalah;
		b.analytical thinking: kemampuan satu informasi dengan informasi lain, mencari hubungan sebab akibat:
		c.creative thinking: kemampuan mencari alternatif solusi dari permasalahan; dan
		d.strategic thinking: kemampuan memprediksikan suatu keadaan berdasarkan data yang ada
		kemudian mampu membuat keputusan dari kemungkinan alternatif solusi yang ada.
	ŀ	Dimensi Psikologi
		Karakteristik kepribadian dalam aspek:
		a.integritas;
		4 b.keunggulan personal;
		c.keunggulan sebagai pembelajar; d.kompetensi sosial; dan
		e.penggerak perubahan.
76 E	Dosen Lektor	Etilo des Tri Dhaves Daverrusa Tir:
		Etika dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Pengetahuan dasar dan wawasan terkait etika, pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian.
		. 2g

Halaman 17 dari 62

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		Bahasa Inggris Kompetensi membaca teks dalam Bahasa Inggris yang meliputi: a.teks artikel ilmiah; b.teks argumentatif; c.teks pengumuman; dan d.teks berita.
		Penalaran dan Pemecahan Masalah Kemampuan dalam aspek: a.critical thinking: kemampuan mengidentifikasi masalah; b.analytical thinking: kemampuan satu informasi dengan informasi lain, mencari hubungan sebab akibat; c.creative thinking: kemampuan mencari alternatif solusi dari permasalahan; dan d.strategic thinking: kemampuan memprediksikan suatu keadaan berdasarkan data yang ada kemudian mampu membuat keputusan dari kemungkinan alternatif solusi yang ada.
		Dimensi Psikologi Karakteristik kepribadian dalam aspek: a.integritas; 4 b.keunggulan personal; c.keunggulan sebagai pembelajar; d.kompetensi sosial; dan e.penggerak perubahan.
77	Dosen Asisten Ahli	1 Etika dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Pengetahuan dasar dan wawasan terkait etika, pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian.
		Bahasa Inggris Kompetensi membaca teks dalam Bahasa Inggris yang meliputi: a.teks artikel ilmiah; b.teks argumentatif; c.teks pengumuman; dan d.teks berita.
		Penalaran dan Pemecahan Masalah Kemampuan dalam aspek: a.critical thinking: kemampuan mengidentifikasi masalah; b.analytical thinking: kemampuan satu informasi dengan informasi lain, mencari hubungan sebab akibat; c.creative thinking: kemampuan mencari alternatif solusi dari permasalahan; dan d.strategic thinking: kemampuan memprediksikan suatu keadaan berdasarkan data yang ada kemudian mampu membuat keputusan dari kemungkinan alternatif solusi yang ada.
		Dimensi Psikologi Karakteristik kepribadian dalam aspek: a.integritas; b.keunggulan personal; c.keunggulan sebagai pembelajar; d.kompetensi sosial; dan e.penggerak perubahan.
78	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Permenkes No. 2 Tahun 2023 (Bab VI)
		2 Permenpan No. 68 Tahun 2021 3 Standar Kompetensi Entomolog Kesehatan
		4 Metode Penulisan Karya Tulis İlmiah
		Kemampuan Khusus: Rencana kegiatan tahunan di bidang pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit
		Survei Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Investigasi/Penyelidikan Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
		Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Uji kerentanan dan uji efikasi vektor
70	Entamolog Konobetes Tarams'i	6 Pedoman dan petunjuk teknis bidang vektor dan binatang pembawa penyakit
79	Entomolog Kesehatan Terampil	Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
		2 Permenpan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
		Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan Kemampuan Khusus:
		Permenpan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan Permenkes RI No. 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesling
		Buku Identifikasi nyamuk Anopheles Buku Identifikasi nyamuk Aedes, Culex dan Mansonia
		Dedo identificasi ingantuk nedesi, Cutex dari Mansonia Pedoman Penggunaan Insektisida/Pestisida Pedoman Pengendalian Tikus
		7 Pedoman Survei Entomologi
80	Epidemiolog Kesehatan Ahli	8 Pedoman Pengendalian Tikus dan Lalat Kemampuan Umum:
	Pertama	1 Komunikasi Efektif 2 Komunikasi Interpersonal
	'	Halaman 18 dari 62

Halaman 18 dari 62

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		3 Advokasi
		4 Pengorganisasian kegiatan epidemiologi
		Kemampuan Khusus: 1 Manajerial Epidemiologi
		2 Surveilans Epidemiologi
		3 Manajemen Data Epidemiologi
		4 Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB/wabah
		5 Pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini penyakit dan masalah kesehatan 6 Kaiian Epidemiologi
		7 Kewaspadaan Dini KLB
81	Epidemiolog Kesehatan Terampil	Kemampuan Umum:
		1 PMK 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilance Kesehatan
		UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/321/2020 tentang Standar Profesi Epidemiologi Kesehatan
		Kemampuan Khusus:
		1 Langkah-Langkah Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi
		2 Investigasi Kejadian Luar Biasa/Wabah
		3 Pelaksanaan Surveilans KLB
		Monev Program Pengendalian Penyakit di Puskesmas Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB
		6 Manajemen Data
		7 Surveilans Kesehatan
82	Fisikawan Medis Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 PP No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif Peraturan Bapeten No. 4 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi pada Penggunaan Pesawat Sinar-
		Peraturan Bapeten No. 4 Tanun 2020 tentang Reselamatan Radiasi pada Penggunaan Pesawat Sinar- X dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional
		Perka Bapeten No. 17 Tahun 2012 tentang Keselamatan Radiasi dalam Kedokteran Nuklir
		4 Perka Bapeten No. 3 Tahun 2013 tentang Keselamatan Radiasi dalam Radioterapi
		5 Perka Bapeten No. 6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif
		Perka Bapeten No. 4 Tahun 2013 tentang Proteksi Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir IAEA Safety Standards Series No. General Safety Requirement Part 3
		IAEA International Basic Safety Standart for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of
		Radiation Souce No. 115
		9 Pedoman teknis penetapan dan penerapan pembatas dosis pekerja radiasi di fasilitas kesehatan
		Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor: 1211/K/V/2021 tentang Penetapan Nilai
		Tingkat Panduan Diagnostik 11 Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik
		Kemampuan Khusus:
		1 NCRP 147 Structural Shielding Design for Medical X-Ray Facilities
		2 NCRP 145 New Dental X-Ray Guidelines
		3 Perka Bapeten No. 4 Tahun 2013 tentang Proteksi Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang
		4 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Uji
		Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional International Atomic Energy Agency Technical Report Series No. 457: Dosimetry in Diagnostic
		Radiology: an International Code of Practice
		6 NCRP 151 Shielding Evaluation for Radiotheraphy Bunker
		7 SRS 47 Radiation Protection in the design of Radiotheraphy facilities
		8 IAEA Technical Report Series No. 398 Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotheraphy ICRU Report 29 Dose spesification for reporting external beam therapy in photons and electrons
		Prescribing recording reporting photon beam therapy
		10 AAPM Radiation Therapy Committee TG 4011 Acceptance Test Procedures Bracytheraphy
		12 TRS 398
		13 IAEA Tecdoc 989 Quality Assurance in Radiotheraphy
		14 Protokol QA TG 51
		Peraturan Kepala Bapeten No. 17 Tahun 2012 mengenai pelayanan keselamatan radiasi dalam bidang kedokteran nuklir
		Peraturan Bapeten No. 3 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan standar produk
		penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor ketenaganukliran 17 PP No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif
		PP No. 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat
		Radioaktif
		 19 ICRP Publications 53, 80, 106: Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals 20 IAEA: Nuclear Medicine Physics: A Handbook for Teachers and Students
		21 Stabin M. The Importance of Patient Specific Dose Calculation in Nuclear Medicine Nucl. Eng and Tech. Vol. 40, No. 7 2008
		22 International Commission on Radiation Units and Measurements Absorbed-dose specification in
		Nuclear Medicine ICRU Rep. 67 23 Peraturan Kepala Bapeten No. 16 Tahun 2012 tentang Tingkat Klierens
		24 Perka Bapeten No. 7 Tahun 2017 tentang Nilai Batas Radioaktif Lingkungan
		25 AAPM Task Group 177: Acceptance Testing and Annual Physics Survey Recommendations for Gamma Camera, SPECT, and SPECT/CT Systems
		AEA, Quality Assurance for Radioactivity Measurement in Nuclear Medicine, Technical Reports Series
83	Fisioterapis Ahli Pertama	No. 454 Kemampuan Umum:
50		Kermanipuan Onlain. Kepmenaker No. 49 Tahun 2018 tentang SKKNI Fisioterapi
		2 Permenkes 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi
	l	Permenkes 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis Halaman 19 dari 62

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		4 Kode Etik Fisioterapi Indonesia
		Kemampuan Khusus:
84	Fisioterapis Terampil	Kepmenaker No. 49 Tahun 2018 tentang SKKNI Fisioterapi Kompetensi Umum:
0.	i iolotorapio rotattipii	Prinsip komunikasi dalam pelayanan kesehatan
		2 Kode etik
		3 Hak dan kewajiban 4 Hukum kesehatan
		5 Keselamatan fisioterapis
		6 Keselamatan alat
		Kompetensi Khusus: 1 Pemeriksaan kondisi umum dan tanda-tanda vital
		Tes dan pengukuran karakteristik antropometri
		3 Tes dan pengukuran nyeri
		4 Tes dan pengukuran refleks
		5 Tes dan pengukuran lingkup gerak sendi dan panjang otot 6 Intervensi terapi latihan
		7 Intervensi electrophysical agents
		8 Intervensi mekanik
		Intervensi perbaikan jalan napas dan ventilasi Intervensi tapping dan bandaging
		11 Intervensi bantuan hidup dasar
85	Guru Ahli Pertama	Konsep suatu disiplin ilmu yang relevan
		2 Materi suatu disiplin ilmu yang relevan
		Hirarki konsep dan materi suatu disiplin ilmu Prasyarat dari suatu disiplin ilmu yang relevan
		5 Keterkaitan suatu konsep dengan konsep yang lain
		6 Konsep-konsep yang berkaitan dengan suatu disiplin
		7 Teori belajar Ausubel
		8 Teori belajar Gagne 9 Teori belajar Piaget
		10 Karakteristik murid berkebutuhan khusus
		11 Tahapan perkembangan berdasarkan usia dan karakteristik khas masing-masing tahap
		12 Teori belajar Gagne: Taksonomi Bloom dan perkembangannya 13 Profil Pelajar Indonesia
		14 Teori Belajar Gagne
		15 Learning Objective
		Individualized Education Program (IEP) dan Prinsip-prinsip differentiated learning Teori dasar komunikasi
		18 Active listening
		19 Kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar
		20 Konsep dan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan
		21 Mengembangkan motivasi siswa 22 Behavior modification & habit formation
		23 Prinsip-prinsip <i>reward</i> , <i>punishment</i> , dan <i>reinforcement</i> dalam pembentukan tingkah laku
		24 Desain pembelajaran
		25 Facilitating learning 26 Berfikir kritis
		Rerhagai teknik asesmen di tingkat kelas (classroom-hased assessment) sesuai dengan tujuan
		pembelajaran pembelajaran
		28 Konsep dan prinsip assessment as learning dan assessment for learning
		Pemanfaatan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran (feedback) Program remedial dan program pengayaan berdasarkan hasil asesmen
		31 Refleksi
		32 Procedural & declarative knowledge
		33 Working memory & long-term memory 34 Kode etik guru
		35 Interaksi guru-murid
		36 School safety
		37 Diversity
		38 Pengertian dan pengembangan potensi39 Perencanaan karir dan pengembangan potensi diri
86	Inspektur Angkutan Udara Ahli	Kompetensi Umum:
	Pertama	1 Regulasi nasional dan internasional
		2 Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan Kompetensi Khusus:
		Pengaturan teknis pengoperasian penerbangan sipil nasional (Bidang Angkutan Udara, Keamanan Penerbangan, Navigasi Penerbangan, Kelaikudaraan, Operasi Pesawat Udara dan Kebandarudaraan)
		Stakeholder penyelenggara penerbangan sipil nasional (Airlines, Airport, Airnav, Authority) Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan
		Kriteria, tugas dan wewenang Inspektur Angkutan Udara
		5 Standar pelayanan penerbangan
		6 Perizinan angkutan udara 7 Petunjuk teknis pengawasan penyelenggaraan angkutan udara
87	Inspektur Kelaikudaraan Pesawat	Retunjuk teknis pengawasan penyelenggaraan angkutan udara Kemampuan Umum:
	Udara Ahli Pertama	Regulasi Nasional dan Internasional tentang Penerbangan Sipil
		2 Tugas, tanggung jawab dan kompetensi Inspektor Kelaikudaraan
		3 Dasar Teknik 4 Dasar Audit
ı	I	Halaman 20 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		Kemampuan Khusus:
		Proses Sertifikasi Pesawat dan Persyaratan Kelaikudaraan Proses Penerbitan Sertifikat Operator Penerbangan
		3 Proses Penerbitan Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat
		4 Proses Penerbitan Sertifikat Kecakapan Personal
		5 Proses Penerbitan Sertifikat Organisasi Pelatihan 6 Proses Penerbitan Sertifikat Komponen
		7 Prosedur Audit dan Surveillance AOC
		8 Prosedur Audit dan Surveillance AMO
88	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli	Kemampuan Umum:
	Pertama	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
		Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil
		Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.19/MEN/2010 tentang
		Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
		Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang Standar Kegiatan 6 Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan
		Perikanan
		7 SNI CXC 1- 1969 Rev 5 tentang Prinsip Umum Hygiene Pangan
		Kemampuan Khusus:
		Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
		Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil
		Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
		Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
		Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang Standar Kegiatan
		5 Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
		Peraturan Kepala Badan KIPM Nomor 95 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan
		Keamanan Hasil Perikanan Peraturan Kepala Badan KIPM Nomor 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Mutu dan
		Keamanan Hasil perikanan dalam rangka Penyediaan Pangan Sehat
		Peraturan Kepala Badan KIPM Nomor 02 Tahun 2017 tentang tata cara penerbitan, pembekuan, dan
		pencabutan nomor registrasi UPI ke negara mitra Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement
		10 Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi
		11 Sistem Manajemen Mutu Lembaga Penguji
		12 Peraturan Menteri KP Nomor 21 Tahun 2019 tentang pelayanan publik lingkup KKP 13 SNI CXC 1- 1969 Rev 5 tentang Prinsip Umum Hygiene Pangan
89	Inspektur Navigasi Penerbangan	Kemampuan Umum:
	Ahli Pertama	Undang-Undang dan Peraturan yang berkaitan dengan penerbangan.
		Peraturan Menteri tentang OTAKER Kementerian Perhubungan ICAO Annex dan ICAO Documen
		Undang-Undang, Peraturan dan Regulasi yang berkaitan dengan penerbangan sipil nasional dan
		4 internasional
		Kemampuan Khusus:
		Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan ICAO Doc Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional
		Inspektur Navigasi Penerbangan
		3 Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kriteria tugas dan kewenangan Inspektur Penerbangan
		4 Peraturan Menteri perhubungan tentang Pencarian dan Pertolongan pada kecelakaan pesawat Udara
90	Instruktur Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Identifikasi Pengetahuan K3 Umum
		Identifikasi Pengetahuan K3 Umum Identifikasi Kebutuhan Pelatihan atau Pengukuran Produktivitas
		3 E-learning
		4 Pendampingan Pelatihan Kerja
		Kemampuan Khusus: 1 Identifikasi Kebutuhan Pelatihan atau Pengukuran Produktivitas
		Rencana Pelaksanaan Pelatihan
		3 Media Pembelajaran
		4 Perangkat Penilaian 5 Detter Kebutuhan Fasilitas dan Detter Peralatan
		5 Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan 6 Pelatihan Tatap Muka
		7 Pemeliharaan Peralatan Pelatihan
		8 Bimbingan Konsultansi
		9 Perangkat Evaluasi Hasil Pembelajaran 10 Evaluasi Hasil Pembelajaran
91	Konselor Adiksi Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		Regulasi nasional dan internasional tentang rehabilitasi GPN
		2 Pengetahuan adiksi narkoba 3 Pengetahuan konseling
		4 Pencatatan dan pelaporan
		Kompetensi Khusus:
		1 Skrining
		2 Penerimaan Awal 3 Asesmen
	ı	Halaman 21 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		4 Rencana Rawatan
		5 Rancangan Edukasi
		6 Edukasi
		7 Konseling Individu 8 Konseling Kelompok
		9 Intervensi Keluarga
		10 Penanganan Krisis
		11 Konferensi Kasus 12 Konsultasi dan Koordinasi
		13 Supervisi Layanan
92	Manggala Agni Terampil	Kemampuan Umum
		Wawasan regulasi terkait lingkungan hidup dan kehutanan Wawasan regulasi terkait lingkungan hidup dan kehutanan
		Wawasan regulasi terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan Wawasan umum terkait lingkungan hidup dan kehutanan
		Wawasan umum terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan
		Kemampuan Khusus
		Pendampingan pencegahan kebakaran hutan dan lahan Pemeliharaan sekat bakar, sekat kanal, embung, kantong air, atau bangunan air lainnya
		3 Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan
		4 Pengelolaan sistem peringatan dini
		5 Penatalaksanaan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan
		6 Pengecekan lapangan informasi kebakaran hutan dan lahan (groundcheck hotspot) 7 Penatalaksanaan pemadaman darat
		8 Dukungan pemadaman udara
		9 Evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran hutan dan lahan
		10 Inventarisasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan 11 Inovasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan
93	Manggala Agni Pemula	Kemampuan Umum
	00 0	Wawasan regulasi terkait peraturan perundangan lingkungan hidup dan kehutanan
		Wawasan regulasi terkait peraturan perundangan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Wawasan regulasi terkait peraturan perundangan lahatan Fiyagalah Managala Agai
		Wawasan regulasi terkait peraturan perundangan Jabatan Fungsional Manggala Agni Wawasan umum terkait lingkungan hidup dan kehutanan
		5 Wawasan umum terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan
		6 Wawasan umum terkait Jabatan Fungsional Manggala Agni
		Kemampuan Khusus
		Identifikasi data dan informasi untuk kebutuhan pemberdayaan masyarakat Pendampingan pencegahan kebakaran hutan dan lahan
		3 Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan
		4 Pemeliharaan sekat bakar, sekat kanal, embung, kantong air, atau bangunan air lainnya
		5 Penatalaksanaan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan 6 Data dan informasi kebakaran hutan dan lahan serta pemantauan titik panas (hotspot)
		7 Penatalaksanaan pemadaman darat
		8 Evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran hutan dan lahan
		9 Detasering/penjagaan terhadap areal pascakebakaran hutan dan lahan 10 Inovasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan
94	Medik Veteriner Ahli Pertama	Kompetensi Khusus:
		Peraturan, Perundang-Undangan bidang Peternakan dan Pengertian umum di bidang Keswan,
		Kesmavet, dan Kesrawan
		Prosedur Tatacara Penanganan, Pemeliharaan dan Pemeriksaan bidang Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan
		3 Tatacara Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
0.5	Materia e Abil D	4 Identifikasi Status Reproduksi dan Penanganan Reproduksi dan Kebidanan pada Hewan
95	Metrolog Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 UU No. 20 Tahun 2014
		2 UU No. 2 Tahun 1981
		3 UU No. 33 Tahun 2014
		4 PP No. 34 Tahun 2018 5 Permenpan RB No. 43 Tahun 2020
		6 Pedoman KAN terkait kalibrasi peralatan (kan.or.id)
		7 Pedoman SNSU terkait kalibrasi peralatan (kan.or.id)
		8 Kursus pengantar metrologi (elearning.bsn.go.id)
		8 Kursus pengantar metrologi (elearning.bsn.go.id) 9 Website BSN (bsn.go.id)
		8 Kursus pengantar metrologi (elearning.bsn.go.id)
		8 Kursus pengantar metrologi (elearning.bsn.go.id) 9 Website BSN (bsn.go.id) 10 Website Layanan Kalibrasi dan Penyelenggara Uji Profisiensi BSN (www.sparta.bsn.go.id) 11 OIML R 111 (www.oiml.org) 12 www.bipm.org/kcdb/
		8 Kursus pengantar metrologi (elearning.bsn.go.id) 9 Website BSN (bsn.go.id) 10 Website Layanan Kalibrasi dan Penyelenggara Uji Profisiensi BSN (www.sparta.bsn.go.id) 11 OIML R 111 (www.oiml.org) 12 www.bipm.org/kcdb/ 13 www.apmpweb.org
		8 Kursus pengantar metrologi (elearning.bsn.go.id) 9 Website BSN (bsn.go.id) 10 Website Layanan Kalibrasi dan Penyelenggara Uji Profisiensi BSN (www.sparta.bsn.go.id) 11 OIML R 111 (www.oiml.org) 12 www.bipm.org/kcdb/
		8 Kursus pengantar metrologi (elearning.bsn.go.id) 9 Website BSN (bsn.go.id) 10 Website Layanan Kalibrasi dan Penyelenggara Uji Profisiensi BSN (www.sparta.bsn.go.id) 11 OlML R 111 (www.oiml.org) 12 www.bipm.org/kcdb/ 13 www.apmpweb.org 14 http://www.apmpweb.org/documents/file/mou.pdf Kemampuan Khusus: 1 SNI ISO/IEC 17025:2017
		8 Kursus pengantar metrologi (elearning.bsn.go.id) 9 Website BSN (bsn.go.id) 10 Website Layanan Kalibrasi dan Penyelenggara Uji Profisiensi BSN (www.sparta.bsn.go.id) 11 OlML R 111 (www.oiml.org) 12 www.bipm.org/kcdb/ 13 www.apmpweb.org 14 http://www.apmpweb.org/documents/file/mou.pdf Kemampuan Khusus: 1 SNI ISO/IEC 17025:2017 2 SNI ISO 17043:2010
		8 Kursus pengantar metrologi (elearning.bsn.go.id) 9 Website BSN (bsn.go.id) 10 Website Layanan Kalibrasi dan Penyelenggara Uji Profisiensi BSN (www.sparta.bsn.go.id) 11 OIML R 111 (www.oiml.org) 12 www.bipm.org/kcdb/ 13 www.apmpweb.org 14 http://www.apmpweb.org/documents/file/mou.pdf Kemampuan Khusus: 1 SNI ISO/IEC 17025:2017 2 SNI ISO 17043:2010 3 SNI ISO 17034:2016
		8 Kursus pengantar metrologi (elearning.bsn.go.id) 9 Website BSN (bsn.go.id) 10 Website Layanan Kalibrasi dan Penyelenggara Uji Profisiensi BSN (www.sparta.bsn.go.id) 11 OlML R 111 (www.oiml.org) 12 www.bipm.org/kcdb/ 13 www.apmpweb.org 14 http://www.apmpweb.org/documents/file/mou.pdf Kemampuan Khusus: 1 SNI ISO/IEC 17025:2017 2 SNI ISO 17043:2010
		8 Kursus pengantar metrologi (elearning.bsn.go.id) 9 Website BSN (bsn.go.id) 10 Website Layanan Kalibrasi dan Penyelenggara Uji Profisiensi BSN (www.sparta.bsn.go.id) 11 OlML R 111 (www.oiml.org) 12 www.bipm.org/kcdb/ 13 www.apmpweb.org 14 http://www.apmpweb.org/documents/file/mou.pdf Kemampuan Khusus: 1 SNI ISO/IEC 17025:2017 2 SNI ISO 17043:2010 3 SNI ISO 17043:2016 4 SNI ISO 35001:2019 5 SNI ISO 20224-3:2020 6 ISO 1
		8 Kursus pengantar metrologi (elearning.bsn.go.id) 9 Website BSN (bsn.go.id) 10 Website Layanan Kalibrasi dan Penyelenggara Uji Profisiensi BSN (www.sparta.bsn.go.id) 11 OlML R 111 (www.oiml.org) 12 www.bipm.org/kcdb/ 13 www.apmpweb.org 14 http://www.apmpweb.org/documents/file/mou.pdf Kemampuan Khusus: 1 SNI ISO/IEC 17025:2017 2 SNI ISO 17043:2010 3 SNI ISO 17043:2016 4 SNI ISO 35001:2019 5 SNI ISO 20224-3:2020 6 ISO 1 7 SNI ISO 9001
		8 Kursus pengantar metrologi (elearning.bsn.go.id) 9 Website BSN (bsn.go.id) 10 Website Layanan Kalibrasi dan Penyelenggara Uji Profisiensi BSN (www.sparta.bsn.go.id) 11 OlML R 111 (www.oiml.org) 12 www.bipm.org/kcdb/ 13 www.apmpweb.org 14 http://www.apmpweb.org/documents/file/mou.pdf Kemampuan Khusus: 1 SNI ISO/IEC 17025:2017 2 SNI ISO 17043:2010 3 SNI ISO 17043:2016 4 SNI ISO 35001:2019 5 SNI ISO 20224-3:2020 6 ISO 1
		8 Kursus pengantar metrologi (elearning.bsn.go.id) 9 Website BSN (bsn.go.id) 10 Website Layanan Kalibrasi dan Penyelenggara Uji Profisiensi BSN (www.sparta.bsn.go.id) 11 OlML R 111 (www.oiml.org) 12 www.bipm.org/kcdb/ 13 www.apmpweb.org 14 http://www.apmpweb.org/documents/file/mou.pdf Kemampuan Khusus: 1 SNI ISO/IEC 17025:2017 2 SNI ISO 17043:2010 3 SNI ISO 17034:2016 4 SNI ISO 35001:2019 5 SNI ISO 20224-3:2020 6 ISO 1 7 SNI ISO 9001 8 ISO Guide 35:2017 9 ISO GUM 10 Dasar-dasar Statistika
		8 Kursus pengantar metrologi (elearning.bsn.go.id) 9 Website BSN (bsn.go.id) 10 Website Layanan Kalibrasi dan Penyelenggara Uji Profisiensi BSN (www.sparta.bsn.go.id) 11 OlML R 111 (www.oiml.org) 12 www.bipm.org/kcdb/ 13 www.apmpweb.org 14 http://www.apmpweb.org/documents/file/mou.pdf Kemampuan Khusus: 1 SNI ISO/IEC 17025:2017 2 SNI ISO 17043:2010 3 SNI ISO 17034:2016 4 SNI ISO 35001:2019 5 SNI ISO 20224-3:2020 6 ISO 1 7 SNI ISO 9001 8 ISO Guide 35:2017 9 ISO GUM

Halaman 22 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		13 Buku Spesifikasi, Metrologi, dan Kontrol Kualitas Geometrik Jilid 1
		14 Buku Konsep Dasar Akustik untuk Pengendalian Kebisingan15 Buku Metrology In Short
		16 Ketidakpastian Pengukuran
		17 Buku Fisika Dasar
		18 Buku Kimia Dasar
		19 Buku Kimia Organik
		20 Dasar-dasar Pengukuran Besaran Listrik
		Buku Pengantar Metrologi Kelistrikan Panduan kalibrasi micrometer
		23 Panduan Alat Pengukur Getaran (Vibration Meter)
		24 Pemahaman analisis Polymerase Chain Reaction (PCR)
		25 Karaterisasi Deoxyribonucleicacid DNA
		26 Pemahaman DNA plasmid
		27 Pemahaman proses kloning 28 Karakterisasi Mikroba pada Pangan
		29 Calibration and Measurement Capabilities in the context of CIPM MRA
		30 International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) Recommendation 2002
		31 Panduan KAN (Guide on the Evaluation and Expression) - kan.or.id
		32 Panduan KAN (Guide on Measurement Assurance) - kan.or.id
		33 Handbook of Humidity Measurement: Methods, Materials and Technologies The National Institute of Standards and Technology (NIST) Frequency Measurement and Analysis
		34 System (FMAS)
		35 Traceable Temperature Textbook, John Wiley & Son
		36 Diagnostic Methods I: Sensitivity, specificity, and other measures of accuracy (Stralen et al., 2009)
		37 Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM 100:2008)
		38 Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA 4/02:M-2013)
		39 International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms (VIM) 3rd edition
		 40 Calibration philosophy in practice 2nd edition 41 Application Note 6 ERM. Use of ERM certificates and materials
		41 Application Note 6 ERM. Use of ERM certificates and materials 42 Guidelines for the Selection and Use of Reference Materials ILAC-G9:2005
		43 Eurachem Guide, "Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement", 2012
		44 Eurachem - Selection, Use and Interpretation of Proficiency Testing (PT) Schemes
		45 Guide to Quality in Analytical Chemistry Citac/Eurachem Guide
96	Negosiator Perdagangan Ahli	Kompetensi Umum:
	Pertama	Pengetahuan, Norma, dan Regulasi Umum Perundingan Perdagangan Internasional Pengetahuan Umum Kerja Sama Perdagangan Internasional
		3 Pengetahuan Umum Akses Pasar, Perlindungan, dan Pengamanan Perdagangan
		4 Pengetahuan Umum Mekanisme dan Tata Cara Perundingan Kompetensi Khusus:
		Pengetahuan seputar data dan informasi terkait negara mitra dan organisasi internasional lainnya
		Pengetahuan umum terkait isu-isu dalam kerjasama perdagangan internasional
		Pengetahuan umum terkait isu-isu dalam perundingan perdagangan internasional. 3 Isu-isu tradisional: NTMS; TiS; dll
		Isu-isu baru: Environment; Labour; Gender; Culture, dll
		4 Pengetahuan umum tentang Perundingan Bilateral
		5 Pengetahuan umum tentang Perundingan Regional 6 Pengetahuan umum tentang Perundingan Multilateral
		Posisi dasar atau kepentingan penyelenggaraan perdagangan luar negeri Indonesia terkait substansi
		atau kawasan atau negara
		8 Harmonisasi substansi perdagangan luar negeri Indonesia pada substansi atau kawasan atau negara
		 9 Strategi kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia pada substansi atau kawasan atau negara 10 Penyelesaian Sengketa Dagang (Dispute Settlement Understanding)
		11 Instrumen Safeguard
		12 Instrumen Dumping
<u> </u>	Nickelainain ALP D	13 Instrumen Subsidy/Countervailing Measure
97	Nutrisionis Ahli Pertama	Kompetensi Umum: Keputusan Menkes RI No. HK.01.07/Menkes/1910/2022 tentang Standar Profesi Dietisien dan
		Permenkes No. 26 Tanun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi
		Asuhan gizi klinik (clinical nutrition) Kebijakan kesehatan spesifik yang merupakan prioritas daerah masing-masing di Indonesia
		Kompetensi Khusus:
		Pengelolaan masalah gizi Pemantauan/surveilans gizi
		Pemberdayaan dan kolaborasi dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat gizi dan
		kesehatan
		4 Asuhan gizi individu, kelompok dan masyarakat
		5 Pengelolaan sistem penyelenggaraan makanan (food service) 6 Pengelolaan sumber daya lokal, bisnis gizi (nutripreneurship)
98	Nutrisionis Terampil	Kompetensi Umum:
55		Penyusunan rencana tahunan, triwulanan, bulanan, harian
		2 Penyusunan juklak/juknis
		3 Penyusunan standar gizi, makanan dan dietetik
		Kompetensi Khusus:
		1 Penyusunan pedoman gizi, makanan, dietetik Pengumpulan data anak balita, bumil dan buteki untuk pemberian makanan tambahan penyuluhan dan
		Pengumpulan data anak balita, bumii dan buteki untuk pemberian makanan tambanan penyulunan dan pemulihan pada anak balita dengan status gizi kurang
		Pengumpulan data makanan kelompok sasaran setempat untuk penilaian mutu gizi
	•	Halaman 23 dari 62

Halaman 23 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

99 Ok	kupasi Terapis Terampil	4 Pemeriksaan dan penerimaan bahan, materi, pangan, peralatan, dan sarana kegiatan pelayanan gizi 5 Penyimpanan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana kegiatan pelayanan gizi 6 Pencatatan dan pelaporan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana dalam harian/mingguan di ruang simpan 7 Penyaluran bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana harian/mingguan sesuai unit/wilayah kerja 8 Pemeriksaan ruang simpan harian 9 Pengukuran TB, BB, umur di unit atau wilayah kerja 10 Pengukuran IMT pada orang dewasa di unit/wilayah kerja sesuai kebutuhan 12 Asesmen riwayat makan dan gizi pada kilen 13 Pencatatan hasil pengukuran antropometri 14 Penyediaan makanan tambahan balita atau penyuluhan gizi 15 Penyediaan makanan tambahan balita atau penyuluhan gizi 16 Penyediaan kapsul Vit A 17 Penyediaan kapsul yodium 18 Penyediaan preparat besi 19 Pencatatan harian penyediaan makanan biasa dan makanan diet sederhana Pemantauan kegiatan pengukuran BB, TB, umur ditingkat desa, sasaran SKDN, status gizi bulanan (posyandu) 21 Pemantauan kegiatan PMT, balita/anak sekolah/bumil sasaran SKDN, status gizi, macam/jumalh PMT 22 Pemantauan pelayanan penyelenggaraan diet di rumah sakit atau di institusi lain secara harian 23 Pemantauan penggunaan bahan makanan secara harian dan 10 harian Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 2 PMK No. 76 tentang Standar Layanan Terapi Okupasi 3 SK IOTI No. 134/Skep/IOTI.PUSAT/V/2021 tentang Perubahan Kode Etik Okupasi Terapis
99 Ok	kupasi Terapis Terampil	Pencatatan dan pelaporan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana dalam harian/mingguan di ruang simpan Penyaluran bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana harian/mingguan sesuai unit/wilayah kerja Pemeriksaan ruang simpan harian Pengukuran TB, BB, umur di unit atau wilayah kerja Pengukuran LILA di unit wilayah kerja Pengukuran IMT pada orang dewasa di unit/wilayah kerja sesuai kebutuhan Asesmen riwayat makan dan gizi pada klien Pencatatan hasil pengukuran antropometri Penyediaan makanan tambahan balita atau penyuluhan gizi Penyediaan makanan biasa Penyediaan kapsul Vit A Penyediaan kapsul Vit A Penyediaan preparat besi Pencatatan harian penyediaan makanan biasa dan makanan diet sederhana Pemantauan kegiatan pengukuran BB, TB, umur ditingkat desa, sasaran SKDN, status gizi bulanan (posyandu) Pemantauan kegiatan PMT, balita/anak sekolah/bumil sasaran SKDN, status gizi, macam/jumalh PMT Pemantauan penggunaan penyelenggaraan diet di rumah sakit atau di institusi lain secara harian Pemantauan penggunaan bahan makanan secara harian dan 10 harian Kemampuan Umum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN PMK No. 76 tentang Standar Layanan Terapi Okupasi
99 Ok	kupasi Terapis Terampil	7 Penyaluran bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana harian/mingguan sesuai unit/wilayah kerja 8 Pemeriksaan ruang simpan harian 9 Pengukuran TB, BB, umur di unit atau wilayah kerja 10 Pengukuran LILA di unit wilayah kerja 11 Pengukuran IMT pada orang dewasa di unit/wilayah kerja sesuai kebutuhan 12 Asesmen riwayat makan dan gizi pada klien 13 Pencatatan hasil pengukuran antropometri 14 Penyediaan makanan tambahan balita atau penyuluhan gizi 15 Penyediaan makanan biasa 16 Penyediaan kapsul Vit A 17 Penyediaan kapsul Vit A 17 Penyediaan preparat besi 19 Pencatatan harian penyediaan makanan biasa dan makanan diet sederhana Pemantauan kegiatan pengukuran BB, TB, umur ditingkat desa, sasaran SKDN, status gizi bulanan (posyandu) 21 Pemantauan kegiatan PMT, balita/anak sekolah/bumil sasaran SKDN, status gizi, macam/jumalh PMT 22 Pemantauan pelayanan penyelenggaraan diet di rumah sakit atau di institusi lain secara harian 29 Pemantauan penggunaan bahan makanan secara harian dan 10 harian Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 2 PMK No. 76 tentang Standar Layanan Terapi Okupasi
99 Ok	kupasi Terapis Terampil	8 Pemeriksaan ruang simpan harian 9 Pengukuran TB, BB, umur di unit atau wilayah kerja 10 Pengukuran LILA di unit wilayah kerja 11 Pengukuran IMT pada orang dewasa di unit/wilayah kerja sesuai kebutuhan 12 Asesmen riwayat makan dan gizi pada klien 13 Pencatatan hasil pengukuran antropometri 14 Penyediaan makanan tambahan balita atau penyuluhan gizi 15 Penyediaan makanan biasa 16 Penyediaan kapsul Vit A 17 Penyediaan kapsul Vit A 17 Penyediaan preparat besi 19 Pencatatan harian penyediaan makanan biasa dan makanan diet sederhana Pemantauan kegiatan pengukuran BB, TB, umur ditingkat desa, sasaran SKDN, status gizi bulanan (posyandu) 21 Pemantauan kegiatan PMT, balita/anak sekolah/bumil sasaran SKDN, status gizi, macam/jumalh PMT 22 Pemantauan pengunaan penyelenggaraan diet di rumah sakit atau di institusi lain secara harian 23 Pemantauan penggunaan bahan makanan secara harian dan 10 harian Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 2 PMK No. 76 tentang Standar Layanan Terapi Okupasi
99 Ok	kupasi Terapis Terampil	9 Pengukuran TB, BB, umur di unit atau wilayah kerja 10 Pengukuran LILA di unit wilayah kerja 11 Pengukuran IMT pada orang dewasa di unit/wilayah kerja sesuai kebutuhan 12 Asesmen riwayat makan dan gizi pada klien 13 Pencatatan hasil pengukuran antropometri 14 Penyediaan makanan tambahan balita atau penyuluhan gizi 15 Penyediaan makanan biasa 16 Penyediaan kapsul Vit A 17 Penyediaan kapsul yodium 18 Penyediaan preparat besi 19 Pencatatan harian penyediaan makanan biasa dan makanan diet sederhana Pemantauan kegiatan pengukuran BB, TB, umur ditingkat desa, sasaran SKDN, status gizi bulanan (posyandu) 21 Pemantauan kegiatan PMT, balita/anak sekolah/bumil sasaran SKDN, status gizi, macam/jumalh PMT 22 Pemantauan pelayanan penyelenggaraan diet di rumah sakit atau di institusi lain secara harian 23 Pemantauan penggunaan bahan makanan secara harian dan 10 harian Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 2 PMK No. 76 tentang Standar Layanan Terapi Okupasi
99 Ok	kupasi Terapis Terampil	10 Pengukuran LILA di unit wilayah kerja 11 Pengukuran IMT pada orang dewasa di unit/wilayah kerja sesuai kebutuhan 12 Asesmen riwayat makan dan gizi pada klien 13 Pencatatan hasil pengukuran antropometri 14 Penyediaan makanan tambahan balita atau penyuluhan gizi 15 Penyediaan makanan biasa 16 Penyediaan kapsul Vit A 17 Penyediaan kapsul Vit A 18 Penyediaan preparat besi 19 Pencatatan harian penyediaan makanan biasa dan makanan diet sederhana Pemantauan kegiatan pengukuran BB, TB, umur ditingkat desa, sasaran SKDN, status gizi bulanan (posyandu) 21 Pemantauan kegiatan PMT, balita/anak sekolah/bumil sasaran SKDN, status gizi, macam/jumalh PMT 22 Pemantauan pengunaan penyelenggaraan diet di rumah sakit atau di institusi lain secara harian 23 Pemantauan penggunaan bahan makanan secara harian dan 10 harian Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 2 PMK No. 76 tentang Standar Layanan Terapi Okupasi
99 Ok	kupasi Terapis Terampil	12 Asesmen riwayat makan dan gizi pada klien 13 Pencatatan hasil pengukuran antropometri 14 Penyediaan makanan tambahan balita atau penyuluhan gizi 15 Penyediaan makanan biasa 16 Penyediaan kapsul Vit A 17 Penyediaan kapsul yodium 18 Penyediaan preparat besi 19 Pencatatan harian penyediaan makanan biasa dan makanan diet sederhana 20 Pemantauan kegiatan pengukuran BB, TB, umur ditingkat desa, sasaran SKDN, status gizi bulanan (posyandu) 21 Pemantauan kegiatan PMT, balita/anak sekolah/bumil sasaran SKDN, status gizi, macam/jumalh PMT 22 Pemantauan pelayanan penyelenggaraan diet di rumah sakit atau di institusi lain secara harian 23 Pemantauan penggunaan bahan makanan secara harian dan 10 harian Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 2 PMK No. 76 tentang Standar Layanan Terapi Okupasi
99 Ok	kupasi Terapis Terampil	13 Pencatatan hasil pengukuran antropometri 14 Penyediaan makanan tambahan balita atau penyuluhan gizi 15 Penyediaan makanan biasa 16 Penyediaan kapsul Vit A 17 Penyediaan kapsul yodium 18 Penyediaan preparat besi 19 Pencatatan harian penyediaan makanan biasa dan makanan diet sederhana Pemantauan kegiatan pengukuran BB, TB, umur ditingkat desa, sasaran SKDN, status gizi bulanan (posyandu) 21 Pemantauan kegiatan PMT, balita/anak sekolah/bumil sasaran SKDN, status gizi, macam/jumalh PMT 22 Pemantauan pelayanan penyelenggaraan diet di rumah sakit atau di institusi lain secara harian 23 Pemantauan penggunaan bahan makanan secara harian dan 10 harian Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 2 PMK No. 76 tentang Standar Layanan Terapi Okupasi
99 Ok	kupasi Terapis Terampil	15 Penyediaan makanan biasa 16 Penyediaan kapsul Vit A 17 Penyediaan kapsul yodium 18 Penyediaan preparat besi 19 Pencatatan harian penyediaan makanan biasa dan makanan diet sederhana 20 Pemantauan kegiatan pengukuran BB, TB, umur ditingkat desa, sasaran SKDN, status gizi bulanan (posyandu) 21 Pemantauan kegiatan PMT, balita/anak sekolah/bumil sasaran SKDN, status gizi, macam/jumalh PMT 22 Pemantauan pelayanan penyelenggaraan diet di rumah sakit atau di institusi lain secara harian 23 Pemantauan penggunaan bahan makanan secara harian dan 10 harian Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 2 PMK No. 76 tentang Standar Layanan Terapi Okupasi
99 Ok	kupasi Terapis Terampil	16 Penyediaan kapsul Vit A 17 Penyediaan kapsul yodium 18 Penyediaan preparat besi 19 Pencatatan harian penyediaan makanan biasa dan makanan diet sederhana 20 Pemantauan kegiatan pengukuran BB, TB, umur ditingkat desa, sasaran SKDN, status gizi bulanan (posyandu) 21 Pemantauan kegiatan PMT, balita/anak sekolah/bumil sasaran SKDN, status gizi, macam/jumalh PMT 22 Pemantauan pelayanan penyelenggaraan diet di rumah sakit atau di institusi lain secara harian 23 Pemantauan penggunaan bahan makanan secara harian dan 10 harian Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 2 PMK No. 76 tentang Standar Layanan Terapi Okupasi
99 Ok	kupasi Terapis Terampil	18 Penyediaan preparat besi 19 Pencatatan harian penyediaan makanan biasa dan makanan diet sederhana 20 Pemantauan kegiatan pengukuran BB, TB, umur ditingkat desa, sasaran SKDN, status gizi bulanan (posyandu) 21 Pemantauan kegiatan PMT, balita/anak sekolah/bumil sasaran SKDN, status gizi, macam/jumalh PMT 22 Pemantauan pelayanan penyelenggaraan diet di rumah sakit atau di institusi lain secara harian 23 Pemantauan penggunaan bahan makanan secara harian dan 10 harian Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 2 PMK No. 76 tentang Standar Layanan Terapi Okupasi
99 Ok	kupasi Terapis Terampil	20 Pemantauan kegiatan pengukuran BB, TB, umur ditingkat desa, sasaran SKDN, status gizi bulanan (posyandu) 21 Pemantauan kegiatan PMT, balita/anak sekolah/bumil sasaran SKDN, status gizi, macam/jumalh PMT 22 Pemantauan pelayanan penyelenggaraan diet di rumah sakit atau di institusi lain secara harian 23 Pemantauan penggunaan bahan makanan secara harian dan 10 harian Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 2 PMK No. 76 tentang Standar Layanan Terapi Okupasi
99 Ok	kupasi Terapis Terampil	20 (posyandu) 21 Pemantauan kegiatan PMT, balita/anak sekolah/bumil sasaran SKDN, status gizi, macam/jumalh PMT 22 Pemantauan pelayanan penyelenggaraan diet di rumah sakit atau di institusi lain secara harian 23 Pemantauan penggunaan bahan makanan secara harian dan 10 harian Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 2 PMK No. 76 tentang Standar Layanan Terapi Okupasi
99 Ok	kupasi Terapis Terampil	Pemantauan pelayanan penyelenggaraan diet di rumah sakit atau di institusi lain secara harian Pemantauan penggunaan bahan makanan secara harian dan 10 harian Kemampuan Umum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN PMK No. 76 tentang Standar Layanan Terapi Okupasi
99 Ok	kupasi Terapis Terampil	Pemantauan penggunaan bahan makanan secara harian dan 10 harian Kemampuan Umum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN PMK No. 76 tentang Standar Layanan Terapi Okupasi
99 Ok	kupasi Terapis Terampil	Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 2 PMK No. 76 tentang Standar Layanan Terapi Okupasi
		2 PMK No. 76 tentang Standar Layanan Terapi Okupasi
		Kemampuan Khusus:
		1 Screening
		Pemeriksaan ADLs Pemeriksaan kesadaran sensori
		4 Pemeriksaan taktil
		5 Pemeriksaan proprioseptif 6 Pemeriksaan Vestibular
		7 Pemeriksaan Visual
		8 Pemeriksaan pendengaran 9 Pemeriksaan pengecapan
		10 Pemeriksaan stereognosis
		11 Pemeriksaan kinesthesia12 Pemeriksaan respon nyeri
		13 Pemeriksaan skema tubuh
		14 Pemeriksaan diskriminasi sisi kanan-kiri15 Pemeriksaan konstansi bentuk
		16 Pemeriksaan posisi dalam ruang 17 Pemeriksaan Visual-Closure
		18 Pemeriksaan persepsi latar depan dan belakang
		Pemeriksaan persepsi kedalaman/jarak Pemeriksaan hubungan spasial
		21 Pemeriksaan orientasi topografi
		Pemeriksaan biomekanik penunjang okupasional Pemeriksaan neuromuscular penunjang okupasional
		24 Pemeriksaan koordinasi motorik kasar penunjang okupasional
		Pemeriksaan menyilang garis tengah tubuh penunjang okupasional Pemeriksaan lateralitas penunjang okupasional
		27 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional
		Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional Pemeriksaan praksis
		30 Pemeriksaan koordinasi gerak halus/dexteritas
		31 Pemeriksaan integrasi visual motor 32 Pemeriksaan orientasi
		33 Pemeriksaan recognisi
		34 Pemeriksaan rentang atensi 35 Pemeriksaan memori
		36 Pemeriksaan sekuentis
		37 Pemeriksaan kategorisasi38 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik
		39 Pemeriksaan konsep diri
		40 Pemeriksaan kinerja peran41 Pemeriksaan partisipasi sosial
		42 Pemeriksaan keterampilan interpersonal
		 43 Identifikasi potensi dan limitasi/restriksi komponen kinerja okupasional 44 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi
		45 Prognosis fungsional
		 45 Prognosis fungsional 46 Terapi berbasis komponen kinerja okupasional 47 Area kinerja okupasional
		46 Terapi berbasis komponen kinerja okupasional

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		51 Penanganan okupasi terapi pada kondisi gangguan biomekanik penunjang okupasional
		52 Penanganan okupasi terapi pada kondisi gangguan neuromuskular penunjang okupasional
		53 Penanganan okupasi terapi pada kondisi gangguan integrasi kognitif penunjang okupasional
		54 Penanganan okupasi terapi pada kondisi psikososial penunjang okupasional
		55 Penerapan teknologi dan alat bantu fungsional
		56 Dokumentasi proses okupasi terapi
100	Operator Sistem Informasi	Pengetahuan Umum:
	Administrasi Kependudukan	Materi umum terkait Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat, Dasar Negara, dan Undang-Undang
	Terampil	' Dasar
		2 Materi tentang Pemerintahan Pusat-Daerah, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersifat
		² Umum
		3 Materi tentang Pengetahuan Komputer yang bersifat umum
		Pengetahuan Khusus:
		Materi khusus terkait Administrasi Kependudukan yang bersifat khusus
		2 Materi tentang Pencatatan Sipil yang bersifat khusus
		2. Materi tentora Dangatahuan Takaia Ciatam Informasi Administrasi Kanandudukan dan Onsustar CIAK
		3 Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Operator SIAK
101	Ortotis Prostetis Terampil	Kemampuan Umum:
	·	1 Terminologi dasar anotomi
		Pengetahuan osteologi, myologi dan arthrologi pada lower limb dan upper limb
		3 Kontraksi otot skeletal
		Kasus patologi congenital yang umumnya membutuhkan intervensi O/P
		Kasus patologi acquired yang umumnya membutuhkan intervensi O/P Kasus patologi acquired yang umumnya membutuhkan intervensi O/P
		6 Intervensi O/P pada kasus patologi
		7 Prinsip dasar biomekanik
		8 Biomekanik komprehensif dari normal gait
		9 Biomekanik komprehensif dari pathological gait
		10 Bahan, handtools, heavy/big machinery yang umum dipakai di keilmuan ortotik prostetik
		11 Kode Etik Profesi Ortotis Prostetis Tahun 2022
		12 Permenkes 22 Tahun 2013 tentang Standar Pekerjaan dan Praktik Ortotis Prostetis
		13 Permenkes 27 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Ortotis Prostetis
		14 Pengelolaan Bahan Mentah Habis Pakai (BMHP)
		15 Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja
		Kemampuan Khusus:
		1 Amputasi pada lower limb prostesis
		2 Komponen pada lower limb prosthesis
		3 Preskripsi pada lower limb prosthesis
		4 Produksi Partial Foot Prostesis
		5 Produksi Transtibial dan Ankle Disarticulation Prostesis
		6 Produksi Transfemoral dan Knee Disarticulation
		7 Amputasi Upper Limb
		8 Design dan komponen/material pada upper limb prosthesis
		9 Preskripsi pada upper limb prosthesis
		Produksi prosthesis pada level amputasi wrist disarticulation, transradial, elbow disarticulation,
		transhumeral
		11 Kondisi patologi yang membutuhkan FO, AFO, KO, KAFO, HO, dan HKAFO
		12 Komponen dan material pada upper limb ortosis
		13 Desain dan variasi pada upper limb orthosis
		14 Preskripsi pada upper limb orthosis
		15 Proses fabrikasi upper limb orthosis
		16 Patologi pada Spinal
		17 Desain Spinal Othosis
		18 Preskripsi Spinal Orthosis
		19 Produksi Spinal Orthosis
102	Pamong Belajar Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
102	i among belajai Alili Ferlania	Kernampuan omum. Karakteristik, kebutuhan perkembangan peserta didik
		Teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran pedagogi dan andragogi
		Teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran pedagogi dan andragogi Program kegiatan pembelajaran
		4 Strategi kegiatan pembelajaran
		5 Peningkatan kualitas pembelajaran melalui tindakan reflektif
		Kemampuan Khusus:
		1 Kebutuhan belajar, sumber belajar, potensi, dan permasalahan peserta didik
		2 Konsep keilmuan yang relevan untuk kegiatan pembelajaran, pengkajian dan pengembangan model
		3 Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
		4 Kegiatan pembelajaran, pengkajian program dan pengembangan model
		5 Konsep prinsip-prinsip, metode dan teknik penelitian
400	D D L AUE	6 Pengetahuan dan keterampilan fungsional
103	Pamong Budaya Ahli Pertama	Kisi-kisi Utama:
		Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2020
		tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya
		Kisi-kisi Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
		2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
		3 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film
		5 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum
		Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor
		6 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Halaman 25 dari 62

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
		8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda
		Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan
		Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran
		Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya
		Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, RIset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum
104	Damana Dudaya Taramail	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya
104	Pamong Budaya Terampil	Kisi-kisi Utama: Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya
		Kisi-kisi Umum:
		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
		3 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film
		5 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor
		6 Feraturan Penerintan Nomor 87 Tanun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
		7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
		Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda
		Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan
		Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran
		Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya
		Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, RIset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum
		Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya
105	Paramedik Karantina Hewan	Kompetensi Umum: Peraturan Perundangan
	Terampil	Kompetensi Khusus:
		1 Mitigasi Risiko
		2 Pemantauan HPHK
		3 Pengawasan Karantina Hayati Hewani
106	Paramedik Veteriner Penyelia	4 Tindakan Karantina Hewan Kompetensi Khusus:
.00	· aramount reterment onlyona	Peraturan Perundang-Undangan bidang Peternakan dan Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan
		2 Prosedur Tatacara Penanganan, Pemeliharaan dan Pemeriksaan bidang Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan
		3 Tatacara Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
107	Paramedik Veteriner Terampil	4 Identifikasi Status Reproduksi dan Penanganan Reproduksi dan Kebidanan pada Hewan Kompetensi Khusus:
,	aea Totoliiloi Totaliipii	Peraturan Perundang-Undangan bidang Peternakan dan Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan
		2 Prosedur Tatacara Penanganan, Pemeliharaan dan Pemeriksaan bidang Keswan, Kesmavet, dan
		 Kesrawan Tatacara Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Identifikasi Status Reproduksi dan Penanganan Reproduksi dan Kebidanan pada Hewan
108	Paramedik Veteriner Pemula	Kompetensi Khusus:
		Peraturan Perundang-Undangan bidang Peternakan dan Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan Prosedur Tatacara Penanganan, Pemeliharaan dan Pemeriksaan bidang Keswan, Kesmavet, dan
		Kesrawan Tatacara Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
		4 Identifikasi Status Reproduksi dan Penanganan Reproduksi dan Kebidanan pada Hewan
109	Pekerja Sosial Ahli Madya	Kompetensi Umum:
		Penyelarasan (harmonisasi) dengan peraturan perundang-undangan yang lain Pengembangan strategi advokasi kebijakan kesejahteraan sosial yang tepat sesuai kondisi
		Kompetensi Khusus: Mengeyaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen dalam analisis kelayakan
		perencanaan pekerjaan sosial
l		2 Mengevaluasi dan menyusun langkah strategis dalam pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Sosial
		Supervisi dan evaluasi proses sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial Mangeyaluasi dan menyusun perangkat porma standar prosedur instrument dalam peneranan layanan.

Halaman 26 dari 62

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		1 Perumusan kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan kesejahteraan sosial
		2 Advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial serta monitoring dan evaluasi hasil advokasi
		Kompetensi Khusus: 1 Analisis kelayakan perencanaan pekerjaan sosial sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis
		Penyiapan bahan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis terkait Manajemen Pekerjaan Sosial
		3 Penyusunan rancangan sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial
		4 Penerapan layanan pekerjaan sosial sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis
111	Pemadam Kebakaran Terampil	Kemampuan menyajikan bahan terkait dengan pembinaan dan pengawasan pekerja sosial Kompetensi Umum:
	· omadam rosanaram rosampii	1 Teori Segitiga Api
		Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta alat komunikasi
		Kesiapsiagaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Keselamatan Petugas dan Penggunaan Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)
		Kompetensi Khusus:
		Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		2 Tali Temali dan Penyelamatan
110	Pemadam Kebakaran Pemula	3 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) Kompetensi Umum:
112	Pemadam Kebakaran Pemula	1 Teori Segitiga Api
		Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		3 Kesiapsiagaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		4 Keselamatan Petugas dan Penggunaan Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)
		Kompetensi Khusus: 1 Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		2 Tali Temali dan Penyelamatan
		3 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK)
113	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli	Kemampuan Umum:
	Pertama	Konsep dasar, teknis, metode pemberdayaan dan pengembangan kemitraan kesehatan masyarakat pekerja
		2 Langkah pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kemitraan kesehatan masyarakat pekerja
		Manajemen pelaksanaan pembimbingan dalam pemberdayaan dan pengembangan kemitraan kesehatan masyarakat pekerja
		4 Kemampuan Khusus:
		5 Prinsip dan metode
		6 Tahap pelaksanaan
		7 Pengumpulan data 8 Pengolahan, penyajian dan interpretasi data
		9 Analisis Data
		10 Perencanaan sampai dengan monitoring evaluasi
		Kemampuan Khusus:
		1 Konsep dasar SMK3 2 Perencanaan penerapan SMK3
		3 Tahapan SMK3
		4 Penyusunan dan penyampaian informasi SMK3
		5 Penguraian informasi SMK3
		Manajemen risiko di tempat kerja Pembimbingan dan pendampingan pelaksanaan program Kesehatan Kerja
114	Pembina Industri Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Peraturan tentang Perindustrian dan Kebijakan Industri
		Peran sektor industri dalam perekonomian Klasifikasi Industri dan Klasifikasi Paku Lapangan Hasha Indonesia (KPLI)
		Klasifikasi Industri dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tugas Jabatan dan Pengembangan Profesi (Karya Tulis Ilmiah)
		Kemampuan Khusus:
		RIPIN, perencanaan pembangunan nasional, pembangunan sumber daya industri, dan Bangun Industri
		Nasional
		Perancangan Perusahaan Industri Standar Produk dan Standar Kompetensi (SNI dan SKKNI)
		4 Konsep, Sejarah, dan Penerapan Industri 4.0, Making Indonesia 4.0, dan INDI 4.0
		Konsepsi Teknologi Industri, Manfaat Penggunaan, Technology Readiness Level (TRL), dan Turn Key
		Project
		6 Industri Berbasis Sumber Daya Alam 7 Industri Hijau, Circular Ekonomi, dan Zero Waste
		8 Industri Strategis
		9 Produk Dalam Negeri dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
		10 Jasa Industri dan Rantai Nilai Global
		11 Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri Kebijakan serta Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri: Iklim Usaha, Ekspor-Impor, Kondisi
		Industri, Persaingan Global, dan Bentuk Advokasi
		Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), 13 Pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Tertentu, serta Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)
		Perundingan, Kerja Sama Internasional, Neraca Komoditas, Rantai Suplai Global, dan Potensi Internasional
		15 Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Industri
		16 Industri Halal
		17 Fasilitas Fiskal, Nonfiskal, dan Perizinan Berusaha
115	Develope Lega Marchindre Aldi	18 Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan Kebijakan Satu Data
	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya	Kompetensi Umum 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
ı l		Halaman 27 dari 62

Halaman 27 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK	
		Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kompetensi Khusus	
		Manajemen kelembagaan dan usaha jasa konstruksi	
		2 Manajemen proyek konstruksi	
		3 Sumber Daya Konstruksi (SDM, Material dan Peralatan Konstruksi)	
		Pembinaan kompetensi Tenaga Konstruksi Keamanan dan keselamatan konstruksi	
116	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Kompetensi Umum:	
		1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	
		Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kompetensi Khusus:	
		Manajemen kelembagaan dan usaha jasa konstruksi	
		2 Manajemen proyek konstruksi	
		3 Sumber Daya Konstruksi (SDM, Material dan Peralatan Konstruksi)	
		4 Pembinaan kompetensi Tenaga Konstruksi 5 Keamanan dan keselamatan konstruksi	
117	Pembina Jasa Konstruksi Ahli	Kompetensi Umum:	
	Pertama	1 Manajemen Kontrak Konstruksi	
		Manajemen Risiko Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kebijakan Publik	
		Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	
		5 Statistik Money dan Pelaporan	
		6 Manajemen Lingkungan Pekerjaan Konstruksi Kompetensi Khusus:	
		Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi	
		2 Pengembangan Kerjasama Jasa Konstruksi Strategis Di Dalam Dan Luar Negeri	
		Manajemen Pemberdayaan Usaha Jasa Konstruksi Manajemen Pengembangan Pasar Jasa Konstruksi	
		5 Pembinaan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi	
		6 Manajemen Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	
		7 Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) Bidang Jasa Konstruksi	
		Pembinaan Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Manajemen Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi	
		10 Manajemen Rantai Pasok Material Dan Peralatan Konstruksi	
		11 Manajemen Pengembangan Teknologi Konstruksi	
		Manajemen Peningkatan Penggunaan Komponen Dalam Negeri Manajemen Pengembangan Kelembagaan Jasa Konstruksi	
		14 Manajemen K3 Konstruksi	
		15 Manajemen Penjaminan Dan Pengendalian Mutu Konstruksi	
118	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan	16 Manajemen Konstruksi Hijau Kemampuan Umum:	
110	Perikanan Ahli Muda	Peraturan terkait pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	
		Kemampuan Khusus:	
		Pengembangan usaha dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan Perumusan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	
		Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	
		4 Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan	
		5 Uji terap teknik produk kelautan dan perikanan6 Pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan	
119	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan	Kemampuan Umum:	
	Perikanan Ahli Pertama	Peraturan terkait pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	
		Kemampuan Khusus: 1 Pengembangan usaha dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan	
		Perumusan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	
		3 Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	
		Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan Uji terap teknik produk kelautan dan perikanan	
		Oji terap teknik produk kelautan dan perikanan Pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan	
120	Pemeriksa Desain Industri Ahli	Kemampuan Umum:	
	Pertama	Definisi desain industri Juknis Pemeriksaan Desain Industri	
		3 Klasifikasi Locarno	
		4 Pengetahuan Umum tentang Kekayaan Intelektual	
		5 Pengetahuan umum tentang seni atau desain	
		6 Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2005 7 TRIPS Agreement	
		8 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	
		Kemampuan Khusus:	
		Definisi desain industri Juknis Pemeriksaan Desain Industri	
		3 Klasifikasi Locarno	
		4 Ketentuan terkait kejelasan dan kesatuan desain industri	
		5 Pengetahuan umum bidang Kekayaan Intelektual 6 Pengetahuan Umum tentang Seni atau Desain	
		7 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2005	
		8 Permenpan No.36 Tahun 2013	
		9 TRIPS Agreement 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	
121	Pemeriksa Karantina Tumbuhan	Kompetensi Umum:	
	Terampil	1 Regulasi pertanian	
		Halaman 28 dari 62	

Halaman 28 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		2 Sistem budidaya tanaman (pola tanam, pupuk dan pemupukan, bibit unggul, dan pengendalian hayati)
		3 Terminologi pertanian Kompetensi Khusus:
		·
		1 Ilmu tumbuhan (anatomi dan fisiologi tumbuhan), morfologi serangga, dan ilmu hama penyakit tanaman
		Mikrobiologi (virus, protista, bakteri, nematoda, dan jamur) Penulasi karaptina tumbuhan dan kemanan bayati nabati
		Regulasi karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati Teknik pengendalian OPT
		Wawasan tentang perkarantinaan tumbuhan, koleksi, alat dan bahan laboratorium, serta ilmu pertanian
400		umum
122	Pemeriksa Merek Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Wawasan umum mengenai kekayaan intelektual
		2 Wawasan internasional di bidang merek
		3 Sejarah Peraturan Perundang-undangan di bidang Merek
		4 Peraturan Menpan RB Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Kemampuan Khusus:
		Undang-Undang tentang Merek Nomor 20 Tahun 2016 i o Undang-Undang tentang Cinta Keria Nomor
		6 Tahun 2023 beserta peraturan pelaksanaannya
		Sejarah Peraturan Perundang-undangan di bidang Merek Undang-Undang tentang Merek Nomor 20 Tahun 2016 beserta peraturan pelaksanaannya
		Nico Classification dan Poraturan Montori Hukum dan HAM Nomer 67 Tahun 2016 in Poraturan
		Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021
123	Pemeriksa Paten Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Modul Kekayaan Intelektual di Bidang Paten Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016
		3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
		4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023
		Kemampuan Khusus: 1 Modul Kekayaan Intelektual di Bidang Paten
		Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016
		3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
		4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023
		5 Permenkumham Nomor 38 Tahun 2018 6 Permenkumham Nomor 13 Tahun 2021
124	Pemeriksa Perdagangan Berjangka	Kompetensi Umum:
	Komoditi Ahli Pertama	1 Penyusunan kebijakan bidang perdagangan
		Advokasi kebijakan bidang perdagangan Penyelenggaraan sistem informasi perdagangan
		Kompetensi Khusus:
		Pemeriksaan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang
		Komoditas (PLK)
		Penyidikan dan penindakan Pengaturan, pembinaan, dan pengembangan PBK, SRG, PLK
		4 Fasilitasi substansi PBK, SRG, PLK
125	Penata Anestesi Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Kepmenkes HK-01.07/MENKES/722/2020 tentang Standar Kompetensi Penata Anestesi Kemampuan Khusus:
		1 Kepmenkes HK-01.07/MENKES/722/2020 tentang Standar Kompetensi Penata Anestesi
		2 Permenpan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Penata Anestesi
126	Penata Kadastral Ahli Pertama	3 Permenkes Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pekerjaan Penata Anestesi Kemampuan Umum:
120	T GHALA NAGAGITAL AHIL L GITAHIA	Dasar Pertanahan
		Kemampuan Khusus:
		1 Pemetaan 2 Pengukuran Bidang Tanah
		3 Survei Pertanahan
127	Penata Kehakiman Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
		2 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
		Peraturan Sekjen Komisi Yudisial RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 3 Sekjen Komisi Yudisial RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI
		Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 4 047/KMA/SKB/IV/2009, dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
		Kompetensi Khusus:
		Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara dan prosedur penerimaan dan verifikasi laporan masyarakat terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
		Konsep dasar, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penanganan laporan masyarakat 2 khususnya dalam rangka penyiapan Sidang Panel dan Sidang Pleno serta Sidang Majelis Kehormatan
		Hakim (MKH) 2. Pameteen duggen Pelanggayan Keda Etily dan Pedaman Perilaku Hakim (KERRH)
		3 Pemetaan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor
		4 047/KMA/SKB/IV/2009, dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Halaman 29 dari 62

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			ır, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara investigasi, dalam rangka Kasus terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
		Perilaku Hak	Investigasi Pendalaman Kasus terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman im (KEPPH) sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis
			ır, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara Penelusuran Rekam Jejak kebutuhan metode penelusuran rekam jejak
			alon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di MA sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis
			ur, teknik metode, oeraturan dan mekanisme, tata cara pelaksanaan Seleksi Calon Hakim
		Perencanaai Pelaksanaar	alon Hakim Ad Hoc n Kebutuhan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc serta identifikasi Kebutuhan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc sesuai pedoman kerja/petunjuk
			ır, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan nakim dan upaya kesejahteraan hakim
128	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli	Kompetensi	
	Muda	Teori-teori pa Kompetensi	ada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan infrastruktur bangunan dan perumahan Khusus:
			n bangunan gedung dan kawasan permukiman raan bangunan gedung
		Penyelengga	raan bangunan gedung negara dan gedung hijau
			ngunan dan lingkungan raan perumahan dan kawasan permukiman
129	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli	Kompetensi Kebijakan/Pe	Umum: eraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan
	Pertama	Permukiman Teori - teori ı Kawasan Pe	pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan Infrastruktur Bangunan Gedung dan
		Kompetensi	
			n Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman raan Bangunan Gedung
			raan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau ngunan dan Lingkungan
			ngunan dan Lingkungan raan Kawasan Permukiman
130	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	Kompetensi	
	Anii Ferlama		eraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur Jalan dan
		Kompetensi	
		Analisa Kese Pengusahaa	
		Pengelolaan	Lingkungan Bidang Bina Marga
		Penyusunan Pengoperasi	Jaringan Jalan an Jalan Tol
		Perancangai	n Jalan
		Perancangai	n Jembatan Konstruksi Jalan
		Pelaksanaar	Konstruksi Jembatan
			Preservasi Bidang Bina Marga Teknik Bidang Bina Marga
131	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli		ilu di Indonesia
	Pertama		lu dan Pilkada
		Struktur Orga	lu di Indonesia anisasi
		Kewenangar	
		Etik Policy maker	dan implementator
			PU (komisioner)
			ungsi Kesekretariatan n Keuangan dan Anggaran
			aksanaan Anggaran
		Pencalonan	
		Data Pemilih Pemungutan	dan Perhitungan Suara
		Dasar Hukur	n Pemilu
		Undang-Und Peraturan Ki	
		Azas-azas P	emilu emilu
			elenggaraan Pemilu
132	Penata Kelola Pengawasan	Kode Etik Kemampuan	Umum:
- =	Pemilihan Umum Ahli Pertama	UU Nomor 7	Tahun 2017
		Kemampuan	Khusus: pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu
		Pedoman pe	nyusunan Indeks Kerawanan Pemilu
		Pengawasar	
		Pengawasar Pelaporan da	partisipatit an registrasi dugaan pelanggaran pemilu
	•	.,	Halaman 30 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

7 Pernatakan pulasan perlanganan Pelangan Penulu	NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
Pernata Kelola Pernyahatan			6 Persidangan pelanggaran Pemilu
S. Pelaksanaan penyelesian senyeleta potese Pentilu 137 Pentati Kololu Penyehatan 1 Tindak langui dan penandanan puhalan 1 Kerbikangan penyelesian senyeleta potese Pentilu 138 Pentati Kololu Penyehatan 1 Kerbikangan pentangan pendangan terkati infrastruksur penyehatan ingkungan 1 Kerbikangan pentangan pentangan terkati pengelokan dan penbanguran infrastruksur penyehitan 1 Kerbikangan pentangan pentangan pentangan pentangan senangan pentangan			
Penata Kelola Penyehatan			
Lingkungan Ahil Muda			
Persata Kelola Perumahan Ahl Persata Kelola Persata Ahl Persata Ahl Persata Kelola Persata Ahl Persata Kelola Persata Ahl Persata Kelola Persata Ahl Persata Ahl Persata Kelola Persata Ahl	133		
Penata Katola Ponyehatan Penata Kalola Ponyehatan Penata Kalola Perumahan Ahli Penata Kalola Penata Penat		Lingkungan Anii Muda	Tagri tagri nada hidang kailmuan yang tarkait pangalalaan dan nambangunan infrastruktur nanyahata
Kompetensi Khusus: 1. Perwistengaranan sitem penyediaan air minum 2. Perwistengaranan persampahan 3. Perpelahan air minum persampahan 3. Perpelahan air minum persampahan 4. Permisten air minum persampahan 4. Permisten air minum persampahan 5. Permisten Kelola Perwishatan 5. Permisten Khusus: 5. Permisten Khusus: 6. Permisten Khusus: 6. Permisten Khusus: 6. Permisten Khusus: 7. Permisten Khusus: 8. Permisten Khusus: 8. Permisten Khusus: 8. Permisten Khusus: 8. Permisten Khusus: 9. Permisten Khusus: 9. Permisten Khusus: 1. Permisten Permist			
Penata Kelola Penyehatan Penata Kelola Penyehatan Penata Kelola Penyehatan Penata Kelola Penyehatan Penatah Keloja Penyehatan Penatah Keloja Penyehatan Penatah			
Penata Kelola Penyahatan Campetersi Umum: Kompetersi Umum: Kompetersi Umum: Campetersi Umum: Campete			
Penata Kelola Penyehatan Kompetera Umum: Kebijakan Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama Kebijakan Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Kebijakan Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Kebijakan Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur penyehatan Lingkungan Rompetera Khasus: Penyehatan Lingkungan Penyehatan Lingkungan			
134 Penata Kelola Penyekatan Iungkungan Ahil Portama			g
Lingkungan Ahil Pertama	134	Penata Kelola Penvehatan	
Ingkungan Kompetensi Khusus: 1 Penyelengaranan Prasaman dan Ari Minum 2 Penyelengaranan Prasaman dan Sarana Persampahan 3 Pengelolaan Ari Limbah Domestik 4 Pengelolaan Ari Limbah Domestik 4 Pengelolaan Prasaman Linghungan 4 Pengelolaan Prasaman Linghungan 4 Pentaman 5 Penyelengaranan Prasaman dan Sarana Persampahan 3 Pengelolaan Prasaman Linghungan 5 Penyelengaranan Prasaman dan sarana Persaman 5 Penyelengaranan Prasaman dan sarana Persaman 5 Penyelengaranan pendinanan n pendinanan n pendinanan pendinananan pendinananan pendinanananananan		•	Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Penyehatan Lingkungan
Inglungan Kompetersi Khusus: 1 Peryebinggaraan Pasarana dan Salam Persyapitaan Air Minum 2 Peryebinggaraan Pasarana dan Salam Persampahan 3 Pengelolaan Aur, Limbah Domesik 4 Perjama 4 Perjama Pertaman Perlaman Perlaman 5 Pentahan Ahil 7 Kebipiakan Perahuan Perundang-Undangan, Strategi, Program 7 Perlama Perlaman Perl			7 Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur penyehat
Peryetenggarana Pisarana dan Sarana Persampahan			lingkungan
2 Penyelengaraan Prasarana dan Sarana Persampahan			
135 Penata Kelola Perumahan Ahli			
Separata Kelola Perumahan Ahli Formpetensi Umum: Nome Nom			
Pertama	16-		
2 Pemantauan dan evaluasi program 3 Pengelolaan data dan informasi 4 Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria serta Penetapan NSPK 5 Penyelenggaraan pembinaan teknik 5 Penyelenggaraan pembinaan teknik 6 Pengelolaan Manajemen Resiko 7 Penyusunan laproan tindak lanjuh hasil pemeriksaan Kompetensi Khusus: 1 Perencanaan teknik terkait perumahan dan kawasan permukiman 2 Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 3 Penyelenggaraan Simulan Pumah Humu dan Komersial 4 Penyelenggaraan Simulan Perumahan Swadaya 6 Pengawasan Konstruksi 7 Pemantatatan Rumah Susun/Fumah Khusus Kompetensi Humu: 7 Penantatatan Permukiman 7 Perpelenggaraan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman 8 Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman 8 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Megara dan Gedung Hijau 8 Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 8 Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 8 Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 9 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Megara dan Gedung Hijau 9 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Megara Hijau 9 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Megara Hijau 9 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Megara Hijau Hi			Kompetensi Umum: 1. Kahijakan/ Peraturan Perundangal Indongan, Stratogi, Program
3 Pengelolan data dan informasi 4 Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria serta Penetapan NSPK 5 Penyelenggaraan pembinaan teknis 6 Pengelolan Managamen Resiko 7 Penyusunan Itaporan Indrik lanjut hasil pemeriksaan Kompetensi Khusus: 1 Perencanaan teknis terkait perumahan dan kawasan permukiman 2 Penyelenggaraan Stimulan Perumahan dan kawasan permukiman 3 Penyelenggaraan Stimulan Perumahan dan kawasan permukiman 4 Penyelenggaraan Stimulan Perumahan dan kawasan permukiman 5 Penyelenggaraan Stimulan Perumahan Sundaya 6 Pengawasan Konstruksi 7 Pemerhatanan Stimulan Perumahan Sundaya 6 Pengawasan Konstruksi 7 Pemerhatanan Rumah Susun 6 Pengawasan Konstruksi 7 Pemerhatanan Rumah Susun 8 Kebijakan Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman 8 Teori Leori pada bidang kelimuan yang terkait pengelolaan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman 9 Penata Laksana Bangunan Gedung 1 Perrecanaan Bangunan Gedung 2 Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman 2 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau 3 Penata Laksana Bangunan Gedung 4 Pertakan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman 5 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau 4 Penataan Bangunan Gedung 5 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau 4 Penataan Bangunan Gedung 6 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau 5 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau 6 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau 7 Perecanaan Bangunan Gedung Hijau 8 Penata Laksana Jalan dan 9 Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan kawasan permukiman 1 Kebijakan Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur bangunan dan perumahan dan perundahan Hijau 1 Kebijakan Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur bangunan Infrastruktur Jalan Jembatan 1 Kebijakan Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Jalan Jembatan 2 Penyusanan Jalan Tol 3 Pengelogaan Jalan Tol 4 Penyusunan Jalan Tol		i Gitama	
5 Penyelenggaraan pembinaan teknis			1 0
6 Pengusuana laparan Indak lanjut hasil pemeriksaan Kompeteria Khusus: 1 Perencanaan berkis terkait perumahan dan kawasan permukiman 2 Penyelenggaraan Stimulan Rumah Umum dan Komersial 4 Penyelenggaraan Stimulan Rumah Umum dan Komersial 5 Penyelenggaraan Stimulan Rumah Umum dan Komersial 6 Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Terampil 7 Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Terampil 8 Penyelenggaraan Stimulan Rumah Susun 8 Permukiman Terampil 9 Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Terampil 137 Penata Laksana Bangunan Gedung Mangan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman 138 Penata Laksana Bangunan Gedung Mangan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman 139 Penata Laksana Bangunan Gedung Mangan Bangunan Gedung Mangan			
Penyusunan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan			
Kompetensi Khusus: 1			
2 Penyelenggaraan Simulan Rumah Umum dan Komersial			
3 Penyelenggaraan Stimulan Rumah Umum dan Komersial 4 Penyelenggaraan Stimulan Perumahan Swadaya 5 Penyelenggaraan Stimulan Perumahan Swadaya 6 Pengawasan Konstruksi 7 Pemarifaatan Rumah Susun/Rumah Khusus 7 Pemarifaatan Rumah Susun/Rumah Khusus 8 Kompetensi Umum: 1 Kompetensi Umum: 1 Perencanaan Permukiman Terampil 1 Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman 2 Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman 3 Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman 4 Penatan Bangunan Gedung Man Kawasan Permukiman 4 Penatan Bangunan Gedung Man Kawasan Permukiman 4 Penatan Bangunan Gedung Man Kawasan Permukiman 5 Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 2 Penyelenggaraan bangunan gedung dan kawasan permukiman 2 Penyelenggaraan bangunan gedung dan kawasan permukiman 2 Penyelenggaraan bangunan gedung dan kawasan permukiman 3 Penyelenggaraan bangunan gedung man gedung 3 Penyelenggaraan bangunan gedung 4 Penataan bangunan gedung 4 Penataan bangunan gedung 4 Penyelengaraan bangunan gedung 4 Penataan bangunan gedung 4 Penyelengaraan perumahan dan kawasan permukiman 5 Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 5 Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 6 Penyelensi Umum: 1 Kebijakaniperaan perumahan dan kawasan permukiman 6 Penyelensi Umum: 1 Pengawasan Perentang-undangan terkait Infrastruktur Jalan dan Jembatan 7 Perancangan Jalan 7			Perencanaan teknis terkait perumahan dan kawasan permukiman
4 Penyelenggaraan Stimulan Perumahan Susun			
S Penyelenggaraan Stimulan Perumahan Swadaya			
6 Pengawasan Konstruksi			
Benata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Terampil Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Permukima			6 Pengawasan Konstruksi
dan Kawasan Permukiman Terampil Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	100		
Permukiman Per		o o	
Sempetensi Khusus: 1		dan Kawasan Fermukinan Terampii	
Kawasan Permukiman Kompetensi Khusus: 1 Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman 2 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau 4 Penataan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau 5 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau 6 Penataan Bangunan Garung Henatawasan Permukiman 7 Penata Laksana Bangunan Gedung Kompetensi Umum: 7 Kebjakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur bangunan dan perumahan Kompetensi Umum: 8 Penyelenggaraan bangunan gedung dan kawasan permukiman 9 Penata Laksana Jalan dan 9 Penata Laksana Jalan dan 9 Penata Laksana Jalan dan 1 Kompetensi Umum: 1 Kebjakan/peraturan perundang-undangan terkait Infrastruktur bangunan dan perumahan kompetensi Umum: 1 Kebjakan/peraturan perundangan 1 Perencanaan bangunan gedung negara dan gedung hijau 1 Penata Laksana Jalan dan 1 Kompetensi Umum: 1 Kebjakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Jalan dan Jembatan 1 Kompetensi Khusus: 1 Analisa Keselamatan 2 Pengusahaan Jalan Tol 3 Pengelolaan Lingkungan Bidang Bina Marga 4 Penyasanan Jalan Tol 5 Pengoperasian Jalan Tol 6 Perancangan Jembatan 8 Pelaksanaan Konstruksi Jalan 9 Pelaksanaan Konstruksi Jembatan 10 Pelaksanaan Preservasi Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 11 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan 139 Penata Laksana Jalan dan 14 Kompetensi Umum: 1 Kebijakanan Ronstruksi Jembatan 15 Pengoperasian Jalan Perovasi Bidang Bina Marga 16 Pengoperasian Jalan Perovasi Bidang Bina Marga 17 Perancangan Jenetanian Perovasi Bidang Bina Marga 18 Penata Laksana Jalan dan Jembatan Peroviceri Jeneta Bidang Perikait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 18 Penata Laksana Jalan dan Jembatan Peroviceri Deroviceri Jeneta Bidang Perikait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan			
1 Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman			Kawasan Permukiman
2 Penyelenggaraan Bangunan Gedung			
4 Penataan Bangunan dan Lingkungan			2 Penyelenggaraan Bangunan Gedung
S Penyelengaraan Kawasan Permukiman			
Renata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Pemula Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur bangunan dan perumahan			
dan Kawasan Permukiman Pemula 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur bangunan dan perumahan 2 Teori-teori pada bidang kelimuan yang terkait pengelolaan infrastruktur bangunan dan perumahan Kompetensi Khusus: 1 Perencanaan bangunan gedung dan kawasan permukiman 2 Penyelenggaraan bangunan gedung negara dan gedung hijau 4 Penataan bangunan dan lingkungan 5 Penyelenggaraan bangunan gedung negara dan gedung hijau 4 Penataan bangunan dan lingkungan 5 Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kompetensi Khusus: 1 Analisa Keselamatan 2 Pengusahaan Jalan Tol 3 Pengelolaan Lingkungan Bidang Bina Marga 4 Penyusunan Jaringan Jalan 5 Pengoperasian Jalan Tol 6 Perancangan Jalan 7 Perancangan Jalan 7 Perancangan Jalan 9 Pelaksanaan Konstruksi Jalan 9 Pelaksanaan Konstruksi Jembatan 10 Pelaksanaan Feserwasi Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 12 Teori-teori pada bidang kelimuan yang terkait infrastruktur jalan dan jembatan 13 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan	137	Penata Laksana Bangunan Gedung	, , , ,
2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan infrastruktur bangunan dan perumahan Kompetensi Khusus: 1 Perencanaan bangunan gedung dan kawasan permukiman 2 Penyelenggaraan bangunan gedung negara dan gedung hijau 4 Penataan bangunan dan lingkungan 5 Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur Jalan Jembatan Kompetensi Khusus: 1 Analisa Keselamatan 2 Pengusahaan Jalan Tol 3 Pengelolaan Lingkungan Bidang Bina Marga 4 Penyusunan Jaringan Jalan 5 Pengoperasian Jalan Tol 6 Perancangan Jalan 7 Perancangan Jembatan 8 Pelaksanaan Konstruksi Jembatan 10 Pelaksanaan Konstruksi Jembatan 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 139 Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dar jembatan dar jembatan nerbatan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan an pembatan nerbatan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan nerbatan pembatan perundang-undangan terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dar jembatan pembatan nerbatan pembatan nerbatan pembatan pembatan nerbatan pembatan nerbatan pembatan pembatan nerbatan nerbatan pembatan nerbatan pembatan nerbatan pembatan nerbatan nerbatan pembatan nerbatan pembatan nerbatan		S S	
1 Perencanaan bangunan gedung dan kawasan permukiman			2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan infrastruktur bangunan dan perumahan
2 Penyelenggaraan bangunan gedung 3 Penyelenggaraan bangunan gedung negara dan gedung hijau 4 Penataan bangunan dan lingkungan 5 Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Jalan dan Jembatan 2 Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur Jalan Jembatan Kompetensi Khusus: 1 Analisa Keselamatan 2 Pengusahaan Jalan Tol 3 Pengelolaan Lingkungan Bidang Bina Marga 4 Penyusunan Jaringan Jalan 5 Pengoperasian Jalan Tol 6 Perancangan Jalan 7 Perancangan Jembatan 8 Pelaksanaan Konstruksi Jalan 9 Pelaksanaan Konstruksi Jembatan 10 Pelaksanaan Preservasi Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 139 Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula 139 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait infrastruktur jalan dan jembatan diembatan			
3 Penyelenggaraan bangunan gedung negara dan gedung hijau 4 Penataan bangunan dan lingkungan 5 Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Jalan dan Jembatan Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur Jalan Lembatan Kompetensi Khusus: 1 Analisa Keselamatan Rompetensi Khusus: 1 Analisa Keselamatan Pengusahaan Jalan Tol Renyusunan Jaringan Jalan Pengusahan Jalan Tol Renyusunan Jaringan Jalan Pengoperasian Jalan Tol Perancangan Jembatan Perancangan Jembatan Perancangan Jembatan Pelaksanaan Konstruksi Jembatan Pelaksanaan Konstruksi Jembatan Pelaksanaan Preservasi Bidang Bina Marga Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga Kompetensi Umum: Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga Renyasina Perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan Renyasina Perundang-undangan terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Pengawasan Perundang-undangan terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Pengawasan Perundang-undangan terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Pengawasan Pengalolaan Pengawasan P			
4 Penataan bangunan dan lingkungan 5 Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Jalan dan Jembatan 2 Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur Jalan Jembatan Kompetensi Khusus: 1 Analisa Keselamatan 2 Pengusahaan Jalan Tol 3 Pengusahaan Jalan Tol 3 Pengusunan Jaringan Jalan 5 Pengoperasian Jalan Tol 6 Perancangan Jalan 7 Perancangan Jembatan 8 Pelaksanaan Konstruksi Jalan 9 Pelaksanaan Konstruksi Jalan 9 Pelaksanaan Konstruksi Jalan 10 Pelaksanaan Freservasi Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 13 Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan da jembatan			
Rompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Jalan dan Jembatan 2 Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur Jalan Jembatan Kompetensi Khusus: 1 Analisa Keselamatan 2 Pengusahaan Jalan Tol 3 Pengelolaan Lingkungan Bidang Bina Marga 4 Penyusunan Jaringan Jalan 5 Pengoperasian Jalan Tol 6 Perancangan Jalan 7 Perancangan Jembatan 8 Pelaksanaan Konstruksi Jalan 9 Pelaksanaan Konstruksi Jembatan 10 Pelaksanaan Preservasi Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 12 Pengabatan 13 Pengabatan 14 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 3 Pengelolaan dan jembatan 3 Pen			4 Penataan bangunan dan lingkungan
Jembatan Terampil 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Jalan dan Jembatan Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur Jalan Jembatan Kompetensi Khusus: 1 Analisa Keselamatan 2 Pengusahaan Jalan Tol 3 Pengelolaan Lingkungan Bidang Bina Marga 4 Penyusunan Jaringan Jalan 5 Pengoperasian Jalan Tol 6 Perancangan Jalan 7 Perancangan Jembatan 8 Pelaksanaan Konstruksi Jalan 9 Pelaksanaan Konstruksi Jembatan 10 Pelaksanaan Konstruksi Jembatan 10 Pelaksanaan Preservasi Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 139 Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan da jembatan			
Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur Jalan Kompetensi Khusus: 1 Analisa Keselamatan 2 Pengusahaan Jalan Tol 3 Pengelolaan Lingkungan Bidang Bina Marga 4 Penyusunan Jaringan Jalan 5 Pengoperasian Jalan Tol 6 Perancangan Jalan 7 Perancangan Jembatan 8 Pelaksanaan Konstruksi Jalan 9 Pelaksanaan Konstruksi Jembatan 10 Pelaksanaan Preservasi Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 139 Penata Laksana Jalan dan Jembatan 1 Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan da jembatan	138		
Sembatan Kompetensi Khusus: 1		Jembalan Terampii	Tani tani nada hidana kalimura yang tarkait nangalalan dan nambangunan Infrastruktur Jalan dan
1 Analisa Keselamatan 2 Pengusahaan Jalan Tol 3 Pengelolaan Lingkungan Bidang Bina Marga 4 Penyusunan Jaringan Jalan 5 Pengoperasian Jalan Tol 6 Perancangan Jalan 7 Perancangan Jembatan 8 Pelaksanaan Konstruksi Jalan 9 Pelaksanaan Konstruksi Jembatan 10 Pelaksanaan Preservasi Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 12 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait infrastruktur jalan dan jembatan 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan da jembatan			
2 Pengusahaan Jalan Tol 3 Pengelolaan Lingkungan Bidang Bina Marga 4 Penyusunan Jaringan Jalan 5 Pengoperasian Jalan Tol 6 Perancangan Jalan 7 Perancangan Jembatan 8 Pelaksanaan Konstruksi Jalan 9 Pelaksanaan Konstruksi Jembatan 10 Pelaksanaan Preservasi Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 12 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait infrastruktur jalan dan jembatan 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan da jembatan			
3 Pengelolaan Lingkungan Bidang Bina Marga 4 Penyusunan Jaringan Jalan 5 Pengoperasian Jalan Tol 6 Perancangan Jalan 7 Perancangan Jambatan 8 Pelaksanaan Konstruksi Jalan 9 Pelaksanaan Konstruksi Jembatan 10 Pelaksanaan Preservasi Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 11 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan da jembatan			
4 Penyusunan Jaringan Jalan 5 Pengoperasian Jalan Tol 6 Perancangan Jalan 7 Perancangan Jembatan 8 Pelaksanaan Konstruksi Jalan 9 Pelaksanaan Konstruksi Jembatan 10 Pelaksanaan Preservasi Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 12 Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dar jembatan			
5 Pengoperasian Jalan Tol 6 Perancangan Jalan 7 Perancangan Jembatan 8 Pelaksanaan Konstruksi Jalan 9 Pelaksanaan Konstruksi Jembatan 10 Pelaksanaan Preservasi Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 12 Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dar jembatan			
7 Perancangan Jembatan 8 Pelaksanaan Konstruksi Jalan 9 Pelaksanaan Konstruksi Jembatan 10 Pelaksanaan Preservasi Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 13 Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan da jembatan			5 Pengoperasian Jalan Tol
8 Pelaksanaan Konstruksi Jalan 9 Pelaksanaan Konstruksi Jembatan 10 Pelaksanaan Preservasi Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 139 Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan da jembatan			
9 Pelaksanaan Konstruksi Jembatan 10 Pelaksanaan Preservasi Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 139 Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan da jembatan			
10 Pelaksanaan Preservasi Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 139 Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dar jembatan			
11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga 139 Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula 14 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan 14 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan 15 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 16 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 17 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 18 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 18 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 18 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 18 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 18 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 18 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 18 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 18 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 18 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 18 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 18 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan jembatan 18 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan jembatan 18 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan jembatan 18 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan yang			10 Pelaksanaan Preservasi Bidang Bina Marga
Jembatan Pemula 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan da jembatan			11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga
2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan da jembatan	139		
		oembalan remula	
Halaman 31 dari 62			Kompetensi Khusus:

Halaman 31 dari 62

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		Perencanaan teknis jalan, jembatan, dan terowongan
		Pelaksanaan konstruksi jalan Pelaksanaan konstruksi jembatan dan terowongan
		4 Preservasi jalan, jembatan, dan terowongan
		5 Lingkungan dan keselamatan jalan
		6 Pengadaan lahan dan dampak sosial
1		7 Pendanaan jalan, jembatan, dan terowongan
		8 Pengoperasian lalu lintas 9 Bahan uji mutu
140	Penata Laksana Penyehatan	Kompetensi Umum:
1	Lingkungan Terampil	Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Penyehatan Lingkungan
1		Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur penyehatan
1		Lingkungan Kompetensi Khusus:
1		Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
1		2 Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan
		3 Pengelolaan Air Limbah Domestik
141	Panata Lakaana Panyahatan	4 Pengelolaan Drainase Lingkungan Kompetensi Umum:
	Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Pemula	Kompeterisi omain. Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur penyehatan lingkungan
1		2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur penyehatan
1		lingkungan
		Kompetensi Khusus:
		Penyelengaraan sistem penyediaan air minum Penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan
		3 Pengelolaan air limbah domestik
		4 Pengelolaan drainase lingkungan
142	Penata Laksana Sumber Daya Air	Kompetensi Umum:
1	Penyelia	Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air Tarif tarif and a bidan da bid
1		Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air
1		Kompetensi Khusus:
1		1 Pengelolaan sumber daya air
1		2 Pengelolaan sungai
1		3 Pengelolaan daerah pantai
1		Pengelolaan drainase utama perkotaan Pengelolaan daerah irigasi
1		6 Pengelolaan daerah rawa
1		7 Pengelolaan air tanah dan air baku
1		8 Pengelolaan bendungan
143	Penata Laksana Sumber Daya Air	Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung) Kompetensi Umum:
143	Mahir	Kompetensi omani. Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air
1	-	Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya
1		air
1		Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan sumber daya air
1		2 Pengelolaan sungai
1		3 Pengelolaan daerah pantai
1		4 Pengelolaan drainase utama perkotaan
		F. Danastelana danak (dana)
		5 Pengelolaan daerah irigasi
1		6 Pengelolaan daerah rawa
		6 Pengelolaan daerah rawa 7 Pengelolaan air tanah dan air baku
		6 Pengelolaan daerah rawa 7 Pengelolaan air tanah dan air baku 8 Pengelolaan bendungan 9 Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung)
144	Penata Laksana Sumber Daya Air	6 Pengelolaan daerah rawa 7 Pengelolaan air tanah dan air baku 8 Pengelolaan bendungan 9 Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung) Kompetensi Umum:
144	Penata Laksana Sumber Daya Air Terampil	6 Pengelolaan daerah rawa 7 Pengelolaan air tanah dan air baku 8 Pengelolaan bendungan 9 Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung) Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air
144	•	6 Pengelolaan daerah rawa 7 Pengelolaan air tanah dan air baku 8 Pengelolaan bendungan 9 Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung) Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya
144	•	6 Pengelolaan daerah rawa 7 Pengelolaan air tanah dan air baku 8 Pengelolaan bendungan 9 Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung) Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air
144	•	6 Pengelolaan daerah rawa 7 Pengelolaan air tanah dan air baku 8 Pengelolaan bendungan 9 Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung) Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air
144	•	6 Pengelolaan daerah rawa 7 Pengelolaan air tanah dan air baku 8 Pengelolaan bendungan 9 Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung) Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Sungai
144	•	6 Pengelolaan daerah rawa 7 Pengelolaan air tanah dan air baku 8 Pengelolaan bendungan 9 Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung) Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Sungai 3 Pengelolaan Daerah Pantai
144	•	6 Pengelolaan daerah rawa 7 Pengelolaan air tanah dan air baku 8 Pengelolaan bendungan 9 Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung) Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Daerah Pantai 4 Pengelolaan Daerah Pantai
144	•	6 Pengelolaan daerah rawa 7 Pengelolaan air tanah dan air baku 8 Pengelolaan bendungan 9 Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung) Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Sungai 3 Pengelolaan Daerah Pantai
144	•	6 Pengelolaan daerah rawa 7 Pengelolaan air tanah dan air baku 8 Pengelolaan bendungan 9 Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung) Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Daerah Pantai 4 Pengelolaan Daerah Pantai 5 Pengelolaan Daerah Irigasi 6 Pengelolaan Daerah Rawa 7 Pengelolaan Daerah Air Tanah & Air Baku
144	•	6 Pengelolaan daerah rawa 7 Pengelolaan air tanah dan air baku 8 Pengelolaan bendungan 9 Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung) Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Daerah Pantai 4 Pengelolaan Daerah Pantai 4 Pengelolaan Daerah Pirgasi 6 Pengelolaan Daerah Rawa 7 Pengelolaan Daerah Air Tanah & Air Baku 8 Pengelolaan Bendungan
	Terampil	6 Pengelolaan daerah rawa 7 Pengelolaan air tanah dan air baku 8 Pengelolaan bendungan 9 Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung) Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Sungai 3 Pengelolaan Daerah Pantai 4 Pengelolaan Daerah Pantai 5 Pengelolaan Daerah Irigasi 6 Pengelolaan Daerah Rawa 7 Pengelolaan Daerah Rawa 7 Pengelolaan Baerah Air Tanah & Air Baku 8 Pengelolaan Bendungan 9 Pengelolaan Tampungan Air Lainnya (Danau, Situ, Embung)
145	•	6 Pengelolaan daerah rawa 7 Pengelolaan air tanah dan air baku 8 Pengelolaan bendungan 9 Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung) Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Daerah Pantai 4 Pengelolaan Daerah Pantai 4 Pengelolaan Daerah Irigasi 6 Pengelolaan Daerah Rawa 7 Pengelolaan Daerah Rawa 8 Pengelolaan Baendungan 9 Pengelolaan Bendungan 9 Pengelolaan Tampungan Air Lainnya (Danau, Situ, Embung) Kompetensi Umum:
145	Terampil Penata Laksana Sumber Daya Air	6 Pengelolaan daerah rawa 7 Pengelolaan air tanah dan air baku 8 Pengelolaan bendungan 9 Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung) Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Daerah Pantai 4 Pengelolaan Daerah Pantai 4 Pengelolaan Daerah Pirgasi 6 Pengelolaan Daerah Rigasi 6 Pengelolaan Daerah Air Tanah & Air Baku 8 Pengelolaan Bendungan 9 Pengelolaan Tampungan Air Lainnya (Danau, Situ, Embung) Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air
145	Terampil Penata Laksana Sumber Daya Air	6 Pengelolaan daerah rawa 7 Pengelolaan air tanah dan air baku 8 Pengelolaan bendungan 9 Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung) Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Daerah Pantai 4 Pengelolaan Daerah Pantai 4 Pengelolaan Daerah Pingasi 6 Pengelolaan Daerah Rawa 7 Pengelolaan Daerah Air Tanah & Air Baku 8 Pengelolaan Daerah Air Tanah & Air Baku 8 Pengelolaan Tampungan Air Lainnya (Danau, Situ, Embung) Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air
145	Terampil Penata Laksana Sumber Daya Air	6 Pengelolaan daerah rawa 7 Pengelolaan air tanah dan air baku 8 Pengelolaan bendungan 9 Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung) Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Sungai 3 Pengelolaan Daerah Pantai 4 Pengelolaan Daerah Pantai 4 Pengelolaan Daerah Pigasi 6 Pengelolaan Daerah Rawa 7 Pengelolaan Daerah Air Tanah & Air Baku 8 Pengelolaan Bendungan 9 Pengelolaan Tampungan Air Lainnya (Danau, Situ, Embung) Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air 8 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air 9 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air 1 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air 1 Kompetensi Khusus:
145	Terampil Penata Laksana Sumber Daya Air	6 Pengelolaan daerah rawa 7 Pengelolaan air tanah dan air baku 8 Pengelolaan bendungan 9 Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung) Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Sungai 3 Pengelolaan Daerah Pantai 4 Pengelolaan Daerah Pantai 4 Pengelolaan Daerah Pirjasi 6 Pengelolaan Daerah Rawa 7 Pengelolaan Daerah Air Tanah & Air Baku 8 Pengelolaan Daerah Air Tanah & Air Baku 8 Pengelolaan Tampungan Air Lainnya (Danau, Situ, Embung) Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air 8 Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan sumber daya air
145	Terampil Penata Laksana Sumber Daya Air	6 Pengelolaan daerah rawa 7 Pengelolaan air tanah dan air baku 8 Pengelolaan bendungan 9 Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung) Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Sungai 3 Pengelolaan Daerah Pantai 4 Pengelolaan Daerah Pantai 4 Pengelolaan Daerah Rawa 5 Pengelolaan Daerah Rawa 6 Pengelolaan Daerah Air Tanah & Air Baku 8 Pengelolaan Bendungan 9 Pengelolaan Bendungan 9 Pengelolaan Tampungan Air Lainnya (Danau, Situ, Embung) Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan sumber daya air Pengelolaan sumber daya air
145	Terampil Penata Laksana Sumber Daya Air	6 Pengelolaan daerah rawa 7 Pengelolaan air tanah dan air baku 8 Pengelolaan bendungan 9 Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung) Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Daerah Pantai 4 Pengelolaan Daerah Pantai 4 Pengelolaan Daerah Irigasi 6 Pengelolaan Daerah Rawa 7 Pengelolaan Daerah Air Tanah & Air Baku 8 Pengelolaan Baendungan 9 Pengelolaan Tampungan Air Lainnya (Danau, Situ, Embung) Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air 8 Pengelolaan sumber daya air 9 Pengelolaan sumber daya air 1 Pengelolaan sumber daya air 2 Pengelolaan sumber daya air 2 Pengelolaan sumber daya air 3 Pengelolaan sumber daya air
145	Terampil Penata Laksana Sumber Daya Air	6 Pengelolaan daerah rawa 7 Pengelolaan air tanah dan air baku 8 Pengelolaan bendungan 9 Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung) Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Sungai 3 Pengelolaan Daerah Pantai 4 Pengelolaan Daerah Pantai 4 Pengelolaan Daerah Rawa 5 Pengelolaan Daerah Rawa 6 Pengelolaan Daerah Air Tanah & Air Baku 8 Pengelolaan Bendungan 9 Pengelolaan Tampungan Air Lainnya (Danau, Situ, Embung) Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air 1 Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan sumber daya air 2 Pengelolaan sumber daya air 2 Pengelolaan sumber daya air 2 Pengelolaan sumber daya air 3 Pengelolaan sumber daya air

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK	
		7 Pengelolaan air tanah dan air baku 8 Pengelolaan bendungan	
		Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung)	
146	Penata Mediasi Sengketa Hak	Kemampuan Umum:	
	Asasi Manusia Ahli Pertama	1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN	
		2 Permenpan 1 tahun 2023 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999	
		4 Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993	
		5 Profil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	
		6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000	
		7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012	
		Kemampuan Khusus:	
		1 Permenpan 12 Tahun 2020	
		2 Perses 19 Tahun 2020	
147	Penata Penanggulangan Bencana	3 Perses 20 Tahun 2020 Kompetensi Umum:	
1-77	Ahli Pertama	Konsep Dasar Penanggulangan Bencana	
		Kompetensi Khusus:	
		Bahan penyiapan penyusunan rencana penanggulangan bencana	
		Alur penyebarluasan dan advokasi rencana penanggulangan bencana Bahan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana	
		Bahan penyusunan rencana dikar pengulangan kedaruratan bencana Bahan penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	
		5 Bahan penyusunan rencana kontingensi	
		6 Informasi hasil kajian risiko bencana	
		7 Pemantauan risiko bencana secara berkala 8 Bahan pengembangan budaya sadar bencana	
		9 Tahapan pemeliharaan logistik dan peralatan	
		10 Konsep dasar distribusi logistik dan peralatan	
		Pelaksanaan pendampingan dalam rangka penguatan relawan dan ketahanan masyarakat dalam	
		'' penanggulangan bencana 12 Rancangan tempat evakuasi	
		13 Jalur evakuasi, pemasangan rambu dan papan informasi	
		14 Kebutuhan data dan informasi kebencanaan	
		15 Data dan informasi kebencanaan	
		16 Penataan ruang berbasis analisis risiko bencana17 Alur rancangan pengembangan Satuan Pendidikan Aman Bencana	
		Hasil analisis data dan informasi yang diperlukan untuk pembangunan dan penguatan sistem	
		peringatan dini multi ancaman bencana	
		Alur pengembangan platform sistem peringatan dini multi ancaman bencana dengan teknologi terkini Prosedur operasi standar penyebarluasan peringatan dini ke pemerintah daerah dan masyarakat	
		21 Rancangan sistem peringatan dini dengan lembaga usaha	
		22 Rancangan sistem peringatan dini dengan akademisi	
		23 Bahan latihan sistem peringatan dini tingkat regional dan internasional dalam rangka knowledge sharing	
		24 Rencana kaji cepat penanggulangan bencana	
		 Pengolahan dan analisis data dampak dan kebutuhan penanganan darurat Sajian informasi untuk rekomendasi penanganan darurat 	
		27 Bahan untuk pengambilan keputusan penetapan status keadaan darurat bencana	
		28 Bahan analisis dampak kejadian bencana dan sumber daya untuk penanganan bencana	
		29 Bahan rencana operasi penanganan darurat bencana	
		Bahan penyusunan organisasi komando penanganan darurat bencana Rencana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana	
		32 Persiapan operasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana	
		33 Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital	
		34 Bahan rencana pemulihan prasarana dan sarana vital terdampak bencana	
		 35 Bahan petunjuk pelaksanaan penanganan darurat 36 Tahapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka kegiatan logistik dan peralatan 	
		Tahapan penyusunan rencana pemulihan fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan publik, keamanan dan	
		ketertiban	
		Asistensi perencanaan pelaksanaan pemulihan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam Bahan penyusunan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam	
		40 Pemulihan dan peningkatan fisik pasca bencana	
148	Penata Penerbitan Ilmiah Ahli	Kompetensi Umum:	
	Pertama	Konsep dan strategi pemerolehan naskah atau materi audiovisual Daneana karia dan kagistan namasi dan daginingsi tahihtan ilmiah	
		Rencana kerja dan kegiatan promosi dan desiminasi terbitan ilmiah Etika publikasi dalam proses verifikasi pemerolehan naskah atau materi audiovisual	
		Kompetensi Khusus:	
		1 Penerimaan naskah atau materi audiovisual	
		Penelaahan dan penilaian naskah atau materi audiovisual Penelaahan dan penilaian naskah atau materi audiovisual	
		3 Penyuntingan 4 Desain	
		5 Produksi	
149	Penata Perlindungan Saksi dan	Kemampuan Umum:	
	Korban Ahli Pertama	1 Tugas dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	
		2 Definisi Perlindungan 3 Definisi Subyek Perlindungan	
		4 Syarat Permohonan Perlindungan	
		5 Tata Cara Pengajuan Permohonan	
		Halaman 33 dari 62	

Halaman 33 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		6 Jangka Waktu Permohonan Perlindungan
		7 Persiapan Layanan Permohonan Perlindungan
		S Jenis Tindak Pidana dalam Pemberian Perlindungan Hak Saksi dan Korban
		10 Jenis Layanan Perlindungan
		11 Jangka Waktu Pemberian Perlindungan
		Kemampuan Khusus:
		1 Investigasi
		2 Asesmen
		3 Penelaahan Dokumen Permohonan Perlindungan
		4 Telaah Materiil Permohonan
		5 Risalah Permohonan
		6 Keputusan Pemberian Perlindungan
		7 Teknis Perlindungan Fisik 8 Teknis Pemberian Bantuan Medis dan Rehabilitasi
		9 Teknis Pemenuhan Hak Prosedural
		10 Teknis Pemberian Rehabilitasi Psikososial
		11 Teknis Pemenuhan Hak Saksi Pelaku
		12 Teknis Pemenuhan Hak atas Pembiayaan
		13 Teknis Perpanjangan atau Pemberhentian Perlindungan
		14 Teknis Pemberian Perlindungan Hukum
		15 Teknis Pemberian Hak atas Informasi
150	Penata Pertanahan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Dasar pertanahan
		Kemampuan Khusus: 1 Ketentuan PPAT
		1 Ketentuan PPAT 2 Konsolidasi Tanah
		2 Konsolidasi Tanan 3 Mediasi
		4 Pemberdayaan tanah masyarakat
		5 Pembina perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang
		6 Penanganan perkara pertanahan
		7 Penanganan sengketa dan konflik pertanahan
		8 Penataan kawasan tertentu
		9 Penatagunaan tanah
		10 Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
		11 Penetapan potensi redistribusi tanah
		12 Pengadaan tanah
		13 Pengaturan pertanahan14 Pengelolaan data dan informasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
		15 Pengelolaan data Tanah Objek Reforma Agraria
		16 Pengendalian Pertanahan
		17 Penilaian tanah
		18 Pertimbangan yuridis pertanahan
		19 Teknis dan ketentuan pendaftaran tanah
		20 Teknis dan ketentuan penetapan hak tanah
151	Penata Ruang Ahli Madya	Kemampuan Umum:
		Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Kemampuan Khusus: 1 Kesesuajan kegiatan pemanfaatan ruang
		Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Penertiban pemanfaatan ruang
		3 Pengawasan penataan ruang
		4 Pengendalian pemanfaatan ruang
		5 Peninjauan kembali rencana tata ruang
		6 Penyusunan rencana tata ruang
		7 Sinkronisasi program pemanfaatan ruang
152	Penata Ruang Ahli Muda	Kemampuan Umum:
		Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Kemampuan Khusus:
		Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Penertiban pemanfaatan ruang
		Penertiban pemanfaatan ruang Pengawasan penataan ruang
		Pengawasan penataan ruang Pengendalian pemanfaatan ruang
		5 Peninjauan kembali rencana tata ruang
		6 Penyusunan rencana tata ruang
		7 Sinkronisasi program pemanfaatan ruang
153	Penata Ruang Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Kemampuan Khusus:
		1 Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
		2 Penertiban pemanfaatan ruang
		3 Pengawasan penataan ruang
		4 Pengendalian pemanfaatan ruang
		5 Peninjauan kembali rencana tata ruang
		6 Penyusunan rencana tata ruang 7 Sinkronisasi program pemanfaatan ruang
154	Peneliti Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
.54	. Sona / am i Ortaina	Butir-butir Kode Etik Peneliti; Tiga Pilar Etika.
		Pengenalan Jurnal Ilmiah dan e-journal; Prosedur dan praktek submit naskah; Praktek penggunaan
		aplikasi manajemen referensi
	•	•

Halaman 34 dari 62

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		Konsep Dasar Kekayaan Intelektual (KI) dan Sistem Perlindungan KI; Kekayaan Intelektual, Inovasi,
		dan Kegiatan Litbang; Aspek-aspek terkait KI. 4 Manajemen Penelitian; Implementasi Manajemen Penelitian
		Kompetensi Khusus:
		Filosofi dan paradigma kegiatan penelitian; Pendekatan dan metode penelitian (penelitian kuantitatif,
		1 kualitatif, dan mixed method); Invention, Inovation, Discovery (menuju ke Novelty); Implementasi
		pendekatan dan metode penelitian.
		Konsep proposal penelitian; Kriteria dan formulasi proposal penelitian; Strategi dan teknik penulisan
		2 proposal penelitian; Berpikir kritis; Teknik perumusan masalah/pertanyaan penelitian; Metodologi penelitian; Pengelolaan penelitian
		3 Data dan sumber data; Penelusuran informasi ilmiah; Metode pengumpulan data; Instrumen penelitian
		Konsep dasar pengolahan data; Metode pengolahan dan analisis data; Penyajian dan interpretasi hasil
		penelitian; Penarikan kesimpulan.
		Konsep penulisan ilmiah; Substansi, jenis, dan bentuk penerbitan untuk tulisan ilmiah; Etika publikasi ilmiah; Strategi publikasi di jurnal ilmiah.
155	Penera Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Pengetahuan umum metrologi legal
		Peraturan perundangan metrologi legal di Indonesia
		Pengadministrasian sidang tera/tera ulang Pengelolaan Cap Tanda tera
		Kompetensi Khusus:
		Peneraan Timbangan Bukan Otomatis Mekanik (persiapan pengujian, pengujian, dan pengambilan
		keputusan sah/batal terhadap TBO Mekanik)
		Peneraan Timbangan Bukan Otomatis Elektronik (persiapan pengujian, pengujian, dan pengambilan keputusan sah/batal terhadap TBO Elektronik)
		Peneraan Pompa Likur RRM (persianan pengujian, pengujian, dan pengambilan keputusan sah/hatal
		terhadap Pompa Ukur BBM)
156	Penera Terampil	Kompetensi Umum:
		Pengetahuan umum metrologi legal Peraturan perundangan metrologi legal di Indonesia
		3 Pengadministrasian sidang tera/tera ulang
		4 Pengelolaan Cap Tanda tera
		Kompetensi Khusus:
		Peneraan Timbangan Bukan Otomatis Mekanik (persiapan pengujian, pengujian, dan pengambilan
		keputusan sah/batal terhadap TBO Mekanik) Peneraan Timbangan Bukan Otomatis Elektronik (persiapan pengujian, pengujian, dan pengambilan
		keputusan sah/batal terhadap TBO Elektronik)
		Peneraan Pompa Ukur BBM (persiapan pengujian, pengujian, dan pengambilan keputusan sah/batal terhadap Pompa Ukur BBM)
157	Penerjemah Bahasa Arab Ahli	Kompetensi Umum:
	Pertama	Teori Penerjemahan
		Kompetensi Khusus:
		Merespons kaidah bahasa Indonesia Membaca teks bahasa Indonesia
		Struktur bahasa Arab dan ungkapan tulis bahasa Arab
		4 Pemahaman membaca teks bahasa Arab
	Penerjemah Bahasa Inggris Ahli	Kompetensi Umum:
	Pertama	Teori Penerjemahan
		Kompetensi Khusus: 1 Merespons kaidah bahasa Indonesia
		Membaca teks bahasa Indonesia
		Struktur bahasa Inggris dan ungkapan tulis bahasa Inggris
		4 Pemahaman membaca teks bahasa Inggris
159	Penerjemah Bahasa Mandarin Ahli Pertama	Kompetensi Umum: Teori Penerjemahan
	i Gilallia	Kompetensi Khusus:
		Merespons kaidah bahasa Indonesia
		2 Membaca teks bahasa Indonesia
		3 Struktur bahasa Mandarin dan ungkapan tulis bahasa Mandarin
160	Pengamat Gunung Api Terampil	4 Pemahaman membaca teks bahasa Mandarin Kompetensi Umum:
100	ongamat Gunung Apr Terampii	1 Tugas fungsi Pengamat Gunung Api
		2 Peran Pengamat Gunung Api
		3 Organisasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
		4 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		5 Kejadian letusan besar gunung api di Indonesia 6 Lokasi-lokasi gunung api di Indonesia
		Kompetensi Khusus:
		1 Pembentukan gunung api
		2 Istilah Kegunungapian
		Dampak gunung api Kawasan rawan bencana gunung api
		5 Produk gunung api
		6 Klasifikasi gunung api
		7 Komponen dasar elektronika
		8 Rangkaian listrik
		9 Sensor dan Transducer 10 Alat Ukur dan Pengukuran
		11 Gelombang
		Halaman 35 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		12 Thermodinamika
		13 Pengukuran dalam ilmu fisika 14 Aplikasi dalam ilmu fisika
		15 Elektromagnetika
		16 Geometri
		17 Trigonometri
		18 Statistika
		19 Diferensial, integral dan limit 20 Jaringan komputer
		21 Dasar-dasar pemrograman
		22 Elektronika digital
		23 Dasar Mikrocontroler dan Mikroprocessor
		24 Peralatan pemantauan gunung api
		25 Pengetahuan tentang pemantauan visual dan instrumental
		26 Tingkat aktivitas gunung api 27 Diseminasi informasi gunung api
161	Pengamat Gunung Api Pemula	Kompetensi Umum:
	· ongamas comeng · p· · omea	Tugas fungsi Pengamat Gunung Api
		2 Peran Pengamat Gunung Api
		3 Organisasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
		Regulasi terkait mitigasi bencana geologi Kejadian letusan besar gunung api di Indonesia
		6 Lokasi-lokasi gunung api di Indonesia
		Kompetensi Khusus:
		1 Pembentukan gunung api
		2 Istilah Kegunungapian
		3 Dampak gunung api
		4 Kawasan rawan bencana gunung api 5 Produk gunung api
		6 Klasifikasi gunung api
		7 Komponen dasar elektronika
		8 Rangkaian listrik
		9 Sensor dan Transducer
		10 Gelombang 11 Mekanika (Gaya)
		12 Geometri
		13 Trigonometri
		14 Statistika
		15 Jaringan komputer
		16 Sistem bilangan komputer 17 Peralatan pemantauan gunung api
		Penalatan pemantauan gunung api Pengetahuan tentang pemantauan visual dan instrumental
		19 Tingkat aktivitas gunung api
		20 Diseminasi informasi gunung api
		21 Lingkungan kerja Pengamat Gunung Api
162	Pengamat Tera Pemula	Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan umum kemetrologian
		Peraturan perundangan bidang metrologi, standardisasi dan perlindungan konsumen
		Kompetensi Khusus:
		1 Pengetahuan Cap Tanda Tera
		2 Pengetahuan dasar UTTP Dimensi
		Pengetahuan dasar UTTP Massa dan Timbangan Pengetahuan dasar UTTP Volume
		4 Pengetahuan dasar UTTP Volume 5 Pengetahuan dasar UTTP Listrik
		6 Pengetahuan dasar BDKT
		7 Pengetahuan dasar satuan ukuran
100	D	8 Penyuluhan Metrologi Legal
163	Pengantar Kerja Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Undang - Undang dan Peraturan - peraturan terkait Jabatan Pengantar Keria
		Undang - Undang dan Peraturan - peraturan terkait Jabatan Pengantar Kerja Asas, metode, dan teknik pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
		Data kebutuhan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
		4 Layanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
J		5 Asas, metode, dan teknik pelayanan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan
		6 Layanan kebutuhan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan
		6 Layanan kebutuhan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan Kemampuan Khusus:
		6 Layanan kebutuhan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan Kemampuan Khusus:
		6 Layanan kebutuhan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan Kemampuan Khusus: 1 Data pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 2 Asas, metode, dan teknik pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing 3 Prosedur penggunaan tenaga kerja asing
10.		6 Layanan kebutuhan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan Kemampuan Khusus: 1 Data pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 2 Asas, metode, dan teknik pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing 3 Prosedur penggunaan tenaga kerja asing 4 Klasifikasi data pelayanan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan
	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	6 Layanan kebutuhan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan Kemampuan Khusus: 1 Data pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 2 Asas, metode, dan teknik pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing 3 Prosedur penggunaan tenaga kerja asing 4 Klasifikasi data pelayanan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan Kompetensi Umum:
	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama	6 Layanan kebutuhan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan Kemampuan Khusus: 1 Data pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 2 Asas, metode, dan teknik pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing 3 Prosedur penggunaan tenaga kerja asing 4 Klasifikasi data pelayanan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan
	•	6 Layanan kebutuhan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan Kemampuan Khusus: 1 Data pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 2 Asas, metode, dan teknik pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing 3 Prosedur penggunaan tenaga kerja asing 4 Klasifikasi data pelayanan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan Kompetensi Umum: 1 Regulasi terkait Kelembagaan petani pemakai air 2 Regulasi yang mengatur pengawasan, pengujian serta sertifikasi alat dan mesin komoditas pertanian
	•	6 Layanan kebutuhan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan Kemampuan Khusus: 1 Data pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 2 Asas, metode, dan teknik pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing 3 Prosedur penggunaan tenaga kerja asing 4 Klasifikasi data pelayanan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan Kompetensi Umum: 1 Regulasi terkait Kelembagaan petani pemakai air 2 Regulasi yang mengatur pengawasan, pengujian serta sertifikasi alat dan mesin komoditas pertanian 3 Pengetahuan tentang aspek pengawasan, pengujian serta sertifikasi alat dan mesin komoditas pertanian
	•	6 Layanan kebutuhan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan Kemampuan Khusus: 1 Data pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 2 Asas, metode, dan teknik pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing 3 Prosedur penggunaan tenaga kerja asing 4 Klasifikasi data pelayanan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan Kompetensi Umum: 1 Regulasi terkait Kelembagaan petani pemakai air 2 Regulasi yang mengatur pengawasan, pengujian serta sertifikasi alat dan mesin komoditas pertanian Pengetahuan tentang aspek pengawasan, pengujian serta sertifikasi alat dan mesin komoditas pertanian Kompetensi Khusus:
	•	6 Layanan kebutuhan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan Kemampuan Khusus: 1 Data pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 2 Asas, metode, dan teknik pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing 3 Prosedur penggunaan tenaga kerja asing 4 Klasifikasi data pelayanan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan Kompetensi Umum: 1 Regulasi terkait Kelembagaan petani pemakai air 2 Regulasi yang mengatur pengawasan, pengujian serta sertifikasi alat dan mesin komoditas pertanian Pengetahuan tentang aspek pengawasan, pengujian serta sertifikasi alat dan mesin komoditas pertanian Kompetensi Khusus: Pengetahuan tentang tata cara pengawasan, pengujian serta sertifikasi alat dan mesin komoditas
	•	6 Layanan kebutuhan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan Kemampuan Khusus: 1 Data pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 2 Asas, metode, dan teknik pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing 3 Prosedur penggunaan tenaga kerja asing 4 Klasifikasi data pelayanan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan Kompetensi Umum: 1 Regulasi terkait Kelembagaan petani pemakai air 2 Regulasi yang mengatur pengawasan, pengujian serta sertifikasi alat dan mesin komoditas pertanian Pengetahuan tentang aspek pengawasan, pengujian serta sertifikasi alat dan mesin komoditas pertanian Kompetensi Khusus:

Halaman 36 dari 62

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX



Desar-desar if no pertannis : Sidogi, Morfologi umbohan, Peruliana faneman, Agronomi, Fisiologi umbohan, Harian Tannama den Pergebatian Tannama den	NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
3. Regulas Rebeljskan National can Internacional 4. Stradar Pelaksanaan pregulas repetition from transam 5. Stradar Pelaksanaan produks dan sertifikasi brinh 7. Telinis pelaksanaan produks dan sertifikasi brinh 8. Telinis pelaksanaan Pengulas Mutu Berih di Laboratorium Kompateria (Youse: 9. Stradar pelaksanaan Pengulas Mutu Berih di Laboratorium Kompateria (Youse: 1. Fengalahuan Buddaya Tamanan 2. Stradar pelaksanaan Pengulas Mutu Berih di Laboratorium Kompateria (Youse: 3. Telinis perlaksanaan Pengulas Mutu Berih di Laboratorium Kompateria (Youse: 4. Telinis perlaksanaan Pengulas Mutu Berih di Laboratorium Kompateria (Youse: 5. Telinis perlaksana dan pelapsana varietas 6. Stradar pelaksanaan Pengulas Mutu Berih di Laboratorium Kompateria (Youse: 9. International (Youse: 9. Internation			
Elizador Polis-kananan producta dina serifikasi benih			
Sandar pedesaman products dan sertificas benin			
B. Istalin dan prospecturally pelepasan varieties			
7 Tokos perlainan dan pelapasan varietas			
S Technic Pelaskannaan Percyulan Mutu Benin di Laboratorium			
Rengalaris Risussis: Pengalarisan Budidinya Tanaman			
Pengawas Benih Tanaman Ahl Pengawas Benih			
2 Standar pelaksanaan produksid dan serifikasi benih 3 Standar pelaksanaan produksid an serifikasi benih 3 Standar pelaksanaan produksid san benih tanaman 4 Tokins penilaan dan pelapasan varietas 5 Tokins penilaan dan pelapasan pengawasan peredaran benih tanaman 3 Tokins penilaan dan pengakai dan serifikas benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 3 Tokins penilaan dan pengakai dan serifikas benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 3 Tokins penilaan dan pelapasan varietas 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 3 Tokins penilaan dan pelapasan varietas 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 3 Tokins penilaan dan pelapasan varietas 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 3 Tokins penilaan dan pelapasan varietas 3			
3 Standar pelaksanaana prengawasan perdaran benih tanaman			, ,
4 Teknis penilatan dan pelapasan varietas			
5 Tenins Peristasanana Pengujan Mulu Benih di Laboratorium			
Muda			
Muda 1 Pengelahuan sumun benih tanaman 2 Dasar-desar ilmu pertainan : Biologi, Morfologi tumbuhan, Pemuliaan tanaman, Agronomi, Fisiologi 2 Dusar-desar ilmu pertainan : Biologi, Morfologi tumbuhan, Pemuliaan tanaman, Agronomi, Fisiologi 3 Regulasi Kebipikan Assonid dan Internasional 4 Standar Peliksananan pengewasan peredaran benih tanaman 5 Sandar peliksananan pengewasan peredaran benih tanaman 6 Sandar peliksananan pengewasan peredaran benih tanaman 7 Telenis pemilian dan pelepsaan varietas 8 Teknis Peliksananan Pengelakan Masional dan Internasional 9 Regulasi (Kebipikan Nasional dan Internasional 1 Regulasi (Kebipikan Nasional dan Internasional 1 Regulasi (Kebipikan Nasional dan Internasional 2 Regulasi (Kebipikan Nasional dan Internasional 3 Standar peliksananan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Standar peliksananan pengawasan peredaran benih tanaman 5 Teknis penilalan dan pelepsaan varietas 6 Teknis peliksananan pengawasan peredaran benih tanaman 7 Regulasi (Kebipikan Nasional dan Internasional 8 Pengawas Benih Tanaman Penyelele 8 Pengawas Benih Tanaman Penyelele 9 Pengawas Benih Tanaman Penyelele 9 Pengawas Benih Tanaman Penyelele 1 Regulasi anasional dan internasional 9 Pengawas Benih Tanaman Penyelele 1 Regulasi anasional dan internasional 1 Regulasi anasional dan internasional 2 Standar pelaksananan pengawasan peredaran benih tanaman 3 Standar pelaksananan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilalan dan pelepsaan varietas 5 Teknis Pelaksananan Pengulan Mutu Benih di Laboratorium 6 Regulasi Angelasi Angel	166	Pengawas Benih Tanaman Ahli	
Pengawas Benih Tanaman Ahii		•	
Europhana Hamilan Tanaman dan Penyakit Tanaman			Dagar dagar ilmu portanian : Biologi Morfologi tumbuhan Bomuliaan tanaman Agronomi Ficiologi
4 Standar Pelaksanaan pengawasan peredaran bershi tanaman 5 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran bershi tanaman 6 Istilah dan prosedur/alur pelapsaan varietas 7 Teknis pelaksanaan Pengulian Mula Benih di Laboratorium Kompeteria Khusus: 1 Pengatauan Buddaya Tanaman 2 Regulasan Pengulian Mula Benih di Laboratorium Kompeteria Khusus: 3 Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama 4 Standar pelaksanaan Pengulian Mula Benih di Laboratorium Kompeteria Khusus: 5 Teknis Pelaksanaan Pengulian Mula Benih di Laboratorium Kompeteria Khusus: 6 Teknis Pelaksanaan Pengulian Mula Benih di Laboratorium Kompeteria Khusus: 7 Sandar pelaksanaan Pengulian Mula Benih di Laboratorium Rompeteria Khusus: 8 Sandar pelaksanaan Pengulian Mula Benih di Laboratorium Rompeteria Khusus: 9 Sandar pelaksanaan Pengulian Mula Benih di Laboratorium Rompeteria Khusus: 9 Sandar pelaksanaan Pengulian Mula Benih di Laboratorium Rompeteria Khusus: 9 Sandar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 9 Sandar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 1 Teknis penlalah dian pelapsaan varietas 2 Standar pelaksanaan penguwasan peredaran benih tanaman 3 Standar pelaksanaan penguwasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penlalah dian pelapsaan varietas 1 Teknis penlalah dian pelapsaan varietas 2 Standar pelaksanaan penguwasan peredaran benih tanaman 3 Standar pelaksanaan penguwasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penlalah dian pelapsaan varietas 1 Teknis penlalah dian pelapsaan va			
Sandar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih			3 Regulasi /Kebijakan Nasional dan Internasional
6 Istlah dan prosedur/alur pelepasan varietas 7 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompeterisi Khusus: 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Pengulasi Krebijakan Nasional dan Internasional 3 Standar pelaksanaan produksi dan sertilikasi benih 4 Standar pelaksanaan produksi dan sertilikasi benih 6 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetersi Umum: Pertama 167 Pengawas Benih Tanaman Ahil Pertama 168 Pengawas Benih Tanaman Penyela 168 Pengawas Benih Tanaman Penyela 168 Pengawas Benih Tanaman Penyela 169 Pengawas Benih Tanaman Penyela 169 Pengawas Benih Tanaman Penyela 169 Pengawas Benih Tanaman Penyela 160 Pengawas Benih Tanaman Penyela 160 Pengawas Benih Tanaman Penyela 160 Pengawas Benih Tanaman Penyela 161 Pengawas Benih Tanaman Penyela 162 Pengelahuan Dudoksya Tanaman 163 Teknis penilakan nasional dan Internasional 164 Pengawas Benih Tanaman Penyela 165 Pengelahuan Unum Benih Tanaman 166 Satandar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 167 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetersi Khusus: 168 Pengawas Benih Tanaman Mahir 169 Pengawas Benih Tanaman Mahir 160 Pengawas Benih Tanaman Mahir 160 Pengawas Benih Tanaman Mahir 160 Pengawas Benih Tanaman Mahir 161 Pengawas Benih Tanaman Mahir 162 Pengawas Benih Tanaman Mahir 163 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 164 Teknis penilalan dan pelapsan varietas 165 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetersi Khusus: 1 Pengathuan Buddaya Tanaman 1 Satandar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 1 Terampi 170 Pengawas Benih Tanaman 171 Pengawas Benih Tanaman 172 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 173 Teknis penilalan dan pelapsan varietas 174 Pengawas Benih Tanaman 175 Teknis penilalan dan pelapsanan angawasan penedaran benih tanaman 176 Teknis penilalan dan pelapsanan angawasan penedaran benih tanaman 177 Pengawas Benih Tanaman 178 Pengawas Benih Tanaman 179 Pengawas Benih Tanaman 170 Pengawas Benih Tanaman 171 Pengawas Bibit Ternak Ahil 1			4 Standar Pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman
Pergawas Benih Tanaman Peryeta			5 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih
B Teknis Pelaksanaan Pengujan Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus:			6 Istilah dan prosedur/alur pelepasan varietas
B Teknis Pelaksanaan Pengujan Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus:			
Kompetensi Khusus: 1 Pengadahana Budidaya Tanaman 2 Regulasi / Kebipiakan Nasional dan Internasional 3 Sitandar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih anaman 4 Sitandar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih anaman 5 Tokins pentlalan dan pelapasan varienta Fortama			
Pengawas Benih Tanaman Ahi Pertama			
Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih			1 Pengetahuan Budidaya Tanaman
Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih			2 Regulasi /Kebijakan Nasional dan Internasional
S Teknis penilaian dan pelepasan varietas			3 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih
6 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium			4 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman
Pengawas Benih Tanaman Ahli			5 Teknis penilaian dan pelepasan varietas
Pertama			6 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium
2 Pengathuan Budidaya Tanaman Kompetensi Khusus:	167	Pengawas Benih Tanaman Ahli	Kompetensi Umum:
Kompetensi Khusus: 1		Pertama	1 Regulasi nasional dan internasional
Standar pelaksanaan pengukasan pereduran benih tanaman			2 Pengetahuan Budidaya Tanaman
2 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 3 Taknis penilaian dan pelapasan varietas Kompetensi Umum: 1 Regulasi/kebijakan nasional dan internasional 2 Pengatahuan Umum Benih Tanaman 3 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 4 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 6 Taknis Pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 5 Taknis penilaian dan pelapasan varietas 6 Taknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus: 1 Pengatahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Taknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus: 1 Regulasi/kebijakan nasional dan internasional 2 Standar pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 1 Regulasi/kebijakan nasional dan internasional 2 Standar pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 1 Pengatahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Taknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Taknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 1 Pengawas Benih Tanaman 2 Standar pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Taknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 1 Pengawas Benih Tanaman 1 Pengulasi masional dan internasional 2 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Taknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilainan dan pelepasan varietas 5 Teknis pelaksanaanan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 1 Pengawas Bibit Terna			Kompetensi Khusus:
3 Teknis penlalaran dan pelepasan varietas			
Regulasi/kebijakan nasional dan internasional			2 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman
1 Regulasi/kebiijakan nasional dan internasional 2 Pengetahuan Umum Benih Tanaman 3 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih tanaman 5 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 6 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 1 Pengetaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus: 1 Pengetaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus: 1 Pengetaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 1 Fengulasi nasional dan internasional 2 Standar pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus: 3 Standar pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus 5 Teknis Pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium 6 Kompetensi Khusus 7 Teknis penilaian dan pelapasan varietas 7 Teknis penilaian dan pelapasan varietas 8 Teknis penilain dan pela			3 Teknis penilaian dan pelepasan varietas
2 Pengetahuan Umum Benih Tanaman 3 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 4 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih tanaman 5 Teknis penilalan dan pelepasan varietas 6 Teknis penilalan dan pelepasan varietas 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan pengujan Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan penguksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan penguawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilalan dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujan Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 1 Regulasi/kebiijakan nasional dan internasional 2 Standar pelaksanaan Pengujan Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 4 Teknis penilalan dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujan Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 1 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilalan dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujan Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 1 Terampil 170 Pengawas Benih Tanaman 1 Terampil 171 Pengawas Benih Tanaman 172 Standar pelaksanaan Pengujan Mutu Benih di Laboratorium 173 Standar pelaksanaan Pengujan Mutu Benih di Laboratorium 174 Kompetensi Umum: 1 Regulasi nasional dan internasional 2 Standar pelaksanaan Pengujan Mutu Benih di Laboratorium 175 Kompetensi Umum: 2 Standar pelaksanaan Pengujan Mutu Benih di Laboratorium 176 Kompetensi Umum: 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujan Mutu Benih di Laboratorium 177 Kompetensi Umum: 1 Pengawas Bibit Ternak Ahli 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak 1 Kompetensi Umum: 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak 1 Kompetensi Umum: 1 Sistem perbibitan nasional	168	Pengawas Benih Tanaman Penyelia	
3 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 4 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 5 Teknis penilalan dan pelepasan varietas 6 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khsuss: 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilalan dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilalan dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 169 Pengawas Benih Tanaman Mahir 169 Pengawas Benih Tanaman Mahir 160 Pengawas Benih Tanaman Mahir 160 Pengawas Benih Tanaman Mahir 160 Pengawas Benih Tanaman Mahir 161 Pengalasik-bekili Mahira Mahi			
4 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 5 Teknis penlialan dan pelepasan varietas 6 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan peradaran benih tanaman 4 Teknis penlialan dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 1 Regulasi/kebiijakan nasional dan internasional 2 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penlialan dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 1 Pengawas Benih Tanaman 2 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 3 Standar pelaksanaan pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 1 Pengawas Benih Tanaman 2 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penlialan dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 1 Regulasi nasional dan internasional 2 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penlialan dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 1 Pengakas Bibit Ternak Ahli Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus 1 Pengakasanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penlialan dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penlialan dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penlialan dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penlialan dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 6			
S Teknis penilalam dan pelepasan varietas			
6 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium			
Kompetensi Khusus: 1 Pengawas Benih Tanaman			
1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 1 Regulasi/kebilijakan nasional dan internasional 2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 1 Pengawas Benih Tanaman 2 Standar pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium 1 Regulasi nasional dan internasional 2 Standar pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium 1 Regulasi nasional dan internasional 2 Standar pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium 1 Regulasi nasional dan internasional 2 Standar pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium 3 Standar pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium 3 Standar pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium 3 Standar pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium 4 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium 4 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium 5 Teknis			
2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 1 Regulasi/kebiljakan nasional dan internasional 2 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus: 1 Pengawas Benih Tanaman 2 Standar pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus tanada Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus tan			
Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman			
4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas			
Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium			
Fengawas Benih Tanaman Mahir Regulasi/kebiljakan nasional dan internasional			
1 Regulasi/kebiijakan nasional dan internasional 2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 1 Regulasi nasional dan internasional 2 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus 1 Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama 171 Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama 172 Pengawas Bibit Ternak Ahli Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak Kompetensi Khusus: 1 Sistem perbibitan nasional	400	D " -	
2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penlialian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penlialian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 170 Pengawas Benih Tanaman Terampil 1 Regulasi nasional dan internasional 2 Standar pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 1 Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama 1 Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak Kompetensi Umum: 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak Kompetensi Hinsus: 1 Sistem perbibitan nasional	169	rengawas Benih Tanaman Mahir	
3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 170 Pengawas Benih Tanaman Terampil 1 Regulasi nasional dan internasional 2 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus 1 Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama 171 Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama 172 Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama 173 Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama Pengujian Mutu Benih di Laboratorium 174 Pengawas Bibit Ternak Ahli Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak Kompetensi Khusus: 1 Sistem perbibitan nasional			• ,
4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas			
S Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman			
Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 1 Regulasi nasional dan internasional 2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus 1 Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama 171 Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak Kompetensi Khusus: 1 Sistem perbibitan nasional			
1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 1 Regulasi nasional dan internasional 2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 1 Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama			
2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 1 Regulasi nasional dan internasional 2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus 1 Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama 171 Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama 172 Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama 173 Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama 174 Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama 175 Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak Kompetensi Khusus: 1 Sistem perbibitan nasional			
3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 1 Regulasi nasional dan internasional 2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: Peraturan perundangan 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak Kompetensi Khusus: 1 Sistem perbibitan nasional			
4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 1 Regulasi nasional dan internasional 2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak Kompetensi Khusus: 1 Sistem perbibitan nasional			
Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium			
Terampil Teramp			
Terampil 1 Regulasi nasional dan internasional 2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak Kompetensi Khusus: 1 Sistem perbibitan nasional	170	Pangawaa Panih Tanaman	
2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 171 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak Kompetensi Khusus: 1 Sistem perbibitan nasional	1/0	•	
3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: Pertama 4 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak Kompetensi Khusus: 1 Sistem perbibitan nasional		ι σιαπιμπ	
4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 171 Pergawas Bibit Ternak Ahli Pertama 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak Kompetensi Khusus: 1 Sistem perbibitan nasional			
5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Nompetensi Umum: Pertama 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak Kompetensi Khusus: 1 Sistem perbibitan nasional			
Kompetensi Khusus 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: Pertama 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak Kompetensi Khusus: 1 Sistem perbibitan nasional			
1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak Kompetensi Khusus: 1 Sistem perbibitan nasional			· ,
2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak Kompetensi Khusus: 1 Sistem perbibitan nasional			
3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Umum: 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak Kompetensi Khusus: 1 Sistem perbibitan nasional			
4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium 171 Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama Kompetensi Umum: 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak Kompetensi Khusus: 1 Sistem perbibitan nasional			
5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium 171 Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama Kompetensi Umum: 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak Kompetensi Khusus: 1 Sistem perbibitan nasional			
171 Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama Kompetensi Umum: 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak Kompetensi Khusus: 1 Sistem perbibitan nasional			
Pertama 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak Kompetensi Khusus: 1 Sistem perbibitan nasional	171	Dengerrae Dikit Tamadi. Alif	
Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak Kompetensi Khusus: Sistem perbibitan nasional	1/1	•	
Kompetensi Khusus: 1 Sistem perbibitan nasional		rепата	
1 Sistem perbibitan nasional			
		l l	

Halaman 37 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

2 Taksonomi pada temak 3 Sistem reprodukt temak 4 Sistem pencentana temak 5 Sistem pencelaktim sel 8 Pertilaina kundulat dan kuantulat pada temak 9 Penanana teknologi bidang beternakan 10 Sistem pencelahan sel 11 Sistem pencelahan sel 12 Sistem pencelahan sel 13 Sistem pencelahan sel 14 Sistem bidang beternakan 15 Principa Sistem pencelahan sel 15 Principa Sistem pencelahan selatah dan terbito 14 Sistem bidang peternakan 15 Principa Sistem pencelahan 16 Pengawas Bibit Ternak Mahir 17 Pengawas Sibit Ternak Mahir 18 Sistem pencelahan selatah selat	NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
4 Sistem percentage terrais 5 Sistem bernomal terrais 6 Genetika pasta terrais 7 Sestem percentage terrais 7 Sestem percentage terrais 8 Percentage terrais 1 Sistem percentage terrais 2 Sistem percentage terrais 3 Sistem percentage terrais 4 Sistem percentage terrais 5 Percentage terrais 6 Sistem percentage terrais 7 Sistem percentage terrais 8 Sistem percentage terrais 9 Sistem percentage terrais 1 Sistem percentage terrais 1 Sistem percentage terrais 1 Sistem percentage terrais 2 Sistem percentage terrais 3 Sistem percentage terrais 3 Sistem percentage terrais 3 Sistem percentage terrais 4 Sistem percentage terrais 5 Sistem percentage terrais 6 Sistem percentage terrais 7 Sistem percentage terrais 8 Sistem percentage terrais 9 Sistem percentage terrais 1 Sistem percentage terrais 2 Sistem percentage terrais 3 Sistem percentage terrais 3 Sistem percentage terrais 3 Sistem percentage terrais 4 Sistem percentage terrais 5 Sistem percentage terrais 5 Sistem percentage terrais 6 Sistem percentage terrais 7 Sistem percentage terrais 7 Sistem percentage terrais 8 Sistem percentage terrais 9 Sistem percentage terrais 1 Sistem percentage ter			
6 Sustern hormonal termak 7 Sustern permbelahan set 8 Persilahan septial frank Numeritärif pada ternak 9 Persilahan setjalen dan kusuritärif pada ternak 10 Sustern permbelahan set 11 Sustern permbelahan set 12 Istaliah bidang peternakan 13 Sustern permbelahan setjalen peternakan 14 Sustern bidang peternakan 15 Sustern permbelahan setjalen peternakan 16 Sustern bidang peternakan 17 Septial bidang peternakan 18 Sustern permbelahan setjalen dan Transfer Embrio 18 Persilahan peternakan dan Transfer Embrio 19 Persilahan perturbangan dan Transfer Embrio 19 Ternakan dan Transfer Embrio 19 Ternakan dan Transfer Embrio 19 Ternakan dan Transfer Embrio 19 Sustern permbeliahan ternak 19 Ternakan dan Transfer Embrio 19 Sustern permbeliahan ternak 19 Ternakan dan Transfer Embrio 19 Sustern permbeliahan ternak 19 Ternakan dan Transfer Embrio 19 Sustern permbeliahan ternak 19 Ternakan dan Transfer Embrio 19 Sustern permbeliahan ternak 19 Ternakan dan Transfer Embrio 19 Sustern permbeliahan ternak 19 Ternakan dan Transfer Embrio 19 Sustern permbeliahan ternak 19 Ternakan dan Transfer Embrio			
Committee Comm			
8 Pennikan kusatitatif dan kusantiatif pada ternak 9 Penniqaan kehindool bidang peternakan 10 Sistem uji penforma dan uji zuriat 112 Sistem jangulijan pada ternak 112 Sistem jangulijan pada ternak 113 Sistem jangulijan pada ternak 114 Sistem bidang peternakan 15 Pences Inseminasis Bistan dan Transfer Embrio 15 Pengawas Bibit Ternak Mahir 16 Pengawas Bibit Ternak Mahir 17 Pendang peternakan 18 Pendang peternakan 19 Sistem pendangan peternakan 19 Sistem pendangan peternakan 19 Pendangan pendangan peternakan 19 Sistem pembibian ternak 19 Sistem pembibian ternak 19 Sistem pembibian ternak 19 Sistem pembibian pernakan 19 Pendangan pendangan peternakan 19 Sistem pembibian ternak 19 Sistem pembibian ternak 19 Sistem pembibian ternak 19 Sistem pembibian ternak 19 Sistem pendangan pendangan pendangan bidang pengawasan bata tradisional, kosmetaka, dan produk 19 Pendangan pendangan di bidang pengawasan bata tradisional, kosmetaka, dan produk 19 Pendangan Pendangan pendangan di bidang pengawasan bata tradisional, kosmetaka, d			
173 Pengawas Bibit Ternak Mahrr Sistem pengulain pada ternak Sistem pengulain pada ternak Sistem produksi semerin bibut dan embrio Sistem pengulain pengulain dan Transfer Embrio Sistem pengulain pengulain Sistem pe			
10. Sistem up performa dan ui zuriat 11. Sistem progujian pada termak 12. Islaih bidan pudermaken 13. Sistem propulsian pada termak 13. Sistem propulsian pada termak 14. Sistem perpoduksi semen bidu dan embrio 15. Proses inserencesa Bustan dan Transfer Embrio 16. Disagnosa gelaja penyaket secaria sederhana 17. Pengawas Bibit Termak Mahir 18. Pentaruan perundangan 19. Penerapan SNI Benh Sibit Termak 19. Penerapan SNI Benh Sibit Termak 19. Pentaruan perundangan 19. Penerapan SNI Benh Sibit Termak 19. Sistem penoruban termak 10. Sistem penoruban termak 10. Sistem penoruban termak 11. Sistem penoruban termak 12. Inserimena bustan dan transfer embrio 13. Sistem penoruban termak 14. Sistem penoruban termak 15. Sistem penoruban termak 16. Sistem penoruban termak 17. Sistem senaruban dan termak 18. Sistem penoruban termak 19. Sistem penoruban termak 19. Sistem penoruban termak 19. Sistem penoruban termak 10. Sistem penduksi semen belan dan termak 10. Sistem penduksi semen belan dan dan dan dan dan dan dan dan dan d			
172 Pengawas Bibit Temak Mahir 173 Sistem produksi semen beku dan embrio 175 Pengawas Bibit Temak Mahir 176 Pengawas Bibit Temak Mahir 177 Pengawas Bibit Temak Mahir 178 Pengawas Bibit Temak Mahir 178 Pengawas Bibit Temak Mahir 179 Pengawas Bibit Temak Mahir 179 Pengawas Bibit Temak Mahir 170 Pengawas Bibit Temak Mahir 180 Pengawas Bibit Temak Mahir 190 Pengawas Bibit Temak Mahir 191 Pengawas Bibit Temak Mahir 192 Pengawas Bibit Temak Mahir 193 Pengawas Bibit Temak Mahir 194 Pengawas Bibit Temak Mahir 195 Pengawas Bibit Temak Mahir 196 Pengawas Bibit Temak Mahir 197 Pengawas Bibit Temak Mahir 197 Pengawas Bibit Temak Mahir 197 Pengawas Bibit Temak Mahir 198 Pengawas Mahir 198			
12 Islant bidanop peternakan 13 Sistem poduksi semen beku dan embrio 14 Sistem bidanop peternakan 15 Proses heminasi Bustan dan Transfer Embrio 16 Diagnosa geleta peripakti secara sederhana Semperatus Umum. 2 Pengawas Bibit Ternak Mahir 2 Pengawas Bibit Ternak Mahir 3 Pengamasi Bustan dan Transfer Embrio 17 Pengawas Bibit Ternak Mahir 4 Pengawas Bibit Ternak Mahir 5 Sistem pendibutan ternak 6 Sistem pendibutan ternak 7 Sistem pendibutan ternak 7 Sistem pendibutan ternak 8 Sistem pendibutan ternak 9 Sistem pendibutan ternak 9 Sistem pendibutan ternak 10 Sistem pendibutan ternak 11 Sistem pendibutan ternak 12 Inseminasi bustan dan ternak Uji Performa dan Uji Zuriat 18 Sistem pendibutan ternak Uji Performa dan Uji Zuriat 19 Pengawas Bibit Ternak Terampia 10 Sistem produksi semen beku dan embrio 11 Sistem manajenen bidanop peternakan 10 Sistem produksi semen beku dan embrio 11 Sistem pendibutan ternak 12 Inseminasi bustan dan transfer embrio 13 Kespatian bewan sederhana 14 Sistem pendibutan ternak 15 Sistem pendibutan ternak 16 Sistem pendiksi ternak 17 Sistem sembitan ternak 18 Sistem pendiksi ternak 19 Sistem pendiksi ternak 19 Sistem pendiksi ternak 19 Sistem pendiksi ternak 19 Sistem pendiksi ternak 10 Sistem pendiksi ternak 11 Sistem manajenen bidang pengawasan obet tradisional, kosmelika, dan produk 11 Sistem manajenan bidang pengawasan obet tradisional, kosmelika, dan produk 11 Sistem mengalan pendikangan di bidang pengawasan obet tradisional, kosmelika, dan produk 11 Sistem mengalan pendiksi dan pengawasan pengan 12 Pentaharan Perundangan dibidang pengawasan obet tradisional, kosmelika, dan produk 13 Tata cara registrasi obat 14 Tata cara registrasi obat 15 Tata cara registrasi obat 16 Tata cara registrasi obat 17 Pendikan pengawasan sarana poduksi (Da			
172 Pengawas Bibit Temak Mahir 18 Pengawas Bibit Temak Mahir 19 Sisten pengadas Islamia Mahir 19 Sisten pengadas Islamia Mahir 10 Sisten pengadas Islamia Mahir 11 Sisten manajemen bidang peternakan 12 Islamia Bautan dan transier embrio 13 Kasehatan bewan sederhana Kompeterol Umum: 19 Pengawas Bibit Temak Terampal 173 Pengawas Bibit Temak Terampal 174 Pengawas Bibit Temak Terampal 175 Pengawas Bibit Temak Terampal 176 Pengawas Bibit Temak Terampal 177 Pengawas Bibit Temak Terampal 178 Pengawas Bibit Temak Terampal 179 Pengawas Bibit Temak Terampal 179 Pengawas Bibit Temak Terampal 170 Pengawas Bibit Temak Terampal 170 Pengawas Bibit Temak Terampal 170 Pengawas Bibit Temak Terampal 171 Pengawas Bibit Temak Terampal 172 Pengawas Bibit Temak Terampal 173 Pengawas Bibit Temak Terampal 174 Pengawas Bibit Temak Terampal 175 Pengawas Bibit Temak Terampal 176 Pengawas Bibit Temak Terampal 177 Pengawas Bibit Temak Terampal 178 Pengawas Bibit Temak Terampal 179 Pengawas Bibit Temak Terampal 170 Pengawas Bibit Temak Terampal 170 Pengawas Bibit Temak Terampal 170 Pengawas Bibit Temak Terampal 171 Pengawas Bibit Temak Terampal 172 Pengawas Bibit Temak Terampal 173 Pengawas Bibit Temak Terampal 174 Pengawas Bibit Temak Terampal 175 Pengawas Bibit Temak Terampal 176 Pengawas Bibit Temak Terampal 177 Pengawas Bibit Temak Terampal 178 Pengawas Terampal dan Mahiran 178 Pengawas Terampal dan Mahiran 179 Pengawas Terampal dan Mahiran 179 Pengawas Teram			,
172 Pengawas Bibli Temak Mahir 172 Pengawas Bibli Temak Mahir 173 Pengawas Bibli Temak Mahir 174 Pengawas Bibli Temak Mahir 175 Pengawas Bibli Temak Mahir 176 Pengawas Bibli Temak Mahir 177 Pengawas Bibli Temak Mahir 178 Pengawas Bibli Temak Mahir 179 Pengawas Bibli Temak Mahir 170 Pengawas Bibli Temak Mahir 170 Pengawas Bibli Temak Mahir 171 Pengawas Bibli Temak Mahir 172 Pengawas Bibli Temak Mahir 173 Pengawas Bibli Temak Mahir 174 Pengawas Bibli Temak Mahir 175 Pengawas Bibli Temak Mahir 176 Pengawas Bibli Temak Mahir 177 Pengawas Bibli Temak Mahir 178 Pengawas Bibli Temak Mahir 179 Pengawas Bibli Temak Mahir 170 Pengawas Pengawas Mahir 170 Pengawas Pengawas Mahir 171 Pengawas Pengawas Mahir 172 Pengawas Pengawas Mahir 173 Pengawas Pengawas Mahir 174 Pengawas Pengawas Mahir 175 Pengawas Pengawas Mahir 176 Pengawas Pengawas Mahir 177 Pengawas Pengawas Mahir 178 Pengawas Pengawas Mahir 179 Pengawas Pengawas Mahir 179 Pengawas Pengawas Mahir 170 Pengawas Pengawas Mahir 1			
172 Pengawas Bibit Temak Mahir 1 Peraturan perudangan 1 Pentangan SNI Benih Bibit Temak Kompetensi Umum: 1 Peraturan perudangan 2 Penerapan SNI Benih Bibit Temak Kompetensi Umum: 2 Penerapan SNI Benih Bibit Temak Kompetensi Umum: 3 Penerapan SNI Benih Bibit Temak 4 Pentangan SNI Benih Bibit Temak 5 Penerapan SNI Benih Bibit Temak 6 Pentangan Pendangan Inda Penak 7 Sistem homonal pada temak 8 Residua pengalian temak Mily Penforma dan Uji Zuriat 9 Isilah peterakan 10 Sistem produksi semen beku dan embrio 11 Sistem manajeenen bideng peterakan 12 Penerapan SNI Benih Bibit Temak 13 Kompetensi Umum: 14 Pentangan SNI Benih Bibit Temak 15 Sistem pendibitan temak 16 Sistem pendibitan temak 17 Sistem pendibitan temak 18 Sistem pendibitan temak 19 Sistem pendibitan temak 19 Sistem pendibitan temak 10 Sistem pendibitan temak 10 Sistem pendibitan temak 10 Sistem pendibitan temak 11 Sistem pendibitan temak 12 Sistem pendibitan temak 13 Sistem reproduksi temak 14 Sistem pendibitan temak 15 Sistem pendibitan temak 16 Sistem pendibitan temak 17 Sistem pendibitan temak 18 Sistem reproduksi temah 19 Sistem pendibitan temak 19 Sistem pendibitan temak 10 Sistem pendibitan temak 10 Sistem pendibitan temak 11 Sistem manajemen bidang peterakan 10 Sistem pendibitan temak 11 Sistem manajemen bidang peterakan 11 Sistem manajemen bidang peterakan 12 Inseminasi buatan dari transfer embrio 13 Keephatan hewan sederapan dibitang pengawasan obat 14 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat 15 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat 16 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk 18 Sistem informasi dan teknologi di lingkungan BPOM 18 Kemampuan Umum: 18 Sistem informasi dan teknologi di lingkungan BPOM 18 Sistem informasi dan teknologi di lingkungan BPOM 18 Sistem informasi dan teknologi di lingkungan BPOM 19 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, sata dara pengalistan pengawasan sanana poduksi (Obat, PB, dan NAPZA) 19 Regulasi dalam pengawasa			
Kompetensi Umum: Pendrayan Sibit Ternak Mehir			
1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Benih Piblish Ternak Kompetensi Khusus: 1 Sistem pembibitan ternak 2 Taksonomi pada ternak 3 Sistem percenaan ternak 4 Sistem percenaan ternak 5 Sistem percenaan ternak 6 Genetika pada ternak 7 Sista kualariat dan kuantahat ternak 9 Sistem pencenaan ternak 1 Sistem pencenaan ternak 2 Sista kualariat dan kuantahat ternak 3 Sistem pencenaan ternak 1 Sistem pencenaan 1 Sistem manajemen beku dan embric 1 Sistem manajemen bidang peternakan 1 Sistem manajemen bidang peternakan 1 Sistem pencenaan Sulta ternak 1 Kompetensia Umuri 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Benih Ribit Ternak Kompetensi Khusus: 1 Sistem pembibitan ternak 2 Taksonomi pada ternak 3 Sistem pencenaan ternak 4 Sistem pencenaan ternak 5 Sistem pencenaan ternak 6 Sistem pencenaan ternak 7 Sista kualariat dan kuantataf ternak 8 Sistem pencenaan ternak 9 Sistem pencenaan ternak 1 Sistem pencenaan ternak 1 Sistem pencenaan ternak 1 Sistem pencenaan ternak 1 Sistem pencenaan ternak 2 Sista kualariat dan kuantataf ternak 3 Sistem pencenaan ternak 4 Sistem pencenaan ternak 5 Sista kualariat dan kuantataf ternak 8 Metode pengilain ternak kil) Performa dan Uji Zuriat 9 Isilah peternakan 1 Sistem pencenaan ternak 1 Sistem pencenaan ternak 1 Sistem pencenaan ternak 1 Sistem pencenaan ternak 2 Taksonomi pada ternak 3 Metode pengilain ternak kil) Performa dan Uji Zuriat 9 Isilah peternakan 1 Sistem pencenaan ternak 1 Sistem pencenaan ternak 2 Taksonomi pada ternak 3 Metode pengilain ternak kil) Performa dan Uji Zuriat 9 Isilah peternakan 1 Sistem pencenaan ternak 1 Penaturan Penundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 1 Separatan Penundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 2 Penaturan Penundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 2 Separatan Penundang-undanga	172	Pengawas Rihit Ternak Mahir	
Kompetensi Khusus: 1	''-	Tongawas Bisit Tomat Marin	
1 Sistem permibilata ternak 2 Taksonomi pada ternak 3 Sistem reproduksi ternak 4 Sistem percensan ternak 5 Sistem memoral pada ternak 6 Genetika pada ternak 7 Sifat kualitari dan kuantitari femak 8 Metode pengujata menkuliji Performa dan Uji Zuriat 9 Istilah peternakan 10 Sistem produksi semen beku dan embrio 11 Sistem manajemen bidarap peternakan 11 Sistem manajemen bidarap peternakan 12 International budatan dari Parafel embrio 11 Sistem manajemen bidarap peternakan 12 International budatan dari Parafel embrio 12 Penerapan Sistema 12 Penerapan Sistema 12 Penerapan Sistema 12 Penerapan Sistema 13 Sistem pembibitan ternak 13 Sistem pembibitan ternak 14 Penerapan Sistema 14 Penerapan Sistema 14 Penerapan Sistema 14 Penerapan Sistema 15 Sistem pembibitan ternak 16 Sistem pembibitan ternak 16 Sistem pembibitan ternak 17 Sistem pembibitan ternak 18 Sistem pembibitan t			2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak
2 Taksonomi pada ternak 3 Sistem perpoduksi ternak 4 Sistem perpoduksi ternak 5 Sistem hormoral pada ternak 6 Genetika pada ternak 7 Sirlat kualitatif dan kuantitatif ternak 8 Metode pengujuan ternak/Liji Performa dan Uji Zuriat 9 Isitali peternakan 10 Sistem produksi semen beku dan embrio 11 Sistem manajemen bidang peternakan 11 Sistem manajemen bidang peternakan 12 Inseminasi buatan dan transfer embrio 13 Kesenstan hewan sederihana Kompetensi Umum: 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Berin/Bibla Ternak Kompetensi Umum: 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Berin/Bibla Ternak Kompetensi Umum: 2 Sistem pembibatan ternak 2 Sistem pembibatan ternak 2 Sistem pembibatan ternak 3 Sistem pembibatan ternak 4 Sistem pembibatan ternak 5 Sistem pembibatan ternak 6 Genetika pada ternak 7 Sirat kualitatif dan kuantitatif ternak 8 Metode pengujan ternak/Liji Performa dan Uji Zuriat 9 Isitali peternakan 10 Sistem produksi semen beku dan embrio 11 Sistem produksi semen beku dan embrio 11 Sistem produksi semen beku dan embrio 11 Sistem manajemen bidang peternakan 12 Inseminasi buatan dan transfer embrio 13 Kesehatan hewan sederihana Kemampuan Umum: 1 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 3 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 3 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 1 Sistem Manajemen Mulu 1 Kemampuan Khusus: 1 Tata cara registrasi obat tradisional 2 Tata cara registrasi obat tradisional 3 Tata cara registrasi obat tradisional 3 Tata cara registrasi obat tradisional (Sistem) Politika dan pengawasan pangan 1 Perilikan pengaksan sarana produksi (Obat, PB, dan NAPZA) 9 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi (Obat, PB, dan NAPZA) 1 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi (Obat, PB, dan NAPZA) 1 Penilian registrasi produk spengawasan sarana produksi dan distribusi pangan 1 Prinsip-prinsip CPRO (Konsepkasan sarana distribusi dan pelayanan			
Sistem reproduksi ternak			
4 Sistem percentant ternak 5 Sistem percentant ternak 6 Genetika pada ternak 7 Silat kualitatif dan kuantitatif ternak 8 Metode pengujan ternak/Liji Performa dan Liji Zuriat 9 Istilah peternakan 10 Sistem produksi semen beku dan embrio 11 Sistem manajemen bidang peternakan 11 Sistem manajemen bidang peternakan 12 Inseminasi buatan dan transfer embrio 13 Kesebatan hewan sederhana Kompetensi Umum: 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNB Benin Bibih Ternak Kompetensi Umum: 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNB Benin Bibih Ternak Kompetensi Umum: 2 Penerapan SNB Benin Bibih Ternak Kompetensi Khusus: 1 Sistem perobibatan ternak 2 Taksonomi pada ternak 2 Sistem perobibatan ternak 3 Sistem percenanan ternak 4 Sistem percenanan ternak 5 Sistem percenanan ternak 6 Genetika pada kersak 7 Sista kualitatif dan kuantitatif ternak 8 Metode pengujan ternak/Liji Performa dan Liji Zuriat 9 Istilah peternakan 10 Sistem produksi semen beku dan embrio 11 Sistem pada dengan ternak 11 Inseminasi buatan dan transfer embrio 13 Kesebatan hewan sederhana 12 Inseminasi buatan dan transfer embrio 13 Kesebatan hewan sederhana 14 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk kompetens 15 Sistem Manajemen Mutu 16 Komunikasi risiko bidang pengawasan pangan 17 Kejadan terkait bahaya dan itatu risiko di bidang pengawasan umum 18 Sistem Manajemen Mutu 19 Taturan Perundang-undangan di bidang pengawasan umum 19 Sistem Manajemen Mutu 19 Taturan Perundang-undangan di bidang pengawasan pangan 19 Peraturan Perundang-undangan di bidang			
Sistem hormonal pada ternak			
Genetika pada ternak			5 Sistem hormonal pada ternak
B. Metode pengujan ternak Uji Performa dan Uji Zuriat 9. Istilah peternakan 10. Sistem produksi semen beku dan embrio 11. Sistem manajemen bidang peternakan 12. Inseminasi buatan dan transfer embrio 13. Kesehatan hewan saderhana Kompetensi Umum: 1. Peraturan perundangan 2. Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak Kompetensi Umum: 1. Peraturan perundangan 2. Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak Kompetensi Khusus: 1. Sistem penbibitan ternak 2. Taksonomi pada ternak 3. Sistem reproduksi ternak 4. Sistem pencemaan ternak 4. Sistem pencemaan ternak 6. Genetika pada ternak 7. Sirlat kualitatif dan kuantitatif ternak 8. Metode pengujan ternak 9. Istilah peternakan 10. Sistem manajemen bidang peternakan 10. Sistem manajemen bidang peternakan 10. Istem manajemen bidang peternakan 11. Sistem manajemen bidang peternakan 12. Inseminasi buatan dan transfer embrio 13. Kesehatan hewan sederhana Kemampuan Umum: Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk Komplemen Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk Komplemen Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan umum Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan uman pangan di Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan uman di Peraturan Perun			
9 Istlish peternakan 10 Sistem produksi semen beku dan embrio 11 Sistem manajemen bidang peternakan 12 Inseminasi buatan dan transfer embrio 13 Kesehatan hewan sederhana Kompetensi Umum: 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Bentri/Bibit Ternak Kompetensi Khusus: 1 Sistem pembidian ternak 2 Taksonomi pada ternak 3 Sistem reproduksi ternak 4 Sistem pencernaan ternak 5 Sistem hormonal pada ternak 6 Genetika pada ternak 7 Sifat buatitati dan kuantitadi ternak 8 Metode penguian ternak Uij Zuriat 9 Istliah peternakan 10 Sistem produksi semen beku dan embrio 11 Sistem manajemen bidang peternakan 11 Sistem manajemen bidang peternakan 12 Inseminasi buatan dan transfer embrio 13 Kesehatan hewan sederhana Kemanpuan Umum. 14 Peraturan Porundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 1 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 1 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 1 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 1 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 1 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 2 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 3 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan umum 5 Sistem Manajemen Mutu 6 Komurikasi risko bidang obat dan makanan 7 Kejadian terkati bahaya dan/atau risko di bidang Obat dan Makanan 8 Sistem informasi dan teknologi di lingkungan BPOM Kemampuan Khusus: 1 Tata cara registrasi obat tradisional dan Suplemen Kesehatan 10 Regulasi dalam registrasi pangan olahan tingkat dasar 11 Penjalasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi panga			
10 Sistem produksi semen beku dan embrio 11 Sistem manajemen bidang peternakan 12 Inseminasi buatan dan transfer embrio 13 Kesehatan hewan sederhana 12 Pengawas Bibit Ternak Terampil 1			
11 Sistem manajemen bidang peternakan 12 Inseminasi buatan dan transfer embrio 13 Kesehatan hewan sederhana Kompetensi Umum: 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak Kompetensi Khusus: 1 Sistem penembidian ternak 2 Taksonomi pada ternak 2 Taksonomi pada ternak 3 Sistem pengembalan ternak 4 Sistem penembanan ternak 4 Sistem penembanan ternak 5 Sistem penembanan ternak 6 Genetika pada ternak 6 Genetika pada ternak 7 Sirlat kualitatif dan kuantitatif ternak 8 Metode pengujian ternak/Uji Performa dan Uji Zuriat 9 Istilah peternakan 10 Sistem produksi semen beku dan embrio 11 Sistem manajemen bidang peternakan 12 Inseminasi buatan dan transfer embrio 13 Sistem preduksi semen beku dan embrio 13 Sistem penduksi semen beku dan embrio 14 Sistem perundangan dan dan transfer embrio 15 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan bangan 4 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan pangan 4 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan bangan 4 Peraturan Perundang-undangan di bidang			
173 Pengawas Bibit Temak Terampii 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SN Bib Benih Bibit Temak 3 Kompetensi Khusus: 1 Sistem pembibatan temak 2 Taksonomi pada temak 3 Sistem reproduksi temak 4 Sistem peneraman temak 5 Sistem hormonal pada temak 6 Genetika pada temak 7 Sifat kualitatif dan kuantitatif temak 8 Metode penguina temak/10 silitah petemakan 10 Sistem produksi semah 11 Sistem peneraman temak 11 Sistem peneraman temak 12 Inamanal pada temak 13 Sistem pengundan temak/10 silitah petemakan 14 Inamanal Petemakan 15 Sistem produksi semen beku dan embrio 11 Sistem produksi semen beku dan embrio 12 Inaminasi buatan dan transfer embrio 13 Kesehatan hewan sederhana Kemanpuan Ilmum: 1 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat 1 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat reproduksi komplemen 13 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat reproduksi komplemen 14 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan upana 14 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan upanamanal Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan upanamananananananananananananananananana			
Kompetensi Unrum: Pengawas Bibit Ternak Terampil Kompetensi Khusus: Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak Kompetensi Khusus: Sistem pembibitan ternak Taksonomi pada ternak Taksonomi pada ternak Sistem pencernaan ternak Sistem pencernaan ternak Sistem pencernaan ternak Sistem hormonan pada ternak Sistem hormonan pada ternak Genetika pada ternak Repulsa dalam manali			
1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SN Benith Bibit Temak Kompetensi Khusus: 1 Sistem pembibitan ternak 2 Taksonomi pada ternak 3 Sistem reproduksi ternak 4 Sistem peneraman ternak 5 Sistem hormonal pada ternak 6 Genetika pada ternak 7 Silat kualitatif dan kuantitatif ternak 8 Medode penguian ternak Uji Performa dan Uji Zuriat 9 Isitilah peternakan 10 Sistem produksi semen beku dan embrio 11 Sistem manajemen bidang peternakan 11 Sistem manajemen bidang peternakan 12 Inseminasi buatan dan transfer embrio 13 Sistem manajemen bidang peternakan 14 Peraturan 15 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 2 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 3 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan apnagan 4 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan unum 5 Sistem Manajemen Mutu 6 Komunlikasi risiko bidang obat dan makanan 7 Kojadian terkaki bahaya dan/atatu risiko di bidang Obat dan Makanan 8 Sistem informasi dan teknologi di lingkungan BPOM Kemampuan Khusus: 1 Tata cara registrasi obat 2 Tata cara registrasi obat 2 Tata cara registrasi porduk kosmetika 6 Tata cara registrasi porduk kosmetika 7 Penilalan registrasi pangan olahan 1 Peralusi dalam pengawasan sarana produksi (Dbat, PB, dan NAPZA) 9 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan 12 Prinsip-prinsip CPOB (Konsep dasar kemantan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prir CPPB RTP 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 18 Prinsip-prinsip CPPOB (Konsep dasar kemantan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prir CPPB RTP	170	December 2016 A Tempel Temper 1	
2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak Kompetensi Khsus: 1 Sistem pembibitan ternak 2 Taksonomi pada ternak 3 Sistem perpoduksi ternak 4 Sistem perpoduksi ternak 5 Sistem bencernaan ternak 5 Sistem bencernaan ternak 6 Genetika pada ternak 7 Sifat kualitatif dan kuanitatif ternak 8 Metode pengujian ternak/Uji Performa dan Uji Zuriat 9 Sistam produksi semen beku dan embrio 10 Sistem produksi semen beku dan embrio 11 Sistem manajemen bidang peternakan 10 Sistem produksi semen beku dan embrio 11 Sistem manajemen bidang peternakan 12 Inseminasi buatan dan transfer embrio 13 Kesehatan hewan sederhana 12 Inseminasi buatan dan transfer embrio 13 Kesehatan hewan sederhana 14 Renampuan Umum: 1 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 3 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 4 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan umum 5 Sistem Manajemen Mutu 6 Komunikasi risiko bidang obat dan makanan 7 Kejadian terkati bahaya danrakau risiko di bidang Obat dan Makanan 8 Sistem Informasi dan teknologi di lingkungan BPOM Kemampuan Khusus: 1 Tata cara praregistrasi obat 2 Tata cara registrasi obat 3 Tata cara registrasi pangan olahan 6 Tata cara notifikasi produk kosmetika 6 Tata cara pralistrasi porduk suplemen kesehatan 7 Penilaian registrasi pangan olahan tingkat dasar 8 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi (Doat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 10 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi (Doat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 12 Prinsip-prinsip CPOB (Konsep dasar kemanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prinsip CPOB (Konsep dasar kemanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prinsip CPOB (Konsep dasar kemanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prinsip CPOB (Konsep dasar kemanan pangan dan Suplemen Kesehatan 15 Prinsip-prinsip CPOB (Konsep dasar kemanan pangan dan higiene sa	1/3	Pengawas Bibit Ternak Terampii	
Kompetensi Khusus: 1 Sistem permbibitan ternak			
2 Taksonomi pada ternak 3 Sistem reproduksi ternak 4 Sistem pencernaan ternak 5 Sistem hormonal pada ternak 7 Sifat kualitatif dan kuantitatif ternak 8 Metode pengujan ternak(U) Performa dan Uji Zuriat 9 Istilah peternakan 10 Sistem produksi semen beku dan embrio 11 Sistem morduksi semen beku dan embrio 11 Sistem morduksi semen beku dan embrio 11 Sistem morduksi semen beku dan embrio 13 Kesehatan hewan sederhana 14 Inseminasi buatan dan transfer embrio 13 Kesehatan hewan sederhana 15 Inseminasi buatan dan transfer embrio 16 Kesehatan hewan sederhana 17 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 18 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 19 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan bat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 19 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan bat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 19 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan bat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 20 Peraturan Perundangan di bidang pengawasan bat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 21 Peraturan Perundangan di bidang bengawasan bat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 22 Peraturan Perundangan di bidang bengawasan bat tradisional, kosmetika, dan produksi dan teknologi di lingkungan BPOM 23 Kenampuan khusus: 11 Tata cara registrasi obat tradisional 12 Tata cara registrasi obat tradisional 13 Tata cara registrasi obat tradisional 14 Tata cara registrasi obat tradisional 15 Tata cara notifikasi produk kopmenika 16 Tata cara penlialan registrasi pangan olahan lingkat dasar 18 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 19 Penlialan registrasi pangan olahan lingkat dasar 10 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 11 Prinsip-prinsip CPOB Bidan CPKB untuk golongan B 15 Prinsip-prinsip CP			Kompetensi Khusus:
3 Sistem reproduksi ternak 4 Sistem pencernaan ternak 5 Sistem hormonal pada ternak 6 Geretika pada ternak 7 Sirat kualitatif dan kuantitatif ternak 8 Metode pengujan ternak/Uji Performa dan Uji Zuriat 9 Istilah peternakan 10 Sistem produksi semen beku dan embrio 11 Sistem manajemen bidang peternakan 12 Inseminasi buatan dan transfer embrio 13 Kesehatan hewan sederhana Kemampuan Umum: 1 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk kemampuan Umum: 5 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan bat tradisional, kosmetika, dan produk kemampuan Umum: 6 Kemampuan Umum: 7 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan pangan 1 Peraturan Perundang-undangan di bidang bengawasan umum 1 Sistem Manajemen Mutu 1 Kemampuan Mutu 1 Kemampuan Mutusi Sistem Manajemen Mutu 1 Kemampuan Kinusus: 1 Tata cara registrasi risko bidang obat dan makanan 7 Kejadian terkait bahaya dan/atau risiko di bidang Obat dan Makanan 8 Sistem informasi dan teknologi di lingkungan BPOM Kemampuan Khusus: 1 Tata cara registrasi obat 2 Tata cara registrasi obat tradisional 4 Tata cara registrasi obat tradisional 7 Tata cara registrasi obat tradisional 7 Tata cara registrasi produk kuplemen kesehatan 5 Tata cara negistrasi produk kuplemen kesehatan 7 Penilaian registrasi produk kuplemen kesehatan 7 Penilaian registrasi produk kuplemen kesehatan 8 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi di dan distribusi koametelt 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi di dan distribusi koametelt 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi di dan distribusi koametelt 11 Pengalasi dalam pengawasan sarana produksi di dan distribusi pangan 12 Prinsip-prinsip CPOB terkini dan CPOB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 14 Prinsip-prinsip CPOB terkini dan CPOB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 15 Prinsip-prinsip CPOB di dan Appa dan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prinsip CPOB di dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan N			
4 Sistem percemaan ternak 5 Sistem hormonal pada ternak 6 Genetika pada ternak 7 Sifat kualitatif dan kuanitatif ternak 8 Metode pengujian ternak(U) Performa dan Uji Zuriat 9 Istilah peternakan 10 Sistem produksi semen beku dan embrio 11 Sistem motuksi semen beku dan embrio 11 Sistem motuksi semen beku dan embrio 12 Inseminasi buatan dan transfer embrio 13 Kesehatan hewan sederhana Kemampuan Umum: 1 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 3 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 5 Sistem Manajemen Mutu 6 Komunikasi risiko bidang obat dan makanan 7 Kejadian terkait bahaya dan/atau risiko di bidang Obat dan Makanan 8 Sistem informasi dan teknologi di lingkungan BPOM Kemampuan Khusus: 1 Tata cara registrasi obat 2 Tata cara registrasi obat 2 Tata cara registrasi obat 3 Tata cara registrasi obat 4 Tata cara registrasi obat 5 Tata cara registrasi obat 7 Penilaian registrasi produk kosmetika 6 Tata cara penilaian registrasi pangan olahan 7 Penilaian registrasi pangan olahan registrasi badi dalam pengawasan sarana produksi (Obat, PB, dan NAPZA) 9 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan 12 Prinsip-prinsip CPOB terkini dan CPOB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 14 Prinsip-prinsip CPOB terkini dan CPOB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 15 CPPB IRTP 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 18 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 19 Prinsip-prinsip CPOB (konsep dasar kemanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prinsip CPOB (konsep dasar kemanan pangan dan pingayaban Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam p			
5 Sistem hormonal pada ternak 6 Genetika pada ternak 7 Silat kualitatif dan kuanitatif ternak 8 Metode pengujian ternak/Uji Performa dan Uji Zuriat 9 Istilah peternakan 10 Sistem produksi semen beku dan embrio 11 Sistem manajemen bidang peternakan 12 Inseminasi buatan dan transfer embrio 13 Kesehatan hewan sederhana Kemampuan Umum: 1 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat 2 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 3 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 4 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 3 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan pangan 4 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan umum 5 Sistem Manajemen Mutu 6 Komunikasi risiko bidang obat dan makanan 7 Kejadian terkait bahaya dan/atatu risiko di bidang Obat dan Makanan 8 Sistem informasi dan teknologi di lingkungan BPOM Kemampuan Khusus: 1 Tata cara praregistrasi obat 2 Tata cara registrasi obat 2 2 Tata cara registrasi obat dan makanan aregistrasi poduk suplemen kesehatan 5 Tata cara registrasi obat tradisional 4 Tata cara registrasi obat tradisional 7 Penilatan registrasi poduk kosmetika 6 Tata cara notifikasi produk kosmetika 6 Tata cara notifikasi produk kosmetika 6 Tata cara notifikasi produk kosmetika 10 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi (Obat, PB, dan NAPZA) 9 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan 12 Prinsip-prinsip CPOET terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 14 Prinsip-prinsip CPOET terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 15 CPPB IRTP 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA)			
6 Genetika pada ternak 7 Sifat kualitatif dan kuantitatif ternak 8 Metode pengujian ternak/Uji Performa dan Uji Zuriat 9 Istilah peternakan 10 Sistem produksi semen beku dan embrio 11 Sistem produksi semen beku dan embrio 11 Sistem manajemen bidang peternakan 12 Inseminasi buatan dan transfer embrio 13 Kesehatan hewan sederhana Kemampuan Umum: 1 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 3 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 3 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan umum 5 Sistem Manajemen Mutu 6 Komunikasi risiko bidang obat dan makanan 7 Kejadian terkati bahaya dan/atau risiko di bidang Obat dan Makanan 8 Sistem informasi dan teknologi di lingkungan BPOM Kemampuan Khusus: 1 Tata cara registrasi obat 2 Tata cara registrasi obat tradisional 4 Tata cara registrasi obat tradisional 5 Tata cara registrasi obat tradisional 6 Tata cara registrasi produk suplemen kesehatan 5 Tata cara registrasi produk kosmetika 6 Tata cara registrasi produk kosmetika 7 Penilaian registrasi pangan olahan tingkat dasar 8 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 10 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Rejulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Rejulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 12 Prinsip-prinsip CPOB terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 14 Prinsip-prinsip CPOB terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 15 CPPB IRTP 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA)			
8 Metode pengujian ternak/Uji Performa dan Uji Zuriat 9 Istilah peternakan 10 Sistem produksi semen beku dan embrio 11 Sistem produksi semen beku dan embrio 12 Inserminasi buatan dan transfer embrio 13 Kesehatan hewan sederhana Kemampuan Umum: 1 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 3 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 4 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan umum 5 Sistem Manajemen Mutu 6 Komunikasi risiko bidang obat dan makanan 7 Kejadian terkait bahaya dan/atau risiko di bidang Obat dan Makanan 8 Sistem informasi dan terknologi di lingkungan BPOM Kemampuan Khusus: 1 Tata cara registrasi obat 2 Tata cara registrasi obat 2 Tata cara registrasi obat tradisional 4 Tata cara registrasi obat tradisional 5 Tata cara registrasi produk kosmetika 6 Tata cara registrasi produk kosmetika 6 Tata cara penilaian registrasi pangan olahan 7 Penilaian registrasi pangan olahan 7 Penilaian registrasi pangan olahan 7 Penilaian registrasi pangan olahan lingkat dasar 8 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi (Obat, PB, dan NAPZA) 9 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Penjusip-prinsip CPOB 13 Prinsip-prinsip CPOB (Konsep dasar kemanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prir 15 CPPB IRTP 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA)			6 Genetika pada ternak
9 Istilah peternakan 10 Sistem produksi semen beku dan embrio 11 Sistem manajemen bidang peternakan 12 Inseminasi buatan dan transfer embrio 13 Kesehatan hewan sederihana Ahli Pertama Remamasi dan Makanan Ahli Pertama Remampuan Umum: 1 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 3 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 4 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan umum 5 Sistem Manajemen Mutu 6 Komunikasi risiko bidang obat dan makanan 7 Kejadian terkait bahaya dan/atau risiko di bidang Obat dan Makanan 8 Sistem informasi dan teknologi di lingkungan BPOM Kemampuan Khusus: 1 Tata cara registrasi obat 2 Tata cara registrasi obat 3 Tata cara registrasi obat 4 Tata cara registrasi obat tradisional 4 Tata cara registrasi porduk kometika 6 Tata cara notifikasi produk kometika 6 Tata cara politikasi produk kometika 6 Tata cara politikasi produk kometika 7 Penilaian registrasi pangan olahan 7 Penilaian registrasi pangan olahan Ingikat dasar 8 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi (Obat, PB, dan NAPZA) 9 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 10 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Prinsip-prinsip CPOTB terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 14 Prinsip-prinsip CPKB dan CPKB untuk golongan B 15 Prinsip-prinsip CPKB dan CPKB untuk golongan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prinsip CPPB IRTP 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA)			
10. Sistem produksi semen beku dan embrio 11. Sistem manajemen bidang peternakan 12. Inseminasi buatan dan transfer embrio 13. Kesehatan hewan sederhana Kemampuan Umum: 1 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 3 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 4 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan pangan 4 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan umum 5 Sistem Manajemen Mutu 6 Komunikasi risiko bidang obat dan makanan 7 Kejadian terkait bahaya dan/atau risiko di bidang Obat dan Makanan 8 Sistem informasi dan teknologi di lingkungan BPOM Kemampuan Khusus: 1 Tata cara registrasi obat 2 Tata cara registrasi obat tradisional 4 Tata cara registrasi obat tradisional 4 Tata cara registrasi produk suplemen kesehatan 5 Tata cara notifikasi produk kosmetika 6 Tata cara penilaian registrasi pangan olahan 7 Penilaian registrasi pangan olahan 7 Penilaian registrasi pangan olahan tingkat dasar 8 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi (Obat, PB, dan NAPZA) 9 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Perinsip-prinsip CPOB 13 Prinsip-prinsip CPOB terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 14 Prinsip-prinsip CPOB untuk golongan B Prinsip-prinsip CPOB terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi pangan dan prinsip-prin 15 CPPB IRTP 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan Pelayanan Obat (Obat dan NaPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan Pelayanan Obat (Obat dan NaPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan Pelayanan Obat (Obat dan NaPZA)			
11 Sistem manajemen bidang peternakan 12 Inseminasi buatan dan transfer embiro 13 Kesehatan hewan sederhana Ahli Pertama Kemampuan Umum: 1 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 3 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 3 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan pangan 4 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan umum 5 Sistem Manajemen Mutu 6 Komunikasi risiko bidang obat dan makanan 7 Kejadian terkait bahaya dan/atau risiko di bidang Obat dan Makanan 8 Sistem informasi dan teknologi di lingkungan BPOM Kemampuan Khusus: 1 Tata cara registrasi obat 2 Tata cara registrasi obat 3 Tata cara registrasi obat tradisional 4 Tata cara registrasi obat tradisional 5 Tata cara registrasi produk kosmetika 6 Tata cara prilainan registrasi pangan olahan 7 Penilaian registrasi pangan olahan 7 Penilaian registrasi pangan olahan tingkat dasar 8 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi (Obat, PB, dan NAPZA) 9 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan 12 Prinsip-prinsip CPOB 13 Prinsip-prinsip CPOB (Konsep dasar kemanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prir CPPB IRTP 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			
174 Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama Ahli Pertama Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama Pertama Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen Pertaman Perundang-undangan di bidang pengawasan pangan Pertaman Perundang-undangan di bidang pengawasan umum Sistem Manajemen Mutu Kemampuan Khusus bidang obat dan makanan Keladian terkait bahaya dan/atau risiko di bidang Obat dan Makanan Kemampuan Khusus: Tata cara registrasi obat tradisional Tata cara registrasi pangan olahan ingkat dasar Penilaian registrasi pangan olahan ingkat dasar Penilaian registrasi pangan olahan ingkat dasar Regulasi dalam pengawasan sarana produksi (Obat, PB, dan NAPZA) Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan Prinsip-prinsip CPOB Trinsip-prinsip CPOB terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) Prinsip-prinsip CPOB terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) Prinsip-prinsip CPOB (konsep dasar kemanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prin CPPB IRTP Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA)			
Rengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama			
Ahli Pertama 1 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 3 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan pangan 4 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan umum 5 Sistem Manajemen Mutu 6 Komunikasi risiko bidang obat dan makanan 7 Kejadian terkait bahaya dan/atau risiko di bidang Obat dan Makanan 8 Sistem informasi dan teknologi di lingkungan BPOM Kemampuan Khusus: 1 Tata cara registrasi obat 2 Tata cara registrasi obat 2 Tata cara registrasi obat tradisional 4 Tata cara registrasi obat tradisional 5 Tata cara registrasi produk suplemen kesehatan 5 Tata cara notifikasi produk kosmetika 6 Tata cara perilaian registrasi pangan olahan 7 Penilaian registrasi pangan olahan tingkat dasar 8 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi (Obat, PB, dan NAPZA) 9 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan 12 Prinsip-prinsip CPOB 13 Prinsip-prinsip CPOB terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 14 Prinsip-prinsip CPRB dan CPKB untuk golongan B 15 Prinsip-prinsip CPOB (konsep dasar kemanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prin CPPB IRTP 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	474	D	
2 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 3 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan pangan 4 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan umum 5 Sistem Manajemen Mutu 6 Komunikasi risiko bidang obat dan makanan 7 Kejadian terkait bahaya dan/atau risiko di bidang Obat dan Makanan 8 Sistem informasi dan teknologi di lingkungan BPOM Kemampuan Khusus: 1 Tata cara praregistrasi obat 2 Tata cara registrasi obat 3 Tata cara registrasi obat tradisional 4 Tata cara registrasi obat tradisional 5 Tata cara notifikasi produk kuplemen kesehatan 5 Tata cara notifikasi produk kosmetika 6 Tata cara penilaian registrasi pangan olahan 7 Penilaian registrasi pangan olahan tingkat dasar 8 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi (Obat, PB, dan NAPZA) 9 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan 12 Prinsip-prinsip CPOB 13 Prinsip-prinsip CPOB terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 14 Prinsip-prinsip CPRB dan CPKB untuk golongan B 15 Prinsip-prinsip CPBOB (konsep dasar kemanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prin CPPB IRTP 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			
2 komplemen 3 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan pangan 4 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan umum 5 Sistem Manajemen Mutu 6 Komunikasi risiko bidang obat dan makanan 7 Kejadian terkait bahaya dan/atau risiko di bidang Obat dan Makanan 8 Sistem informasi dan teknologi di lingkungan BPOM Kemampuan Khusus: 1 Tata cara praregistrasi obat 2 Tata cara registrasi obat 3 Tata cara registrasi obat tradisional 4 Tata cara registrasi obat tradisional 4 Tata cara registrasi produk suplemen kesehatan 5 Tata cara notifikasi produk kosmetika 6 Tata cara penilaian registrasi pangan olahan 7 Penilaian registrasi pangan olahan tingkat dasar 8 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi (Obat, PB, dan NAPZA) 9 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 10 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan 12 Prinsip-prinsip CPOB 13 Prinsip-prinsip CPOB terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 14 Prinsip-prinsip CPOB terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 15 Prinsip-prinsip CPOB (konsep dasar kemanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prir CPPB IRTP 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan		7 mil i citama	Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional kosmetika, dan produk
4 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan umum 5 Sistem Manajemen Mutu 6 Komunikasi risiko bidang obat dan makanan 7 Kejadian terkait bahaya dan/atau risiko di bidang Obat dan Makanan 8 Sistem informasi dan teknologi di lingkungan BPOM Kemampuan Khusus: 1 Tata cara praregistrasi obat 2 Tata cara registrasi obat 3 Tata cara registrasi obat tradisional 4 Tata cara registrasi produk suplemen kesehatan 5 Tata cara negistrasi produk kosmetika 6 Tata cara negistrasi produk kosmetika 7 Penilaian registrasi pangan olahan registrasi pangan olahan 7 Penilaian registrasi pangan olahan tingkat dasar 8 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi (Obat, PB, dan NAPZA) 9 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi (Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 10 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan 12 Prinsip-prinsip CPOB 13 Prinsip-prinsip CPOB terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 14 Prinsip-prinsip CPOB (konsep dasar kemanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prinsip CPPB IRTP 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA)			,
5 Sistem Manajemen Mutu 6 Komunikasi risiko bidang obat dan makanan 7 Kejadian terkait bahaya dan/atau risiko di bidang Obat dan Makanan 8 Sistem informasi dan teknologi di lingkungan BPOM Kemampuan Khusus: 1 Tata cara praregistrasi obat 2 Tata cara registrasi obat 3 Tata cara registrasi obat tradisional 4 Tata cara registrasi obat tradisional 4 Tata cara registrasi produk suplemen kesehatan 5 Tata cara notifikasi produk kosmetika 6 Tata cara penilaian registrasi pangan olahan 7 Penilaian registrasi pangan olahan 7 Penilaian registrasi pangan olahan 8 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi (Obat, PB, dan NAPZA) 9 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 10 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan 12 Prinsip-prinsip CPOB 13 Prinsip-prinsip CPOB terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 14 Prinsip-prinsip CPOB (konsep dasar kemanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prins CPPB IRTP 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			
6 Komunikasi risiko bidang obat dan makanan 7 Kejadian terkait bahaya dan/atau risiko di bidang Obat dan Makanan 8 Sistem informasi dan teknologi di lingkungan BPOM Kemampuan Khusus: 1 Tata cara praregistrasi obat 2 Tata cara registrasi obat 3 Tata cara registrasi obat 4 Tata cara registrasi obat tradisional 4 Tata cara registrasi produk suplemen kesehatan 5 Tata cara notifikasi produk kosmetika 6 Tata cara penilaian registrasi pangan olahan 7 Penilaian registrasi pangan olahan tingkat dasar 8 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi (Obat, PB, dan NAPZA) 9 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 10 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan 12 Prinsip-prinsip CPOB 13 Prinsip-prinsip CPOB terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 14 Prinsip-prinsip CPOB (konsep dasar kemanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prinsip CPPB IRTP 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA)			
7 Kejadian terkait bahaya dan/atau risiko di bidang Obat dan Makanan 8 Sistem informasi dan teknologi di lingkungan BPOM Kemampuan Khusus: 1 Tata cara praregistrasi obat 2 Tata cara registrasi obat 3 Tata cara registrasi obat tradisional 4 Tata cara registrasi produk suplemen kesehatan 5 Tata cara notifikasi produk kosmetika 6 Tata cara penilalian registrasi pangan olahan 7 Penilaian registrasi pangan olahan 8 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi (Obat, PB, dan NAPZA) 9 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 10 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 12 Prinsip-prinsip CPOB 13 Prinsip-prinsip CPOB terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 14 Prinsip-prinsip CPOB (konsep dasar kemanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prin CPPB IRTP 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			
8 Sistem informasi dan teknologi di lingkungan BPOM Kemampuan Khusus: 1 Tata cara praregistrasi obat 2 Tata cara registrasi obat 3 Tata cara registrasi obat tradisional 4 Tata cara registrasi produk suplemen kesehatan 5 Tata cara notifikasi produk kosmetika 6 Tata cara penilaian registrasi pangan olahan 7 Penilaian registrasi pangan olahan tingkat dasar 8 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi (Obat, PB, dan NAPZA) 9 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 10 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan 12 Prinsip-prinsip CPOB 13 Prinsip-prinsip CPOB terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 14 Prinsip-prinsip CPOB (konsep dasar kemanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prin CPPB IRTP 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			
1 Tata cara praregistrasi obat 2 Tata cara registrasi obat 3 Tata cara registrasi obat tradisional 4 Tata cara registrasi produk suplemen kesehatan 5 Tata cara notifikasi produk suplemen kesehatan 6 Tata cara penilaian registrasi pangan olahan 7 Penilaian registrasi pangan olahan tingkat dasar 8 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi (Obat, PB, dan NAPZA) 9 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 10 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan 12 Prinsip-prinsip CPOB 13 Prinsip-prinsip CPOTB terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 14 Prinsip-prinsip CPKB dan CPKB untuk golongan B 15 Prinsip-prinsip CPPOB (konsep dasar kemanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prir CPPB IRTP 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			8 Sistem informasi dan teknologi di lingkungan BPOM
2 Tata cara registrasi obat 3 Tata cara registrasi obat tradisional 4 Tata cara registrasi produk suplemen kesehatan 5 Tata cara notifikasi produk kosmetika 6 Tata cara penilaian registrasi pangan olahan 7 Penilaian registrasi pangan olahan tingkat dasar 8 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi (Obat, PB, dan NAPZA) 9 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 10 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan 12 Prinsip-prinsip CPOB 13 Prinsip-prinsip CPOTB terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 14 Prinsip-prinsip CPKB dan CPKB untuk golongan B 15 Prinsip-prinsip CPPOB (konsep dasar kemanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prir CPPB IRTP 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			
3 Tata cara registrasi obat tradisional 4 Tata cara registrasi produk suplemen kesehatan 5 Tata cara notifikasi produk kosmetika 6 Tata cara penilaian registrasi pangan olahan 7 Penilaian registrasi pangan olahan tingkat dasar 8 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi (Obat, PB, dan NAPZA) 9 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 10 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan 12 Prinsip-prinsip CPOB 13 Prinsip-prinsip CPOTB terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 14 Prinsip-prinsip CPKB dan CPKB untuk golongan B 15 Prinsip-prinsip CPPOB (konsep dasar kemanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prir CPPB IRTP 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			
4 Tata cara registrasi produk suplemen kesehatan 5 Tata cara notifikasi produk kosmetika 6 Tata cara penilaian registrasi pangan olahan 7 Penilaian registrasi pangan olahan tingkat dasar 8 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi (Obat, PB, dan NAPZA) 9 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 10 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan 12 Prinsip-prinsip CPOB 13 Prinsip-prinsip CPOTB terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 14 Prinsip-prinsip CPKB dan CPKB untuk golongan B 15 Prinsip-prinsip CPPOB (konsep dasar kemanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prin CPPB IRTP 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			
5 Tata cara notifikasi produk kosmetika 6 Tata cara penilaian registrasi pangan olahan 7 Penilaian registrasi pangan olahan tingkat dasar 8 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi (Obat, PB, dan NAPZA) 9 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 10 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan 12 Prinsip-prinsip CPOB 13 Prinsip-prinsip CPOTB terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 14 Prinsip-prinsip CPKB dan CPKB untuk golongan B 15 Prinsip-prinsip CPPOB (konsep dasar kemanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prin CPPB IRTP 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			
7 Penilaian registrasi pangan olahan tingkat dasar 8 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi (Obat, PB, dan NAPZA) 9 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 10 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan 12 Prinsip-prinsip CPOB 13 Prinsip-prinsip CPOB terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 14 Prinsip-prinsip CPKB dan CPKB untuk golongan B 15 Prinsip-prinsip CPPOB (konsep dasar kemanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prin CPPB IRTP 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			
8 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi (Obat, PB, dan NAPZA) 9 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 10 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan 12 Prinsip-prinsip CPOB 13 Prinsip-prinsip CPOTB terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 14 Prinsip-prinsip CPKB dan CPKB untuk golongan B 15 Prinsip-prinsip CPPOB (konsep dasar kemanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prin CPPB IRTP 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			
9 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 10 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan 12 Prinsip-prinsip CPOB 13 Prinsip-prinsip CPOTB terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 14 Prinsip-prinsip CPKB dan CPKB untuk golongan B 15 Prinsip-prinsip CPPOB (konsep dasar kemanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prin CPPB IRTP 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			
10 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan 12 Prinsip-prinsip CPOB 13 Prinsip-prinsip CPOTB terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 14 Prinsip-prinsip CPKB dan CPKB untuk golongan B 15 Prinsip-prinsip CPPOB (konsep dasar kemanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prin CPPB IRTP 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			
11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan 12 Prinsip-prinsip CPOB 13 Prinsip-prinsip CPOTB terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 14 Prinsip-prinsip CPKB dan CPKB untuk golongan B 15 Prinsip-prinsip CPPOB (konsep dasar kemanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prin CPPB IRTP 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			
13 Prinsip-prinsip CPOTB terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 14 Prinsip-prinsip CPKB dan CPKB untuk golongan B 15 Prinsip-prinsip CPPOB (konsep dasar kemanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prin CPPB IRTP 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan
 14 Prinsip-prinsip CPKB dan CPKB untuk golongan B 15 Prinsip-prinsip CPPOB (konsep dasar kemanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prin CPPB IRTP 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 			
Prinsip-prinsip CPPOB (konsep dasar kemanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prin CPPB IRTP 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			
15 CPPB IRTP 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			Data in ada in ODDOD (kanana dana kanana ang dan kining ang italian ang dan ada in ada in ada in
16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA)17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			
17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			
18 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi Kosmetik			
19 Regulasi dalam pengawasan sarana pengedaran Pangan Halaman 38 dari 62	, I		

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Prinsip-prinsip CDOB
			Pengawasan sarana pelayanan kefarmasian Pedoman Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB)
			Prinsip-prinsip Cara Penyimpanan dan Pengiriman Obat Tradisional yang Baik
			Regulasi terkait sampling dan pengujian pangan
			Regulasi dan pedoman sampling obat
			Regulasi dan pedoman tindak lanjut obat tradisional dan suplemen makanan Regulasi dan pedoman sampling kosmetika
			Regulasi dan pedoman samping kosmetika Regulasi pengawasan iklan dan/atau promosi obat
			Regulasi pengawasan iklan dan/atau promosi produk tembakau
			Regulasi pengawasan iklan dan/atau promosi pangan olahan
			Regulasi pengawasan iklan dan/atau promosi kosmetika
			Regulasi pengawasan iklan dan/atau promosi obat tradisional dan suplemen kesehatan Regulasi pengawasan penandaan dan/atau promosi obat
			Regulasi pengawasan penandaan dan/atau promosi obat
		35 F	Regulasi terkait penandaan/label pangan olahan
			Regulasi pengawasan penandaan dan/atau promosi kosmetika
			Regulasi pengawasan penandaan dan/atau promosi obat tradisional dan suplemen kesehatan Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran obat dan makanan
			Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran obat dan makahan Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran narkotika, psikotropika, dan prekursor
			Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran obat tradisional dan suplemen kesehatan
			Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran kosmetik
			Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran pangan
			Sistem farmakovigilans di industri farmasi Petunjuk teknis pelaporan monitoring efek samping OTSK
			Efek tidak diinginkan pada penggunaan kosmetik
			Kasus/kejadian pelanggaran hukum di bidang obat dan makanan
		47	Teori dasar kromatografi, prinsip pemisahan dan pengujian secara kromatografi kompleks (KLT-
		7	densitometri/KCKT/KG) Teori dasar, teknik preparasi/penyiapan sampel dan prinsip pengujian secara Spektrofotometri
		48 ((Spektrofotometer UV-Vis, AAS, Spektrodensitometer, FT-IR)
			Teori dasar dan prinsip pengujian secara disolusi Pengertian, pemahaman kalibrasi dan istilah-istilah terkait (pengukuran, adjusment, tera dan
			ketertelusuran pengukuran) serta aplikasi hasil kalibrasi dan persyaratan sesuai standar acuan
		((ISO/IEC 17025:2017)
			Prinsip pengujian sampel secara reaksi antigen antibodi
			(aglutinasi/flokulasi/ELISA/omunodifusi/endotoksin bakteri/imunokromatografi/lainnya) Prinsip pengujian identifikasi Mikroba Patogen atau DNA Spesifik-Sepesies menggunakan Polymerase
			Chain Reaction (PCR)/Loop Mediated Isothermal Amplifiation (LAMP); atau Screening Produk
			Rekayasa Genetika menggunakan PCR
			Pengertian, tujuan dan prinsip pengujian Efektifitas Pengawet
			Penanganan/pemeliharaan Hewan Uji
		-	Penetapan toksisitas/nilai pirogen contoh uji/atau penetapan DL50 Pelaksanaan penyiapan pengujian (sterilisasi, teknik aseptik, penanganan media/reagen, contoh uji dan
			paku mikroba)
			Prinsip pengujian kualitatif/kuantitatif Mikroba Spesifik
			Pedoman penyusunan metodologi riset, metodologi kualitatif, dan metodologi kuantitatif
			Teknik penyusunan materi/produk KIE yang efektif Strategi komunikasi, informasi, dan edukasi
			Layanan pengaduan dan informasi
			Konsep pengawasan obat dan makanan
			Dasar hukum penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan, jenis dan
175	Pangawas Komotralasian Ahli	r	nierarki peraturan perundang-undangan Kompotongi Umum:
1/5	Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama	F	Kompetensi Umum: Prinsip pengawasan tentang hal-hal yang dilarang, sanksi dan penegakan hukum sesuai Undang-
			Undang No 2 Tahun 1981
		2 F	Pelaksanaan Pengawasan Metrologi Legal
			Kompetensi Khusus:
			Pengawasan UTTP Pengawasan BDKT
			Pengawasan BDK I Pengawasan Satuan Ukur
			Penyuluhan Kemetrologian
			Pengetahuan Pengantar Penyidikan
4=-	D	6 F	Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan
176	Pengawas Keselamatan Pelayaran	6 F	Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan Kompetensi Umum:
176	Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Pertama	6 F	Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan
176		6 F F F	Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan Kompetensi Umum: Peraturan/ Ketentuan Nasional dan Internasional Tentang Pelayaran Kompetensi Khusus: Perencanaan Pengawasan Keselamatan Pelayaran
176		6 F F F 1 F 2 F	Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan Kompetensi Umum: Peraturan/ Ketentuan Nasional dan Internasional Tentang Pelayaran Kompetensi Khusus: Perencanaan Pengawasan Keselamatan Pelayaran Kenavigasian
176		6 F F 1 F 2 H 3 F	Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan Kompetensi Umum: Peraturan/ Ketentuan Nasional dan Internasional Tentang Pelayaran Kompetensi Khusus: Perencanaan Pengawasan Keselamatan Pelayaran Kenavigasian Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal dan Manajemen Keselamatan Kapal
176		6 F F 1 F 2 F 3 F 4 F	Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan Kompetensi Umum: Peraturan/ Ketentuan Nasional dan Internasional Tentang Pelayaran Kompetensi Khusus: Perencanaan Pengawasan Keselamatan Pelayaran Kenavigasian Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal dan Manajemen Keselamatan Kapal Pemanduan
	Ahli Pertama	6 F F F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F	Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan Kompetensi Umum: Peraturan/ Ketentuan Nasional dan Internasional Tentang Pelayaran Kompetensi Khusus: Perencanaan Pengawasan Keselamatan Pelayaran Kenavigasian Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal dan Manajemen Keselamatan Kapal
	Ahli Pertama Pengawas Keselamatan Pelayaran	6 F F F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F	Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan Kompetensi Umum: Peraturan/ Ketentuan Nasional dan Internasional Tentang Pelayaran Kompetensi Khusus: Perencanaan Pengawasan Keselamatan Pelayaran Kenavigasian Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal dan Manajemen Keselamatan Kapal Pemanduan Penegakan Hukum di Laut dan Penyelamatan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kompetensi Umum:
	Ahli Pertama	6 F F F 6 F F F F F F F F F F F F F F F	Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan Kompetensi Umum: Peraturan/ Ketentuan Nasional dan Internasional Tentang Pelayaran Kompetensi Khusus: Perencanaan Pengawasan Keselamatan Pelayaran Kenavigasian Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal dan Manajemen Keselamatan Kapal Pemanduan Penegakan Hukum di Laut dan Penyelamatan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kompetensi Umum: Peraturan/ Ketentuan Nasional dan Internasional Tentang Pelayaran
	Ahli Pertama Pengawas Keselamatan Pelayaran	6 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan Kompetensi Umum: Peraturan/ Ketentuan Nasional dan Internasional Tentang Pelayaran Kompetensi Khusus: Perencanaan Pengawasan Keselamatan Pelayaran Kenavigasian Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal dan Manajemen Keselamatan Kapal Pemanduan Penegakan Hukum di Laut dan Penyelamatan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kompetensi Umum: Peraturan/ Ketentuan Nasional dan Internasional Tentang Pelayaran Kompetensi Khusus:
	Ahli Pertama Pengawas Keselamatan Pelayaran	6 F F F 6 F F F F F F F F F F F F F F F	Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan Kompetensi Umum: Peraturan/ Ketentuan Nasional dan Internasional Tentang Pelayaran Kompetensi Khusus: Perencanaan Pengawasan Keselamatan Pelayaran Kenavigasian Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal dan Manajemen Keselamatan Kapal Pemanduan Penegakan Hukum di Laut dan Penyelamatan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kompetensi Umum: Peraturan/ Ketentuan Nasional dan Internasional Tentang Pelayaran
	Ahli Pertama Pengawas Keselamatan Pelayaran	6 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan Kompetensi Umum: Peraturan/ Ketentuan Nasional dan Internasional Tentang Pelayaran Kompetensi Khusus: Perencanaan Pengawasan Keselamatan Pelayaran Kenavigasian Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal dan Manajemen Keselamatan Kapal Pemanduan Penegakan Hukum di Laut dan Penyelamatan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kompetensi Umum: Peraturan/ Ketentuan Nasional dan Internasional Tentang Pelayaran Kompetensi Khusus: Perencanaan Pengawasan Keselamatan Pelayaran

Halaman 39 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		5 Penegakan Hukum di Laut dan Penyelamatan
		6 Kesyahbandaran
178	Pengawas Keselamatan Pelayaran	7 Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kompetensi Umum:
	Pemula	Peraturan/Ketentuan Nasional dan Internasional tentang Pelayaran
		Kompetensi Khusus:
		1 Kenavigasian
170	Pengawas Koperasi Ahli Pertama	Penegakan hukum di laut dan penyelamatan Kemampuan Umum:
173	r engawas Noperasi Amir r enama	Menerapkan, memonitoring dan mengevaluasi perencanaan advokasi kebijakan pengawasan koperasi
		Mengaplikasikan pengelolaan organisasi dan manajemen koperasi sesuai peraturan perundangan yang
		berlaku Kemampuan Khusus:
		Mengaplikasikan mengenai peraturan dan perundangan yang menjadi landasan hukum dalam pemeriksaan koperasi
		2 Mengaplikasikan mengenai peraturan dan perundangan yang menjadi landasan hukum dalam penilaian kesehatan koperasi
		Mengaplikasikan mengenai konsep pelaporan
		4 Merencanakan, melaksanakan pemantauan dan monitoring berdasarkan pedoman
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli	Kemampuan Umum:
	Pertama	Istilah dan definisi terkait bidang keamanan dan mutu pangan hasil pertanian Peraturan Perundang-Undangan terkait bidang keamanan dan mutu pangan hasil pertanian
		2 Peraturan Perundang-Undangan terkait bidang keamanan dan mutu pangan hasil pertanian Kemampuan Khusus:
		Kelembagaan keamanan pangan, serta fungsi dan tugasnya terkait bidang keamanan dan mutu pangan
		hasil pertanian
		2 Standar/Persyaratan Keamanan Pangan
		Mekanisme penerapan, pengawasan, dan pengujian di bidang keamanan pangan Cemaran/Kontaminan dalam Pangan (biologi, kimia, fisik)
181	Pengawas Mutu Pakan Ahli	Kompetensi Umum:
	Pertama	1 Regulasi bidang pakan
		2 Pengertian pakan, bahan pakan, obat hewan, tanaman pakan ternak dan hijauan pakan ternak
		3 Peralatan Pengolahan pakan
		Kompetensi Khusus: 1 Standar pakan / bahan pakan dan formulasi pakan
		Pengujian mutu dan keamanan pakan
		3 Tatacara pengolahan pakan
		4 Proses produksi pakan, penyimpanan bahan pakan dan pakan serta budidaya tanaman pakan ternak
182	Pengawas Mutu Pakan Terampil	Kompetensi Umum:
		 Regulasi bidang pakan Pengertian pakan, bahan pakan, obat hewan, tanaman pakan ternak dan hijauan pakan ternak
		3 Peralatan Pengolahan pakan
		Kompetensi Khusus:
		1 Standar pakan / bahan pakan dan formulasi pakan
		2 Pengujian mutu dan keamanan pakan
		3 Tatacara pengolahan pakan
183	Pengawas Mutu Pakan Pemula	4 Proses produksi pakan, penyimpanan bahan pakan dan pakan serta budidaya tanaman pakan ternak Kompetensi Umum:
100	r engawas wutu r akan r emula	1 Regulasi bidang pakan
		2 Pengertian pakan, bahan pakan, obat hewan, tanaman pakan ternak dan hijauan pakan ternak
		3 Peralatan Pengolahan pakan
		Kompetensi Khusus: 1 Standar pakan / bahan pakan dan formulasi pakan
		Standar pakan / banan pakan dan formulasi pakan Pengujian mutu dan keamanan pakan
		3 Tatacara pengolahan pakan
		4 Proses produksi pakan, penyimpanan bahan pakan dan pakan serta budidaya tanaman pakan ternak
	Pengawas Perdagangan Ahli	Kompetensi Umum:
	Pertama	1 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
		UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
		Kompetensi Khusus:
		PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan
		Konsumen
		2 PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
		Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Permendag Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan
		Permendag Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor di Luar
		Kawasan Pabean (Post Border)
		Permendag Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan/Melengkapi
		× 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1
		Label Berbahasa Indonesia
		Permendag Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
185	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	Permendea Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetanan Standar Kegiatan Heaha dan Produk pada
185	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	Permendag Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan Kemampuan Umum: Peraturan Kelautan dan Perikanan
185	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	Permendag Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan Kemampuan Umum:

Halaman 40 dari 62

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		Pengolahan dan penyusunan proses pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
		Pemahaman konsep dasar penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan
		perikanan 4 Pemahaman konsep dasar dan proses pengoperasian armada pengawasan
		Penyusunan dan pelakasanaan standardisasi dan fasilitasi pengawakan armada pengawasan sumber
400		daya kelautan dan perikanan
186	Pengawas Radiasi Ahli Pertama	Kemampuan Umum: UU Nomor 10 Tahun 1997
		Kemampuan Khusus:
		Organisasi BAPETEN (Peraturan BAPETEN No. 9 Tahun 2020) Paraturan Bili kasi dan tahululul ASN dan ialah sanggaran dan s
		Peraturan, nilai, tusi, dan tata kelola ASN dan jabatan fungsional pengawas radiasi Fisika Nuklir
		4 Proteksi Radiasi (Peraturan BAPETEN No. 4 Tahun 2013)
		5 Teknologi Nuklir 6 Pengelolaan Limbah Radioaktif (PP No. 61 Tahun 2013)
		7 Pengangkutan dan Keamanan Zat Radioaktif (PP No. 58 Tahun 2015)
187	Pengelola Ekosistem Laut dan	Kemampuan Umum:
	Pesisir Ahli Pertama	Peraturan Kelautan dan Perikanan Kemampuan Khusus:
		1 Membuat Peta Tematik
		Rencana pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Varifikasi teksir dan membuat pata kedastar laut.
		Verifikasi teknis dan membuat peta kadaster laut Analisis data dan informasi kawasan konservasi periaran
		5 Klasifikasi data dan informasi untuk penilaian ekonomi sumber daya
188	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	Kompetensi Umum: Peraturan Kelautan dan Perikanan
	i onama	Kompetensi Khusus:
		1 Jenis-jenis penyakit ikan
		Monitoring dan/atau surveilan penyakit ikan Biosecurity
		4 Penanganan penyakit
		5 Metode pengujian laboratorium
		6 Substansi Uji Residu 7 Jenis-jenis obat ikan
		8 Kerusakan lingkungan
100	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	9 Monitoring lingkungan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahan dan aturan turunannya serta Modul
109	Ahli Muda	1 Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level-2 dan 3
		2 Identifikasi/Reviu Kebutuhan dan Penetapan Barang/Jasa
		Penyusunan Spesifikasi Teknis dan/atau Kerangka Acuan Keraja (KAK) berbasis masukan (input), 3 proses, dan keluaran (output) sesuai dengan analisis proses produksi/pelaksanaan pekerjaan, untuk
		pekerjaan yang tidak kompleks
		Penyusunan perkiraan harga sesuai dengan analisis proses produksi/ pelaksanaan, untuk pekerjaan yang tidak kompleks
		5 Perumusan Pemaketan dan Cara Pengadaan sesuai Strategi Pengadaan
		Reviu terhadap Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pekerjaan dengan
		proses Pengadaan Barang/Jasa yang tidak sederhana Penyusunan dan Penjelasan Dokumen Pemilihan yang dilakukan melalui metode pemilihan: a.
		Tender/Seleksi; dan b. Penunjukan Langsung.
		Evaluasi Penawaran dengan metode evaluasi:
		a. harga terendah ambang batas; b. sistem nilai;
		c. penilaian biaya selama umur ekonomis;
		d. kualitas; e. kualitas dan biaya;
		f. pagu anggaran; dan
		g. biaya terendah. 9 Penilaian Kualifikasi pada: a. Tender/Seleksi; dan b. Penunjukan Langsung.
		10 Pengelolaan Sanggahan
		Negosiasi Teknis dan Harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengacu pada
		 analisis proses produksi, metode pelaksanaan dan/atau Harga Pokok Penjualan (HPP) Penyusunan Daftar Penyedia Barang/Jasa Pemerintah
		13 Pengadaan Barang/Jasa secara e-purchasing dan pembelian melalui toko daring
		14 Perumusan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam bentuk Surat Perjanjian Pengadalan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Persang/Jasa Pemerintah terhadan masukan (input)
		Pengendalian Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap masukan (input), 15 proses produksi/pelaksanaan, dan keluaran (output) hasil pekerjaan berupa Barang/Jasa yang tidak
		kompleks
		Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berupa Barang/Jasa yang tidak kompleks setelah melalui proses penjaminan mutu (quality assurance)
		Analisis dan pemecahan masalah teknis operasional Penyusunan Rencana, Persiapan, Pelaksanaan,
		dan Pengawasan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola
		Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola untuk pekerjaan dengan: a. masukan (input) berupa personil dengan keahlian tertentu dan bahan/material umum;
		18 b. proses/metode pelaksanaan telah memiliki standar/ pedoman yang spesifik sesuai bidang pekerjaan
		dengan variasi pelaksanaan tergantung pada kondisi lapangan; dan/atau
190	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	c. keluaran (output) yang akan dihasilkan dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif 1 Identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang/jasa
	Ahli Pertama	2 Penyusunan spesifikasi teknis dan KAK
		3 Penyusunan perkiraan harga

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		Reviu terhadap dokumen persiapan pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk pekerjaan dengan proses pengadaan barang/jasa yang sederhana
		5 Penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada pengadaan langsung dan tender cepat
		6 Evaluasi penawaran dan penilaian kualifikasi pada pengadaan langsung
		7 Evaluasi penawaran harga terendah sistem gugur
		8 Negosiasi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah mengacu pada HPS dan standar harga/biaya
		9 Pengadaan barang/jasa secara E-Purchasing dan pembelian melalui toko daring
		Melakukan perumusan kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK)
		Melakukan pengendalian pelaksanaan kontak pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk pekerjaan sederhana dan banyak tersedia di pasar
		Melakukan pekerjaan serah terima hasil pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan sederhana dan
		banyak tersedia di pasar 13 Melakukan pekerjaan evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang/jasa Pemerintah
		14 Perencanaan pengadaan barang/juasa secara Swakelola
		15 Persiapan pengadaan barang/jasa secara Swakelola
		Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola Pengawasan barang/jasa secara Swakelola
191	Pengelola Produksi Perikanan	Kemampuan Umum:
	Tangkap Ahli Pertama	Peraturan tentang kebijakan perikanan tangkap
		Kemampuan Khusus: 1 Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumberdaya Ikan sesuai pedoman kerja petunjuk teknis
		Rancang Bangun, Standardisasi, Tata Kelola Kapal Perikanan
		3 Perlindungan, Standardisasi dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
		4 Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan
		5 Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan 6 Perizinan Usaha Perikanan
192	Pengelola Sumber Daya Air Ahli	Kompetensi Umum
	Madya	Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air
		Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air
		Kompetensi Khusus
		1 Pengelolaan sumber daya air
		2 Pengelolaan sungai 3 Pengelolaan daerah pantai
		4 Pengelolaan drainase utama perkotaan
		5 Pengelolaan daerah irigasi
		6 Pengelolaan daerah rawa 7 Pengelolaan air tanah dan air baku
		8 Pengelolaan bendungan
		9 Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung)
193	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda	Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air
	ividua	2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya
		air air
		Kompetensi Khusus:
		Pengelolaan sumber daya air Pengelolaan sungai
		3 Pengelolaan daerah pantai
		4 Pengelolaan drainase utama perkotaan
		5 Pengelolaan daerah irigasi 6 Pengelolaan daerah rawa
		7 Pengelolaan air tanah dan air baku
		8 Pengelolaan bendungan
104	Pengelola Sumber Daya Air Ahli	Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung) Kompetensi Umum:
134	Pertama	Kompetensi omani. Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air
		2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya
		air Kompetensi Khusus:
		Pengelolaan Sumber Daya Air
		2 Pengelolaan Sungai
		3 Pengelolaan Daerah Pantai
		4 Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan 5 Pengelolaan Daerah Irigasi
		6 Pengelolaan Daerah Rawa
		7 Pengelolaan Daerah Air Tanah & Air Baku
		Pengelolaan Bendungan Pengelolaan Tampungan Air Lainnya (Danau, Situ, Embung)
195	Pengembang Kewirausahaan Ahli	Kemampuan Umum:
	Pertama	Kebijakan bidang koperasi, UMKM dan kewirausahaan
		Kemampuan Khusus: 1 Pemetaan potensi dan pemetaan data kewirausahaan
		Pernetaan potensi dan pernetaan data kewirausanaan Analisis usaha
		3 Konsultasi bisnis dan pendampingan usaha
		4 Pengembangan inkubasi wirausaha
		5 Pengembangan teknologi informasi usaha 6 Permodalan dan pembiayaan alternatif bagi wirausaha
		7 Pengembangan ekosistem bisnis
		Halaman 42 dari 62

Halaman 42 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

2 Pemahaman Tentang Pemantauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3 Pemahaman Tentang Persiapan Pembinaan 4 Pemahaman Tentang Pelaksanaan Lyaluasi Pembinaan 5 Pemahaman Tentang Pelaksanaan Lyaluasi Pembinaan 6 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 7 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 8 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 9 Pemahaman Tentang Evaluasi Dokumen Lingkungan 10 Pemahaman Tentang Evaluasi Dokumen Lingkungan 11 Pemahaman Tentang Evaluasi Dokumen Lingkungan 11 Pemahaman Tentang Evaluasi Dokumen Lingkungan 12 Pemahaman Tentang Evaluasi Dokumen Lingkungan 13 Pemahaman Tentang Evaluasi Dokumen Lingkungan 14 Pemahaman Tentang Evaluasi Dokumen Lingkungan 15 Pemahaman Tentang Penilaian Kinerja Institusi Atau Personal Lingkungan 16 Pemahaman Tentang Penilaian Kinerja Institusi Atau Personal Lingkungan 17 Pemahaman Tentang Perakanan Tentang Perakanan Tentang Respendia Institusi Atau Personal Lingkungan 18 Pemahaman Tentang Perakanan Tentang Perakanan Tentang Respendialian Kenusakan dan Kenusakan dan Kerusakan Lingkungan 19 Pemahaman Tentang Perakanan n Tentang Perakananan Kebijakan Teknis Pengendalian Pencemaran dan Penanggulangan Pencemaran dan/Ata Perusakan Lingkungan Penahaman Tentang Perakananan Tentang Perakananan Kebijakan Penantangulangan Pencemaran dan/Ata Perakanan Tentang Perakananan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Ata Perakananan Tentang Perakananan Respendalian Penantanan Kualitas Lingkungan Pencemaran Tentang Perakananan Respendalian Perakananan Sumber Pencemaran Sepakanan Pengendalian Penantanan Sumber Pencemaran Sepakanan Pengendalian Penantanan Sepakananan Pengenda	NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
3 Model konsep purificulam 4 Landsas pregrenbangan kurikulum 5 Prinsip pengenbangan kurikulum 6 Prinsip pengenbangan kurikulum 7 Prinsip pengenbangan kurikulum 7 Prinsip pengenbangan kurikulum 8 Prinsip pengenbangan kurikulum 9 Pengumolain dala untuk penyeuran program pengenbangan kurikulum 10 Petunjuk pelaksamanan ji coba dari kurikulum 11 Nasakin penganthan kepiatun jo dasi dari kurikulum 12 Ur coba dari kurikulum ada dari kurikulum 13 Ur coba dari kurikulum ada dari kurikulum 14 Lacram salari coba dari kurikulum 15 Revisi dari kurikulum aseual hasal analais 16 Revisi dari kurikulum aseual hasal analais 16 Revisi dari kurikulum aseual hasal analais 17 Identifikasi dari kurikulum aseual hasal analais 18 Pedalamanan separan perilapan melakulum 19 Pengembang Penilalan Pendikan 20 Program solialassal 22 Pelaksamanan perilapan inpelimentasi 23 Koorinsia dingan insistemata kurikulum 24 Pengembang Penilalan Pendikian 25 Permanan solialassal 26 Permanan solialassal 27 Pelaksamanan perilapan insistemata kurikulum 28 Pengembang Penilalan Pendikian 29 Pengembang Penilalan Pendikian 30 Pengembang Penilalan Pendikian 31 Pendelaman solialassal 32 Penalaman solialassal 33 Pengembang Penilalan pendikian biritikhasa biritikha	196		
4 Landsean pengembangan kurikulum 5 Prinsip pengembangan kurikulum 6 Kongounn hurikulum 7 Konrafup pengembangan kurikulum 9 Perbaikun dalah berpadan pengembangan kurikulum 10 Perbaikun dalah berpadah pengembangan kurikulum 11 Naskah penganahan kegiatan uji coba dari kurikulum 12 Uii coba dari kurikulum 13 Pengumpulan dan Marifikasi dala uji coba dari kurikulum 14 Uii coba dari kurikulum ana dalah kurikulum 15 Pengumpulan dan Marifikasi dala uji coba dari kurikulum 16 Pendungan dan Marifikasi dala uji coba dari kurikulum 17 Isakah penganahan kegiatan penganahan pengan berpadahan dari kurikulum pendasahan hala di coba 18 Pendasanan kegiatan perbaikan dari kurikulum berdasahan hala di coba 19 Isakasanan kegiatan perbaikan dari kurikulum berdasahan hala di coba 19 Isakasanan kegiatan perbaikan dari kurikulum 19 Lapporn bada kurikulum pendasahan hala di coba 19 Pengembangan penganahan penganahan pendakan dari kurikulum 19 Lapporn badasahasan kegiatan pendakan dari kurikulum 19 Lapporn badasahasan kegiatan pendakan dari kurikulum 19 Pengembangan pendakan persapan penganan penganahan kurikulum 19 Pengembangan Pendakkan dari kurikulum penganahan kurikulum 19 Pengembangan Pendakkan dari kurikulum penganahan kurikulum 19 Pengembangan Pendakkan dari kurikulum penganahan kurikulum 19 Pengembangan Pendakkan penganahan penganahan kurikulum penganahan kurikulum penganahan kurikulum penganahan han penganahanahan penganahanahan penganahanahan penganahanahan penganahanahan penganahanahan p		Pertama	V
S. Prinsip pengembangan kurikujum R. Komponen kurikulum R. Komponen kurikulum R. Komponen kurikulum R. Komponen kurikulum R. Pengembangan kepangan kepangan kurikulum R. Pengembangan kepangan an kepangan kepangan kepangan kepangan kepangan kepangan kepang			
8 Remonent kurksulam 8 Pengampulan data untuk penyasunan program pengembangan kurikulum 8 Pengampulan data untuk penyasunan program pengembangan kurikulum 11 Nakahi pengampan kengatan uja coba drift kurikulum 12 Uji coba drift kurikulum 13 Pengampulan dan kainfikasi data uju coda drift kurikulum 13 Pengampulan dan kainfikasi data uju coda drift kurikulum 13 Pengampulan dan kainfikasi data uju coda drift kurikulum 13 Pengampulan dan kainfikasi data uju coda drift kurikulum 14 Laporan beda kurikulum sesual hasal amalisis 16 Perita drift kurikulum sesual hasal amalisis 17 Pengampulan dan kainfikasi data uju coda drift kurikulum 18 Pengampulan dan kainfikasi data uju coda drift kurikulum 19 Pengampulan dan kainfikasi data uju coda drift kurikulum 19 Pengampulan dan kainfikasi data uju data dan dari data dari data untuk data untu			
8. Perpaymouting data untuk penyagunan program pengampan kurikulum 9. Perbakan and kurikulum 11. Perbatujuk pelaksamanan juj coba draf kurikulum 11. Nasidah penyarihan kespiatan juj coba draf kurikulum 11. Nasidah penyarihan kespiatan juj coba draf kurikulum 11. Perpaymoutin dan karikasi data juj coba draf kurikulum 11. Perpaymoutin dan karikasi data juj coba draf kurikulum 11. Regional pengamban dan karikasi data juj coba draf kurikulum 11. Regional pengamban dan karikasi data juj coba draf kurikulum 11. Regional pengamban dan karikasi data juj coba draf kurikulum 11. Regional pengamban dan kurikulum pengaskan dan karikasi dan kurikulum 12. Pengamban dan kurikulum pengaskan dan kepatan pengaban dan karikasi dan kurikulum 12. Pengam selaksi dan kurikulum pengaskan depenbasi 12. Pelaksaman persiapan implementasi 12. Pelaksaman persiapan implementasi 12. Pengamban pengam implementasi 12. Pengamban pengam implementasi 12. Pengamban pengam implementasi 12. Pengamban pengam pengam pengamban pengamban kurikulum 13. Pengamban pengamban pengamban pengamban kurikulum 14. Pengamban pengamban pengamban kurikulum 15. Pengamban pengamban pengamban kurikulum 16. Pengamban Pendikian Pendikian Pendikian berabaskan pengamban kurikulum 17. Pengamban pengamban pendikan pengamban kurikulum 18. Pengamban Pendikian Pendikian Pendikian pengamban kurikulum 19. Pendaman pengamban pendikian pendikan Pengamban kurikulum 19. Pendaman Pendikian Pendikian Pengamban kurikulum 19. Pendaman Pendikian Pengamban Pendikian Pengaban bengamban bendakan Pengamban Pendikian Pengaban bengamban bendakan Pengamban Pendikian Pengamban Pengamba			
9 Perbalkan draf kurkulum 10 Perbalkan kepistan uji coba draf kurikulum 11 Naskah pengarahan kepistan uji coba draf kurikulum 12 Ujicoba draf kurikulum 13 Pergampolan dan kana kepistan uji coba draf kurikulum 13 Pergampolan dan kana dala uji coba draf kurikulum 14 Pergampolan dan kana dala uji coba draf kurikulum 15 Persi draf kurikulum 15 Persi draf kurikulum 16 Persi draf kurikulum 16 Persi draf kurikulum 16 Persi draf kurikulum 17 Pergam pada dipersikan dan kurikulum 18 Persi draf kurikulum 19 Lajorah far kurikulum 19 Lajorah far kurikulum 19 Lajorah far kurikulum 19 Lajorah far kurikulum 19 Lajorah farikulum 19 Laj			
10 Petunjuk pelaksaranan igi coba draf kurikulum 11 Naskar pengarhah kepitan ju doba draf kurikulum 12 Uji coba draf kurikulum 13 Penganghah kepitan ju doba draf kurikulum 14 Penganghah kepitan ju doba draf kurikulum 15 Penganghah kan karikasi dala kurikulan anaksi 16 Pencanan perbalah draf akurikulun berdasakarah haali yi coba 17 Identifikasi draf kurikulum sensu kurikal anaksi 18 Pelaksanan perbalah draf akurikulum berdasakarah haali yi coba 18 Pencanan kepitan perbalah draf kurikulum 19 Laporan hasil perbalah draf kurikulum 19 Laporan hasil perbalah draf kurikulum 19 Pengandah draf kurikulum 20 Penganan perbalah draf kurikulum 21 Pengandah draf kurikulum 22 Pelaksanan persianan implementasi 23 Koordinan dia dengan instala inkrait 24 Perencanan kepitan pendeliahan 25 Perencanan kepitan pengembangan kurikulum 26 Perencanan kepitan pengembangan kurikulum 27 Pengandah Pertaman dengan penganan penjalah pengeliah pengeliahan pengel			
11 Naskah pengarahan kepistan uji coba diri kurikulum 12 Uji ciba diri kurikulum 13 Pengampulan dan Marifikasi data uji coba diri kurikulum 14 Laporan habi uji coba diri kurikulum 15 Nevel diri kurikulum sesusi habi analasi dan			
12 Uji Jooba offat kurikulum 13 Penganghapida nai Marifikasi data uji oba draf kurikulum 14 Laporan Insail uji coba draf kurikulum berubasi Arabika 15 Revis dari kurikulum berubasi Arabika 16 Rencana perbahara draf kurikulum berubasirkan hasil uji coba 17 Hennikasi dari kurikulum berubasirkan hasil uji coba 18 Laporan Insail parlaksira draf kurikulum berubasirkan hasil uji coba 19 Laporan Insail parlaksira draf kurikulum berubasirkan hasil uji coba 19 Laporan Insail parlaksira draf kurikulum 19 Laporan Insail parlaksiran drafta kurikulum 19 Laporan Insail parlaksiran drafta kurikulum 19 Laporan Insail parlaksiran drafta kurikulum 19 Laporan Insail parlaksiran parlaksiran drafta kurikulum 19 Laporan Insail parlaksiran parlaksiran parlaksiran parlaksiran parlaksiran 19 Laporan Insail parlaksiran parlaksiran parlaksiran parlaksiran parlaksiran parlaksiran parlaksiran parlaksiran parlaksiran 19 Laporan Insail parlaksiran parlaksir			
14 Laporan hasil uji coba draf kurikulum sevina sala analisis 16 Rencara perbalkan furukulum sevinasarkan hasil uji coba. 17 Identifikan furukulum sevinasarkan hasil uji coba. 18 Pelaksananan kejatan perbalkan draf kurikulum 19 Laporan hasil perbalkan draf kurikulum 20 Program sosialisiasa. 21 Pelaksanan kejatan perbalkan draf kurikulum 22 Program sosialisiasa. 23 Pelaksananan kejatan perbalkan draf kurikulum 24 Perpananan sosialisiasa. 25 Perpananan kejatan perbalkan draf kurikulum 26 Perpananan kejatan perbalkan draf kurikulum 27 Pengembang Penilaian Pendidikan 28 Perpanananan kejatan perpananan n kejatan perpanana			
15 Revis draf kurikulum sesuai hasil analisis 16 Revisane perbalakin draf kurikulum yang akan diperbalaki 18 Pelaksanan kepistan perbalakin draf kurikulum 19 Laporan hasil perbalakin draf kurikulum 19 Laporan hasil perbalakin draf kurikulum 19 Pengam sosielisissi 20 Projam sosielisissi 21 Pelaksanan kepistan perbalakin draf kurikulum 22 Rodridina sosielisissi 23 Rodridina sosielisissi 24 Perencanan kepistan penantai implementasi 25 Perencanan kepistan penantaian 26 Perencanan kepistan penantaian 27 Pengembang Penilaian Pendidikan 28 Perencanan kepistan penelitian pengembangan kurikulum 29 Pengembang Penilaian Pendidikan 29 Pengembang Penilaian Pendidikan 20 Dasar-dasar penilaian pendidikan 20 Dasar-dasar penilaian pendidikan 21 Penantaian matemalika panda domain data dan peluana, belangan, kuentitatif, dan aljabar 29 Pengembang Teknologi 20 Pennahanan Teknologi Pembelajar pendidikan 20 Pengembang Teknologi 21 Pengembang Teknologi Pembelajar pendidikan 22 Pengembang Teknologi Pembelajar pengembangan kelindikan pengembangan teknologi pembelajar 28 Pengembang Teknologi Pembelajar pengembangan kelindikan pengembangan teknologi pembelajar 29 Pengembang Teknologi Pembelajar 20 Pengembang Teknologi Pembelajar 20 Pengembang Teknologi Pembelajar 20 Pengembang Teknologi Pembelajar 21 Penahaman Teknologi Pembelajar 22 Pengembangan Pengembangan pendidikan 23 Pengembangan Pengembangan Pengembangan pengelolaan Lingkungan 24 Pembanan Teknologi Pembelajar 25 Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengelolaan Lingkungan 26 Pengahaman Teknologi Perbelajaran Pengelolaan Lingkungan 27 Pengahaman Teknologi Perbelajaran Pengelolaan Lingkungan 28 Pengahaman Teknologi Perbelajaran Pengelolaan Lingkungan 29 Pengahaman Teknologi Pengembangan Pengenbanan Pengelolaan Lingkungan 20 Pengahaman Teknologi Pengembangan Pengenbangan Pengendalan Pengelolaan Lingkungan 21 Pengahaman Te			<u> </u>
156 Rencana perpalakan dari kurikulum berdasarkan hasil uji coba			april to a green a constant
17 Bentifikasi draf kurikulum yang akan diperbaiki			
18 Pedaksanaan kepilatan perbaikan draf kurikulum 19 Peragam sesialisasi 21 Pelaksanaan posisiasasi 22 Pelaksanaan posisiasasi 22 Pelaksanaan posisiasasi 22 Pelaksanaan posisiasasi 23 Pedaksanaan posisiasasi 24 Pelaksanaan posisiasasi 25 Pedaksanaan posisiasasi 26 Pedaksanaan posisiasasi 27 Pelaksanaan posisiasasi 28 Pedaksanaan posisiasasi 28 Pedaksanaan posisiasasi 28 Pedaksanaan posisiasasi 28 Pedaksanaan pedaksan			
20 Pogram socialisasi 21 Pelaksanaan persiapaan implementasi 22 Pelaksanaan persiapaan implementasi 23 Roof-Ginasi dengan intansi terkati 24 Perencanaan kepitatan peranditan 25 Perencanaan kepitatan peranditanan pe			
21 Pelaksanaan posialasas 22 Pelaksanaan posialasas 23 Koordinasi dengan instansi torkat 24 Perencianaan kepilatan bribingan teknis 25 Perencianaan kepilatan pemartauan 26 Perencianaan kepilatan pemartauan 26 Perencianaan kepilatan pemartauan 27 Pengembang Peniliatian Pendidikan 3 Pengembang Teknologi 4 Pengembang Teknologi 5 Pembelajaran Ahil Pertama 5 Pengembang Teknologi 6 Pengembang Teknologi 8 Pengembang Teknologi 9 Pengembang Teknologi 9 Pengembang Teknologi 9 Pengembang Teknologi 9 Pengembang Teknologi 199 Pengembang Teknologi 9 Pengembang Teknologi 9 Pengembang Teknologi 199 Pengembang Teknologi 199 Pengembang Teknologi 190 Pengembangan Teknologi 1 Pemahaman Tentang Pengembangan Pengembangan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 3 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 4 Pemahaman Tentang Pengembangan Kebijakan Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 1 Pemahaman Tentang Pengembangan Kebijakan Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 1 Pemahaman Tentang Pengembangan Kebijakan Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 1 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 1 Pemahaman Tentang Pengembangan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan 1 Pemahaman Tentang Pengembangan Pengembangan Relembagaan Pengendalian Pencemaran Ingkungan 1 Pemahaman Tentang Pengembangan Pengembangan Pengendalian Kerusakan Lingkungan 1 Pemahaman Tentang Pengembangan Pengend			
22 Pelaksanaan persiapan implementasi 23 Kordinasi dengan intansi terkati 24 Perencanaan kepidatan birabingan teknis 25 Perencanaan kepidatan pemantauan 26 Perencanaan kepidatan pemantauan 27 Pengembang Penilalan Pendidikan 28 Pengembang Teknologi 29 Dasar-dasar penilalan pendidikan 3 Proses penyelengaran penilalan pendidikan 3 Proses penyelengaranan penilalan pendidikan 3 Proses penyelengaranan penilalan pendidikan 4 Pengembang Teknologi Pembelajaran Athil Pertama 5 Proses penyelengaranan penilalan pendidikan 6 Reparan Pengembang Teknologi Pembelajaran Kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran Athil Pertama 7 Pengendali Dampak Lingkungan 8 Ahil Pertama 7 Pengendali Dampak Lingkungan 8 Pengendali Dampak Lingkungan 8 Pengendalian Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 8 Regiala Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 9 Pengendali Dampak Lingkungan Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1 Pemahaman Tentang Pengendalian Pencemanan Penindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2 Penahaman Tentang Pengenbangan Pembinaan 3 Pemahaman Tentang Pengenbangan Pembinaan 4 Pemahaman Tentang Pengenbangan Pembinaan 5 Penahaman Tentang Pengenbangan Pembinaan 6 Penahaman Tentang Pengenbangan Pembinaan 7 Pemahaman Tentang Pengenbangan Pembinaan 8 Penahaman Tentang Pengenbangan Pembinaan 9 Pemahaman Tentang Pengenbangan Pembinaan 10 Pemahaman Tentang Pengenbangan Kebijakan Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 10 Pemahaman Tentang Evaluasi Dokumen Lingkungan 10 Pemahaman Tentang Evaluasi Dokumen Lingkungan 11 Pemahaman Tentang Evaluasi Dokumen Lingkungan 12 Pemahaman Tentang Evaluasi Dokumen Lingkungan 13 Pemahaman Tentang Pengenbangan Pengenbangan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Keusakan dan Kondisi Sosial Pengenbanaan Tentang Pengenbangan Bahan Perumusan Kebijakan Dangkungan Pengenbangan Pengenbangan Pengenbangan Pengenbangan Pengenb			
28 Koordinasi dengan instansi terkat 24 Perencanana kepiatan bribingan teknis 25 Perencananan kepiatan bribingan teknis 26 Perencananan kepiatan pemathasuan 26 Perencananan kepiatan pemathasuan 27 Pengembang Penilaian Pendidikan 28 Pengembang Teknologi 29 Pengembang Teknologi 29 Pengembang Teknologi 29 Pengembang Teknologi Rembelajaran Ahil Pertama 20 Pengendali Dampak Lingkungan 3 Proses penyelenggaran penilaian pendidikan 4 Penahamanan Tertanghan, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi termasuk koni dan praktik dalam pengembangan desain, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi proses dan sumber untuk belajar 4 Remanpuan Uhmur: 8 Regulasi Tertang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 8 Remanpuan Humur: 1 Pemahaman Tertanghangan Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2 Pemahaman Tertanghangan Penantauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3 Pemahaman Tertanghangan Pengendanan Pembinaan 4 Pemahaman Tertanghangan Pengendanan Pembinaan 5 Pemahaman Tertanghangan Pengendangan Pembinaan 6 Pemahaman Tertanghangan Pengendangan Pembinaan 7 Pemahaman Tertanghangan Pengendangan Pembinaan 8 Pemahaman Tertanghangan Pengendangan Pembinaan 9 Pemahaman Tertanghangan Pengendangan Pembinaan 10 Pemahaman Tertanghangan Pengendangan Pembinaan 10 Pemahaman Tertanghangan Pengendalian Kerusakan dan Kondisi Sosial 14 Pemahaman Tertanghananan n Tertanghanananan Tertanghananananan Tertanghananananan Tertanghanananananan Tertanghanananananan Tertanghanananananananan Tertanghanananananananananananananananananan			
24 Perencanaan kegiatan bimbingan teknis 25 Perencanaan kegiatan pemartauan 26 Perencanaan kegiatan pemartauan 27 Pengembang Penilaian Pendidikan 28 Pengembang Teknologi 29 Pengembang Teknologi 29 Pengembang Teknologi 29 Pengembang Teknologi 20 Pengembang Teknologi 20 Pengembang Teknologi 20 Pengembang Teknologi 20 Pengembang Teknologi 21 Pengendail Dampak Lingkungan 22 Ahli Pertama 23 Pirasse penyelenggaran pentilaian pendidikan 24 Kemampuan Uhrum: 25 Registra Haria 26 Pengendail Dampak Lingkungan 26 Pengendail Dampak Lingkungan 27 Pengendail Dampak Lingkungan 28 Pengahaman Tentang Pengendalian Pencemaran Air. Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 28 Penahaman Tentang Persenaanan Penantauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 28 Penahaman Tentang Pengendalian Pencemaran Air. Udara dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 29 Pengahaman Tentang Pengendalian Pencemaran Air. Udara dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 20 Pengahaman Tentang Pengantauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 21 Pemahaman Tentang Pengantauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 22 Pemahaman Tentang Pengantauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 23 Pemahaman Tentang Pengantauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 24 Pemahaman Tentang Pengantauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 25 Pemahaman Tentang Pengantauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 26 Pengahaman Tentang Pengantauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 27 Pemahaman Tentang Pengantangan Penbinaan 28 Pemahaman Tentang Pengantangan Penbinaan 29 Pengahaman Tentang Pengandalian Pengangan Pengan			
26 Perencanaan kegiatan penelitian pengembangan kurjukurum			24 Perencanaan kegiatan bimbingan teknis
1 Pengembang Penilaian Pendidikan 2 Dasar-dasar penilaian pendidikan 2 Dasar-dasar penilaian pendidikan 3 Proses penyelenggaraan penilaian pengembangan pengembangan pengembangan teknologi pembelajar meliputi sanalaisis dan pengembangan desain, pemantaatan, pengelolaan, serta evaluasi proses dan sumber untuk belajar 4 Proses penyelengaran penilaian pengembangan desain, pemantaatan, pengelolaan, serta evaluasi pengembangan pengembangan pengembangan pengembangan pengembangan pengembangan pengelolaan Lingkungan Hidup 2 Pemahaman Tentang Permantauan Pertindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2 Pemahaman Tentang Permantauan Pertindungan dan Pengelolaan Lingkungan 3 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 4 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 5 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 6 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 7 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 8 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 9 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 1 Pemahaman Tentang Pengembangan Pengembangan Nelembangan 1 Pemahaman Tentang Pengembangan Pengembangan Nelembangan 1 Pemahaman Tentang Pengembangan Pengembangan Nelembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Nelembangan Pengembangan Pengembangan Nelembangan Pengembangan Pengembangan Nelembangan Pengembangan			
2 Dasar-dasan penlialan pendidikan 3 Proses penyletinggaran penlialan pendidikan 3 Proses penyletinggaran penlialan pendidikan 3 Proses penyletinggaran penlialan pendidikan Kompetensi Pengembang Teknologi Pembelajaran Kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran kepidajaran Ahli Pertama Kompetensi Pengembang Teknologi Pembelajaran Kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran kepidajaran Ahli Pertama Kompetensi Pengembangan Kelalan pengembangan desain, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi proses dan sumber untuk belajar Komampuan Imum: Regulasi Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 Kemampuan Khusus: Pemahaman Tentang Perencanaan Pemantauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemahaman Tentang Perencanaan Pembinaan Pengenbangan Hembinaan Pemahaman Tentang Pengahaman Perbinaan Pemahaman Pemahaman Pemahaman Pemahaman Pemahaman Pema	197	Pengembang Penilaian Pendidikan	
3 Proses penyelenggaraan penlidian pendidikan	.01		
Pembelajaran Ahli Pertama meliputi analisis dan pengkaljann, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi bermasuk teri dan praklik dalam pengembangan desain, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi proses dan sumber untuk belajar Kemampuan Humm: Regulasi Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 Kemampuan Humm: 1 Pemahaman Tentang Persiapan Pemantauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2 Pemahaman Tentang Persiapan Pembinaan 4 Pemahaman Tentang Petsiapan Pembinaan 5 Pemahaman Tentang Petsiapan Pembinaan 6 Pemahaman Tentang Petsiaksanaan Pembinaan 7 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 8 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 9 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 10 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 10 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 11 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 12 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 13 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 14 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 15 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 16 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 17 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 18 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 19 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 19 Pemahaman Tentang Pengenbangan Pembinaan 10 Pemahaman Tentang Pengenbangan Pembinaan 11 Pemahaman Tentang Pengenbangan Pembinaan 12 Pemahaman Tentang Pengenbangan Pembinaan 13 Pemahaman Tentang Pengenbangan Pengendalian Kerusakan dan Kondisi Sosial 14 Pencemaran Tentang Pengenbangan Pengendalian Kerusakan dan Kendisi Sosial 15 Pemahaman Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 Kemampuan Humus: Regulasi Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 Kemampuan Humusi Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pennggulangan Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan 1 Pemahaman Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Pencemaran dan/Atau Perus			
termasuk teori dan prakitik dalam pengembangan desain, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi proses dan sumber untuk belajar. Remampuan Umum: Regulasi Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 (Emampuan Khusus: 1 Pemahaman Tentang Perantauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2 Pemahaman Tentang Perantauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3 Pemahaman Tentang Perantauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3 Pemahaman Tentang Perantauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4 Pemahaman Tentang Perantangan Pembinaan 6 Pernahaman Tentang Perantangan Pembinaan 7 Pemahaman Tentang Perantangan Rebibakan Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 8 Pemahaman Tentang Pergembangan Rebibakan Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 10 Pemahaman Tentang Perjahangan Kebijakan Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 11 Pemahaman Tentang Perjahan Hingkungan 12 Pemahaman Tentang Perjahan Hingkungan 12 Pemahaman Tentang Perjahan Hingkungan 13 Pemahaman Tentang Perjahan Hingkungan 14 Pemahaman Tentang Perjahan Hingkungan 15 Pemahaman Tentang Perjahan Hingkungan 16 Pemahaman Tentang Perjahan Hingkungan 18 Pemahaman Tentang Perjahan Hingkungan 18 Pemahaman Tentang Perjahan Hingkungan 19 Pemahaman Tentang Perjahan Hingkungan 19 Pemahaman Tentang Perjahan Hingkungan 19 Pemahaman Tentang Perjahan Perjahan Hingkungan 19 Pemahaman Tentang Perjahan Hingkungan 19 Pengendalian Kerusakan dan Kerusakan Lingkungan 19 Pemahaman Tentang Perjahan Hingkungan 19 Pengendalian Kerusakan dan Kerusakan Lingkungan 19 Permahaman Tentang Perjahan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Pengendalian Pencemaran dan Merusakan Lingkungan 19 Pemahaman Tentang Perjahan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Pengendalian Pencemaran dan Merusakan Lingkungan Permahaman Tentang Perjahan Heribah Perumakan Hingkungan 19 Pemahaman Tentang Perjahan Heribah Perumakan Hingkungan 19 Pemahaman Tentang Perjahan Heribah Perumakan Hingkungan 19 Pemahaman Tentang Perjahan Heriba	198		
199 Pengendali Dampak Lingkungan Regulasi Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 Kemampuan Husus: 1 Pemahaman Tentang Perencanaan Pemantauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2 Pemahaman Tentang Perencanaan Pemantauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3 Pemahaman Tentang Pemantauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3 Pemahaman Tentang Pemahaman Pembinaan 4 Pemahaman Tentang Pelaksanaan Pembinaan 6 Pemahaman Tentang Pelaksanaan Pembinaan 7 Pemahaman Tentang Pelaksanaan Pembinaan 8 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 9 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 10 Pemahaman Tentang Pengembangan Pengembangan 10 Pemahaman Tentang Pengembangan Pengembangan 10 Pemahaman Tentang Pengembangan Pengembangan 11 Pemahaman Tentang Pengembangan Pengembangan 12 Pemahaman Tentang Penjalain Kinerja Institusi Matu Personal Lingkungan 13 Pemahaman Tentang Menitoring dan Institusi Matu Personal Lingkungan 13 Pemahaman Tentang Menitoring dan Evaluasi Pengembangan Relembagaan Pengendalian Pemahaman Tentang Menitoring dan Evaluasi Pengembangan Relembagaan Pengendalian Pemahaman Tentang Menitoring dan Evaluasi Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan 15 Pemahaman Tentang Menitoring dan Evaluasi Pengendalian Kerusakan dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 Kemampuan Umum: Regulasi Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 Pemahaman Tentang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 Pemahaman Tentang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 Pemahaman Tentang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 Pemahaman Tentang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Pencemaran dan/Ata Pensahaman Tentang Pengendalian Pencemaran dan Pengendalian Pencemaran dan/Ata Pengahaman T		Pembelajaran Anii Pertama	
Fernandali Dampak Lingkungan Regulasi Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 Regulasi Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 Remampuan Khusus: 1 Pemahaman Tentang Perencanaan Pemantauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemahaman Tentang Persispan Pembinaan Pemahaman Tentang Persispan Pembinaan Pemahaman Tentang Persispan Pembinaan Pemahaman Tentang Persispan Pembinaan Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan Pemahaman Tentang Persipan Persipan Pemahaman Tentang Persipan Persipan Pemahaman Tentang Persipan Pemahaman Tentang Persipan Pemahaman Tentang Persipan Pemahaman Tentang Pemahaman Tentang Persipan Pemahaman Tentang Pemahaman Persipan Pemahaman Tentang Pemahaman Pemuhaman			
Kemampuan Khusus: 1	199	Pengendali Dampak Lingkungan	
1 Pemahaman Tentang Perencanaan Pemantauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2 Pemahaman Tentang Pemantauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3 Pemahaman Tentang Pelaksanaan Pembinaan 4 Pemahaman Tentang Pelaksanaan Pembinaan 5 Pemahaman Tentang Pelaksanaan Levaluasi Pembinaan 6 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 7 Pemahaman Tentang Pengembangan Kebijakan Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungh Hidup 8 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 9 Pemahaman Tentang Pengembangan Kebijakan Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 10 Pemahaman Tentang Perlausi Dokumen Lingkungan 11 Pemahaman Tentang Perlausi Dokumen Lingkungan 12 Pemahaman Tentang Perlainah Lingkungan 13 Pemahaman Tentang Perlainah Kinerja Institusi Atau Personal Lingkungan 14 Pemahaman Tentang Perlainah Kinerja Institusi Atau Personal Lingkungan 15 Pemahaman Tentang Perlainah Kinerja Institusi Atau Personal Lingkungan 16 Pemahaman Tentang Perlainah Kinerja Institusi Atau Personal Lingkungan 17 Pemahaman Tentang Perlainah Kinerja Institusi Atau Personal Lingkungan 18 Pemahaman Tentang Inventariasai Pencemaran, Kerusakan dan Komisi Sosial 19 Pemahaman Tentang Inventariasai Pencemaran, Kerusakan dan Kerusakan Lingkungan 19 Pemahaman Tentang Inventariasai Pencemaran Kerusakan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan 19 Pemahaman Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 Kemampuan Umum: 10 Regulasi Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 Kemampuan Tentang Depaya Pengendalian Pencemaran dan Penanggulangan Pencemaran A Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pengendalian Pencemaran Depamahaman Tentang Pemahaman Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Pencemaran Pemahaman Pemahamauan Kegiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Pencemaran Pemahaman Tentang Pemahaman Tentang Pemahaman Pemahaman Pemahamauan Kegiatan Pemulihan Kualitas L		Ahli Pertama	
2 Pemahaman Tentang Pemantauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3 Pemahaman Tentang Persiapan Pembinaan 4 Pemahaman Tentang Persiapan Pembinaan 5 Pemahaman Tentang Pelaksanaan Evaluasi Pembinaan 6 Pemahaman Tentang Pelaksanaan Evaluasi Pembinaan 7 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 7 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 8 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 9 Pemahaman Tentang Evaluasi Dokumen Lingkungan 10 Pemahaman Tentang Evaluasi Dokumen Lingkungan 11 Pemahaman Tentang Evaluasi Dokumen Lingkungan 11 Pemahaman Tentang Evaluasi Dokumen Lingkungan 12 Pemahaman Tentang Persiana Lingkungan 13 Pemahaman Tentang Pensiana Kinerja Insitiusi Atau Personal Lingkungan 14 Pemahaman Tentang Pensiana Kinerja Insitiusi Atau Personal Lingkungan 15 Pemahaman Tentang Pensiana Kinerja Insitiusi Atau Personal Lingkungan 16 Pemahaman Tentang Pensiana Kinerja Insitiusi Atau Personal Lingkungan 17 Pemahaman Tentang Pensiana Kinerja Insitiusi Atau Personal Lingkungan 18 Pemahaman Tentang Pensiana Kinerja Insitiusi Atau Personal Lingkungan 19 Pemahaman Tentang Pensiana Kinerja Insitiusi Atau Personal Lingkungan 19 Pemahaman Tentang Pensiana Kinerja Insitiusi Atau Personal Lingkungan 19 Pemahaman Tentang Pensiana Kinerja Insitiusi Atau Personal Lingkungan 19 Pengendali Dampak Lingkungan 19 Pemahaman Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 10 Kemampuan Umum: 10 Pemahaman Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 10 Pemahaman Tentang Pengendalian Pencemaran dan Penulihan Kerusakan Lingkungan 10 Pemahaman Tentang Pengendalian Pencemaran dan Penanggulangan Pencemaran dan Penangunan Malai Kegiatan Pencemaran dan Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Penantauan Kualitas Lingkungan Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Sumber Pencemara 10 Pemahaman Tentang Pemahaman Rentang Pemahaman Re			·
3 Pemahaman Tentang Persiapan Pembinaan			1 Pemahaman Tentang Perencanaan Pemantauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4 Pemahaman Tentang Pelaksanaan Pembinaan			
S Pemahaman Tentang Pelaksanaan Evaluasi Pembinaan			
6 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 7 Pemahaman Tentang Pengembangan Kebijakan Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 9 Pemahaman Tentang Evaluasi Dokumen Lingkungan 10 Pemahaman Tentang Evaluasi Dokumen Lingkungan 11 Pemahaman Tentang Evaluasi Dokumen Lingkungan 11 Pemahaman Tentang Evaluasi Dokumen Lingkungan 12 Pemahaman Tentang Perlizian Lingkungan 13 Pemahaman Tentang Peliziana Lingkungan 14 Pemahaman Tentang Pelialian Kinerja Institusi Atau Personal Lingkungan 16 Pemahaman Tentang Perinacangan Terkisi dan Pengembangan Kelembagaan Pengendalian 16 Penahaman Tentang Perancangan Terkisi dan Pengembangan Kelembagaan Pengendalian 18 Pemahaman Tentang Perancangan Terkisi dan Pengembangan Kelembagaan Pengendalian 18 Pemahaman Tentang Menahaman Tentang Menahaman Tentang Derancangan Terkisi dan Pengembangan Kelembagaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 18 Pemahaman Tentang Menahaman Tentang Menahaman Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 Kemampuan Khusus: 1 Pemahaman Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 Kemampuan Khusus: 1 Pemahaman Tentang Pengendalian Pencemaran dan Pemalihan Kerusakan Lingkungan 2 Pemahaman Tentang Pengendalian Pencemaran dan Pemanggulangan Pencemaran dan/Ata Pencemaran 3 Pemahaman Tentang Pepaga Pengendalian Pencemaran dan Penanggulangan Pencemaran dan/Ata Pencemaran 4 Penusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Pencemaran dan/Ata Pencemaran 5 Pemahaman Tentang Pemantauan Sumber Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Sumber Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Menahaman Tentang Pemantaua			
Pemahaman Tentang Pengembangan Kebijakan Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkung Hidup 8 Pemahaman Tentang Evaluasi Dokumen Lingkungan 9 Pemahaman Tentang Evaluasi Dokumen Lingkungan 10 Pemahaman Tentang Perizinan Lingkungan 11 Pemahaman Tentang Rejalian Laboratorium Lingkungan 12 Pemahaman Tentang Rejalian Laboratorium Lingkungan 13 Pemahaman Tentang Penaliaian Kinerja Institusi Atau Personal Lingkungan 14 Pemahaman Tentang Inventariasais Pencemaran, Kerusakan dan Kondisi Sosial 15 Pemahaman Tentang Perancangan Teknis dan Pengembangan Kelembagaan Pengendalian Pendemaran dan Kerusakan Lingkungan 15 Pemahaman Tentang Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan 15 Pemahaman Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 Kemampuan Khusus: 1 Pemahaman Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 Kemampuan Khusus: 1 Pemahaman Tentang Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan 20 Pemahaman Tentang Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pemahaman Tentang Pengendalian Pencemaran dan Pemanggulangan Pencemaran dan Pemahaman Tentang Pelaksanaan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan Pencemaran Pemahaman Tentang Pelaksanaan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Pemahaman Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Kegiatan Pemahaman Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Kegiatan Pemahaman Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Kegiatan Pemahaman Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Memahaman			· ·
Hidup 8 Pemahaman Tentang Evaluasi Dokumen Lingkungan 9 Pemahaman Tentang Evaluasi Dokumen Lingkungan 10 Pemahaman Tentang Evaluasi Dokumen Lingkungan 11 Pemahaman Tentang Kajian Laboratorium Lingkungan 12 Pemahaman Tentang Majian Laboratorium Lingkungan 13 Pemahaman Tentang Penilaian Kinerja Institusi Atau Personal Lingkungan 14 Pemahaman Tentang Perilaian Kinerja Institusi Atau Personal Lingkungan 16 Pemahaman Tentang Perancangan Teknis dan Pengembangan Kelembagaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan dan Kondisi Sosial Pemahaman Tentang Perancangan Teknis dan Pengembangan Kelembagaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pemahaman Tentang Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Kemampuan Umum: Regulasi Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 Kemampuan Umum: Regulasi Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 Kemampuan Khusus: Pemahaman Tentang Pengendalian Perumusan Kebijakan Teknis Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pemahaman Tentang Penjaksanaan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Ata Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Pencemaran dan/Ata Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Pencemaran dan/Ata Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Kegiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Pemahaman Tentang Pepahaman Tentang Pemantauan Kegiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Pemahaman Terhadap Kegiatan Metrologi Pemahaman Tentang Pemantauan Kegiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Pemahaman Terhadap Kegiatan Pemahaman Kegiatan Pemahaman Kegiatan Pemahaman Tentang Pemahaman Tentang Pemahaman Kegiatan Pemahaman Tentang Pe			Pemahaman Tentang Pengembangan Kebijakan Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
9 Pemahaman Tentang Evaluasi Dokumen Lingkungan 10 Pemahaman Tentang Perizinan Lingkungan 11 Pemahaman Tentang Perilaian Kinerja Institusi Atau Personal Lingkungan 12 Pemahaman Tentang Penilaian Kinerja Institusi Atau Personal Lingkungan 13 Pemahaman Tentang Inventiarisasi Pencemaran, Kerusakan dan Kondisi Sosial 14 Pemahaman Tentang Inventiarisasi Pencemaran, Kerusakan dan Kondisi Sosial 16 Pemahaman Tentang Inventiarisasi Pencemaran, Kerusakan dan Kembagaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 15 Lingkungan 16 Pemahaman Tentang Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan 17 Kemampuan Umum: Regulasi Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 Kemampuan Khusus: 1 Pemahaman Tentang Pengendalian Pencemaran dan Pengendalian Pencemaran dan Pemahaman Tentang Pengan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Pengendalian Pencemaran dan Pemahaman Tentang Upaya Pengendalian Pencemaran dan Pemahaman Tentang Pemahaman Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Ata 4 Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Yang Diduga Mengalam Pencemaran dan Penanggulangan Pencemaran dan/Ata 4 Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Sumber Pencemar 1 Pemahaman Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Ata Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Kegiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan 2 Pemahaman Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Ata Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Kegiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan 2 Pemahaman Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Ata Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Kegiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan 2 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan 3 Pemahaman Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pengendalian Ekosistem Hutan 3 Pemantauan dan Evaluasi 4 Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan 4 Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan 4 Penge			Hidup
10 Pemahaman Tentang Perizinan Lingkungan			
12 Pemahaman Tentang Penilaian Kinerja Institusi Atau Personal Lingkungan 13 Pemahaman Tentang Inventarisasi Pencemaran, Kerusakan dan Kondisi Sosial 14 Pemahaman Tentang Perancangan Teknis dan Pengembangan Kelembagaan Pengendalian 15 Pemahaman Tentang Perancangan Teknis dan Pengembangan Kelembagaan Pengendalian 15 Pemahaman Tentang Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan 15 Pemahaman Tentang Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan 16 Kemampuan Umum: Regulasi Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 Kemampuan Khusus: 1 Pemahaman Tentang Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan 2 Pemahaman Tentang Penyapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Pengendalian Pencemaran dan Pemahaman Tentang Pemahaman Tentang Penanfaatan Teknologi Lingkungan Penanhaman Tentang Pemahaman Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Ata Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Yang Diduga Mengalam Pencemaran 2 Pemahaman Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Ata Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Yang Diduga Mengalam Pencemaran 3 Pemahaman Tentang Pemantauan Kegiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan 7 Pemahaman Tentang Pemahaman Tentang Pemantauan Kegiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan 7 Pemahaman Tentang Pemahaman Tenta			
13 Pemahaman Tentang Inventarisasi Pencemaran, Kerusakan dan Kondisi Sosial 14 Pemahaman Tentang Perancangan Teknis dan Pengembangan Kelembagaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 15 Pemahaman Tentang Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan 16 Kemampuan Umum: Regulasi Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 Kemampuan Khusus: Pemahaman Tentang Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Pengendalian Pencemaran Can Pemulihan Kerusakan Lingkungan 2 Pemahaman Tentang Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Pengendalian Pencemaran Can Pemulihan Kerusakan Lingkungan 2 Pemahaman Tentang Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pemahaman Tentang Pemahaman Ten			
Pemahaman Tentang Perancangan Teknis dan Pengembangan Kelembagaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan			
Pengendali Dampak Lingkungan Pemahaman Tentang Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Kemampuan Umum: Regulasi Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 Kemampuan Khusus: Pemahaman Tentang Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pemahaman Tentang Upaya Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pemahaman Tentang Upaya Pengendalian Pencemaran dan Penanggulangan Pencemaran dan/Ata Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Yang Diduga Mengalam Pencemaran Pemahaman Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Sumber Pencemaran Pemahaman Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Sumber Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Melalui Kegiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Pemahaman Tentang Pemantauan Kegiatan Pemantauan Sumber Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Pemahaman Tentang Pemantauan Regiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Pemahaman Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan			Pomphaman Tantang Porangangan Taknis dan Pongambangan Kalambagaan Pongandalian
Pengendali Dampak Lingkungan Terampil Regulasi Tentang Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Kerusakan			
Pengendali Dampak Lingkungan Kemampuan Umum: Regulasi Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 Kemampuan Khusus: Pemahaman Tentang Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pemahaman Tentang Upaya Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pemahaman Tentang Pemanfaatan Teknologi Lingkungan Pemahaman Tentang Pemahaman Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Ata Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Yang Diduga Mengalam Pencemaran Pemahaman Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Ata Pencemaran Pemahaman Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Sumber Pencemar Pemahaman Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Sumber Pencemar Pemahaman Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Pemahaman Tentang Upaya Penantauan Kegiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Pemahaman Tentang Upaya Pengendalian Ekosistem Penahaman Tentang Upaya Pengendalian Ekosistem Hutan Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan Pengenbangan Pengendalian Ekosistem Hutan Pengenbangan Pengendalian Ekosistem Hutan Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan Pen			Pemahaman Tentang Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Kerusakan
Terampil Regulasi Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3 Kemampuan Khusus: Pemahaman Tentang Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pemahaman Tentang Upaya Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pemahaman Tentang Pemanfaatan Teknologi Lingkungan Pemahaman Tentang Pelaksanaan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Ata Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Yang Diduga Mengalam Pencemaran Pemahaman Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Sumber Pencemar Pemahaman Tentang Pemantauan Kegiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Pemahaman Terhadap Kegiatan Metrologi Kemampuan Umum: Kemampuan Umum: Kemampuan Umum: Pertama Regulasi Kemampuan Hutan Regulasi Kemampuan Kusus: Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan Penanfaatan Hasil Hutan Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan Kemampuan Umum:	200	Pangandali Dampak Lingkungar	Lingkungan
Kemampuan Khusus: Pemahaman Tentang Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Pengendalian Pencemaran den Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pemahaman Tentang Upaya Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pemahaman Tentang Pemanfaatan Teknologi Lingkungan Pemahaman Tentang Pelaksanaan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Ata Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Yang Diduga Mengalam Pencemaran Pemahaman Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Sumber Pencemar Pemahaman Tentang Pemantauan Kegiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Pemahaman Tertang Pemantauan Kegiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Pemahaman Tertang Pemantauan Metrologi Kemampuan Umum: Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan Regulasi Kemampuan Khusus: Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan Regemanpuan Umum:	200		
Pemulihan Kerusakan Lingkungan 2 Pemahaman Tentang Upaya Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan 3 Pemahaman Tentang Pemanfaatan Teknologi Lingkungan Pemahaman Tentang Pelaksanaan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Ata 4 Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Yang Diduga Mengalam Pencemaran 5 Pemahaman Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Sumber Pencemara 6 Pemahaman Tentang Pemantauan Kegiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan 7 Pemahaman Terhadap Kegiatan Metrologi Kemampuan Umum:		- r	Kemampuan Khusus:
Pemulihan Kerusakan Lingkungan 2 Pemahaman Tentang Upaya Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan 3 Pemahaman Tentang Pelaksanaan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Ata 4 Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Yang Diduga Mengalam Pencemaran 5 Pemahaman Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Sumber Pencemar 6 Pemahaman Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Sumber Pencemar 6 Pemahaman Terhadap Kegiatan Metrologi Kemampuan Umum: 1 Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 2 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan 3 Regulasi Kemampuan Khusus: 1 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan 2 Pemanfaatan Hasil Hutan 3 Pemantauan dan Evaluasi 4 Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan 200 Pengendali Ekosistem Hutan Kemampuan Umum:			Pemahaman Tentang Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Pengendalian Pencemaran dan
Pemahaman Tentang Pemanfaatan Teknologi Lingkungan			Pemulihan Kerusakan Lingkungan
Pemahaman Tentang Pelaksanaan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Ata 4 Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Yang Diduga Mengalam Pencemaran 5 Pemahaman Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Sumber Pencemar 6 Pemahaman Tentang Pemantauan Kegiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan 7 Pemahaman Terhadap Kegiatan Metrologi Kemampuan Umum: 1 Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 2 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan 3 Regulasi Kemampuan Khusus: 1 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan 2 Pemanfaatan Hasil Hutan 3 Pemantauan dan Evaluasi 4 Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan 202 Pengendali Ekosistem Hutan Kemampuan Umum:			
4 Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Yang Diduga Mengalam Pencemaran 5 Pemahaman Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Sumber Pencemar 6 Pemahaman Tentang Pemantauan Kegiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan 7 Pemahaman Terhadap Kegiatan Metrologi Kemampuan Umum: 1 Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 2 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan 3 Regulasi Kemampuan Khusus: 1 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan 2 Pemanfaatan Hasil Hutan 3 Pemantauan dan Evaluasi 4 Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan 202 Pengendali Ekosistem Hutan Kemampuan Umum:			Pemahaman Tentang Pelaksanaan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Atau
5 Pemahaman Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Sumber Pencemar 6 Pemahaman Tentang Pemantauan Kegiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan 7 Pemahaman Terhadap Kegiatan Metrologi Kemampuan Umum: 1 Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 2 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan 3 Regulasi Kemampuan Khusus: 1 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan 2 Pemanfaatan Hasil Hutan 3 Pemantauan dan Ekosistem Hutan 4 Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan 5 Pengendali Ekosistem Hutan 6 Pengendali Ekosistem Hutan 6 Pengendali Ekosistem Hutan 7 Pengendali Ekosistem Hutan 8 Pengendalian Ekosistem Hutan			4 Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Yang Diduga Mengalami
Sungkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Sumber Pencemar 6 Pemahaman Tentang Pemantauan Kegiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan 7 Pemahaman Terhadap Kegiatan Metrologi Kemampuan Umum: 1 Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 2 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan 3 Regulasi Kemampuan Khusus: 1 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan 2 Pemanfaatan Hasil Hutan 3 Pemantauan dan Evaluasi 4 Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan 202 Pengendali Ekosistem Hutan Wemampuan Umum: Sumber Pencemar Ekosistem Kemampuan Umum Sumber Pencemar Femaulitas Lingkungan Kemampuan Umum Femaulitas Lingkungan Kemampuan Umum Femaulitas Lingkungan Femaulitas Lingkun			
6 Pemahaman Tentang Pemantauan Kegiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan 7 Pemahaman Terhadap Kegiatan Metrologi 201 Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama 1 Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 2 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan 3 Regulasi Kemampuan Khusus: 1 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan 2 Pemanfaatan Hasil Hutan 3 Pemantauan dan Evaluasi 4 Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan 202 Pengendali Ekosistem Hutan Kemampuan Umum:			
7 Pemahaman Terhadap Kegiatan Metrologi 201 Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama 1 Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 2 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan 3 Regulasi Kemampuan Khusus: 1 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan 2 Pemanfaatan Hasil Hutan 3 Pemantauan dan Evosistem Hutan 4 Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan 202 Pengendali Ekosistem Hutan 4 Kemampuan Umum:			
Pertama 1 Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 2 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan 3 Regulasi			
2 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan 3 Regulasi Kemampuan Khusus: 1 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan 2 Pemanfaatan Hasil Hutan 3 Pemantauan dan Evaluasi 4 Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan 202 Pengendali Ekosistem Hutan Kemampuan Umum:	201	•	
3 Regulasi Kemampuan Khusus: 1 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan 2 Pemanfaatan Hasil Hutan 3 Pemantauan dan Evaluasi 4 Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan 202 Pengendali Ekosistem Hutan Kemampuan Umum:		renand	
1 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan 2 Pemanfaatan Hasil Hutan 3 Pemantauan dan Evaluasi 4 Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan 202 Pengendali Ekosistem Hutan Kemampuan Umum:			
2 Pemanfaatan Hasil Hutan 3 Pemantauan dan Evaluasi 4 Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan 202 Pengendali Ekosistem Hutan Kemampuan Umum:			
3 Pemantauan dan Evaluasi 4 Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan 202 Pengendali Ekosistem Hutan Kemampuan Umum:			
4 Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan 202 Pengendali Ekosistem Hutan Kemampuan Umum:			
202 Pengendali Ekosistem Hutan Kemampuan Umum:			
I Torompil 1 Dogulosi Tentone Department Chasistem United		•	Kemampuan Umum:
		Terampil	1 Regulasi Tentang Pengendalian Ekosistem Hutan

Halaman 43 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Pengetahuan Umum Kehutanan
			Jabatan Fungsional KLHK
			Organisasi KLHK Kemampuan Khusus:
			Perencanaan Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
			Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
			Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
			Pengendalian Perubahan Iklim
	•		Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
203	Pengendali Ekosistem Hutan		Pengendalian Ekosistem Hutan Kemampuan Umum:
	Pemula		Pengetahuan Kehutanan
		2	Pengetahuan Umum
			Regulasi Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Regulasi Tentang Pengendalian Ekosistem Hutan
	•		Regulasi tentang penyelenggaraan Kehutanan
			Kemampuan Khusus: Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan Di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan
		1	Ekosistemnya
			Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan Di Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
	ŀ		Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan Di Bidang Pengelolaan Hutan Lestari
	ł		Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan Di Bidang Pengendalian Perubahan Iklim Pengetahuan Kehutanan
			Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan Di Bidang Perencanaan Kehutanan dan Tata
		0	Lingkungan Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan Di Bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan
204	Pengendali Frekuensi Radio Ahli	/	Kompetensi Umum:
	Pertama		Peraturan Perundang-undangan terkait Telekomunikasi
	- Ortaina		Dasar-dasar Telekomunikasi
		3	Komponen Elektronika
			Rangkaian Dasar Elektronika
			Rangkaian Elektronika Telekomunikasi
	ŀ		Elektronika Digital
			Dasar-dasar Komputer Jaringan komputer
	ľ		Perangkat lunak
			Regulasi tentang informatika
		11	Pemeliharaan komputer
			Kompetensi Khusus:
			Antena, propagasi, dan saluran transmisi
	•		Sistem jaringan telekomunikasi Modulasi gelombang radio
			Rangkaian Dasar Elektronika
			Rangkaian Elektronika Telekomunikasi
			Elektronika Digital
			Teknik Instrumentasi (alat ukur)
			Rangkaian super heterodyne
			Jaringan komputer
	}		Perangkat lunak Pemeliharaan komputer
205	Pengendali Organisme Pengganggu		Kompetensi Umum:
	Tumbuhan Ahli Madya		Regulasi terkait OPT/DPI
	•	2	Budidaya Tanaman
		3	Pengetahuan umum OPT/DPI
			Pengendalian OPT/ penanganan DPI secara umum
	}		Kompetensi Khusus: Pengenalan OPT
			Pengenalan OPI Pengenalan dan penanganan DPI
	ľ	3	Musuh Alami
		4	Pengendalian OPT
		5	Koleksi OPT
000	Dannardali Ornari		Pengamatan, peramalan dan analisis OPT
	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda		Kompetensi Umum: Regulasi terkait OPT/DPI
	rambunan / villi Muua		Budidaya Tanaman
	†		Pengetahuan umum OPT/DPI
		4	Pengendalian OPT/ penanganan DPI secara umum
			Musuh alami secara umum
			Pengetahuan umum terkait refugia
			Kompetensi Khusus: Pengenalan OPT
	1		Pengenalan OPT Pengenalan musuh alami
	ľ		Pengenalan dan penanganan DPI
			Pemanfaatan musuh alami
	l		
		5	Pengendalian OPT
		5 6	Pengendalian OPT Koleksi OPT Pengamatan, peramalan dan analisis OPT

Halaman 44 dari 62

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX



NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
207	Pengendali Organisme Pengganggu	Kompetensi Umum:
	Tumbuhan Ahli Pertama	Regulasi terkait OPT/DPI Budidava Tanaman
		Budidaya Tanaman Pengetahuan umum OPT/DPI
		4 Pengendalian OPT/ penanganan DPI secara umum
		Kompetensi Khusus:
		1 Pengenalan OPT
		Pengenalan dan penanganan DPI Musuh Alami
		4 Pengendalian OPT
		5 Koleksi OPT
000	D 11:0 : D	6 Pengamatan, peramalan dan analisis OPT
208	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia	Kompetensi Umum: 1 Regulasi terkait OPT/DPI
	Tullibulian Fellyella	2 Budidaya Tanaman
		3 Pengetahuan umum OPT/DPI
		4 Pengendalian OPT/ penanganan DPI secara umum
		Kompetensi Khusus: 1 Pengenalan OPT
		2 Pengenalan dan penanganan DPI
		3 Musuh Alami
		4 Pengendalian OPT
		5 Koleksi OPT 6 Pengamatan, peramalan dan analisis OPT
209	Pengendali Organisme Pengganggu	Kompetensi Umum:
	Tumbuhan Mahir	1 Regulasi terkait OPT/DPI
		2 Budidaya Tanaman
		Pengetahuan umum OPT/DPI Pengendalian OPT/ penanganan DPI secara umum
		Kompetensi Khusus:
		1 Pengenalan OPT
		2 Pengenalan dan penanganan DPI
		3 Musuh Alami 4 Pengendalian OPT
		5 Koleksi OPT
		6 Pengamatan OPT
210	Pengendali Organisme Pengganggu	Kompetensi Umum:
	Tumbuhan Terampil	1 Regulasi terkait OPT/DPI 2 Budidaya Tanaman
		3 Pengetahuan umum OPT/DPI
		4 Pengendalian OPT/ penanganan DPI secara umum
		5 Pengenalan OPT
		Kompetensi Khusus: 1 Pengenalan dan penanganan DPI
		2 Musuh Alami
		3 Pengendalian OPT
		4 Koleksi OPT 5 Pengamatan OPT
211	Penggerak Swadaya Masyarakat	Kemampuan Umum:
	Ahli Pertama	1 Jabatan Fungsional
		Tugas, Fungsi dan Peran Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat dalam pembangunan Desa,
		Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 3 Identifikasi khalayak sasaran penggerakan
		Kemampuan Khusus:
		Desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi
		Kelembagaan desa Peraturan perundang-undangan mengenai desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan
		transmigrasi
		4 Kewenangan pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi
		5 Konsep Kemandirian Masyarakat
		6 Jejaring Kemitraan dan Inovasi 7 Pemberdayaan Masyarakat
		8 Sosiologi Perdesaan
		9 Perubahan Sosial dan Perubahan Budaya
010	Danghulu Ahli Dartama	10 Komunikasi dan Gerakan Perubahan
212	Penghulu Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
		2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
		3 Pengertian dan Urgensi Moderasi Beragama
		 4 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 5 Profil Kementerian Agama dan struktur pemerintahan RI dari pusat sampai daerah
		6 Cara membaca Al-Qur'an
		7 Ketentuan penggunaan tata bahasa dalam bahasa Arab dan Inggris
		Kemampuan Khusus:
		 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974
		3 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
		4 Kepdirjen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Juknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan
		5 PP Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Rujuk (PNBPNR)
1	l	Halaman 45 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		6 Kompilasi Hukum Islam
		7 Fikih Munakahat Klasik 8 Fikih Munakahat Kontemporer
		Kandungan Ayat Al-Qur'an tentang Nikah, Talak, dan Rujuk, Keluarga Sakinah, dan Kebimasislaman
		Tugas dan fungsi KUA dalam bidang Kebimasislaman
		PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2019 tentang JF Penghulu, PMA Nomor 16 Tahun 2021 tentang Juknis JF Penghulu, dan Perpres Nomor 73 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu
213	Penguji Kendaraan Bermotor Terampil	Kompetensi Umum: 1 Peraturan Perundang-Undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Totalipii	Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		3 Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
		Peraturan Perundang-Undangan tentang Kendaraan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
		6 Peraturan Perundang-Undangan tentang Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor
		7 Peraturan Perundang-Undangan tentang Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor
		Peraturan Perundang-Undangan tentang Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) pengujian kendaraan bermotor
		9 Etika Profesi Penguji Kendaraan Bermotor
		10 Pelayanan Prima
		Kompetensi Khusus: 1 Teknik Pemeriksaan Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor
		2 Teknik Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor
		Sistem Kendaraan Bermotor Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor
		5 Fasilitas dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
		6 Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor
		7 Sistem Informasi dan Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor 8 Teknik Pengukuran Dimensi dan Daya Angkut Kendaraan Bermotor
		Analisis dan Evaluasi Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor
214	Penguji Kendaraan Bermotor	Kompetensi Umum:
	Pemula	Peraturan Perundang-Undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Peraturan Perundang-
		Undangan tentang Kendaraan
		Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor Peraturan Perundang-Undangan tentang Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor
		6 Peraturan Perundang-Undangan tentang Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor
		Peraturan Perundang-Undangan tentang Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) pengujian kendaraan
		bermotor 8 Etika Profesi Penguji Kendaraan Bermotor
		9 Pelayanan Prima
		Kompetensi Khusus: 1 Sistem Kendaraan Bermotor
		2 Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor
		3 Fasilitas dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
		4 Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor 5 Sistem Informasi dan Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor
215	Penguji Keselamatan dan	Kemampuan Umum:
	Kesehatan Kerja Ahli Pertama	1 Perencanaan kegiatan K3
		2 Pengujian K3 3 Pengujian Kompetensi K3
		4 Pengendalian K3
		5 Pengkajian K3
		Kemampuan Khusus: 1 Perencanaan kegiatan K3
		2 Pengujian K3
		3 Pengujian Kompetensi K3 4 Pengendalian K3
		5 Pengkajian K3
216	Penguji Mutu Barang Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		Pengetahuan tentang dasar pengukuran dan statistik sederhana Pengetahuan tentang dasar-dasar pengujian/kalibrasi
		Pengetahuan tentang dasar dasar pengujian/kalibrasi Pengetahuan tentang jenis dan penggunaan peralatan laboratorium pengujian/kalibrasi
		4 Pengetahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium, regulasi dan standardisasi
		Kompetensi Khusus:
		Pengetahuan tentang persiapan, peralatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengujian/kalibrasi
		berdasarkan persyaratan
		Pengetahuan tentang perhitungan hasil pengujian dan ketidakpastian Pengetahuan tentang jaminan mutu pengujian/kalibrasi
		Pengetahuan tentang program kalibrasi ulang alat standar/alat uji
		5 Pengetahuan tentang perencanaan fumigasi
		6 Pengetahuan tentang validasi metode Pengetahuan tentang standar persyaratan kompetensi laboratorium SNI ISO/IEC 17025 dan tentang
		7 tahapan sertifikasi SNI ISO/17067
		8 Pengetahuan tentang pengolahan data dan interpretasi hasil uji/kalibrasi
217	Penguji Mutu Barang Terampil	9 Pengetahuan tentang homogenisasi untuk uji kemahiran Kompetensi Umum:
<u>- 1/</u>	i onguji wutu barang refampii	Halaman 46 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		Pengetahuan tentang dasar pengukuran dan statistik sederhana
		Pengetahuan tentang dasar-dasar pengujian/kalibrasi Pengetahuan tentang dasar-dasar dan metode pengambilan contoh
		Pengetahuan tentang jenis dan penggunaan peralatan laboratorium pengujian/kalibrasi
		5 Pengetahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium, regulasi dan standardisasi
		Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan tentang persiapan contoh dan peralatan pengujian/kalibrasi
		Pengetahuan tentang persiapan conton dan peralatan pengujian kalibrasi Pengetahuan tentang perhitungan hasil pengujian dan ketidakpastian
		3 Pengetahuan tentang jaminan mutu pengujian/kalibrasi
		Pengetahuan tentang program kalibrasi ulang alat standar/alat uji Pengetahuan tentang pengelolaan bahan kimia dan limbah
		6 Pengetahuan tentang homogenisasi untuk uji kemahiran
218	Penguji Mutu Barang Pemula	Kompetensi Umum:
		Pengetahuan tentang dasar pengukuran dan statistik sederhana Pengetahuan tentang dasar-dasar pengujian/kalibrasi
		3 Pengetahuan tentang jenis dan penggunaan peralatan laboratorium pengujian/kalibrasi
		4 Pengetahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium
		Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan tentang persiapan contoh dan peralatan pengujian/kalibrasi serta perawatannya
		2 Pengetahuan tentang dasar-dasar pengujian/kalibrasi
		Pengetahuan tentang kondisi dan akomodasi lingkungan untuk pengujian/kalibrasi Pengetahuan tentang penanganan bahan kimia/media
		Pengetahuan tentang penanganan bahan kimia/media Pengetahuan tentang penanganan arsip contoh pengujian/kalibrasi
219	Pentashih Mushaf Al Quran Ahli	Kemampuan Umum:
	Pertama	Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an PMA No. 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur'an
		3 Kodifikasi Al-Qur'an
		4 Struktur kalimat dan perubahan kata dalam bahasa Arab
		Kemampuan Khusus: 1 Ilmu Rasm
		2 Ilmu Dhabt
222		3 Ilmu Waqaf Ibtida
220	Penyuluh Agama Buddha Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 49 Tahun 2018, PP Nomor 94 Tahun 2021
	· Ortaina	2 Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2021
		3 Wawasan Kebangsaan
		4 Moderasi Beragama 5 Teori Komunikasi
		6 Pengoperasian komputer
		Kompetensi Khusus: 1 Riwayat Siddharta Gautama
		Pancasila Buddhis dan Panca Dhamma
		3 Sifat Luhur Buddha
		4 Sila/Moralitas 5 Puja dan Budaya Buddhis
		6 Agama Budda dan Pelestarian Lingkungan
		7 Empat Kebenaran Mulia
		Hukum Karma dan Tumimbal Lahir Hukum Tilakkhana
		10 Hukum Paticcasamuppada
		11 Misi Pembabaran Dhamma 12 Peranan Agama Buddha dalam Kehidupan Sehari-hari
		13 Kitab Suci Tripitaka
		14 Hari Raya Agama Buddha
		15 Tempat Ibadah Agama Buddha 16 Kesetaraan Gender
		17 Hak Asasi Manusia
		18 Perdamaian Dunia
		19 Sejarah Perkembangan Agama Buddha 20 Candi-candi Agama Buddha di Indonesia
		21 Hukum tertib kosmis (niyama)
		22 Desa Punnakiriyavatthu
		23 Paritta Suci dan kegiatan di vihara 24 Persiapan bimbingan dan penyuluhan
		25 Konsep keluarga bahagia dalam Agama Buddha
		Konsep pelayanan konseling dan pelayanan informasi Konsep penyusunan rencana kerja bimbingan dan penyuluhan
		28 Materi bimbingan dan penyuluhan
		29 Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan
		Pelayanan dalam bentuk pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan dan penyuruhan
		32 Kerja sama lintas sektoral dengan lembaga pemerintah atau swasta
		33 Prosedur pengembangan model/metode/program bimbingan dan penyuluhan
221	Penyuluh Agama Hindu Ahli	34 Penyusunan pedoman bimbingan dan penyuluhan Kompetensi Umum:
	Pertama	1 Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023
		2 Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2021
		Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2023
	ı	Halaman 47 dari 62

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		5 Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor 85 Tahun 2023
		6 Teori Komunikasi
		7 Deteksi dini konflik sosial
		8 Pengoperasian komputer Kompetensi Khusus:
		1 Kitab Suci Weda
		2 Sradha dan Bhakti
		3 Susila
		4 Acara
		5 Sejarah Perkembangan Agama Hindu 6 Kidung Keagamaan
222	Penyuluh Agama Islam Ahli	Kompetensi Umum:
	Pertama	1 Teori Pembinaan dan Pemberdayaan Umat
		2 Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan umat
		 3 Pengelolaan Sumber Daya Masyarakat 4 Regulasi tentang penyelesaian konflik sosial dan keagamaan
		5 Penyelesaian Konflik keagamaan
		6 RAN PE Nomor 7 Tahun 2021 dan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006
		7 Teknologi Informasi dan Komunikasi
		8 Analisis Data
		9 Retorika Dakwah 10 Kelembagaan, Organisasi, Kepemimpinan, dan Hubungan Masyarakat
		11 Metodologi Bimbingan dan Penyuluhan Agama
		12 Manajemen bimbingan dan penyuluhan agama Islam
		Kompetensi Khusus:
		Agama dan Wabah Dakwah Digital
		3 Intoleransi Beragama
		4 Moderasi Beragama
		5 Kaidah Ushul
		6 ljtihad
		7 Sumber Hukum Islam 8 Sejarah Peradaban Islam Indonesia
		9 Dinasti 'Abbasiyah
		10 Dinasti Umayyah
		11 Khulafaur Rasyidin
		12 Sirah Nabawiyah
		13 Shorof 14 Nahwu
		15 Mu'amalah
		16 Ibadah
		17 Akhlak Tercela 18 Akhlak Terpuji
		19 Ilmu tasawuf
		20 Ilmu Kalam
		21 Rukun Iman
		22 Mustholah Hadis 23 Terjemahan Hadis
		24 Hafalan Hadis
		25 Ulumul Qur'an
		26 Tafsir
		27 Terjemahan Ayat 28 Tajwid
223	Penyuluh Agama Katolik Ahli	Kemampuan Umum:
	Pertama	1 Regulasi Penyuluh Agama
		2 Tugas Penyuluh Agama
		Fungsi Penyuluh Agama Panggunaan IT dalam pelaksanaan himbingan atau penyuluhan
		Penggunaan IT dalam pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan Penyuluh Agama berwawasan Moderat
		6 Metode penyuluhan
		Kemampuan Khusus:
		1 Perjanjian Lama
		2 Perjanjian Baru 3 Sejarah Gereja
		4 Sifat-sifat Gereja
		5 Sepuluh Perintah Allah
		6 Lima Tugas Gereja
		7 Sakramen
		8 Liturgi 9 Dokumen Konsili Vatikan II
		10 Ajaran Sosial Gereja
_		Kemampuan Umum:
224	Penyuluh Agama Kristen Ahli	
224	Penyuluh Agama Kristen Ahli Pertama	Peraturan perundang-undangan, kompetensi Penyuluh Agama Kristen
224		Peraturan perundang-undangan, kompetensi Penyuluh Agama Kristen Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Kristen
224		Peraturan perundang-undangan, kompetensi Penyuluh Agama Kristen Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Kristen Sasaran Pelayanan dan Metode Penyuluhan
224		Peraturan perundang-undangan, kompetensi Penyuluh Agama Kristen Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Kristen
224		Peraturan perundang-undangan, kompetensi Penyuluh Agama Kristen Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Kristen Sasaran Pelayanan dan Metode Penyuluhan Hak, kewajiban dan kode etik Penyuluh Agama Kristen Pancasila dalam perspektif Kristen dan implementasinya Kemampuan Khusus:
224		Peraturan perundang-undangan, kompetensi Penyuluh Agama Kristen Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Kristen Sasaran Pelayanan dan Metode Penyuluhan Hak, kewajiban dan kode etik Penyuluh Agama Kristen Pancasila dalam perspektif Kristen dan implementasinya

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		3 Gereja dan Masyarakat Majemuk
		4 Keberagaman agama di Indonesia serta moderasi beragama
		 Sejarah ICT, keberagaman media sosial dan pemanfaatannya sesuai ajaran iman Kristen Hakikat pendidikan (keluarga, lembaga pendidikan, gereja dan masyarakat)
		7 Demokrasi, HAM dan keadilan dalam perspektif iman Kristen
		8 Hakikat Alkitab sebagai Firman Allah dan pedoman hidup
		9 Hakikat nilai-nilai masa kini dan nilai-nilai kristiani
		10 Tugas dan tanggung jawab orang Kristen terhadap alam dan lingkungan hidup
		11 Hakikat budaya dan iman 12 Hakikat keluarga
		13 Hakikat damai sejahtera
225	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Kemampuan Umum
	-	1 Budaya Hukum
		2 Pengetahuan Umum
		Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI Hukum Pidana
		5 Hukum Perdata
		6 ASN
		Kemampuan Khusus
		1 Penyuluhan Hukum
		2 Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI
		Desa Sadar Hukum Kelompok Keluarga Sadar Hukum
		5 Hukum Perdata
		6 Peraturan Perundang-Undangan
		7 Pelayanan Publik
		8 Penyuluh Hukum 9 Komunikasi
		9 Komunikasi 10 Bantuan Hukum
		11 Sikap, Etika dan Perilaku
226	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama	Kemampuan Umum
		1 Perencanaan Penyuluhan Kehutanan
		Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan
		Pengembangan sistem penyuluhan kehutanan
		5 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan
		Kemampuan Khusus
		1 Perencanaan Penyuluhan Kehutanan
		Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan
		Pengembangan sistem penyuluhan kehutanan
		5 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan
227	Penyuluh Kehutanan Terampil	Kemampuan Umum
		Perencanaan Penyuluhan Kehutanan Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan
		3 Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan
		4 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan
		Kemampuan Khusus
		1 Perencanaan Penyuluhan Kehutanan
		Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan
		Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan
228	Penyuluh Kehutanan Pemula	Kemampuan Umum
		1 Perencanaan Penyuluhan Kehutanan
		Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan
		Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan
		Kemampuan Khusus
		1 Perencanaan Penyuluhan Kehutanan
		2 Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan
		 3 Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan 4 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan
229	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli	Kompetensi Umum:
	Pertama	1 Pengendalian Penduduk
		2 Alat dan Metode Kontrasepsi
		3 Pembangunan Keluarga
		4 Konsep Dasar Keluarga 5 Advokasi, KIE, KIP
		Kompetensi Khusus:
		1 Tumbuh Kembang Anak dan Poktan BKB
		2 Generasi Remaja dan Poktan BKR
		3 Poktan BKL
		4 Poktan UPPKA 5 PIK Remaja
		6 Pendataan Keluarga
		7 Pencatatan dan pelaporan
		8 Pembinaan IMP
00.	D 1111	9 Penyuluh KB
	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli	Kemampuan Umum 1 Wawasan regulasi terkait lingkungan hidup dan kehutanan
	Pertama	Halaman 49 dari 62

Halaman 49 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		2 Wawasan umum terkait Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup
		Wawasan umum terkait lingkungan hidup dan kehutanan Kemampuan Khusus
		1 Penanganan sampah laut
		2 Pengaturan pemulihan non institusi
		3 Pengelolaan B3
		4 Pengelolaan limbah B3 5 Pengelolaan limbah non B3
		6 Pengelolaan sampah
		7 Pengelolaan sampah oleh produsen
		8 Pengelolaan sampah pada Bank Sampah
		Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Pengelolaan sampah spesifik
		11 Pengendalian emisi udara
		12 Pengendalian gas rumah kaca
		13 Pengendalian pencemaran air
001	Demonstrate Name to Abili Demons	14 PROPER
231	Penyuluh Narkoba Ahli Pertama	Kompetensi Umum: Pengetahuan dasar tentang ruang lingkup Narkotika, Psikotropika, Bahan Adiktif dan Prekursor
		Narkotika
		2 Pengetahuan tentang tugas dan fungsi BNN
		Kompetensi Khusus:
		1 Menyampaikan informasi P4GN yang efektif
		Keterampilan dasar dalam penyuluhan narkoba Penerapan metode, teknik dan model penyuluhan Narkoba
		Mengetahui gambaran umum tentang sasaran penyuluhan
		5 Membuat laporan dan mengevaluasi penyuluhan Narkoba
232	Penyuluh Perikanan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 45 Tahun 2009
		2 UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
		LILL Namer 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
		Petambak Garam Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan
		Kemampuan Khusus:
		Pengolahan data dan informasi kelembagaan sektor kelautan dan perikanan Pengolahan data dan informasi kelembagaan sektor kelautan dan perikanan
		Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan sektor kelautan dan perikanan Materi Penyuluhan dalam berbagai media
		Penyusunan dan Penerapan Metoda dan Materi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
		5 Kemitraan Usaha Kelautan dan Perikanan
L		6 Peningkatan produktivitas dan skala usaha Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha Perikanan
233	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Pengetahuan Umum tentang Industri dan Kebijakan Industri
	r erdagangan Ann r ertama	Pohon Industri dan Bahan Baku Industri
		3 Klasifikasi Industri
		4 Perijinan Usaha
		Kemampuan Khusus: 1 Standar Industri dan Mutu Produk
		2 Penumbuhan Wirausaha Baru
		Pengembangan Kapasitas Industri Kecil dan Menengah
		4 Perencanaan Konsultasi dan Penyuluhan Aspek Manajemen Produksi IKM
		5 Perencanaan Konsultasi dan Penyuluhan Aspek Manajemen Pemasaran IKM
		Pengelolaan program penyuluhan usaha indag Penyusunan dan Penerapan Metode dan Materi Penyuluhan Usaha Indag
		Penyusunan dan Penerapan Metode dan Materi Penyulunan Usana Indag Pendampingan dan/atau konsultasi usaha indag
		9 Karya Tulis Ilmiah
234	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Pelaksanaan Penyuluhan
		2 Evaluasi Penyuluhan Kompetensi Khusus:
		1 Pelaksanaan Penyuluhan
		2 Evaluasi Penyuluhan
		3 Metode penyuluhan pertanian
235	Penyuluh Pertanian Penyelia	Kompetensi Umum:
		1 Pelaksanaan Penyuluhan 2 Evaluasi Penyuluhan
		Kompetensi Khusus:
		Pelaksanaan Penyuluhan
		2 Evaluasi Penyuluhan
000	Demonstrate Device 1 Add 1	3 Metode penyuluhan pertanian
236	Penyuluh Pertanian Mahir	Kompetensi Umum: 1 Pelaksanaan Penyuluhan
		2 Evaluasi Penyuluhan
		Kompetensi Khusus:
		1 Pelaksanaan Penyuluhan
		2 Evaluasi Penyuluhan
227	Penyuluh Pertanian Terampil	3 Metode penyuluhan pertanian Kompetensi Umum:
231	n enyulun renaman refampii	1 Pelaksanaan Penyuluhan
		2 Evaluasi Penyuluhan
		Kompetensi Khusus:
		Halaman 50 dari 62

Halaman 50 dari 62

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		1 Pelaksanaan Penyuluhan
		2 Evaluasi Penyuluhan
238	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	3 Metode penyuluhan pertanian Kemampuan Umum:
200	r enydidir oosial Aliii i ertama	Penyiapan bahan perumusan kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan
		kesejahteraan sosial
		2 Advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial serta monitoring dan evaluasi hasil advokasi Kemampuan Khusus:
		Pelaksanaan penyusunan perencanaan penyuluhan sosial sesuai pedoman kerja/petunjuk
		teknis dan bimbingan
		Penyajian data dan informasi terkait pemetaan potensi kerawanan sosial daerah Pelaksanaan persiapan terkait penyelenggaraan penyuluhan sosial
		4 Pelaksanaan pengembangan kualitas penyuluhan sosial
239	Perawat Ahli Pertama	5 Pelaksanaan pengembangan kerjasama penyuluhan kemasyarakatan Kompetensi Umum:
200	i elawat Allii i ellama	1 Komunikasi Terapeutik Perawat-klien
		2 Edukasi dalam keperawatan
		3 Penyelenggaraan praktik etik dan legal dalam pelayanan keperawatan Kompetensi Khusus:
		1 Pengkajian keperawatan
		2 Diagnosis keperawatan
		Rencana keperawatan Tindakan keperawatan spesifik kompleks
		5 Evaluasi keperawatan
		6 Pendokumentasian asuhan keperawatan
		7 Pengelolaan pelayanan keperawatan 8 Tindakan pencegahan infeksi
240	Perawat Terampil	Kemampuan Umum:
		Komunikasi terapeutik dalam pemberian asupan keperawatan
		Promosi kesehatan Penggunaan alat-lat pengamanan/pelindung fisik pada pasien untuk mencegah risiko cedera pada
		individu dalam rangka upaya preventif
		4 Dokumentasi keperawatan Kemampuan Khusus:
		Pengkajian keperawatan dasar pada individu
		2 Pemberian oksigenasi sederhana
		Tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat/bencana/kritikal Management Patient Safety
		5 Intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area keperawatan medikal bedah
		6 Intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada keperawatan anak
		Tindakan keperawatan spesifik yang sederhana dalam pemenuhan kebutuhan dasar pada area keperawatan maternitas
		8 Penerapan asuhan keperawatan individu dalam keluarga dengan masalah kesehatan
		9 Tindakan keperawatan jiwa spesifik yang sederhana pada orang dewasa
		10 Terapi komplementer/holistik
		11 Tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre/intra/pos operasi
		12 Perawatan paliatif 13 Konsep berduka/kehilangan
		14 Perawatan luka
241	Perekam Medis Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN 2 Kebijakan Pelayanan RME di Fasyankes (PMK 24/2022 tentang RM, KMK 1423, PMK 13 tentang 1
		sehat, KMK 1559 2022)
		3 KMK No. 312 Tahun 2020
		4 Hasil Kongres IX PORMIKI Tahun 2018 5 Aspek Hukum Rekam Medis
		6 Aspek Manajemen secara umum
		Kemampuan Khusus:
		Manajemen Data Kodifikasi Klinis Sistem Pembiayaan Kesehatan
		3 Statistik dan Pelaporan Data Pasien
		4 Pelayanan Pendaftaran Pasien 5 Penjaminan Mutu Pelayanan Rekam Medis
		6 Pelepasan Informasi Kesehatan
242	Perekam Medis Terampil	Kompetensi Umum:
		Pengetahuan rekam medis dan informasi kesehatan, dasar hukum dan masalahnya Ruang lingkup rekam medis dan informasi kesehatan
		3 Peran perekam medis dan informasi kesehatan
		4 Hukum kesehatan
		5 Dasar-dasar manajemen Kompetensi Khusus:
		Konsep dasar prosedur pelayanan pendaftaran pasien meliputi peraturan dan kebijakan, tatacara
		pelayanan pendaftaran pasien
		2 Identitas pasien 3 Kartu indeks utama pasien (KIUP/IUP)
		4 Penomoran rekam medis
		5 Memutakhirkan (KIUP/IUP) 6 Registrasi pendaftaran pasien rawat jalan
		7 Registrasi pendaftaran pasien rawat jalah 7 Registrasi pendaftaran pasien rawat inap
•	•	Halaman 51 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

Periodical Fundament Periodical Fundament	NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
10 Armillia multi rekam media lainnua			8 Informasi kesehatan pasien
11 Statelisk dan pelaporan dala passion 12 Korsen picasar, procedur dan hebilpian pengelobaan rekam media 13 Pergambilan kembal tekam media 14 Perdahishishishi rokam media 14 Perdahishishishi rokam media 15 Permakutan rokam media 16 Permakutan rokam media 17 Asembiling reham media 18 Permilir rokam media 18 Permilir rokam media 18 Permilir rokam media 19 Perkayasa Ahli Pertama 19 Perkayasa Ahli Pertama 19 Perkayasa Ahli Pertama 19 Permilir rokam media			
12 Konsep dasart, prosedur dan kebipkan pengahan nekan media			
14 Perdistribusean redeam medis			
15 Filing relation media			
16 Perujusuhan reksam media 17 Asambiriliy rakam media 18 Formulir reksam media 18 Formulir reksam media 18 Formulir reksam media 18 Formulir reksam media 19 Korsepi Chasar, poraturan dan tata cara prosedur standar kodifikasi klinis berdasarkan bukule book kodifikasi klinis 19 Korsepi Chasar, poraturan dan tata cara prosedur standar kodifikasi klinis berdasarkan bukule book kodifikasi klinis perbasayan kesehatan 22 Fordikasi klinis berbasis sistem pembiayaan kesehatan 22 Fordikasi klinis berbasis sistem pembiayaan 23 Fordikasi klinis berbasis sistem pembiayaan 24 Fordikasi Reksaman 24 Fordikasi Reksaman 25 Fordikasi Re			
17			
18 Formair rekam medic 19 Konsep desan , penturan dan tata cara prosedur standar kodifikasi klinis berdasankan bukuk-book kodifikasi klinis 20 Kodifikasi klinis 21 Kodifikasi klinis 22 Kodifikasi klinis 23 Kodifikasi klinis 24 Perekayasa Ahii Pertama			
			19. Formulir rokam modis
21 Indexs Undakan medis 2 Kodikuska kinis berhassa sistem pembiayaan 2 2 Kodikuska kinis berhassa sistem pembiayaan 3 2 2 Kodikuska kinis berhassa sistem pembiayaan 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2			19 Konsep dasar, peraturan dan tata cara prosedur standar kodifikasi klinis berdasarkan buku/e-book kodifikasi klinis
243 Perekayasa Ahil Pertama			
Perekayasa Ahil Pertama			
Perencana Ahil Pertama	243	Perekayasa Ahli Pertama	
Remanquan Khusus: Korekayasan Tehrologi			
Teknis Perencanaan Pembangunan Tingkat Dasar	244	Perencana Ahli Pertama	
Remanquan Rivisus: 1			
2 Perencanana Pembangunan Bidang Sosial Tingkat Dasar			
3 Perencanaan Pembangunan Bidang Spasial Tingkat Dasar			
Memanguan Umum:			
1 Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia	245	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	
Kemampuan Khusus:		· oncalan zoglotali / i i i · ontalii a	
1 Kelembagaan DPR 2 J.F.P.L.Anil Pertama/LF APL. Terampil dan Penulisan sesuai PUEBI 3 Instans Pertama/LF APL. Terampil dan Penulisan sesuai PUEBI 3 Instans Perdiama/LF APL. Terampil dan Penulisan sesuai PUEBI 3 Instans Perdiama/LF APL. Terampil dan Penulisan sesuai PUEBI 3 Instans Perdiama/LF APL. Terampil dan Penulisan Sesuai PUEBI 3 Instans Pendiaduk 2 Alat dan Metode Kontrasepsi 3 Pembargunan Keluarga 4 Konsep Dasar Keluarga 5 Advokasi, KIE, KIP 5 Advokasi, KIE, KIP 6 Nompetensi Khusus: 1 Tumburi Kembang Anak 2 POKTAN BKR 3 Poktan BKL 4 Poktan UPPKA 5 PIK Remaja 6 Pendataan Keluarga 7 Pencatatan dan pelaporan 8 Pembinaan IMP 9 Penyuluh KB 6 Pendataan Keluarga 7 Pencatatan dan pelaporan 8 Pembinaan IMP 9 Penyuluh KB 7 Pengendalian Penduduk 2 Alat dan Metode Kontrasepsi 3 Konsep Dasar Keluarga 7 Pencatatan dan Pendiama Imperiama Keluarga 8 Kompetensi Umum: 1 Pengendalian Penduduk 2 Alat dan Metode Kontrasepsi 3 Konsep Dasar Keluarga 6 Pendataan Keluarga 7 Pencatatan dan Pelaporan 8 Kompetensi Umum: 1 Pengendalian Penduduk 2 Alat dan Metode Kontrasepsi 3 Konsep Dasar Keluarga 4 Pencatatan dan pelaporan 8 Kompetensi Umum: 1 Ruang Ingkup humas (termasuk public speaking , MC, moderator) 2 Elika Kehumasan 6 Karakteristik Media 7 Media Baru 8 Kompetensi Khusus: 1 Komunikasi Masa (termasuk public speaking , MC, moderator) 2 Humas pemerintah 3 Manajemen Komunikasi 1 Komunikasi (Tamasuk (copywriting) 1 Komun			
2 JF PL ANII Pertama/JE APL Terampil dan Penulisan sesual PUEBI			
3 Instansi Pembina dan Instansi Pengguna JFPL/JFAPL			
Setupas Lapangan Keluarga Fennana Terampil Pengendalian Penduduk 2 Alat dan Metode Kontrasepsi 3 Pembangunan Keluarga 4 Konsep Dasar Keluarga 5 Advokasi, KIE, KIP Kompetensi Khusus: 1 Tumbuh Kembang Anak 2 POKTAN BKR 3 PoKtan BKL 4 Potan UPPKA 5 PIK Remaja 6 Pendataan Keluarga 7 Pendataan Keluarga 8 Pendataan Keluarga 8 Pendataan Keluarga 8 Pendataan Keluarga 8 Pendataan Keluarga 9 Penyuluh KB 8 Pendataan Keluarga 1 Pengendalian Penduduk 2 Alat dan Metode Kontrasepsi 3 Konsep Dasar Keluarga 8 Pendataan Keluarga 1 Pengendalian Penduduk 2 Alat dan Metode Kontrasepsi 3 Konsep Dasar Keluarga 6 Pendataan Keluarga 7 Pendatian Keluarga 8 Pendatian Keluarga 9 Penyuluh KB 9 Penyuluh			
Pengendalian Penduduk	246	Petugas Lapangan Keluarga	
3 Pembangunan Keluarga 4 Konsep Dasar Keluarga 5 Advokasi, KiE, KiP Kompetensi Khusus: 1 Tumbuh Kembang Anak 2 POKTAN BKR 3 Poktan BKL 4 Poktan UPPKA 5 PiK Remaja 6 Pendataan Keluarga 7 Pencatatan dan pelaporan 8 Pembinaan IMP 9 Penyuluh KB 247 Petugas Lapangan Keluarga Berencana Pemula 8 Pembinaan IMP 9 Penyuluh KB 2 Alat dan Metode Kontrasepsi 3 Konsep Dasar Keluarga Kompetensi Umum: 1 Pengendalian Penduduk 2 Alat dan Metode Kontrasepsi 3 Konsep Dasar Keluarga Kompetensi Khusus: 1 Kelompok Kegistan Tribina & UPPKA 2 Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) 3 Pendatatan dan pelaporan 4 Pencatatan dan pelaporan 5 Kompetensi Umum: 1 Ruang lingkup humas (termasuk public speaking, MC, moderator) 2 Etika Kefumasan 5 Strategi Komunikasi 5 Strategi Komunikasi 6 Karakteristik Media 7 Media Baru 8 Komunikasi Massa (termasuk copywriting) 11 Komunikasi Massa (termasuk copywriting) 12 Komunikasi Massa (termasuk copywriting) 13 Metode Penelitian Komunikasi 14 Teori Komunikasi 15 Audit Komunikasi 16 Komunikasi Visual			
4 Konsep Dasar Keluarga			
S Advokasi, KIE, KIP Kompetensi Khusus: 1 Tumbuh Kembang Anak			
Kompetensi Khusus: 1 Tumbuh Kembang Anak 2 POKTAN BKR 3 Poktan BKL 4 Poktan UPPKA 5 PIK Remaja 6 Pendataan Keluarga 7 Pencatatan dan pelaporan 8 Pembinaan IMP 9 Penyuluh KB 1 Pengendalan Penduduk 2 Alat dan Metode Kontrasepsi 3 Konsep Dasar Keluarga 4 Pencata Hubungan Masyarakat Ahii Muda 8 Penata Hubungan Masyarakat Ahii Muda 1 Ruang lingkup humas (termasuk public speaking , MC, moderator) 1 Regian Reg			
1 Tumbuh Kembang Anak 2 POKTAN BKR 3 Poktan BKL 4 Poktan UPPKA 5 PIK Remaia 6 Pendataan Keluarga 7 Pencatatan dan pelaporan 8 Pembinaan IMP 9 Penyuluh KB Kompetensi Umum: 1 Pengendalian Penduduk 2 Alat dan Melode Kontrasepsi 3 Konsep Dasar Keluarga Kompetensi Umum: 1 Pengendalian Penduduk 2 Alat dan Melode Kontrasepsi 3 Konsep Dasar Keluarga Kompetensi Khusus: 1 Kelompok Kegiatan Tribina & UPPKA 2 Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) 3 Pendataan Keluarga Kompetensi Khusus: Kelompok Kegiatan Tribina & UPPKA 2 Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) 3 Pendatan Afeliarga Kompetensi Umum: 1 Pengendalian Penduduk 2 Pencatatan dan pelaporan Kompetensi Umum: 1 Pengendalian Penduduk 2 Pencatatan dan pelaporan Kompetensi Umum: 1 Pengendalian Penduduk 2 Pencatatan dan pelaporan Kompetensi Umum: 1 Pengendalian Penduduk 2 Penduduk			
3			
4 Poktan UPPKA 5 PIK Remaja 6 Pendataan Keluarga 7 Pencatatan dan pelaporan 8 Petugas Lapangan Keluarga Berencana Pemula 8 Kompetensi Umum: 9 Penyuluh KB 8 Kompetensi Umum: 1 Pengendalian Penduduk 2 Alat dan Metode Kontrasepsi 3 Konsep Dasar Keluarga 8 Kompetensi Kruusus: 1 Kelompok Kegiatan Tribina & UPPKA 2 Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) 3 Pendataan Keluarga 4 Pencatatan dan pelaporan 8 Kompetensi Umum: 1 Ruang lingkup humas (termasuk public speaking, MC, moderator) 2 Eika Kehumasan 8 Kompetensi Umum: 1 Ruang lingkup humas (termasuk public speaking, MC, moderator) 2 Eika Kehumasan 8 Kompetensi Khusus: 1 Kegiatan-kegiatan humas (termasuk hubungan media) 2 Humas pemerintah 3 Manajemen Isu 4 Manajemen Komunikasi 5 Strategi Komunikasi 6 Karakteristik Media 7 Media Baru 8 Komunikasi Massa (termasuk copywriting) 11 Komunikasi Organisasi 12 Komunikasi Organisasi 13 Metode Peneltiian Komunikasi 14 Teori Komunikasi 15 Audit Komunikasi 16 Komunikasi Komunikasi 16 Komunikasi Komunikasi			
S. PIK Remaja			
Pendataan Keluarga 7 Pencatatan dan pelaporan 8 Pembinaan IMP 9 Penyuluh KB			
Petugas Lapangan Keluarga Pembinaan IMP			
8 Pembinaan IMP 9 Penyuluh KB Rerencana Pemula Peranganan Keluarga Berencana Pemula 1 Pengendalian Penduduk 2 Alat dan Metode Kontrasepsi 3 Konsep Dasar Keluarga Kompetensi Umum: 1 Kelompok Kegiatan Tribina & UPPKA 2 Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) 3 Pendataan Keluarga 4 Pencataan dan pelaporan Kompetensi Umum: 1 Ruang lingkup humas (termasuk public speaking, MC, moderator) 2 Etika Kehumasan Kompetensi Khusus: 1 Kegiatan-kegiatan humas (termasuk hubungan media) 2 Humas pemerintah 3 Manajemen isu 4 Manajemen Komunikasi 5 Strategi Komunikasi 6 Karakteristik Media 7 Media Baru 8 Komunikasi Massa (termasuk jumalistik) 9 Publisitas 10 Penulisan Kehumasan (termasuk copywriting) 11 Komunikasi Organisasi 12 Komunikasi Interpersonal 13 Metode Penelitian Komunikasi 14 Teori Komunikasi 15 Audit Komunikasi 15 Audit Komunikasi 16 Komunikasi Interpersonal 18 Komunikasi Interpersonal 19 Audit Komunikasi 14 Teori Komunikasi 15 Audit Komunikasi 15 Audit Komunikasi 16 Komunikasi Visual			
Petugas Lapangan Keluarga Fompetensi Umum:			
Berencana Pemula 1 Pengendalian Penduduk 2 Alat dan Metode Kontrasepsi 3 Konsep Dasar Keluarga Kompetensi Khusus: 1 Kelompok Kegiatan Tribina & UPPKA 2 Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) 3 Pendataan Keluarga 4 Pencataan dan pelaporan Kompetensi Umum: 1 Ruang lingkup humas (termasuk public speaking, MC, moderator) 2 Etika Kehumasan Kompetensi Khusus: 1 Kegiatan-kegiatan humas (termasuk hubungan media) 2 Humas pemerintah 3 Manajemen isu 4 Manajemen Komunikasi 5 Strategi Komunikasi 6 Karakteristik Media 7 Media Baru 8 Komunikasi Massa (termasuk jurnalistik) 9 Publisitas 10 Penulisan Kehumasan (termasuk copywriting) 11 Komunikasi Organisasi 12 Komunikasi Organisasi 13 Metode Penelitian Komunikasi 15 Audit Komunikasi 15 Audit Komunikasi 15 Komunikasi 15 Komunikasi 15 Komunikasi 16 Komunikasi 15 Komunikasi 16 Komunikasi 16 Komunikasi 16 Komunikasi 16 Komunikasi 17 Komunikasi 18 Komunikasi 18 Komunikasi 19 Komunikasi			
2 Alat dan Metode Kontrasepsi 3 Konsep Dasar Keluarga Kompetensi Khusus: 1 Kelompok Kegiatan Tribina & UPPKA 2 Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) 3 Pendataan Keluarga 4 Pencatatan dan pelaporan Kompetensi Umum: 1 Ruang lingkup humas (termasuk public speaking, MC, moderator) 2 Etika Kehumasan Kompetensi Khusus: 1 Kegiatan-kegiatan humas (termasuk hubungan media) 2 Humas pemerintah 3 Manajemen isu 4 Manajemen Komunikasi 5 Strategi Komunikasi 6 Karakteristik Media 7 Media Baru 8 Komunikasi Massa (termasuk jurnalistik) 9 Publisitas 10 Penulisan Kehumasan (termasuk copywriting) 11 Komunikasi Organisasi 12 Komunikasi Interpersonal 13 Metode Penelitian Komunikasi 14 Teori Komunikasi 15 Audit Komunikasi 16 Komunikasi 15 Komunikasi 16 Komunikasi			
3 Konsep Dasar Keluarga Kompetensi Khusus: 1 Kelompok Kegiatan Tribina & UPPKA 2 Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) 3 Pendataan Keluarga 4 Pencatatan dan pelaporan Kompetensi Umum: 1 Ruang lingkup humas (termasuk public speaking, MC, moderator) 2 Etika Kehumasan Kompetensi Khusus: 1 Kegiatan-kegiatan humas (termasuk hubungan media) 2 Humas pemerintah 3 Manajemen isu 4 Manajemen Komunikasi 5 Strategi Komunikasi 6 Karakteristik Media 7 Media Baru 8 Komunikasi Massa (termasuk jurnalistik) 9 Publisitas 10 Penulisan Kehumasan (termasuk copywriting) 11 Komunikasi Interpersonal 13 Metode Penelitian Komunikasi 14 Teori Komunikasi 15 Audit Komunikasi 15 Komunikasi Interpersonal 16 Komunikasi Visual		регенсана нетина	
Kompetensi Khusus: Kelompok Kegiatan Tribina & UPPKA			
248 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 25 Etika Kehumasan Kompetensi Umum: 26 Etika Kehumasan Kompetensi Khusus: 27			Kompetensi Khusus:
248 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Kompetensi Umum: Kompetensi Khusus: Kompetensi Khusus: Hegiatan-kegiatan humas (termasuk hubungan media) Humas pemerintah Manajemen isu Manajemen Komunikasi Karateristik Media Media Baru Komunikasi Massa (termasuk jurnalistik) Publisitas Penulisan Kehumasan (termasuk copywriting) Homunikasi Organisasi Komunikasi Interpersonal Metode Penelitian Komunikasi Metode Penelitian Komunikasi Komunikasi Visual			
4 Pencatatan dan pelaporan Kompetensi Umum: 1 Ruang lingkup humas (termasuk public speaking, MC, moderator) 2 Etika Kehumasan Kompetensi Khusus: 1 Kegiatan-kegiatan humas (termasuk hubungan media) 2 Humas pemerintah 3 Manajemen isu 4 Manajemen Komunikasi 5 Strategi Komunikasi 6 Karakteristik Media 7 Media Baru 8 Komunikasi Massa (termasuk jurnalistik) 9 Publisitas 10 Penulisan Kehumasan (termasuk copywriting) 11 Komunikasi Organisasi 12 Komunikasi Interpersonal 13 Metode Penelitian Komunikasi 14 Torri Komunikasi 15 Audit Komunikasi 16 Komunikasi Visual			
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Kompetensi Umum: Ruang lingkup humas (termasuk public speaking, MC, moderator) Etika Kehumasan Kompetensi Khusus: Kegiatan-kegiatan humas (termasuk hubungan media) Humas pemerintah Manajemen isu Manajemen Komunikasi Strategi Komunikasi Karakteristik Media Media Baru Komunikasi Massa (termasuk jurnalistik) Publisitas Penulisan Kehumasan (termasuk copywriting) Komunikasi Organisasi Komunikasi Interpersonal Metode Penelitian Komunikasi Metode Penelitian Komunikasi			
Muda 1 Ruang lingkup humas (termasuk public speaking, MC, moderator) 2 Etika Kehumasan Kompetensi Khusus: 1 Kegiatan-kegiatan humas (termasuk hubungan media) 2 Humas pemerintah 3 Manajemen isu 4 Manajemen Komunikasi 5 Strategi Komunikasi 6 Karakteristik Media 7 Media Baru 8 Komunikasi Massa (termasuk jurnalistik) 9 Publisitas 10 Penulisan Kehumasan (termasuk copywriting) 11 Komunikasi Organisasi 12 Komunikasi Interpersonal 13 Metode Penellitan Komunikasi 14 Teori Komunikasi 15 Audit Komunikasi 16 Komunikasi Visual	248	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli	
Kompetensi Khusus: 1 Kegiatan-kegiatan humas (termasuk hubungan media) 2 Humas pemerintah 3 Manajemen isu 4 Manajemen Komunikasi 5 Strategi Komunikasi 6 Karakteristik Media 7 Media Baru 8 Komunikasi Massa (termasuk jurnalistik) 9 Publisitas 10 Penulisan Kehumasan (termasuk copywriting) 11 Komunikasi Organisasi 12 Komunikasi Interpersonal 13 Metode Penelitian Komunikasi 14 Teori Komunikasi 15 Audit Komunikasi 16 Komunikasi Visual		= = =	1 Ruang lingkup humas (termasuk <i>public speaking</i> , MC, moderator)
1 Kegiatan-kegiatan humas (termasuk hubungan media) 2 Humas pemerintah 3 Manajemen isu 4 Manajemen Komunikasi 5 Strategi Komunikasi 6 Karakteristik Media 7 Media Baru 8 Komunikasi Massa (termasuk jurnalistik) 9 Publisitas 10 Penulisan Kehumasan (termasuk copywriting) 11 Komunikasi Organisasi 12 Komunikasi Interpersonal 13 Metode Penelitian Komunikasi 14 Teori Komunikasi 15 Audit Komunikasi 16 Komunikasi Visual			
2 Humas pemerintah 3 Manajemen isu 4 Manajemen Komunikasi 5 Strategi Komunikasi 6 Karakteristik Media 7 Media Baru 8 Komunikasi Massa (termasuk jurnalistik) 9 Publisitas 10 Penulisan Kehumasan (termasuk copywriting) 11 Komunikasi Organisasi 12 Komunikasi Interpersonal 13 Metode Penelitian Komunikasi 14 Teori Komunikasi 15 Audit Komunikasi 16 Komunikasi Visual			
3 Manajemen isu 4 Manajemen Komunikasi 5 Strategi Komunikasi 6 Karakteristik Media 7 Media Baru 8 Komunikasi Massa (termasuk jurnalistik) 9 Publisitas 10 Penulisan Kehumasan (termasuk copywriting) 11 Komunikasi Organisasi 12 Komunikasi Interpersonal 13 Metode Penelitian Komunikasi 14 Teori Komunikasi 15 Audit Komunikasi 16 Komunikasi Visual			
5 Strategi Komunikasi 6 Karakteristik Media 7 Media Baru 8 Komunikasi Massa (termasuk jurnalistik) 9 Publisitas 10 Penulisan Kehumasan (termasuk copywriting) 11 Komunikasi Organisasi 12 Komunikasi Interpersonal 13 Metode Penelitian Komunikasi 14 Teori Komunikasi 15 Audit Komunikasi 16 Komunikasi Visual			3 Manajemen isu
6 Karakteristik Media 7 Media Baru 8 Komunikasi Massa (termasuk jurnalistik) 9 Publisitas 10 Penulisan Kehumasan (termasuk <i>copywriting</i>) 11 Komunikasi Organisasi 12 Komunikasi Interpersonal 13 Metode Penelitian Komunikasi 14 Teori Komunikasi 15 Audit Komunikasi 16 Komunikasi Visual			
7 Media Baru 8 Komunikasi Massa (termasuk jurnalistik) 9 Publisitas 10 Penulisan Kehumasan (termasuk copywriting) 11 Komunikasi Organisasi 12 Komunikasi Interpersonal 13 Metode Penelitian Komunikasi 14 Teori Komunikasi 15 Audit Komunikasi 16 Komunikasi Visual			
8 Komunikasi Massa (termasuk jurnalistik) 9 Publisitas 10 Penulisan Kehumasan (termasuk <i>copywriting</i>) 11 Komunikasi Organisasi 12 Komunikasi Interpersonal 13 Metode Penelitian Komunikasi 14 Teori Komunikasi 15 Audit Komunikasi 16 Komunikasi Visual			
9 Publisitas 10 Penulisan Kehumasan (termasuk copywriting) 11 Komunikasi Organisasi 12 Komunikasi Interpersonal 13 Metode Penelitian Komunikasi 14 Teori Komunikasi 15 Audit Komunikasi 16 Komunikasi Visual			
11 Komunikasi Organisasi 12 Komunikasi Interpersonal 13 Metode Penelitian Komunikasi 14 Teori Komunikasi 15 Audit Komunikasi 16 Komunikasi Visual			9 Publisitas
12 Komunikasi Interpersonal 13 Metode Penelitian Komunikasi 14 Teori Komunikasi 15 Audit Komunikasi 16 Komunikasi Visual			
13 Metode Penelitian Komunikasi 14 Teori Komunikasi 15 Audit Komunikasi 16 Komunikasi Visual			
14 Teori Komunikasi 15 Audit Komunikasi 16 Komunikasi Visual			
15 Audit Komunikasi 16 Komunikasi Visual			
16 Komunikasi Visual			
249 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Kompetensi Umum:			
Halaman 52 dari 62	249	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli	

Halaman 52 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
	Pertama	1 Ruang lingkup humas
		2 Etika Kehumasan
		Kompetensi Khusus: 1 Manajemen isu
		2 Manajemen komunikasi
		3 Karakteristik media
		4 Media baru
		5 Komunikasi massa 6 Publisitas
		7 Penulisan kehumasan
		8 Media massa
		9 Kegiatan-kegiatan humas 10 Komunikasi organisasi
		11 Komunikasi interpersonal
		12 Teori komunikasi
		13 Model komunikasi
		Metode penelitian komunikasi Audit komunikasi
250	Pranata Hubungan Masyarakat	Kompetensi Umum:
200	Terampil	1 Ruang lingkup humas
		2 Etika Kehumasan
		Kompetensi Khusus:
		Manajemen isu Manajemen komunikasi
		3 Karakteristik media
		4 Media baru
		5 Komunikasi massa 6 Publisitas
		7 Penulisan kehumasan
		8 Kegiatan-kegiatan humas
		9 Komunikasi organisasi
		10 Komunikasi interpersonal 11 Teori komunikasi
		12 Model komunikasi
		13 Metode penelitian komunikasi
		14 Fotografi 15 Komunikasi visual
251	Pranata Komputer Ahli Madya	Kemampuan Khusus:
20.	randa romputor rum maaya	1 IT Enterprise
		2 Manajemen Layanan TI
		3 Manajemen Risiko 4 Pengelolaan data
		5 Infrastruktur Tl/sistem jaringan komputer
252	Pranata Komputer Ahli Muda	Kemampuan Khusus:
		1 IT Enterprise
		Manajemen Layanan TI Manajemen Risiko
		4 Pengelolaan data
		5 Infrastruktur Tl/sistem jaringan komputer
253	Pranata Komputer Ahli Pertama	6 Sistem Informasi/Pengolahan Data/Area TI Khusus Kemampuan Khusus:
233	Tranata Nomputer Amir ertama	1 Manajemen Layanan TI
		2 Pengelolaan data
		3 Manajemen Risiko
		Infrastruktur Tl/sistem jaringan komputer Sistem Informasi/Pengolahan Data/Area Tl Khusus
254	Pranata Komputer Penyelia	Kemampuan Khusus:
	· · · · · ·	1 Pengelolaan data
		Infrastruktur Tl/sistem jaringan komputer Sistem Informasi/Pengolahan Data/Area Tl Khusus
255	Pranata Komputer Mahir	Kemampuan Khusus:
		1 Manajemen Layanan TI
		2 Pengelolaan data
		Infrastruktur Tl/sistem jaringan komputer Sistem Informasi/Pengolahan Data/Area Tl Khusus
256	Pranata Komputer Terampil	Kemampuan Khusus:
	•	1 Pengelolaan data
		Infrastruktur Tl/sistem jaringan komputer Sistem Informasi/Pengolahan Data/Area Tl Khusus
257	Pranata Laboratorium	3 Sistem Informasi/Pengolahan Data/Area TI Khusus Kompetensi Umum:
	Kemetrologian Ahli Pertama	1 Pengetahuan umum metrologi legal
		Peraturan perundangan metrologi legal di Indonesia
		Kompetensi Khusus: 1 Penerapan Ketidakpastian Pengukuran
		Penerapan Ketidakpastian Pengukuran Pengelolaan Laboratorium
		3 Pengelolaan Standar Besaran Massa
		4 Pengelolaan Standar Besaran Panjang
258	Pranata Laboratorium Kesehatan	5 Pengelolaan Standar Besaran Volume Kompetensi Umum:
	Ahli Pertama	1 UU Nakes No. 36 Tahun 2014 : Peraturan terkait Lab
	•	Halaman 53 dari 62

Halaman 53 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		2 PMK No. 42 Tahun 2015 - Peraturan terkait Lab
		3 K3, Biosafety dan Biosecurity 4 Pengelolaan Limbah
		5 Permenkes No. 69 Tahun 2015 - Manajemen Lab
		6 Kode Etik Profesi
		7 Pengendalian Infeksi di Lab/nosokomial 8 Pengendalian dan pemantapan mutu
		Kompetensi Khusus:
		1 Flebotomi vena, kapiler dan arteri
		Penilaian kualitas spesimen darah Pengambilan spesimen selain darah (urin, sputum, feses, cairan tubuh)
		Pengambilan spesimen selain daran (urin, sputum, feses, cairan tubun) Penilaian kualitas spesimen urin dan feses
		5 Penilaian kualitas spesimen sputum dan cairan tubuh
		Manajemen spesimen - penyimpanan spesimen Manajemen spesimen - pengiriman sampel rujukan
		Nanajernen spesimen - penginman samperrujukan Prosesing spesimen darah
		9 Prosesing spesimen selain darah (urin, sputum, feses, cairan tubuh)
		10 Spesimen untuk pemeriksaan laboratorium hispatologi dan sitologi
		 11 Manajemen spesimen - persiapan pasien untuk pemeriksaan laboratorium 12 Kalibrasi alat laboratorium
		13 Persiapan pemeriksaan - pengujian alat untuk pemeriksaan hematologi
		14 Persiapan pemeriksaan - pengujian reagensia untuk pemeriksaan hematologi
		 15 Persiapan pemeriksaan - pengujian alat untuk pemeriksaan kimia darah 16 Persiapan pemeriksaan - pengujian reagensia untuk pemeriksaan kimia darah
		17 Persiapan pemeriksaan - pengujian alat untuk pemeriksaan urinalisis
		18 Persiapan pemeriksaan - pengujian reagensia untuk pemeriksaan urinalisis
		 19 Persiapan pemeriksaan - pengujian alat untuk pemeriksaan mikrobiologi 20 Persiapan pemeriksaan - pengujian reagensia untuk pemeriksaan mikrobiologi
		21 Persiapan pemeriksaan - pengujian reagensia untuk pemeriksaan rito-histoteknologi
		22 Persiapan pemeriksaan - pengujian reagensia untuk permeriksaan sito-histoteknologi
		23 Metode pemeriksaan hematologi 24 Metode pemeriksaan kimia klinik
		25 Metode pemeriksaan mikrobiologi
		26 Metode pemeriksaan imuno-serologi
		27 Manajemen peralatan lab medik - pemeliharaan mikroskop
		Manajemen peralatan lab medik - penanganan masalah pada mikroskop Urinalisis
		30 Kimia Darah
		31 Analisis Gas Darah
		32 Pemeriksaan hematologi lengkap 33 Pemeriksaan penyaring hemostasis
		34 Pemeriksaan imunologi dasar
		35 Sediaan mikroskopis - pembuatan sediaan
		Sediaan mikroskopis - pewarnaan sediaan Sediaan mikroskopis - pembacaan dan interpretasi secara mikroskopis
		38 Pemeriksaan sedimen urin
		39 Pemeriksaan toksikologi klinik 40 Pemeriksaan NAPZA
		41 Pemeriksaan imunohematologi
		42 Pemeriksaan bakteriologi sederhana
		43 Pemeriksaan bakteriologi kompleks
		44 Pemeriksaan mikologi sederhana 45 Pemeriksaan parasitologi sederhana
		46 Pemeriksaan sitohistoteknologi
		47 Pemeriksaan analisis cairan tubuh
		48 Pemeriksaan diagnostik molekuler 49 Pemeriksaan POCT
		50 Penulisan dan interpretasi hasil pemeriksaan
		51 Verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan
259	Pranata Laboratorium Kesehatan	52 Sterilisasi dan desinfeksi Kompetensi Umum:
	Terampil	1 K3, Biosafety dan Biosecurity
		2 Pengambilan spesimen
		3 Pengelolaan limbah 4 Manajemen laboratorium
		5 Peraturan terkait laboratorium
		6 Kode etik
		7 Pengendalian infeksi di laboratorium/nosokomial
		Kompetensi Khusus: 1 Melakukan flebotomi vena dan kapiler
		2 Pengambilan sepsimen selain darah
		Penanganan limbah laboratorium Manjingkan angsiman untuk pamajikanan laboratorium kistanatalasi dan sitenatalasi
		Menyiapkan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium histopatologi dan sitopatologi Kalibrasi alat laboratorium secara sederhana
		6 Pemeriksaan kimia klinik dasar per parameter/setara
		7 Pemeriksaan hematologi dasar per parameter/setara
		Pemeriksaan imunologi dasar per parameter Pembuatan sediaan mikroskopis secara sederhana
		Pembuatan sediaan mikroskopis secara sedemana Pembuatan sediaan mikroskopis secara khusus
		11 Pewarnaan sediaan mikroskopis secara sederhana
		Halaman 54 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

12 Permitikasan dentineruntuk securan mikroedeasi persarat langsangketara (14 Permitikasan dentineruntuk securan sederhara) (14 Permitikasan intercentabola secura sederhara) (15 Permitikasan intercentabola secura sederhara) (17 Permitikasan intercentabola secura sederhara) (18 Permitikasan intercentabola securantuk securantu	NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
14 Pernaripan mulu internal laboratorium secan sederhana 15 Perneksaan improhamatioopa secan sederhana 16 Perneksaan improhamatioopa secan sederhana 17 Perneksaan improhamatioopa secan sederhana 18 Perneksaan introducing secan sederhana 19 Perneksaan altinispiderhana 19 Perneksaan altinispiderhana 19 Perneksaan altinispiderhana 21 Perneksaan altinispiderhana 21 Perneksaan analisa caran hubritybelarra 21 Perneksaan analisa caran hubritybelarra 21 Perneksaan analisa caran hubritybelarra 22 Perneksaan analisa caran hubritybelarra 23 Serialisa dari disinfesia 23 Serialisa dari disinfesia 23 Serialisa dari disinfesia 24 Pernetsaan pernetsaan dari pernetsaan 25 Pernetsaan pernetsaan dari pernetsaan pernetsaan 25 Pernetsaan 25 Pernetsaan pernetsaan dari pernetsaan pernetsaan 25 Pernetsaan pernetsaan dari pernetsaan pernetsaan pernetsaan pernetsaan 25 Pernetsaan 25 Pernetsaan pernetsaan dari pernetsaan pernet			
15 Permikasan tokshologi kinki suora sederhara 17 Permikasan imunosembologi secra sederhara 17 Permikasan imunosembologi secra sederhara 18 Permikasan imunosembologi secra sederhara 20 Permikasan indicologi kinki suora sederhara 21 Permikasan indicologi kinki suora sederhara 22 Permikasan indicologi kinki suora sederhara 23 Permikasan analisa satu principisteria 24 Permikasan analisa satu principisteria 25 Permikasan indicologi kinki suora hukuhbestan 26 Permikasan PCOT (Port of Care Testing) kinia menggunakan teknologi biosensor secara 26 Permikasan PCOT (Port of Care Testing) kinia menggunakan teknologi biosensor secara 26 Permikasan PCOT (Port of Care Testing) kinia menggunakan teknologi biosensor secara 27 Permikasan teknologi biosensor secara 28 Permikasan teknologi biosensor secara 3 Permikasan teknologi biosensor secara 3 Permikasan teknologi biosensor secara 4 Permikasan teknologi biosensor secara 4 Permikasan teknologi biosensor secara 5 Permikasan teknologi biosensor secara 5 Permikasan teknologi biosensor secara 6 Permikasan teknologi biosensor secara 6 Permikasan teknologi biosensor secara 7 Permikasan teknologi biosensor secara 8 Permikasan teknologi biosensor secara 9 Permikasan teknologi bio			
16 Permiskasan munorhemistooli seera sederhama 17 Permiskasan munorhemistooli seera sederhama 18 Permiskasan mikoobiologi, kinir, (biotheriologi, pansibologi, mikologi, virologi) secura sederhama 18 Permiskasan mikoobiologi, kinir, (biotheriologi, pansibologi, mikologi, virologi) secura sederhama 21 Permiskasan andiska balu pripileretina 22 Permiskasan andiska balu pripileretina 23 Permiskasan andiska balu pripileretina 24 Permiskasan andiska balu pripileretina 25 Permiskasan andiska balu pripileretina 26 Permiskasan andiska balu pripileretina 27 Permiskasan persistan den persistan den bahun 28 Permiskasan persistan kepitasan dan bahun 28 Permiskasan persistan kepitasan kepitasan dan bahun 28 Permiskasan persistan kepitasan kepitasan dan bahun 28 Permiskasan persistan kepitasan kepitas			
18 Permiksaan mikhobiloogi kinik (bakishroloogi, parasitologi, mikologi, vrologi) secara sederhana 19 Permiksaan analisa catan bishribetaria 2 Permiksaan analisa catan bishribetaria 2 Permiksaan analisa catan bishribetaria 2 Permiksaan analisa batan bishribetaria 3 Permiksaan analisa batan bishribetaria 3 Permiksaan analisa batan bishribetaria 3 Permiksaan berataria batan batan 3 Permiksaan begalata bishoratorian 3 Permiksaan beratarian dan bahan 3 Permiksaan beratarian beratarian bahan 3 Permiksaan beratarian beratarian bahan			
19 Permitiksan antibilis toteknologi secara sederihana			
20 Pemeriksaan analisa butu piguliwatara			
21 Pernerksean arabilas betu ginjaksetara 22 Pennyksean POCT (Port of Carr Testing) kimia menggunakan teknologi biosensor secara 22 Pennyksean POCT (Port of Carr Testing) kimia menggunakan teknologi biosensor secara 23 Sterlinas den distindenta 23 Sterlinas den distindenta 24 Pennyahusahan setara hegiata biospatrium 24 Pennyahusahan setara hegiata biospatrium 25 Pennyahusahan setara hegiata biospatrium 26 Pennyahusahan setara hegiata biospatrium 27 Pennyahusahan setara hegiata biospatrium 28 Pennyahusahan pentahan din pengunaan bahan 28 Pennyahusahan begiata biospatrium 28 Pennyahusahan pentahan din pengunaan bahan 28 Pennyahusahan begiata biospatrium 28 Pennyahusahan pentahan din pengunaan bahan 28 Pennyahusahan begiata biospatrium 28 Pennyahusahan pentahan din pengunaan bahan 28 Pennyahusahan pentahan din pengunaan bahan 28 Pennyahusahan begiata biospatrium 28 Pennyahusahan pentahan din pengunaan bahan 28 Pennyahusahan begiata biospatrium 28 Pennyahusahan begiata biospatrium 28 Pennyahusahan pentahan din Pentahan 28 Pennyahusahan begiata biospatrium 28 Pennyahusahan begiata din bahan 28 Pennyahusahan begiata biospatrium 28 Pennyahusahan begiata din bahan			
de Pranata Laboratorium Pendidikan Ahil Moda Ahil Penanata Laboratorium Pendidikan Ahil Penanata Laboratorium Pendidikan Ahil Peranata Laboratorium Pendidikan Ahil Peranata Laboratorium Pendidikan Ahil Peranata Laboratorium Pendidikan Ahil Peranata Laboratorium Pendidikan Penyelia Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia Pengenganana penjatan dan penggunaan bahan Pengengananan penjatan dan bahara Pengengananan penjatan dan penggunaan bahan Pengengananan penjatan dan penggunaan bahan Pengengananan penjatan dan penggunaan bahan Pengenganan penjat			
Pranata Laboratorium Pendidikan Ahit Muda Pranata Laboratorium Pendidikan Ahit Muda Ahit Pendanan Ahit			Pemeriksaan POCT (Point of Care Testing) kimia menggunakan teknologi biosensor secara
Pranata Laboratorium Pendidikan			sederhana/setara
Ahl Muda 2. Pengopeasian persistan dan pengunaan bahan 3. Pemelinaran perawatan penaturan dan bahan 4. Pengawatasian sistem kerja iaboratorium 6. Pengawatasian sistem kerja iaboratorium 7. Pengawatasian sistem kerja iaboratorium 7. Pengawatasian sistem kerja iaboratorium 8. Pengawatasian sistem kerja iaboratorium 9. Pengawa	260	Pranata Laboratorium Pendidikan	
3 Permelharann/perawatan perakatan dan bahan 4 Pergarawatan selatan takanan 5 Pergarahan baharan 6 Pergarahan baharan 7 Pergarahan kepitan takoratorium 7 Pergarahan kepitan takoratorium 8 Pergarahan kepitan takoratorium 9 Pergarahan kepitan takoratorium 9 Pergarahan kepitan takoratorium 9 Pergarahan kepitan takoratorium 1 Pergarahan kepitan takoratorium 9 Pergarahan kepitan takoratorium 1 Pergarahan kepitan takoratorium 2 Pengarahan kepitan takoratorium 9 Pergarahan kepitan takoratorium 1 Pergarahan kepitan takoratorium 1 Pergarahan kepitan takoratorium 1 Pergarahan kepitan takoratorium 1 Pergarahan kepitan takoratorium 2 Pengarahan kepitan takoratorium 3 Permilaran perawatan perakatan dan pengarahan bahan 3 Permilaran perawatan perakatan dan perakatan dan Pertolongan Permula 8 Permata Sarahan Saraha	200		כב
Pranata Laboratorium Pendidikan			
Ahil Pertama Ahil Pertama Ahil Pertama Ahil Pertama Perpela Pranata Laboratorium Pendidikan Pengela Pranata Laboratorium Pendidikan Pengela Pranata Laboratorium Pendidikan Pengela Pranata Laboratorium Pendidikan Pengela Pranata Laboratorium Pendidikan Pengela Pengela Pranata Laboratorium Pendidikan Pengela Pengela Pengela Pranata Laboratorium Pendidikan Pengela Pengel			
Ahl Pertama 2 Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan 4 Pengevalusaian sistem kerja laboratorium 5 Pengembangan kepitan laboratorium 6 Pernyelia 262 Pranata Laboratorium Pendidikan 7 Pernyelia and Pertama Pernyelia dan penggunaan bahan 8 Peneliharaan-perawatan dan penggunaan bahan 9 Pengevalusaian sistem kerja laboratorium 1 Perencanaan kepitan laboratorium 2 Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan 9 Peneliharaan-perawatan peralatan dan bahan 1 Pernoanaan kepitan laboratorium 1 Pernoanaan kepitan laboratorium 2 Pengoperasian peralatan peralatan dan bahan 3 Peneliharaan-perawatan peralatan dan bahan 4 Pengevalusaian sistem kerja laboratorium 4 Pengevalusaian sistem kerja laboratorium 7 Penderanaan kepitan laboratorium 4 Pengevalusaian sistem kerja laboratorium 9 Penderanaan kepitan laboratorium 1 Perencanaan kepitan laboratorium 1 Perencanaan kepitan laboratorium 2 Pengoperasian peralatan dan pengunaan bahan 3 Peneliharaan-perawatan peralatan dan pengunaan bahan 9 Penderasi Umuri 1 Pengopatusaian sistem kerja laboratorium 1 Pengovalusaian sistem kerja laboratorium 1 Pengovalusaian sistem kerja laboratorium 1 Pengovalusaian sistem kerja laboratorium 2 Pengoperasian peralatan dan pengunaan bahan 1 Pengovalusaian sistem kerja laboratorium 2 Pengoparasian penalatan dan pengunaan bahan 3 Penduna Pendunaan Pendunaan 1 Pengovalusaian sistem kerja laboratorium 1 Pengovalusaian sistem kerja laboratorium 2 Pengoparasian penalatan sistem kerja laboratorium 2 Pengovalusaian sistem kerja laboratorium 2 Pengovalusaian sistem kerja laboratorium sistem kerja laboratorium sistem kerja laborato	261	Propoto Laboratorium Bandidikan	
Pemeliharaaniprarwatan peralatan dan bahan	201		
Perpanta Laboratorium Pendidikan Perpelia Perpelia Perpenanan kegiatan baboratorium		7 tim F Ortaina	
Perneta Laboratorium Pendidikan Pernecanaan kogiatan laboratorium			
Penyelia 2 Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan 3 Pemeliharaan/perawahan peralatan dan bahan 4 Pengewalusaian sistem kerja laboratorium 2 Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan 3 Pemeliharaan/perawahan peralatan dan penggunaan bahan 3 Pemeliharaan/perawahan peralatan dan penggunaan bahan 3 Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan 4 Pengoperasian peralatan dan behan 4 Pengovalusaian sistem kerja laboratorium 7 Pemula 2 Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan 3 Pemula Peranata Pencarian dan Pertolongan 8 Pemula Peranata Pencarian dan Pertolongan 9 Pemula Peranata Pencarian dan Pertolongan 1 Ulu Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pencarian dan Pertolongan 2 Pempengan RIS Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penbahan perekatan dan Pertolongan 3 Per Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembihaan Potersi Pencarian dan Pertolongan 4 Per Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pembihaan Potersi Pencarian dan Pertolongan 5 Interpretes Kegidari kebugaran jasman 1 Pelaksanaan isahan SAR 1 Peran potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR 2 Pelaksanaan isahan SAR 3 Tekuk pelaksanaan operasi SAR 4 Peran potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR 5 Sistem Komunikasi dalam pelaksanaan operasi SAR 5 Sistem Komunikasi dalam pelaksanaan operasi SAR 6 Sarana dan Peralatian SAR dalam pelaksanaan operasi SAR 7 Peralam Pemeriatian SAR dalam pelaksanaan operasi SAR 9 Peralama Pemeriatian SAR dalam pelaksanaan operasi SAR 9 Peralama Pemeriatian SAR dalam pelaksanaan operasi SAR 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 3 Peralaturan Memerian Peralatian SAR dalam operasi SAR 6 Perana Manifer Penyelik Romor 19 Tahun 2005 9 Peralaturan Memerian Penyelik Romor 19 Tahun 2005 1 Peralaman Memerian Nomor 19 Tahun 2015 1 Peralaman Memerian Memerian Memerian Memerian Penyelik Romor 11 Tahun 2005 1 Peralaman Memerian Memerian Memerian Memerian Pengawai Reperasian Memerian Pengawai Reperasian Memerian Pengawai Reperasian Peralatian Republik Romor 11 Tahun 2005 1 Peralaman Pemalakan Pengawai Reperasian Reperasian Reperasian Reperasia	000	December Laboratory Co. 11 11	
Pranata Laboratorium Pendidikan Perendenan Angelatan dan bahan Perendenan Angelatan dan bahan Perendenan kegistan laboratorium Peranata Laboratorium Pendidikan Perendenanan kegistan laboratorium Peranata Laboratorium Peranata Laboratorium Peranata Perendenan Angelatan Jaboratorium Peranata Perendenan dan Pertolongan Peranata Percarian dan Pertolongan Peranata Percarian dan Pertolongan Perula Peranata Perendenan Peranata Peranatan dan Pertolongan Peranatan Pe	262		
Pranata Laboratorium Pendidikan		н өн ус на	
1 Perencanaan kegiatan laboratorium Pendidikan 2 Perencanaan kegiatan laboratorium 3 Pemeliharaan/perawatan peralatan dan penggunaan bahan 4 Pengengalasah sistem kegi alaboratorium 4 Pengendalasah sistem kegi alaboratorium 4 Pengendalasah sistem kegi alaboratorium 4 Pengendalasah sistem kegi alaboratorium 2 Pengendalasah sistem kegi alaboratorium 2 Pengendalasah sistem kegi alaboratorium 4 Pengendalasah sistem kegi alaboratorium 6 Pengendalasah sistem kegi alaboratorium 6 Pengendalasah sistem kegi alaboratorium 7 Pennata Pencarian dan Pertolongan 7 Pennata Pencarian dan Pertolongan 8 Penunca Penula 7 Pennata Pencarian dan Pertolongan 8 Penunca Pendena 8 Penunca Penandalasah sistem 8 Penunca Penandan 9 Penunc	L		
Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pendiparanan kegiatan laboratorium 1 Perencanaan kegiatan laboratorium 2 Pengoperasian peralatan dan pengunaan bahan 3 Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan 4 Pengoperasian peralatan dan bengunaan bahan 3 Pemalaan/perawatan peralatan dan bahan 4 Pengevaluasian sistem kegia laboratorium Kompetensi Umum: 1 Umomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan 2 Permenpan RB Nomor 33 Tahun 2021 tentang JF Pranata Pencarian dan Pertolongan 3 PP Nomor 21 Tahun 2011 tentang JF Pranata Pencarian dan Pertolongan 4 PP Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan 5 Interpretasi kepiatan kebugaran jasmani Kompetensi Umum: 1 Pelaksamaan siaga SAR 2 Pelaksamaan siaga SAR 3 Teknik pelaksamaan perasi SAR 4 Peran potensi SAR dalam pelaksamaan operasi SAR 5 Sistem Komunikasi dalam pelaksamaan operasi SAR 6 Sarana dan Peralatan SAR dalam pelaksamaan operasi SAR 6 Sarana dan Peralatan SAR dalam pelaksamaan operasi SAR 7 Indrang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 4 Peraturan Meneri PANPB Nomor 01 PREPLO2012 5 Peraturan KPI Momor 01 PREPLO2012 6 Peraturan Meneri Panberi Berta SO Tahun 2017 5 Peraturan KPI Momor 01 PREPLO2012 7 Noobe Citik Jumalasik 7 Projem Sistan 8 Perdoman Perhaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) 8 Kompetersi Khusus 1 Jurialistik 9 Penderasi Khusus 1 Penderasi Khusus 2 Penderasi Khusus 3 Penderasi Khusus 3 Penderasi Khusus 4 Penderasi Khusus 4 Penderasi Khusus 4 Penderasi Khusus 5 Penderasi Khusus 6 Penderasi Khusus 6 Penderasi Khusus 7 Penderasi Khusus 8 Penderasi Kh	263		1 Perencanaan kegiatan laboratorium
Pranata Laboratorium Pendidikan		Mahir	
1 Perencanaan kegiatan laboratorium 2 Perencanaan kegiatan laboratorium 2 Pengoperasian perpatan dan penggunaan bahan 3 Peranata Pencarian dan Pertolongan 4 Pengevatuasian sistem kerja taboratorium 4 Pengevatuasian sistem kerja taboratorium 4 Pengevatuasian sistem kerja taboratorium 5 Peranata Pencarian dan Pertolongan 4 Pengevatuasian sistem kerja taboratorium 5 Peranata Pencarian dan Pertolongan 5 Peranata Pencarian dan Pertolongan 5 Peranata Pencarian dan Pertolongan 6 Peranata Pencarian dan Pertolongan 7 Peranata Pencarian Jawa Pencarian dan Pertolongan 7 Peranata Pencarian Jawa Pencarian Jawa Pencarian dan Pertolongan 7 Peranata Pencarian Jawa Pencarian			
Penanta Pencarian dan Pertolongan Pemulian Pengevaluan pertalatan dan bahan Pertolongan Pemulia Pengevaluan pertalatan dan bahan Pengevaluasian sistem kerjal abboratorium Pemulia Pemulia Pemulia Pengevaluasian sistem kerjal abboratorium Pemulia Pengevaluasian sistem kerjal abboratorium Pemulia Pengevaluasian sistem kerjal abboratorium Pengevaluasian sistem kerjalatan pertolongan Pengerapan RB Nomor 23 Tahun 2011 rentang Pembianan Potensi Pencarian dan Pertolongan Pengerapan RB Namor 21 Tahun 2017 tentang Pembianan Potensi Pencarian dan Pertolongan Pengerapan RB Namor 21 Tahun 2017 tentang Pembianan Potensi Pencarian dan Pertolongan Pengerapan RB Namor 21 Tahun 2017 tentang Pengeraja RB Namor 21 Tahun 2017 tentang Pengeraja RB Namor 21 Tahun 2017 tentang Pengeraja RB Namor 21 Tahun 2018 Penandaran Pertolongan Penandaran Pengeraja RB Namor 21 Tahun 2018 Penandaran Pengeraja RB Namor 21 Tahun 2018 Penandaran Pengeraja RB Namor 21 Tahun 2019 Penandaran Pengeraja RB Namor 21 Tahun 2019 Penandaran Pengeraja RB Namor 21 Tahun 2019 Penandaran Pengeraja RB Namor 21 Tahun 2005 Penaturan Mentel Namor 21 Tahun 2005 Penaturan Mentel Namor 20 Tahun 2016 Penaturan Mentel PANBRB Nomer 30 Tahun 2017 Penaturan Mentel PANBRB Nomer 30 Tahun 2017 Penaturan Mentel PANBRB Nomer 30 Tahun 2018 Penaturan Pengeraja RB Namor 30 Tahun 2018 Penaturan Pengeraja	264	Pranata Laboratorium Pendidikan	- 9
3 Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan 4 Pengeyaluasian sistem kerja laboratorium			
Kompetensi Limum: Uil Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan 2 Permenpan RB Mornor 33 Tahun 2021 tentang Jerpranata Pencarian dan Pertolongan 3 PP Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan 4 PP Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operati Pencarian dan Pertolongan 4 PP Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operati Pencarian dan Pertolongan 4 PP Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operati Pencarian dan Pertolongan 4 PP Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operati Pencarian dan Pertolongan 4 PP Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operati Pencarian dan Pertolongan 4 PP Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operati Pencarian dan Pertolongan 4 PP Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operati Pencarian dan Pertolongan 4 Pertangan Salaga SAR 4 Peran potensi SAR 4 Peranuman Pertolongan 4 Pertolongan 4 Pertolongan Potensi SAR 4 Peranuman Menter PANRB Nomor 30 Tahun 2016 4 Peraturan Menter PANRB Nomor 30 Tahun 2017 5 Peraturan Menter PANRB Nomor 30 Tahun 2017 7 Peraturan Menter PANRB Nomor 30 Tahun 2018 7 Pertolongan		·	
Pemula 1 UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan 2. Permenpan Ris Nomor 31 Tahun 2014 tentang Je Pranata Pencarian dan Pertolongan 3. PP Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinsan Potensi Pencarian dan Pertolongan 4. PP Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pembinsan Potensi Pencarian dan Pertolongan 5. Interpretasi kediatan kebugaran jasmani Kompetensi Khusus 1. Pelaksanaan siaga SAR 2. Pelaksanaan siaga SAR 3. Teknik pelaksanaan operasi SAR 4. Peran potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR 5. Sistem Komunikasi dalam pelaksanaan operasi SAR 6. Sarana dan Pertalatan SAR dalam operasi SAR 6. Sarana dan Pertalatan SAR dalam operasi SAR 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2016 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2017 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2017 6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2017 7. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers 8. Pedoman Pemberitaan Media Cyber 2012 9. Kode Etik Jumalistik 10 P3SPS (Pedoman Perilaku Penylaran dan Standar Program Siaran) Kompetensi Khusus: 1. Jurnalistik 2. Produk Jurnalistik 3. Prinsip Komunikasi 4. Komunikasi massa 5. Profesi Siaran 6. Proses Produksi Siaran 7. Program Siaran 8. Aristik 9. Tata Rias 10. Desain Graphis 11. Animasi 12. Videografi 13. Sosial Media 14. PUEB 14. PUEB 15. Purmen Pengawan Pengawan Negeri Sipil 19. Pomor 17 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawan Negeri Sipil 3. PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawan Negeri Sipil 3. PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawan Negeri Sipil 3. PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawan Negeri Sipil 3. PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawan Negeri Sipil 4. PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawan Negeri Sipil 5. Permenpanth Momor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 4. PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawan Negeri Sipil 5. Permenpanth Momor 1 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawan Negeri Sipil 5. Per			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2 Permenpan RB Nomor 33 Tahun 2021 tentang JF Pranata Pencarian dan Pertolongan 3 PP Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan 4 PP Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan 5 Interpretasi kegiatan kebugaran jasmani Kompetensi Khusus 1 Pelaksanaan siaga SAR 2 Pelaksanaan siaga SAR 3 Teknik pelaksanaan operasi SAR 3 Teknik pelaksanaan operasi SAR 4 Peran potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR 5 Sistem Komunikasi dalam pelaksanaan operasi SAR 6 Sarana dan Pertalatan SAR dalam pelaksanaan operasi SAR 6 Sarana dan Pertalatan SAR dalam operasi SAR 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2016 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 4 Peraturan KPI Nomor 01/PKPI/03/2012 6 Peraturan Menkominto No 02/PER/MKominfo/3/2008 7 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers 8 Pedoman Pemberinam Media Cyber 2012 9 Kode Etik Jurnalistik 10 PSSPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) Kompetensi Khusus: 1 Jurnalistik 2 Produk Jurnalistik 3 Prinsja Komunikasi 4 Komunikasi amasa 5 Profesi Siaran 6 Proses Produksi Siaran 7 Program Siaran 8 Artistik 9 Tata Rias 10 Desain Graphis 11 Animasi 12 Videografi 13 Sosial Media 14 PUEB Kemampuan Umum: 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 Promor 41 Tahun 2072 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 4 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 4 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 5 Permenpanth Momor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 4 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjan Kerja 5 Permenpanth Momor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017	265		
3 PP Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan 4 PP Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan 5 Interpretasi kegiatan kebugaran jasmani Kompetensi Khusus 1 Pelaksanaan siaga SAR 2 Pelaksanaan siaga SAR 3 Teknik pelaksanaan operasi SAR 4 Peran potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR 5 Sistem Komunikasi dalam pelaksanaan operasi SAR 5 Sistem Komunikasi dalam pelaksanaan operasi SAR 6 Sarana dan Peralatan SAR dalam operasi SAR 7 Kompetensi Umumi 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 3 Peraturan Pentana Nomor 19 Tahun 2016 3 Peraturan Menteni PANRB Nomor 30 Tahun 2017 5 Peraturan Menteni PANRB Nomor 30 Tahun 2017 5 Peraturan Menteni PANRB Nomor 30 Tahun 2017 6 Peraturan Menteni PANRB Nomor 30 Tahun 2017 6 Peraturan Menteni PANRB Nomor 30 Tahun 2017 7 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers 8 Pedoman Pemberitaan Media Cyber 2012 9 Kode Etik Jurnalistik 10 PSPS (Pedoman Perilaku Penylaran dan Standar Program Siaran) Kompetensi Khusus: 1 Jurnalistik 2 Produk Jurnalistik 3 Prinsip Komunikasi 4 Komunikasi massa 5 Profesi Siaran 6 Proses Produksi Siaran 7 Program Siaran 8 Artistik 9 Tata Rias 10 Desain Graphis 11 Animasi 12 Videografi 13 Sosial Media 14 PUEB Kemampuan Umum: Leman Menteni Pankang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3 P Nomor 11 Tahun 2015 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3 P P Nomor 11 Tahun 2015 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 5 Pemenpanth Momor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 4 PP Nomor 49 Tahun 2015 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 5 Pemenpanth Momor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017		Pemula	
4 PP Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan 5 Interpretasi Regiatan kebagaran jasmani Kompetensi Khusus 1 Pelaksanaan siaga SAR 2 Pelaksanaan aliahan SAR 3 Teknik pelaksanaan operasi SAR 4 Peran potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR 5 Sistem Komunikasi dalam pelaksanaan operasi SAR 6 Sarana dan Peralatan SAR dalam pelaksanaan operasi SAR 6 Sarana dan Peralatan SAR dalam pelaksanaan operasi SAR 7 Sistem Komunikasi dalam pelaksanaan operasi SAR 8 Kompetensi Umum: 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 5 Peraturan Penkomirinto No QE/PER/MKominfo/3/2008 7 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers 8 Pedoman Perlaksi Polamor 01/P/R/I0/3/2012 6 Peraturan Menkomirinto No QE/PER/MKominfo/3/2008 7 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers 8 Pedoman Pemberitaan Media Cyber 2012 9 Kode Etik Jurnalistik 10 PSSPS (Pedoman Perlaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) Kompetensi Khusus: 1 Jurnalistik 2 Produk Jurnalistik 3 Prinsip Komunikasi 4 Komunikasi Massa 5 Profesi Siaran 7 Program Siaran 8 Artistik 9 Tata Rias 10 Desain Graphis 11 Animasi 12 Videografi 13 Sosial Media 14 PUEBI Kemampuan Umum: 4 Kemampuan Umum: 5 Kemampuan Umum: 5 Kemampuan Umum: 6 Kemampuan Umum: 7 Program Siaran Perdang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 7 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 8 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Pegari Sipil 9 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 1 PP Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017			
Kompetensi Khusus			
Pelaksanaan siaga SAR 2 Pelaksanaan Jeuhan SAR 3 Teknik pelaksanaan operasi SAR 4 Peran potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR 4 Peran potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR 6 Sarana dan Peralatan SAR dalam pelaksanaan operasi SAR 6 Sarana dan Peralatan SAR dalam operasi SAR Kompetensi Umum:			The second of th
2			
3 Teknik pelaksanaan operasi SAR 4 Peran potensi SAR 4 Peran potensi SAR 4 Peran potensi SAR 5 Sistem Komunikasi dalam pelaksanaan operasi SAR 6 Sarana dan Peralatan SAR dalam pelaksanaan operasi SAR 6 Sarana dan Peralatan SAR dalam operasi SAR 7 Month 7 Mo			
Sistem Komunikasi dalam pelaksanaan operasi SAR			
6 Sarana dan Peralatan SAR dalam operasi SAR			4 Peran potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR
Kompetensi Umum: 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 4 Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2017 5 Peraturan KPI Nomor 01/P/RP/I03/2012 6 Peraturan Menkominfo No 02/PER/IM/Kominfo/3/2008 7 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers 8 Pedoman Pemberitaan Media Cyber 2012 9 Kode Etik Jurnalistik 10 P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) Kompetensi Khusus: 1 Jurnalistik 2 Produk Jurnalistik 3 Prinsip Komunikasi 4 Komunikasi massa 5 Profesi Siaran 6 Proses Produksi Siaran 7 Program Siaran 8 Artistik 9 Tata Rias 10 Desain Graphis 11 Animasi 12 Videografi 13 Sosial Media 14 PUEB Kemampuan Umum: Remampuan Umum: Kemampuan Umum: Remampuan Umum: Kemampuan Umum: Remampuan Umum: U			
1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 4 Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2017 5 Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2017 6 Peraturan Menkominfo No 02/PER/M/Kominfo/3/2008 7 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers 8 Pedoman Pemberitaan Media Cyber 2012 9 Kode Etik Jurnalistik 10 P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) Kompetensi Khusus: 1 Jurnalistik 2 Produk Jurnalistik 3 Prinsip Komunikasi 4 Komunikasi massa 5 Profesi Siaran 6 Proses Produksi Siaran 7 Program Siaran 8 Artistik 9 Tata Rias 10 Desain Graphis 11 Animasi 12 Videografi 13 Sosial Media 14 PUEBI Kemampuan Umum: Kemampuan Umum: Kemampuan Umum: Kemampuan Umum: 10 UN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara 2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawai Negeri Sipil 3 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 4 PP Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pengawai Pengawai Penjanjian Kerja 5 Permenpanto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Apanatur Sipil Negara Penjanjian Kerja 5 Permenpanto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Aparatur Sipil Negara Pengawai	266	Pranata Siaran Ahli Portama	
2	200	Frandia Siaran Anii Ferlama	
4 Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2017 5 Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 6 Peraturan Menkominfo No 02/PER/MKominfo/3/2008 7 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers 8 Pedoman Pemberitaan Media Cyber 2012 9 Kode Etik Jurnalistik 10 P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) Kompetensi Khusus:			
5			3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005
6 Peraturan Menkominfo No 02/PER/M/Kominfo/3/2008 7 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers 8 Pedoman Pemberitaan Media Cyber 2012 9 Kode Elik Jurnalistik 10 P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) Kompetensi Khusus: 1 Jurnalistik 2 Produk Jurnalistik 3 Prinsip Komunikasi 4 Komunikasi massa 5 Profesi Siaran 6 Proses Produksi Siaran 7 Program Siaran 8 Artistik 9 Tata Rias 10 Desain Graphis 11 Animasi 12 Videografi 13 Sosial Media 14 PUEBI Kemampuan Umum: 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 4 PP Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perupawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional			
7 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers 8 Pedoman Pemberitaan Media Cyber 2012 9 Kode Etik Jurnalistik 10 P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) Kompetensi Khusus: 1 Jurnalistik 2 Produk Jurnalistik 3 Prinsip Komunikasi 4 Komunikasi massa 5 Profesi Siaran 6 Proses Produksi Siaran 7 Program Siaran 8 Artistik 9 Tata Rias 10 Desain Graphis 11 Animasi 12 Videografi 13 Sosial Media 14 PUEBI Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil Promor 11 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional			
8 Pedoman Pemberitaan Media Cyber 2012 9 Kode Etik Jurnalistik 10 P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) Kompetensi Khusus: 1 Jurnalistik 2 Produk Jurnalistik 3 Prinsip Komunikasi 4 Komunikasi massa 5 Profesi Siaran 6 Proses Produksi Siaran 7 Program Siaran 8 Artistik 9 Tata Rias 10 Desain Graphis 11 Animasi 12 Videografi 13 Sosial Media 14 PUEBI Kemampuan Umum: Aparatur Terampil 4 PUEBI Kemampuan Umum: 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3 PP Nomor 11 Tahun 2015 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional			
10 P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) Kompetensi Khusus: 1 Jurnalistik 2 Produk Jurnalistik 3 Prinsip Komunikasi 4 Komunikasi massa 5 Profesi Siaran 6 Proses Produksi Siaran 7 Program Siaran 8 Artistik 9 Tata Rias 10 Desain Graphis 11 Animasi 12 Videografi 13 Sosial Media 14 PUEBI Aparatur Terampil Kemampuan Umum: 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 4 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional			
Kompetensi Khusus: 1 Jurnalistik 2 Produk Jurnalistik 3 Prinsip Komunikasi 4 Komunikasi massa 5 Profesi Siaran 6 Proses Produksi Siaran 7 Program Siaran 8 Artistik 9 Tata Rias 10 Desain Graphis 11 Animasi 12 Videografi 13 Sosial Media 14 PUEBI 8 Franata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 4 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional			
1 Jurnalistik 2 Produk Jurnalistik 3 Prinsip Komunikasi 4 Komunikasi massa 5 Profesi Siaran 6 Proses Produksi Siaran 7 Program Siaran 8 Artistik 9 Tata Rias 10 Desain Graphis 11 Animasi 12 Videografi 13 Sosial Media 14 PUEBI 8 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil 9 Franata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional			
2 Produk Jurnalistik 3 Prinsip Komunikasi 4 Komunikasi massa 5 Profesi Siaran 6 Proses Produksi Siaran 7 Program Siaran 8 Artistik 9 Tata Rias 10 Desain Graphis 11 Animasi 12 Videografi 13 Sosial Media 14 PUEBI Kemampuan Umum: Aparatur Terampil Videografi 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 PP Nomor 11 Tahun 2017 4 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional			
3 Prinsip Komunikasi 4 Komunikasi massa 5 Profesi Siaran 6 Proses Produksi Siaran 7 Program Siaran 8 Artistik 9 Tata Rias 10 Desain Graphis 11 Animasi 12 Videografi 13 Sosial Media 14 PUEBI Aparatur Terampil Aparatur Terampil Terampil Tu Videografi 10 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 4 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional			
S Profesi Siaran 6 Proses Produksi Siaran 7 Program Siaran 8 Artistik 9 Tata Rias 10 Desain Graphis 11 Animasi 12 Videografi 13 Sosial Media 14 PUEBI 13 Sosial Media 14 PUEBI 14 Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 10 UN Nomor 17 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3 PN Nomor 17 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional			
6			4 Komunikasi massa
7 Program Siaran 8 Artistik 9 Tata Rias 10 Desain Graphis 11 Animasi 12 Videografi 13 Sosial Media 14 PUEBI Kemampuan Umum: Aparatur Terampil Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 4 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional			
8 Artistik 9 Tata Rias 10 Desain Graphis 11 Animasi 12 Videografi 13 Sosial Media 14 PUEBI Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 4 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional			
9 Tata Rias 10 Desain Graphis 11 Animasi 12 Videografi 13 Sosial Media 14 PUEBI Remampuan Umum: Aparatur Terampil 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 4 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional			
10 Desain Graphis 11 Animasi 12 Videografi 13 Sosial Media 14 PUEBI 267 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil Terampil 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 4 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional			
12 Videografi 13 Sosial Media 14 PUEBI			
13 Sosial Media 14 PUEBI Kemampuan Umum: Aparatur Terampil 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 4 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional			
267 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil 14 PUEBI Kemampuan Umum: 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 4 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional			
267 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 4 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional			
Aparatur Terampil 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 4 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional	267	Pranata Sumber Dava Manusia	
 2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 4 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional 	201		
 3 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 4 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional 			2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional			3 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017
!			
		l	

Halaman 55 dari 62

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		Kemampuan Khusus:
		Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur Pagada Laga Administraci Bulancasa Kananawaina ASM
		Pengelolaan Administrasi Pelayanan Kepegawaian ASN Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN
		4 Pengadaan ASN
		5 Pangkat dan Jabatan ASN
		6 Pengembangan Karier ASN
		7 Pola Karier ASN
		8 Promosi ASN 9 Mutasi ASN
		10 Penugasan ASN
		11 Pengembangan Kompetensi ASN
		12 Penilaian Kinerja ASN
		13 Disiplin ASN
		14 Penghargaan ASN
		15 Penggajian, Tunjangan, dan Fasilitas ASN
		16 Pemberhentian ASN 17 Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN
		18 Perlindungan ASN
		19 Cuti ASN
		20 Sistem Informasi ASN
268 F	Psikolog Klinis Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Kode etik sebagai Psikolog Klinis
		Jenjang pangkat Psikolog Klinis Masa jabatan sebagai Psikolog Klinis
		Masa jabatan sebagai Psikolog Klinis Penunjang tugas dan angka kredit
		Kompetensi Khusus:
		Persiapan assesmen melalui wawancara tahap sederhana
		Persiapan assesmen melalui wawancara tahap sedang
		3 Assesmen psikologi
		4 Interpretasi hasil assesmen
		5 Perencanaan intervensi psikologi klinis tingkat sederhana
		6 Intervensi psikologi klinis tingkat sederhana 7 Kunjungan klien di rumah sakit/visite
		8 Kunjungan klien di rumah sakit/konsultan
		9 Kunjungan klien di rumah/home visite
		10 Penyusunan laporan pemeriksaan psikologi klinis
		11 Tugas di tempat risiko tinggi
		12 Penyuluhan psikologis di masyarakat RS
		13 Intervensi psikologi pada situasi KLB, baik secara mandiri maupun dalam TIM 14 Tugas sebagai ketua di ranah tim penanggulangan problem psikologis dalam KLB
		15 Tugas sebagai anggota di ranah tim penanggulangan problem psikologis dalam KLB
269 F	Pustakawan Ahli Muda	Kemampuan Umum:
		Pembudayaan Kegemaran Membaca
		Kemampuan Khusus:
		1 Pengembangan Koleksi Perpustakaan
		Pengorganisasian Bahan Perpustakaan dan Pengetahuan Pengembangan Sistem Kepustakawan
		4 Pelayanan Informasi dan Referensi
		5 Promosi Perpustakaan
270 F	Pustakawan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Pembudayaan Kegemaran Membaca
		Kemampuan Khusus:
		Pengembangan Koleksi Perpustakaan Pengorganisasian Bahan Perpustakaan dan Pengetahuan
		Pengorganisasian Banan Perpustakaan dan Pengetanuan Pengembangan Sistem Kepustakawan
		4 Pelayanan Informasi dan Referensi
		5 Promosi Perpustakaan
		6 Pengembangan Literasi Informasi
271 F	Radiografer Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Pengumpulan data kebutuhan BMHP Pengumpulan program keria dan langgalan pelayanan radiologi sebagai anggata
		Penyusunan program kerja dan laporan kinerja pelayanan radiologi sebagai anggota Pembuatan daftar tunggu pelayanan radiasi pasien baru di runag pesawat radioterapi
		Quality Assurance (QA) den Quality Control (QC) redialegi bekarissenne dengen mitre terkeit sebeggi
		4 anggota
		5 Pengukuran parameter kualitas citra, nilai paparan radiasi di radiologi
		Kemampuan Khusus:
		Tindakan pemeriksaan CT scan kepala, sela tursica, mastoid, tulang-tulang wajah (facial bone), rahang
		atas (maxilaris), rahang bawah (mandibularis), tulang belakang (columna vertebralis), panggul (pelvis), nasopharing, leher, thorax, whole abdomen, abdomen atas, abdomen bawah, abdomen multiphase,
		ekstremitas atas (extremity superior), ekstremitas bawah (extremity inferior)
		2 Tindakan pemeriksaan MRI kepala
		3 Tindakan pemeriksaan MRI MRA otak
		4 Tindakan pemeriksaan MRI MRV otak TOF
		Tindakan pemeriksaan MRI ekstremitas bawah, ekstremitas atas, elbow joint, shoulder joint, pedis
		kasus OA, knee joint, pedis kasus plantar capitis, ankle joint, vertebralis
		6 Tindakan pemeriksaan USG abdomen meliputi liver, kandung empedu, pancreas, spleen dan ginjal
		7 Tindakan pemeriksaan USG sistem urinaria dan sistem reproduksi, sistem vascular dan kelenjar,
		sistem pencernaan, obgyn

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		8 Tindakan pemeriksaan USG dengan doppler non kontras
		9 Tindakan persiapan pemeriksaan radioterapi
		 10 Tindakan persiapan radioterapi dengan simulasi penyinaran 11 Tindakan persiapan radioterapi dengan perencanaan terapi radiasi ekterna dan penyinaran
		12 Tindakan radioterapi ekternal penyinaran
		13 Tindakan radioterapi brakhiterapi
		14 Pemeriksaan kedokteran nuklir
		15 Pemeriksaan kedokteran nuklir wholebody dengan SPECT gamma camera lymphoscintigrafi
272	Radiografer Terampil	Kemampuan Umum:
		Standar Kompetensi dan Kode Etik Radiografer
		2 SKKNI/Kepmenaker 237/2020
		3 Vinnita Meril, Bontrager
		Buku teks Komunikasi Efektif dan Efisien Buku Teks Manajemen Logistik
		6 Buku Manajemen Radiologi
		7 Buku Teks K3 Radiologi
		8 Buku Teks Proteksi Radiasi
		9 Buku Teks Manajemen Mutu Radiologi
		10 Buku Teks QA dan QC Radiologi
		Kemampuan Khusus:
		1 Standar Kompetensi dan Kode Etik Radiografer
		2 SKKNI/Kepmenaker 237/2020 3 Vinnita Meril, Bontrager
		4 Buku Teks Pemeriksaan Radiografi
		5 Buku Teks Pemeriksaan CT Scan
		6 Snopeck, CT Scan
		7 Buku Teks K3 Radiologi
		8 Buku Teks Proteksi Radiasi
273	Refraksionis Optisien Terampil	Kompetensi Umum:
		PMK 01 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal KMK 572 Tahun 2008 tentang Standar Profesi Refraksionis Optisien
		2 KMK 572 Tanun 2006 tentang Standar Profesi Refraksionis Optisien
		3 Permenpan No. 47 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien dan Angka Kreditnya
		Kompetensi Khusus:
		1 KMK 572 Tahun 2008 tentang Standar Profesi Refraksionis Optisien
		2 Permenpan No. 47 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien dan Angka Kreditnya
274	Statistisi Ahli Madya	3 PMK 19 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan RO Optometri Kemampuan Umum:
2/4	Statistisi Ariii iviauya	Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Statistik Nasional (SSN)
		Kemampuan Khusus:
		1 Statistika Dasar
		2 Pengumpulan Data
		3 Teknik Sampling II
		4 Teknik Penyusunan Kuesioner 5 Metode Statistik Menengah
		6 Metode Statistik Menengan
		7 Analisis dan Diseminasi
275	Statistisi Ahli Muda	Kemampuan Umum:
		Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Statistik Nasional (SSN)
		Kemampuan Khusus:
		1 Statistika Dasar
		2 Pengumpulan Data 3 Teknik Sampling I
		4 Teknik Penyusunan Kuesioner
		5 Pengolahan Data
		6 Metode Statistik Menengah
		7 Analisis dan Diseminasi
276	Statistisi Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Statistik Nasional (SSN)
		Kemampuan Khusus:
		Statistika Dasar Pengumpulan Data
		3 Teknik Sampling I
		4 Teknik Penyusunan Kuesioner
		5 Pengolahan Data
		6 Metode Statistik Menengah
6=-	<u> </u>	7 Analisis dan Diseminasi
277	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Dasar Informasi Geospasial Kemampuan Khusus:
		1 Teretris
		2 Fotogrametri
		3 Penginderaan Jauh
		4 SIG dan kartografi
<u> </u>		5 Geografi/Kewilayahan
278	Surveyor Pemetaan Mahir	Kemampuan Umum:
		Dasar Informasi Geospasial
		Kemampuan Khusus: 1 Terestris
I	Ī	Halaman 57 dari 62

Halaman 57 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK	
		2 Fotogrametri	
		3 Penginderaan jauh 4 SIG dan kartografi	
279	Surveyor Pemetaan Terampil	Kemampuan Umum:	
		Dasar Informasi Geospasial	
		Kemampuan Khusus:	
		1 Teretris 2 Fotogrametri	
		3 Penginderaan Jauh	
		4 SIG dan kartografi	
280	Teknisi Akuakultur Terampil	Kemampuan Umum: Pedoman dan aturan tentang pembudidayaan ikan	
		Kemampuan Khusus:	
		1 Pengelolaan sarana, prasarana, dan kawasan perikanan budidaya	
		Pengelolaan perbenihan ikan Pengelolaan perbenihan ikan	
		Pembinaan unit pembenihan ikan Pengelolaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan	
		5 Pengelolaan sertifikasi bidang perikanan budidaya	
		6 Pengelolaan dan rehabilitasi lingkungan budidaya	
281	Teknisi Akuakultur Pemula	Kemampuan Umum: Pedoman dan aturan tentang pembudidayaan ikan	
		Kemampuan Khusus:	
		1 Pengelolaan sarana, prasarana, dan kawasan perikanan budidaya	
		2 Pengelolaan perbenihan ikan	
		Pembinaan unit pembenihan ikan Pengelolaan sertifikasi bidang perikanan budidaya	
282	Teknisi Elektromedis Ahli Pertama	Kompetensi Umum:	
		1 KMK 314 Tahun 2020 Standar Profesi Elektromedis	
		2 Wawasan Kebangsaan	
		3 Pancasila 4 Undang-Undang Dasar 1945	
		Kompetensi Khusus:	
		1 Pedoman Pengelolaan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Tahun 2015	
		2 SOP pemeliharaan alat elektromedik teknologi tinggi	
		Pedoman pemeliharaan alat elektromedik teknologi menengah Metode Keria Kalibrasi	
		5 Data spesifikasi alat elektromedik teknologi sederhana	
		6 Pedoman Pengelolaan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Tahun 2015	
		7 SOP Pengoperasian alat ukur standar	
		8 Pedoman Uji Antara 9 Operational Manual	
		10 Permenkes 54 Tahun 2015 tentang pengujian dan kalibrasi	
		11 Service Manual	
283	Teknisi Elektromedis Terampil	Kemampuan Umum: 1 KMK 314 th 2020 standar profesi elektromedis	
		KMK 314 th 2020 standar profesi elektromedis Wawasan kebangsaan	
		3 Pancasila	
		4 Undang-Undang Dasar 1945	
		5 Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek 6 Registrasi tenaga kesehatan	
		7 Izin dan penyelenggaraan praktik elektromedis	
		Kemampuan Khusus:	
		1 Meja operasi manual/lampu operasi mobile	
		Spygmomanometer Digital/Spygmomanometer Aneroid/Baby Scale/Snellen Chart/Fetal Detector/Spirometer/Audiometer/EKG/Vital Sign Monitor/Elecric Bed/CTG/Pulse Oxymeter Table	
		Top/Holter Monitor/Slit Lamp/Ultrasonography/EEG/Treadmill/Defibrillator	
		Mikroskop/Centrifuge/Stirrer/Shaker Laboratory/Dry Incubator//Waterbath Laboratory/Refrigerated	
		Centrituge	
		Blue Light Phototerapy/Infrared Lamp/Parafin Bath/Microwave Diathermi/Ultrasound Terapy/Shortwave Diathermi/Traksi Unit	
		5 Film Viewer/Dental X-Ray/Authomatic Processing Film (APF)/X-Ray Mobile/Panoramic Dental	
		Unit/General X-Ray Unit	
		6 UV Sterilizer/Ultrasonic Cleaner Infusion Pump/Syringe Pump/Baby Incubator/Infant Radiant Warmer/Authomatic External Defibrillator	
		7 Initision Pump/Syringe Pump/Baby incubator/Initant Radiant Warmer/Authomatic External Delibriliator (AED)/Hemodialisa/Ventilator/Patient Monitor/Defibrillator	
		Alat Bedah dan Anestesi/Diagnostik Laboratorium Klinik/Life Support/Terapi/Radiologi/Disinfeksi dan	
		Sterilisasi	
		9 Alat Diagnostik Sederhana/Menengah 10 Alat Laboratorium Klinik Sederhana/Menengah	
		11 Alat Life Support Sederhana/Menengah	
		12 Alat Terapi Sederhana	
004	Taknjaj Cigi Taramail	13 Laboratorium Klinik/Life Support/Terapi/Radiologi/Bedah dan Anestesi/Disinfeksi dan Sterilisasi	
284	Teknisi Gigi Terampil	Kemampuan Umum: 1 Kepmenaker No. 115 Tahun 2019 tentang SKKNI	
		Permenkes No. 460 Tahun 2020 tentang Standar Profesi	
		3 Permenkes No. 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan	
		Kemampuan Khusus:	
		 Permenpan No. 6 Tahun 2007 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Gigi Permenkes No. 32 tentang Standar Pelayanan 	
		3 Kepmenaker No. 115 Tahun 2019 tentang SKKNI	
	Halaman 58 dari 62		

Halaman 58 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
285	Teknisi Kesehatan Ikan Terampil	Kompetensi Umum:
		Peraturan Kelautan dan Perikanan Kompetensi Khusus:
		Jenis-jenis penyakit ikan
		Monitoring dan/atau surveilan penyakit ikan
		3 Biosecurity 4 Penanganan penyakit
		5 Metode pengujian laboratorium
		6 Substansi Uji Residu
286	Teknisi Kesehatan Ikan Pemula	7 Monitoring lingkungan Kompetensi Umum:
200	Tokinsi Neseriatan ikan Fernaia	Peraturan Kelautan dan Perikanan
		Kompetensi Khusus:
		Jenis-jenis penyakit ikan Monitoring dan/atau surveilan penyakit ikan
		3 Penanganan penyakit
		4 Metode pengujian laboratorium
		5 Jenis-jenis obat ikan 6 Monitoring lingkungan
287	Teknisi Penelitian dan	Kemampuan Umum:
	Perekayasaan Terampil	Penyusunan daftar kebutuhan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi
		Penyiapan kebutuhan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi Kemampuan Khusus:
1		1 Pelaksanaan Penelitian
1		2 Pelaksanaan Pengembangan
1		Pelaksanaan Pengkajian Pasca Pelaksanaan Penjaminan Mutu Layanan IPTEK
288	Teknisi Penerbangan Terampil	Kompetensi Umum:
		1 Regulasi nasional dan internasional
		Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan Dasar teknik
		Kompetensi Khusus:
		1 Sistem operasi penerbangan sipil nasional
		Peraturan teknis pengoperasian penerbangan sipil nasional (Bidang Teknisi Fasilitas Elektronika dan 2 Listrik Penerbangan, Bidang Teknisi Keselamatan Penerbangan, Teknisi Pesawat Udara dan Bidang
		Bandar Udara)
		3 Stakeholder penyelenggara penerbangan sipil nasional (Airlines, Airport, Airnav, Authority)
		Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan Peralatan di bandar udara dan navigasi penerbangan
		6 Prosedur pemeliharaan peralatan bandar udara dan navigasi penerbangan
289	Teknisi Perkebunrayaan Terampil	1 Bank biji
		2 Identifikasi tumbuhan 3 Registrasi
		4 Kebun raya
		5 Herbarium 6 Konservasi umum
		7 Pembibitan
		8 Pemeliharaan koleksi
290	Teknisi Perkebunrayaan Pemula	1 Bank biji 2 Identifikasi tumbuhan
		3 Registrasi
		4 Kebun raya
		5 Herbarium 6 Konservasi umum
1		7 Pembibitan
001	Telepiai Ciava- Al-II D1	8 Pemeliharaan koleksi
291	Teknisi Siaran Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
1		2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Manadagai Khunua.
		Kompetensi Khusus: 1 Listrik
		2 Teori Listrik Statis
1		3 Teori Muatan Listrik 4 Sumber Daya Energi
		5 Teori Dasar-Dasar Antena
		6 Elektronika
		7 Teknik Komputer 8 Sistem Komputer
		9 Jaringan Komputer
1		10 Multimedia
		11 Tata Cahaya 12 Audio-Video
1		13 Fotografi
		14 Dasar-Dasar Audio dan Teknik Studio
		15 Frekuensi 16 Produksi Siaran
		17 Dasar Teknologi
1		18 Teori Dasar Dasar Pemancar
		Halaman 59 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
222	T	19 Teori Alat Ukur dan Teknik Pengukuran
292	Teknisi Transfusi Darah Terampil	Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
		Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
		3 Etika Profesi Teknisi Transfusi Darah
		4 Kode Etik Profesi Teknisi Transfusi Darah
		5 Komunikasi Efektif
		Kemampuan Khusus:
		1 K3 Lab Pelayanan Darah 2 Rekrutmen pendonor
		3 Seleksi Pendonor Darah
		4 Pengambilan Darah
		5 Pengolahan Komponen Darah
		6 Uji Saring IMLTD
		7 Serologi Golongan Darah
		8 Penyimpanan Darah 9 Distribusi dan Transportasi Darah
293	Tenaga Promosi Kesehatan dan	Kompetensi Umum:
230	Ilmu Perilaku Ahli Pertama	1 UU Nomor 36 tentang Kesehatan
		Permenpan 70 tahun 2021 tentang jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku
		Permenkes 74 tahun 2015 tentang upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit
		4 Permenkes 8 tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
		5 Inpres No. 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat
		Kompetensi Khusus:
		1 Unsur-unsur advokasi kesehatan
		2 Teknik-teknik advokasi kesehatan
		Bentuk dukungan advokasi kesehatan Sasaran advokasi kesehatan
		5 Langkah-langkah advokasi kesehatan
		6 Prinsip dasar kemitraan
		7 Landasan menjalankan kemitraan
		8 Unsur kemitraan
		9 Langkah-langkah kemitraan
		10 Sasaran kemitraan
		11 Kunci keberhasilan dalam kemitraan 12 Peran mitra
		13 Potensi mitra
		14 Bentuk kesepakatan kerjasama dalam kemitraan kesehatan
		15 Strategi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
		16 Kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
		17 Fungsi fasilitator dan kader dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
		Peran akder dalam pemberdayaan masyarakat Tahapan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan
		20 Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)
		21 Peran dan tanggung jawab masing-masing instansi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat
		22 Unsur komunikasi kesehatan
		23 Tahapan pengembangan media kesehatan
		24 Tahapan rancangan pengembangan media promosi kesehatan
		25 Jenis/saluran media promosi kesehatan
		26 Metode media promosi kesehatan
		27 Posisioning pesan dalam promosi kesehatan
		28 Tujuan media promosi kesehatan 29 Prinsip penggunaan media
		30 Kriteria penggunaan media
		31 Kunjungan rumah
294	Tenaga Promosi Kesehatan dan	Kemampuan Umum:
	Ilmu Perilaku Terampil	1 Pemberdayaan kepada masyarakat tentang GERMAS
		2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi pencegahan penyakit menular
		3 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan
		Konsep dasar dan berbagai metode pemberdayaan masyarakat Prosedur pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat sehat
		Frosedur peraksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat senat Konsep dasar dan mekanisme penggalangan kemitraan
		7 Prosedur advokasi kesehatan
		Kemampuan Khusus:
		1 Analisis sasaran
		2 Analisis perilaku
		3 Penyusunan rencana kerja penyuluhan kesehatan
		Metode, teknik dan media penyuluhan Persiapan kegiatan penyuluhan individu/pasien
		6 Penyuluhan kepada kelompok/komunitas
		7 Penyuluhan kepada massa
295	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli	Kompetensi Umum:
	Pertama	Pengetahuan umum tentang sanitasi lingkungan
		2 Etika profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan
		Kompetensi Khusus:
		Penyehatan media lingkungan Pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida dan radiasi
		Pengamanan limban, sampan, zar kima berbahaya, pestisida dan radiasi Pengendalian faktor resiko lingkungan vektor dan binatang pembawa penyakit
1	1	Halaman 60 dari 62

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK	
		4 Penyelenggaraan kesehatan lingkungan pada keadaan tertentu	
206	Tenaga Sanitasi Lingkungan	5 Manajemen kesehatan lingkungan Kompetensi Umum:	
290	Terampil	Pengetahuan umum tentang sanitasi lingkungan	
		2 Etika profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan	
		Kompetensi Khusus:	
		 Penyehatan media lingkungan Pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida dan radiasi 	
		Pengamanan limban, sampan, zat kima berbanaya, pestistida dan radiasi Pengendalian faktor resiko lingkungan vektor dan binatang pembawa penyakit	
297	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama	Kemampuan Umum:	
		1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	
		Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan	
		Peraturan Menteri Kesebatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Teranis	
		Gigi dan Mulut	
		Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/671/2020 tentang Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut	
		6 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut	
		Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut	
		8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut	
		Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1513/2022 tentang Standar Kompetensi	
		Kerja Bidang Terapi Gigi dan Mulut	
		 10 Pedoman Program Pengembangan Keprofesan Berkelanjutan 11 Sejarah serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PTGMI 	
		12 Komunikasi efektif	
		13 Penerapan pengambilan keputusan berbasis data	
		14 Penerapan belajar sepanjang hayat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	
		15 Kewirausahaan Kemampuan Khusus:	
		Kemanpuan Krusus. Konsep Dasar Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut	
		Upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut	
		3 Upaya pencegahan penyakit gigi	
		Pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas Dental assisting	
		5 Dental assisting 6 Manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut	
298	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	Kemampuan Umum:	
		1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	
		 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 	
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis	
		Gigi dan Mulut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/671/2020 tentang Standar Profesi Terapis	
		Gigi dan Mulut	
		6 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut	
		Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut	
		8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut	
		Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1513/2022 tentang Standar Kompetensi	
		Kerja Bidang Terapi Gigi dan Mulut	
		10 Pedoman Program Pengembangan Keprofesan Berkelanjutan	
		11 Sejarah serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PTGMI 12 Komunikasi efektif	
		13 Penerapan pengambilan keputusan berbasis data	
		14 Penerapan belajar sepanjang hayat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	
		15 Kewirausahaan	
		Kemampuan Khusus: 1 Konsep Dasar Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut	
		Upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut	
		3 Upaya pencegahan penyakit gigi	
		4 Pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas	
		5 Dental assisting 6 Manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut	
299	Terapis Wicara Terampil	Kompetensi Umum:	
	· ·	1 Pelayanan terapi wicara yang profesional	
		Pengembangan diri dalam pelayanan terapi wicara Komunikasi afaktif dalam pelayanan terapi wicara	
		Komunikasi efektif dalam pelayanan terapi wicara Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan terapi wicara	
		Kebijakan terkait pelayanan terapi wicara	
		6 Pengelolaan Masalah Kesehatan Terapi Wicara	
		Kompetensi Khusus:	
		Pelayanan terapi wicara pada gangguan bahasa Pelayanan terapi wicara pada gangguan wicara	
		Pelayanan terapi wicara pada gangguan wicara Pelayanan terapi wicara pada gangguan suara	
		4 Pelayanan terapi wicara pada gangguan irama kelancaran	
		5 Pelayanan terapi wicara pada gangguan makan dan menelan	
300	Widyabasa Ahli Pertama	Kemampuan Umum:	
		1 UU Nomor 24 Tahun 2009 2 PP Nomor 57 Tahun 2014	
		3 Perpres Nomor 63 Tahun 2019	
	Halaman 61 dari 62		

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX

NO.	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		Variation of Vision
		Kemampuan Khusus 1 Pemahaman tentang tes kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI)
		Penyuntingan dan penyuluhan bahasa Pemahaman terhadan Ahli Bahasa
		o i omanaman ternasap i im Banasa
		4 Penguasaan literasi
		5 Produk leksikografi C Pamahaman tarbadan kaidah Pahasa Indanasia (EVP, TRRI, DURI)
		6 Pemahaman terhadap kaidah Bahasa Indonesia (EYD, TBBI, PUPI)
		7 Perlindungan bahasa dan sastra
		8 Perencanaan peningkatan kompetensi pengajar BIPA
		9 Perencanaan fasilitasi pembelajaran BIPA
201	Midveieure Abli Mude	10 Perancangan bahan fasilitasi pembelajaran BIPA
301	Widyaiswara Ahli Muda	1 Kebijakan Pelatihan ASN dan Widyaiswara
		2 Pembelajaran Orang Dewasa 3 Rancang Bangun dan Rencana Pembelajaran Mata Pelatihan
		4 Media Pembelaiaran
		5 Metode Pembelajaran
		6 e-learning/Pembelajaran daring
		7 Teknik komunikasi dalam pembelajaran
		8 Praktik mengajar/ <i>Micro Teaching</i>
		9 Penyusunan Kurikulum
		10 Penyusunan Modul Pelatihan
		11 Dasar-dasar Karya Tulis Ilmiah (KTI)
202	Widyajawara Abli Bartama	Kebijakan Pelatihan ASN dan Widyaiswara
302	Widyaiswara Ahli Pertama	2 Pembelajaran Orang Dewasa
		3 Rancang Bangun dan Rencana Pembelajaran Mata Pelatihan
		4 Media Pembelajaran
		5 Metode Pembelajaran
		6 e-learning/Pembelajaran daring
		7 Teknik komunikasi dalam pembelajaran
		8 Praktik mengajar/ <i>Micro Teaching</i>
		9 Penyusunan Kurikulum
		10 Penyusunan Modul Pelatihan
		11 Dasar-dasar Karya Tulis Ilmiah (KTI)
L	l .	11 Dasar-dasar Narya Tulis littilati (NTI)

Halaman 62 dari 62

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231030DOXX